

Tekan Inflasi, BOJ Naikkan Suku Bunga ke 1,25%

Jumat, 18 September 2026 11:50 WIB

Toru Fujioka

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121996/tekan-inflasi-boj-naikkan-suku-bunga-ke-1-25/2>

Bloomberg, Bank of Japan (BOJ) menaikkan suku bunga acuannya dan mempercepat laju kenaikan suku bunga ke tingkat tercepat dalam 36 tahun. Langkah tersebut diambil ketika bank sentral Jepang menghadapi risiko inflasi yang semakin besar serta desakan yang semakin terbuka dari Washington untuk melanjutkan normalisasi kebijakan moneter.

BOJ menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 1,25% pada Jumat (18/9), setelah menyelesaikan rapat selama dua hari, menurut pernyataan resmi bank sentral. Keputusan tersebut sesuai dengan prediksi seluruh ekonom yang disurvei Bloomberg. Pemungutan suara menghasilkan keputusan 7-2, dengan anggota dewan Toichiro Asada dan Ayano Sato menyatakan perbedaan pendapat.

Nilai tukar yen melemah menjadi 156,95 per dolar AS setelah keputusan yang telah diperkirakan secara luas tersebut diumumkan. Pernyataan BOJ juga tidak menunjukkan sinyal kuat mengenai penggunaan bahasa yang lebih hawkish untuk mendorong spekulasi positif terhadap mata uang Jepang.

Kenaikan suku bunga tersebut dilakukan hanya tiga bulan setelah kenaikan sebelumnya, sekaligus menandai jeda waktu terpendek antara dua kenaikan suku bunga sejak 1990. Pada saat itu, pengetatan kebijakan yang dilakukan secara cepat oleh bank sentral berperan penting dalam pecahnya gelembung aset Jepang. Ini merupakan kenaikan suku bunga keenam selama masa jabatan Gubernur Kazuo Ueda, terbanyak dibandingkan kepala BOJ mana pun dalam setidaknya setengah abad terakhir. Keputusan tersebut juga diambil setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent berulang kali mendesak Jepang menaikkan suku bunga.

Percepatan kenaikan suku bunga BOJ terjadi setelah perubahan kondisi global yang memengaruhi kebijakan moneter, ketika sejumlah otoritas berupaya mengatasi dampak perang Iran. Federal Reserve (The Fed) menegaskan perubahan tersebut pada Rabu melalui kenaikan suku bunga pertamanya dalam tiga tahun, sekaligus memperkirakan kenaikan lainnya pada akhir tahun ini. Sementara itu, Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga pekan lalu untuk kedua kalinya pada tahun ini.

Kenaikan suku bunga terbaru di Jepang menandai pertama kalinya BOJ, The Fed, dan ECB menaikkan biaya pinjaman pada bulan yang sama. Langkah yang dilakukan secara serentak tersebut juga menunjukkan sejauh mana BOJ telah beranjak dari statusnya sebagai bank sentral yang selama ini menyimpang dari kebijakan moneter global.

Kenaikan tersebut tidak terlalu mengejutkan setelah serangkaian pernyataan Bessent semakin memperkuat ekspektasi pasar terhadap keputusan tersebut.

Meskipun yen melemah terhadap dolar AS sesaat setelah pengumuman, nilainya masih lebih kuat dibandingkan level pada Juli. Intervensi terkoordinasi AS dan Jepang pada akhir bulan tersebut membantu menjauhkan yen dari level terendah dalam sekitar 40 tahun, yakni 163,99 per dolar AS yang tercatat pada 23 Juli.

BOJ kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus menaikkan suku bunga apabila prospek ekonomi dan harga sesuai dengan perkiraan. Dengan tingkat suku bunga 1,25%, suku bunga kebijakan BOJ untuk pertama kalinya berada dalam kisaran bawah estimasi bank sentral terhadap suku bunga netral, yakni tingkat yang dianggap tidak mendorong maupun membatasi aktivitas ekonomi.

Pernyataan Bessent yang berulang kali mendukung langkah BOJ menjelang rapat dewan membantu meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga. Keputusan tersebut bahkan hampir sepenuhnya telah diperhitungkan pasar pada awal September. Dalam pertemuan tatap muka dengan Ueda di North Carolina pada bulan lalu, Bessent “menyatakan dukungan kuat” terhadap langkah tegas Jepang untuk mengatasi pelemahan yen, menurut Departemen Keuangan AS.

Indikator utama inflasi Jepang tetap berada di atas 2% selama empat tahun berturut-turut hingga 2025. BOJ memperkirakan inflasi akan tetap berada di atas targetnya dalam beberapa tahun mendatang. Data yang dirilis pada Jumat sebelumnya menunjukkan bahwa inflasi inti sedikit melambat pada Agustus, sebagian akibat distorsi yang ditimbulkan oleh subsidi. Para analis memperkirakan kenaikan harga akan meningkat hingga mendekati 3% pada awal tahun depan.

Ueda dijadwalkan menjelaskan pertimbangan di balik keputusan pada Jumat tersebut serta arah suku bunga dalam beberapa bulan mendatang melalui konferensi pers yang biasanya dimulai pada pukul 15.30 waktu setempat.

Inflasi Jepang Melambat Jelang Pengumuman Suku Bunga BOJ

Jumat, 18 September 2026 07:30 WIB

Erica Yokoyama

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121952/inflasi-jepang-melambat-jelang-pengumuman-suku-bunga-boj/2>

Bloomberg, Inflasi Jepang melambat untuk pertama kalinya dalam empat bulan, terutama dipengaruhi oleh dampak subsidi pemerintah. Data tersebut dirilis beberapa jam sebelum Bank of Japan (BOJ) diperkirakan mengumumkan kenaikan suku bunga.

Indeks harga konsumen (IHK) yang tidak termasuk harga pangan segar naik 1,7% pada Agustus dibandingkan tahun sebelumnya, melambat dari 1,8% pada Juli, menurut Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Jumat. Para ekonom sebelumnya memperkirakan tingkat inflasi akan tetap tidak berubah.

Meskipun data tersebut menunjukkan sedikit perlambatan inflasi, angka itu diperkirakan tidak akan mengubah pertimbangan BOJ dalam menentukan kebijakan suku bunga pada Jumat, terutama karena ekspektasi yang luas bahwa tren inflasi akan kembali meningkat dalam beberapa bulan mendatang.

Indeks yang tidak mencakup harga pangan segar dan energi, yang menjadi salah satu indikator utama BOJ untuk mengukur inflasi mendasar, naik 1,9%. Angka yang sama juga tercatat pada IHK secara keseluruhan.

Data tersebut dirilis beberapa jam sebelum BOJ mengumumkan keputusan kebijakannya. Para ekonom secara bulat memperkirakan bank sentral akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 1,25%. Jika momentum kenaikan harga yang lebih lemah terus berlanjut, kondisi tersebut dapat mempersulit strategi komunikasi BOJ ketika otoritas berupaya melanjutkan normalisasi kebijakan moneter.

Seperti yang telah terjadi selama beberapa waktu, angka inflasi secara keseluruhan sedikit terdistorsi oleh kebijakan pemerintah yang bertujuan mengurangi beban rumah tangga akibat melonjaknya biaya hidup. Pada bulan terakhir, kebijakan tersebut, terutama langkah pembatasan harga bensin, menurunkan angka IHK utama sebesar 0,62 poin persentase.

Data harga konsumen tersebut dirilis ketika indikator harga lainnya menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap perusahaan. Harga barang korporasi Jepang naik 7,6% pada Agustus dibandingkan tahun sebelumnya, melampaui ekspektasi. Kenaikan harga energi, pelemahan yen, dan kondisi pasar tenaga kerja yang ketat mendorong peningkatan biaya input di seluruh rantai pasokan.

Kondisi tersebut memaksa perusahaan membebankan lebih banyak biaya kepada konsumen. Menurut Teikoku Databank, jumlah produk makanan dan minuman yang mengalami kenaikan harga pada bulan ini meningkat 83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pasar akan mencermati konferensi pers Gubernur BOJ Kazuo Ueda setelah keputusan kebijakan untuk mengetahui bagaimana dia menggambarkan perkembangan harga terbaru serta prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut. Perdagangan di pasar swap overnight menunjukkan bahwa para trader memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga berikutnya pada akhir tahun mencapai 90%.

Dalam laporan prospek ekonomi terbaru, BOJ menyatakan bahwa inflasi akan meningkat hingga berada “jelas di atas 2%” pada paruh kedua tahun fiskal ini. Bank sentral tersebut mengacu pada kenaikan harga cip yang didorong oleh kuatnya permintaan global terkait kecerdasan buatan serta pelemahan yen.

Klaim Pengangguran AS Sentuh Angka Terendah, Pasar Kerja Stabil

Jumat, 18 September 2026 06:45 WIB

María Paula Mijares Torres dan Julia Fanzeres

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121948/klaim-pengangguran-as-sentuh-angka-terendah-pasar-kerja-stabil/2>

Bloomberg, Pengajuan tunjangan pengangguran di Amerika Serikat (AS) turun ke level terendah sejak Juli, sementara klaim berkelanjutan merosot ke level terendah dalam lebih dari dua tahun. Data tersebut menambah sinyal stabilitas pasar tenaga kerja.

Klaim awal tunjangan pengangguran turun 10.000 menjadi 196.000 pada pekan yang berakhir 12 September, salah satu angka terendah sejak 1969, menurut data Departemen Tenaga Kerja AS yang dirilis pada Kamis (17/9). Periode tersebut mencakup hari libur Labor Day, sehingga data dapat mengalami fluktuasi di sekitar hari libur.

Rata-rata pergerakan empat minggu pengajuan baru, yang menjadi indikator untuk meredam volatilitas, turun menjadi 203.250, level terendah dalam lima minggu.

Penurunan klaim awal dapat mencerminkan perubahan musiman yang berkaitan dengan Labor Day dan dimulainya tahun ajaran baru. Meski demikian, tren yang lebih luas menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja di seluruh sektor ekonomi masih terbatas, kecuali dalam beberapa pengumuman besar yang mendapat perhatian luas.

Klaim berkelanjutan, yang menjadi indikator jumlah orang yang menerima tunjangan, turun menjadi 1,73 juta pada pekan yang berakhir 5 September. Angka tersebut merupakan yang terendah sejak 2024.

Meskipun pemutusan hubungan kerja masih terbatas, masyarakat AS tetap enggan meninggalkan pekerjaan mereka di tengah perekrutan tenaga kerja yang tidak merata. Kondisi ini memperkuat gambaran pasar tenaga kerja dengan tingkat perekrutan dan pemutusan hubungan kerja yang sama-sama rendah.

Setelah tidak disesuaikan dengan fluktuasi musiman, klaim awal tercatat turun tajam. Penurunan tersebut terutama didorong oleh penurunan klaim di California, Texas, Michigan, dan New York.

Thailand Perpanjang Program Subsidi Konsumen Senilai 40 Miliar Baht

Jumat, 18 September 2026 19:01 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/thailand-perpanjang-program-subsidi-konsumen-senilai-40-miliar-baht>

KONTAN.CO.ID - Pemerintah Thailand akan memperpanjang program subsidi konsumen dengan memanfaatkan dana sebesar 40 miliar baht atau sekitar US\$1,20 miliar yang masih tersisa dari tahap pertama.

Melansir Reuters Jumat (18/9/2026), Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan, perpanjangan program tersebut masih menunggu persetujuan kabinet.

Program ini ditujukan untuk membantu meringankan beban biaya hidup masyarakat di tengah tingginya biaya hidup.

Tahap pertama program subsidi telah menjangkau sekitar 43 juta orang dan berlangsung pada Juni hingga September. Peserta program menerima subsidi sebesar 1.000 baht atau sekitar Rp500.000 per bulan.

Dalam skema tersebut, pemerintah menanggung 60% dari pembelian yang memenuhi syarat, dengan batas subsidi maksimal 200 baht per orang per hari.

Pemerintah Thailand berencana memperpanjang program tersebut selama dua bulan. Juru bicara pemerintah mengatakan perpanjangan dilakukan menggunakan dana yang masih tersedia dari tahap pertama.

Anutin mengatakan program tersebut tidak semata-mata merupakan kebijakan populis, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah memberikan stimulus terhadap perekonomian sekaligus menekan beban pengeluaran masyarakat.

"Ini bukan kebijakan populis. Ini merupakan kebijakan stimulus ekonomi sekaligus langkah untuk meringankan pengeluaran masyarakat di seluruh negeri pada saat biaya hidup tinggi," kata Anutin.

Perpanjangan subsidi tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan dukungan terhadap aktivitas konsumsi domestik Thailand.

Ringgit Menguat 0,44% Jumat (18/9), Bagaimana Pergerakan Rupiah dan Mata Uang Asia?

Jumat, 18 September 2026 09:30 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ringgit-menguat-044-jumat-189-bagaimana-pergerakan-rupiah-dan-mata-uang-asia>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar mata uang Asia bergerak terbatas terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis (18/9/2026).

Ringgit Malaysia dan dolar Taiwan mencatat penguatan terbesar, sementara won Korea Selatan menjadi salah satu mata uang yang melemah.

Mengutip data Reuters pada pukul 02.05 GMT, ringgit Malaysia menguat 0,44% menjadi 4,078 per dolar AS dari posisi sebelumnya 4,096.

Dolar Taiwan juga menguat 0,32% ke level 31,780 per dolar AS, dari sebelumnya 31,881.

Baht Thailand naik 0,07% menjadi 33,250 per dolar AS, sedangkan peso Filipina menguat 0,15% ke 62,574. Yuan China juga menguat 0,11% menjadi 6,699 per dolar AS.

Rupiah menguat tipis 0,11% ke level 17.715 per dolar AS dari posisi sebelumnya 17.735. Dolar Singapura nyaris stagnan di 1,275 per dolar AS.

Sebaliknya, won Korea Selatan melemah 0,36% menjadi 1.385,30 per dolar AS. Yen Jepang juga turun 0,17% ke 156,220 per dolar AS.

Sementara itu, rupee India bergerak stabil di 95,930 per dolar AS.

Jika dilihat sepanjang 2026, kinerja mata uang Asia masih beragam. Yuan China menjadi salah satu yang mencatat penguatan terbesar, yakni 4,32% dibandingkan akhir 2025.

Won Korea Selatan menguat 3,99%, sedangkan dolar Singapura naik 0,81% dan yen Jepang menguat 0,28%.

Di sisi lain, rupee India melemah 6,32% sejak akhir 2025. Rupiah Indonesia turun 5,90%, peso Filipina melemah 6,03%, sementara baht Thailand turun 5,41%.

Dolar Taiwan tercatat melemah 1,08% sepanjang tahun, sedangkan ringgit Malaysia turun 0,54%.

Realisasi Belanja Bunga Utang Capai Rp394 T Per Agustus

Jumat 18 September 2026 19:20 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122076/realisasi-belanja-bunga-utang-capai-rp394-t-per-agustus/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan total realisasi belanja bunga utang hingga akhir Agustus 2026 tercatat mencapai sekitar Rp394,2 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto mengatakan sebanyak Rp366,4 triliun diantaranya belanja di dalam negeri, sementara luar negeri tercatat mencapai Rp27,8 triliun.

"Artinya, belanja bunga yang kita realisasikan itu beredar di dalam negeri dan menjadi likuiditas dan sumber daya ekonomi untuk mendukung aktivitas ekonomi dalam negeri," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Suminto juga memastikan realisasi pembiayaan utang hingga saat ini masih sesuai dengan desain dalam APBN 2026, dengan outlook defisit dipatok 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Alokasi belanja utang juga dinilai masih cukup memadai. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun juga masih sesuai dengan strategi.

"Jadi, dengan strategi yang on track, kami harapkan kami tetap dapat menjaga level imbal hasil dari SBN [Surat Berharga Negara] kita," tutur dia.

Adapun hingga Agustus 2026, APBN tercatat masih mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara dengan 0,93% terhadap PDB. Meski demikian, keseimbangan primer masih surplus mencapai Rp154 triliun.

Menkeu Klaim Ekonomi RI Kuat di Tengah Gejolak Global

Jumat, 18 September 2026 16:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122008/menkeu-klaim-ekonomi-ri-kuat-di-tengah-gejolak-global/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim data-data ekonomi nasional cukup memberi keyakinan untuk menyampaikan bahwa gerak ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.

Suahasil menjelaskan, dari sisi global, konflik Timur Tengah saat ini masih berlanjut, bahkan malah tambah seru. Tak hanya itu, dua hari lalu bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan dan membuat pemerintah Negeri Uncle Sam berupaya melakukan berbagai antisipasi untuk meredam gejolak di negaranya.

"Indikator volatilitas bergerak divergen, artinya ada tanda-tanda wait and see. Maka itu, kalau kami rekapitulasi keseluruhan, kondisi pernyataan suku bunga akan higher for longer," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta, Jumat (18/9/2026).

Mengamati situasi dunia seperti itu, lanjut dia, sejumlah indikator menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih tetap resilien. Misalnya, dari sisi transaksi yang ada di masyarakat, baik gerak investasi maupun konsumsi, dan lainnya.

"Ini terjadi di tengah proyeksi ekonomi global yang cenderung moderat, di tengah pertumbuhan ekonomi mitra negara juga," kata Suahasil.

Dia menambahkan, seluruh pemangku kepentingan perlu mewaspadaai situasi ekonomi, namun secara umum kondisi saat ini masih cukup mampu bertahan.

"Kita harus mewaspadaai, tidak boleh lengah, tapi kondisi ekonomi Indonesia cukup resilien," tegasnya.

Rupiah Tutup Pekan dengan Penguatan Tipis

Jumat, 18 September 2026 15:32 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122056/rupiah-tutup-pekan-dengan-penguatan-tipis/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan pekan ini dengan penguatan terbatas 0,03% ke Rp17.742/US\$. Penguatan itu membuat rupiah berada di zona hijau bersama sebagian besar mata uang Asia, meski lajunya relatif terbatas di antara mata uang yang menguat sore ini.

Dari kawasan, ringgit Malaysia memimpin penguatan, bersama dolar Taiwan, baht Thailand, yuan China, yuan offshore, dan rupee India lalu rupiah dan dolar Hong Kong yang lebih terbatas.

Apresiasi sebagian mata uang kawasan juga turut ditopang oleh laju yuan setelah bank sentral China menetapkan nilai tukar acuan di level yang lebih kuat. Ini menjadi sinyal bahwa otoritas China masih menginginkan yuan stabil atau bahkan menguat terhadap dolar AS, menjelang pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pekan depan.

Sebaliknya, yen Jepang semakin melemah, disusul won Korea Selatan dan dolar Singapura juga peso Filipina.

Data Bloomberg menunjukkan bahwa rupiah sejatinya masih melemah 0,8% sepanjang pekan ini. Pelemahan itu terjadi bersama won Korea Selatan yang paling tajam 3,05%, diikuti yen Jepang 2,48%.

Posisi rupiah yang hanya menguat 0,03%, bahkan lebih rendah dari penguatan kala pembukaan 0,14% di Rp17.722/US\$ menunjukkan sentimen positif regional belum sepenuhnya menopang penguatan rupiah secara agresif.

Memang, rupiah mendapat sokongan dari pasar obligasi Asia yang kembali menguat, termasuk pasar obligasi domestik. Yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun turun 1,9 bps ke 7,14%, begitu juga dengan yield obligasi Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Penurunan yield di pasar obligasi kawasan menunjukkan adanya permintaan terhadap aset pendapatan tetap Asia dan memberi ruang penguatan pada mata uang kawasan.

Ditambah, penurunan harga minyak mentah membantu meredakan kekhawatiran terhadap inflasi. Brent bergerak di sekitar US\$102,55/barel, sementara WTI turun 1,82% menjadi US\$100,06/barel.

Namun, harga minyak yang masih berada di atas kisaran target asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih membayangi kondisi fiskal Indonesia. Ini menjadi faktor pemberat gerak rupiah.

Selain itu, laju rupiah juga dihadang oleh penguatan dolar AS. Indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama menguat ke 100,29 pada 15:00 WIB. Kenaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) meningkatkan daya tarik aset dolar AS dan membuat investor cenderung selektif terhadap aset negara berkembang.

D samping itu, pelemahan yen hampir 1% setelah Bank of Japan menaikkan suku bunga 25 bps menjadi 1,25%. Keputusan BoJ yang tidak bulat dinilai pasar sebagai langkah separuh hawkish.

Dengan begitu, pekan ini laju rupiah mendapat tenaga dari kondisi eksternal yang mereda dengan turunnya harga minyak dan arus modal masuk ke pasar obligasi kawasan. Di sisi lain, penguatan dolar AS setelah The Fed hawkish menjadi pemberat laju rupiah.

Pekan depan, pelaku pasar akan mencermati arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). BI akan menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 22-23 September mendatang.

Sebagian ekonom memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di 5,75%, lantaran pergerakan rupiah relatif stabil di rentang Rp17.650-17.750/US\$.

Belanja Negara Tembus Rp1.791 T Sampai Agustus 2026, Naik 29%

Jumat, 18 September 2026 11:10 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121990/belanja-negara-tembus-rp1-791-t-sampai-agustus-2026-naik-29/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi total belanja negara hingga Agustus 2026 tercatat mencapai Rp1.791,5 triliun, melonjak 29% secara tahunan (year-on-year/yoy). Namun, angka ini baru setara 56,9% dari target APBN tahun ini senilai Rp2.295,7 triliun.

Berdasarkan data rincinya, kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh naiknya belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang naik sekitar 33% yoy menjadi Rp912,4 triliun dari sebelumnya yang masih Rp686 triliun. Angka itu tercatat 60,4% dari target sepanjang 2026.

"Realiasi belanja K/L ini tumbuh tinggi mencapai Rp912,4 triliun untuk berbagai program," ujar Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Sementara itu, belanja non K/L tercatat mencapai Rp879,1 triliun, yang juga naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang masih Rp702,8 triliun. Angkanya setara 53,6% dari target yang dipatok dalam APBN tahun ini.

Berdasarkan perincian, belanja K/L utamanya paling banyak berasal dari belanja barang yang naik 67,5% yoy menjadi Rp389 triliun. Sementara, belanja pegawai juga melonjak 21,7% yoy menjadi Rp259 triliun.

Lalu, belanja modal tercatat juga naik 14,3% menjadi Rp159,8 triliun. Sementara, belanja bantuan sosial (bansos) tercatat naik tipis 3,4% yoy menjadi sebesar Rp104,5 triliun.

Penerimaan Pajak Naik 24% Agustus 2026: PPN Melejit, PBB Lesu

Jumat, 18 September 2026 10:30 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121986/penerimaan-pajak-naik-24-agustus-2026-ppn-melejit-pbb-lesu/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2026 tercatat sebesar Rp1.409 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan 24,1% secara tahunan, namun porsinya baru 59,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang tahun ini.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kenaikan tersebut utamanya didorong dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tumbuh 38,9% menjadi Rp591,5 triliun. Porsinya 59,4% dari target sepanjang tahun ini.

"Penerimaan pajak terus tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi dan penerapan Coretax yang makin membaik," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Sercata terperinci, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas juga tumbuh 16,6% menjadi Rp722,2 triliun atau mencapai 62,6% dari target. Kemudian, PPh Migas juga tumbuh tinggi mencapai 63,8% menjadi Rp39 triliun atau 70,6% dari sepanjang tahun ini.

Namun, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya mengalami penurunan 15,7% menjadi Rp56,4 triliun. Angka tersebut juga masih 36,8% dari target APBN yang dipatok sepanjang tahun ini.

Secara total, pendapatan negara hingga akhir Agustus 2026 juga mencapai Rp2,055,6 triliun. Angka tersebut naik 25,4% secara tahunan dan mencapai 65,2% dari target APBN yang dipatok Rp3.153,6 triliun.

Total tersebut berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.619,3 triliun atau naik 21,7%, serta mencapai 60,1% dari target. Kemudian, PNBPN juga naik 41,7% menjadi Rp435,1 triliun. Namun, penerimaan hibah tercatat turun 21,6% menjadi Rp184,2 triliun.

Defisit APBN Rp240 Triliun Sampai Agustus 2026 , 0,93% PDB

Jumat, 18 September 2026 10:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121984/defisit-apbn-rp240-triliun-sampai-agustus-2026-0-93-pdb/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Agustus 2026 tercatat mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibanding posisi pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp321,3 triliun atau 1,35% terhadap PDB.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan defisit ini masih jauh di bawah target defisit sepanjang 2026 yang sebesar -Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Posisi keseimbangan primer APBN 2026 mencatatkan surplus Rp154 triliun sampai Agustus 2026. Angka ini lebih tinggi dibanding nominal surplus pada periode yang sama tahun lalu Rp22,2 triliun.

Realisasi defisit terjadi akibat total pendapatan negara lebih rendah dibanding realisasi belanja negara sampai lima bulan pertama tahun ini.

"Realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun sampai Agustus 2026, atau tumbuh 25,4% dibanding periode yang sama tahun lalu," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta, Jumat (18/9/2026).

Kendati demikian, secara porsi, realisasi pendapatan negara tercatat baru 65,2% dari total target APBN yang sebesar Rp3.153 triliun.

Di sisi lain, realisasi belanja negara tercatat Rp2.295,7 triliun atau meningkat 17,1% dibanding Agustus 2025. Porsinya 59,7% terhadap target belanja yang mencapai Rp3.842 triliun.

Dari sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan anggaran negara tercatat Rp473,5 triliun atau tumbuh 10,9% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Harga Pangan Hari Ini: Minyak Goreng Turun, Cabai Naik

Jumat, 18 September 2026 09:40 WIB

Merinda Faradianti

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/121980/harga-pangan-hari-ini-minyak-goreng-turun-cabai-naik/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Harga pangan bergerak beragam pada Jumat (18/9/2026). Berdasarkan panel Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, kenaikan terjadi pada beras, cabai, daging sapi, hingga gula. Sementara itu, harga bawang, ayam, telur, dan salah satu jenis minyak goreng mengalami penurunan.

Pada kelompok cabai, cabai merah keriting mencatat kenaikan mencapai Rp69.400 per kilogram (kg), naik 9,9% atau Rp6.250 dibandingkan periode sebelumnya. Cabai rawit merah juga mengalami kenaikan 0,72% atau Rp650 menjadi Rp90.650 per kg.

Sebaliknya, cabai merah besar turun 19,6% atau sekitar Rp10.700 menjadi Rp43.900 per kg. Cabai rawit hijau juga turun 14,11% atau sekitar Rp9.100 menjadi Rp55.400 per kg.

Harga kedua komoditas bawang dalam panel PIHPS sama-sama mengalami penurunan. Bawang merah ukuran sedang turun 1,06% atau Rp400 menjadi Rp37.300 per kg. Sementara bawang putih ukuran sedang turun 0,64% atau Rp250 menjadi Rp39.050 per kg.

Pada kelompok beras, beras kualitas bawah I naik 3,04% atau Rp450 menjadi Rp15.250 per kg. Beras kualitas bawah II juga naik 4,76% atau Rp700 menjadi Rp15.400 per kg.

Harga beras kualitas medium I meningkat 1,2% atau Rp200 menjadi Rp16.800 per kg. Sementara beras kualitas medium II bertahan di Rp16.350 per kg.

Untuk beras kualitas super, beras kualitas super I tidak mengalami perubahan dan berada di Rp17.850 per kg. Sedangkan beras kualitas super II naik 0,58% atau Rp100 menjadi Rp17.400 per kg.

Di kelompok protein hewani, harga daging ayam ras segar turun 2,47% atau sekitar Rp1.050 menjadi Rp41.400 per kg.

Harga daging sapi kualitas I juga turun 0,72% atau Rp1.100 menjadi Rp151.000 per kg. Sebaliknya, daging sapi kualitas II naik 2,42% atau Rp3.450 menjadi Rp146.250 per kg. Sementara itu, harga telur ayam ras segar turun 5,7% atau Rp1.700 menjadi Rp28.150 per kg.

Harga gula pasir kualitas premium naik 1,23% atau Rp250 menjadi Rp20.600 per kg. Gula pasir lokal juga naik tipis 0,26% atau Rp50 menjadi Rp19.150 per kg.

Pada kelompok minyak goreng, minyak goreng curah mencatat kenaikan paling tinggi, yakni 6,36% atau Rp1.300 menjadi Rp21.750 per kg.

Minyak goreng kemasan bermerek I naik 0,41% atau Rp100 menjadi Rp24.450 per kg. Sebaliknya, minyak goreng kemasan bermerek II turun 2,77% atau Rp650 menjadi Rp22.850 per kg.

Suku Bunga The Fed Naik, Pemerintah Perlu Cermat Pilih Denominasi Global Bond

Jumat, 18 September 2026 05:05 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/suku-bunga-the-fed-naik-pemerintah-perlu-cermat-pilih-denominasi-global-bond>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah perlu mencermati pilihan mata uang dalam penerbitan global bond senilai sekitar US\$ 2 miliar yang masih akan direalisasikan hingga akhir tahun.

Di tengah suku bunga global yang masih tinggi, pemilihan denominasi dapat menentukan biaya pembiayaan sekaligus risiko nilai tukar yang ditanggung pemerintah.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan pemerintah memiliki sejumlah pilihan untuk mendiversifikasi penerbitan surat berharga negara (SBN) valas, tidak hanya dalam dolar AS.

Strategi tersebut dapat menjadi pertimbangan ketika biaya pembiayaan dalam dolar berpotensi tetap tinggi.

"Yang penting adalah mendapatkan yield yang lebih murah sekaligus melakukan diversifikasi denominasi," ujar David kepada Kontan, Kamis (17/9/2026).

Menurut dia, penerbitan SBN dalam denominasi selain dolar AS masih terbuka, terutama dengan melihat perkembangan imbal hasil obligasi pemerintah di negara lain.

Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah denominasi yuan melalui Panda Bond.

David menilai pilihan tersebut masih relevan karena yield obligasi pemerintah China tenor 10 tahun menunjukkan tren penurunan. Kondisi itu berbeda dengan yield obligasi sejumlah negara lain yang cenderung meningkat.

Dengan demikian, pemerintah berpeluang kembali menggunakan strategi diversifikasi mata uang untuk memperoleh biaya pembiayaan yang lebih kompetitif sekaligus mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Namun, pilihan denominasi juga perlu mempertimbangkan risiko nilai tukar. Utang dalam mata uang asing akan meningkatkan kebutuhan pemerintah terhadap devisa ketika pembayaran pokok dan bunga jatuh tempo.

Karena itu, menurut David, penguatan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor menjadi salah satu cara untuk memperkuat ketersediaan devisa domestik.

Dengan pasokan devisa yang lebih kuat, kebutuhan pemerintah terhadap penerbitan utang valas dapat ditekan.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara penerbitan SBN valas dan SBN rupiah.

Penerbitan SBN rupiah yang terlalu besar berpotensi menyerap likuiditas domestik dan meningkatkan risiko crowding out, yakni ketika pembiayaan pemerintah mengurangi ruang pendanaan bagi sektor swasta.

Kondisi pasar global juga menjadi pertimbangan. The Fed pada September 2026 menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3,75%-4%. Suku bunga global yang masih tinggi berpotensi membuat biaya penerbitan surat utang tetap mahal.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah tidak hanya menghadapi pertanyaan mengenai kapan global bond diterbitkan, tetapi juga bagaimana memilih sumber dan denominasi pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan APBN serta risiko nilai tukar.

BI Prediksi Ekonomi Tumbuh 5,2%-6% di 2026, Rupiah Rp 17.300- Rp 17.800 per Dolar AS

Jumat, 18 September 2026 05:30 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-prediksi-ekonomi-tumbuh-52-6-di-2026-rupiah-rp-17300-rp-17800-per-dolar-as>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 17.300 hingga Rp 17.800 per dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang tahun 2026.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, proyeksi tersebut menjadi bagian dari gambaran perekonomian Indonesia ke depan. Selain nilai tukar, BI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,2%-6%.

"Ekonomi growth kita 5,2%-6% dengan rupiah di Rp17.300-Rp17.800 per dolar AS," kata Destry saat menghadiri Raker di Komisi VI DPD RI, Senin (14/9/2026).

Destry menyebut, pergerakan rupiah sebelumnya bahkan telah berada di sekitar level Rp17.500 per dolar AS dan sempat mendekati Rp17.400 per dolar AS.

Namun, kondisi global yang kembali bergejolak memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ia mengatakan, eskalasi perang Iran-Amerika yang semakin meningkat turut mempengaruhi pergerakan rupiah dalam beberapa hari terakhir.

"Gejolak di global memburuk karena perang Iran-Amerika terus makin meningkat, kita agak tertekan dua hari terakhir ini," ujar Destry.

Meski demikian, Destry mengatakan rupiah masih mampu bertahan di level Rp17.600-an per dolar AS.

"Alhamdulillah masih berada di level Rp17.600-an," katanya.

Sementara itu, dari sisi inflasi, BI masih mempertahankan proyeksi inflasi pada sasaran 2,5% plus minus 1%. Dengan demikian, inflasi diperkirakan berada dalam rentang 1,5%-3,5%.

Utang Baru Pemerintah Capai Rp 527,4 Triliun hingga Agustus 2026

Jumat, 18 September 2026 18:52 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/utang-baru-pemerintah-capai-rp-5274-triliun-hingga-agustus-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah terus merealisasikan pembiayaan utang untuk memenuhi kebutuhan anggaran 2026. Hingga akhir Agustus 2026, pembiayaan utang neto pemerintah telah mencapai Rp 506 triliun atau sekitar 60,8% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi pembiayaan utang tersebut masih sesuai dengan rencana pemerintah dalam APBN 2026 atau masih berada dalam jalur (on track).

“Pembiayaan utang neto saat ini realisasi sampai 31 Agustus ada Rp 506 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pembiayaan utang neto terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Hingga akhir Agustus 2026, pembiayaan melalui SBN tercatat sebesar Rp 527,4 triliun. Angka tersebut mencapai 66% dari target APBN 2026 sebesar Rp 799,5 triliun.

Meski demikian, realisasi penerbitan SBN tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 642,6 triliun.

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat sebesar Rp 21,4 triliun atau mencapai 65,6% dari target. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan target pembiayaan melalui pinjaman sebesar Rp 32,7 triliun.

Pemerintah Pantau Pembiayaan Utang

Suahasil menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan pembiayaan utang hingga akhir tahun. Pemerintah memastikan realisasi hingga Agustus masih sesuai dengan rencana APBN 2026.

“Jadi dengan sudah Agustus on track, ini on track. Nah karena itu sesuai dengan rencana APBN, dia on track kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” katanya.

Di sisi lain, pembiayaan utang pemerintah dikelola secara prudent dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi kas yang optimal serta dinamika pasar keuangan.

Kinerja pembiayaan utang yang masih on track dilakukan melalui langkah antisipatif dan active cash & debt management untuk menjaga ketersediaan likuiditas pemerintah tetap memadai.

Selain itu, pemenuhan target pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan cost of fund yang efisien dan risiko yang termitigasi. Pemerintah juga tetap memperhatikan tata kelola serta menjaga indikator utang pada level yang aman.

Pasar SBN Indonesia Masih Solid

Di tengah ketidakpastian global, Suahasil menyebut kondisi pasar SBN Indonesia masih solid. Pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga kondisi pasar surat berharga negara.

Suahasil menjelaskan, salah satu indikator yang diperhatikan pemerintah adalah spread atau selisih imbal hasil SBN Indonesia dengan instrumen negara lain.

Untuk SBN berdenominasi dolar AS tenor 10 tahun, spread terhadap US Treasury tenor 10 tahun berada di sekitar 97 basis poin. Posisi tersebut meningkat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 76 basis poin.

Sementara itu, untuk SBN rupiah tenor 10 tahun, pemerintah mencatat spread sekitar 120 basis poin.

Jika dibandingkan dengan negara lain, Suahasil menyebut spread Indonesia masih berada pada level yang dapat menarik minat investor asing. Dalam perbandingan yang ditampilkan pemerintah, spread Indonesia tercatat 217 basis poin, sedangkan Filipina sebesar 253 basis poin.

“Indonesia relatif oke, kita ada spread dengan 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pemodal asing untuk membeli SBN kita,” jelas Suahasil.

Daya tarik pasar SBN juga terlihat dari kondisi pasar primer. Hal tersebut tercermin dari bid to cover ratio dalam lelang SBN yang mencapai rata-rata 2,53 kali.

Rasio tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata bid to cover ratio lelang Surat Utang Negara (SUN) yang sebesar 1,88 kali.

“Kalau lelang SUN biasanya rata-rata bid to cover ratio-nya 1,88 kali, kalau bid to cover ratio lelang SBN kita 2,53 kali,” pungkasnya.

Serapan APBN 59,7% hingga Agustus, Belanja Pemerintah Jadi Motor Ekonomi

Jumat, 18 September 2026 20:46 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/serapan-apbn-597-hingga-agustus-belanja-pemerintah-jadi-motor-ekonomi>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2026 menunjukkan pemerintah masih menjaga peran belanja negara sebagai pendorong aktivitas ekonomi.

Sebagai informasi, belanja APBN 2026 hingga 31 Agustus mencapai Rp 2.295,7 triliun atau 59,7% dari pagu sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.791,5 triliun atau 57,9% dari pagu. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp912,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp504,3 triliun atau 72,8% dari pagu tahun ini.

Baca Juga: Penerimaan Pajak dari Industri Fintech Capai Rp 878,18 Miliar per Agustus 2026 Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, penyerapan anggaran hingga Agustus yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu menunjukkan adanya upaya pemerintah mempercepat pelaksanaan program dan belanja.

"Pertumbuhan realisasi belanja 17,1% yoy pada bulan Agustus 2026 dan serapan APBN yang lebih tinggi dibandingkan Agustus 2025 mencerminkan pemerintah masih melakukan percepatan belanja untuk mendorong pertumbuhan," ujar David kepada Kontan, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% tahun 2026, pemerintah diproyeksikan tetap menjaga akselerasi belanja hingga akhir tahun. Namun, ruang tersebut tetap bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan fiskal. "Penyerapan 100% dapat tercapai apabila keseimbangan fiskal tetap terjaga," katanya.

David menilai pengeluaran pemerintah masih menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pelaksanaan berbagai program pemerintah pada sisa tahun anggaran akan berperan dalam menjaga aktivitas ekonomi. "Pengeluaran pemerintah masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi," ujar David.

Ia mengatakan penyaluran bantuan sosial dan realisasi program pemerintah diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan konsumsi masyarakat sekaligus mendukung investasi.

Dengan demikian, keberlanjutan belanja pemerintah hingga akhir tahun diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap permintaan domestik.

Di sisi lain, pelaksanaan anggaran tetap perlu memperhatikan keseimbangan fiskal agar ruang belanja dapat terjaga hingga akhir tahun.

Borobudur Indonesia Expo Dibuka, Diharap Jadi Pengungkit Ekonomi Magelang

Jumat, 18 September 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/borobudur-indonesia-expo-dibuka-diharap-jadi-pengungkit-ekonomi-magelang/>

MAGELANG — Gelaran Borobudur Indonesia Expo 2026 di Alun-Alun Kota Magelang pada 17-20 September 2026, diharapkan mampu menjadi pengungkit perekonomian daerah setempat.

Dalam gelaran yang dibuka Kamis (17/9/2026) itu, Pemerintah Kota Magelang menyediakan 150 stan pameran UMKM. Event itu diharapkan dapat menarik hingga 40.000 pengunjung, dengan transaksi mencapai Rp2 miliar.

Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono mengatakan, penyelenggaraan event tersebut menjadi salah satu strategi Pemerintah Kota Magelang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Dia menyebut, Kota Magelang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Karena itu, kekuatan kota diarahkan pada sumber daya manusia, inovasi, kreativitas, serta sektor jasa dan ekonomi kreatif.

"Tidak ada tambang, tidak ada hutan, tidak ada kebun, tidak ada pabrik. Adanya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kualitas tinggi, SDM yang mempunyai inovasi, kreativitas tinggi," kata Damar.

Menurutnya, hampir setiap pekan terdapat event di Kota Magelang, baik berskala lokal, regional, nasional maupun internasional.

"Karena saya meyakini bahwa dengan event, pertumbuhan ekonomi ini akan bergerak tumbuh dengan baik," ujarnya.

Namun, Damar menegaskan, capaian transaksi bukan satu-satunya tujuan. Dia berharap event tersebut menghasilkan kerja sama baru, membuka pasar bagi produk UMKM, mampu mempertemukan pelaku usaha dengan mitra, serta menciptakan peluang baru bagi koperasi.

Borobudur Indonesia Expo 2026 juga diarahkan menjadi ruang promosi bagi potensi ekonomi kawasan penyangga destinasi pariwisata Borobudur. Karena itu, Pemkot Magelang melibatkan wilayah Purwo Manggung, yang terdiri atas Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang, dan Temanggung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan event tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan event itu dinilai penting, karena sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif memiliki peran besar dalam menggerakkan aktivitas ekonomi daerah.

“Kalau kita lihat di Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi kita juga banyak ditopang dari sektor konsumsi. Untuk meningkatkan konsumsi, pintunya adalah pariwisata,” kata Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat acara pembukaan.

Dia menambahkan, pariwisata tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi kreatif. Melalui berbagai event, produk UMKM dan ekonomi kreatif dapat ditampilkan, sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan pasar.

Sumarno menyebut, kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Magelang cukup besar. Karena itu, menurut dia, diperlukan lebih banyak kegiatan yang mampu mendatangkan masyarakat ke Kota Magelang, untuk berbelanja produk UMKM dan ekonomi kreatif.

Dia berharap, berbagai event di Kota Magelang tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga membuka jejaring antarpelaku UMKM di Kota Magelang dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah.

Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian masyarakat, baik Kota Magelang maupun Jawa Tengah.

Sementara itu, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mendorong pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata di Kota Magelang serta Jawa Tengah, untuk membentuk badan usaha koperasi. Sebab, sebagian besar pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara perorangan, sehingga menghadapi keterbatasan dalam mengakses modal, pasar, dan teknologi.

“Sehingga nanti proses transformasi dari usaha yang sebelumnya perorangan menjadi punya badan usaha, mereka nanti bisa lebih mudah mengakses modal, mengakses pasar, mengakses teknologi dan lain sebagainya,” kata Ferry, se usai acara pembukaan.

Ditambahkan, Kementerian Koperasi siap memberikan pendampingan, inkubasi, hingga pembiayaan bagi badan usaha koperasi yang dibentuk para pelaku usaha. Ferry juga menilai, sektor ekonomi kreatif memiliki peluang untuk dikembangkan melalui koperasi, termasuk bagi ilustrator, konten kreator, animator, pelaku fashion, kerajinan, hingga produk wastra khas daerah. (Humas Jateng)*ul

Menkop dorong pelaku usaha Kota Magelang bentuk koperasi

Jumat, 18 September 2026 08:42 WIB

Pewarta: Heru Suyitno, Editor: M Hari Atmoko

https://jateng.antaranews.com/berita/645657/menkop-dorong-pelaku-usaha-kota-magelang-bentuk-koperasi?utm_source=chatgpt.com

Magelang (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), ekonomi kreatif hingga pelaku pariwisata di Kota Magelang, Jawa Tengah, membentuk koperasi berbasis komunitas.

Menteri Ferry Juliantono Ia di Magelang, Kamis (17/9) malam, menyampaikan koperasi dinilai dapat menjadi wadah untuk memperkuat usaha sekaligus membuka akses permodalan yang lebih luas.

"Langkah ini dinilai dapat memperkuat usaha para pelaku ekonomi sekaligus membuka akses terhadap permodalan dan pembinaan," katanya usai membuka Borobudur Indonesia Expo 2026 di Alun-Alun Kota Magelang.

Ia mengatakan, pembentukan koperasi dapat dimulai dengan menghimpun para pelaku usaha atau komunitas yang memiliki bidang usaha sejenis.

Menurut dia, dengan bergabung dalam koperasi, para pelaku usaha diharapkan dapat membangun kekuatan ekonomi secara bersama-sama sekaligus meningkatkan skala usaha.

Keberadaan koperasi, katanya, juga dapat mempermudah anggota mengakses dukungan permodalan, baik melalui lembaga dana bergulir maupun perbankan.

Selain itu, anggota koperasi dapat memperoleh program inkubasi dan pembinaan langsung dari Kementerian Koperasi.

"Karena memang sebagian besar dari pelaku usaha, UMKM itu perorangan dan kelemahan mereka belum punya badan usaha. Dan badan usahanya kita mendorong membentuk koperasi. Begitu juga di kegiatan ekonomi kreatif, anak-anak muda yang kreator, konten kreator, animator itu untuk membentuk koperasi," katanya.

Menkop berharap semakin banyak pelaku usaha, UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata di Magelang yang membentuk koperasi sesuai bidang usaha masing-masing.

Dengan demikian, katanya, koperasi tidak hanya menjadi wadah berhimpun, tetapi juga dapat memperkuat usaha, memperluas jaringan serta meningkatkan kapasitas ekonomi para anggotanya.

Pada kesempatan sebelumnya, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menjelaskan Borobudur Indonesia Expo berlangsung selama 17–20 September 2026 di Alun-Alun Kota Magelang.

"Alun-alun memang episentrum kegiatan-kegiatan di Kota Magelang," katanya dalam jumpa pers untuk agenda tersebut, Rabu (16/9).

Kegiatan bertema "Membangun Bersama, Memperkuat Ekonomi Masyarakat" ini mempertemukan UMKM, ekonomi kreatif, koperasi, pariwisata, investasi, kementerian, serta pemerintah daerah di kawasan Borobudur dengan target dihadiri sekitar 40.000 pengunjung.

Ia mengatakan ekspo tersebut tidak hanya mendatangkan pengunjung dan transaksi, tetapi juga mendorong terbentuk jejaring usaha yang berlanjut setelah pameran berakhir.

"Yang lebih saya harapkan, ada kemanfaatan ekonomi yang bisa berlanjut, terutama setelah kegiatan berakhir," katanya dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang.

Dia mengharapkan pertemuan pelaku usaha dalam ekspos menghasilkan kerja sama baru, pembukaan pasar bagi produk, kemitraan bagi UMKM dan koperasi, serta peluang investasi.

Ekspos dengan target Rp2 miliar tersebut melibatkan pelaku ekonomi dari kawasan penyangga Destinasi Super Prioritas (DSP) Borobudur yang tergabung dalam Purwomanggung, yakni Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang, dan Temanggung.

BofA: Bunga Acuan Fed Era Kevin Warsh Bisa di Atas 5%

Sabtu, 19 September 2026 11:09 WIB

Greg Ritchie

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122099/bofa-bunga-acuan-fed-era-kevin-warsh-bisa-di-atas-5/2>

Bloomberg, Menurut para analis Bank of America Corp., kini saatnya para investor bersiap menghadapi risiko bahwa bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve akan menaikkan suku bunga acuan di atas 5%.

BofA Memperingatkan Risiko Kenaikan Suku Bunga The Fed di Atas 5% Jika Warsh Memimpin pada 2022 (Bloomberg)

Pasar suku bunga acuan masih meremehkan titik akhir dari siklus kenaikan suku bunga Fed yang dimulai minggu ini, kata tim yang terdiri dari Mark Cabana dan Meghan Swiber, sambil mendesak klien untuk bersiap menghadapi kenaikan imbal hasil Treasury dua tahun.

Kontrak swap mengindikasikan tiga kenaikan suku bunga sebesar seperempat poin lagi, yang akan membawa suku bunga federal funds efektif ke kisaran 4,5% hingga 4,75%, sedangkan BofA melihat potensi biaya pinjaman semalam untuk kembali ke level tertinggi dari siklus kenaikan suku bunga 2022 hingga 2023, ketika suku bunga acuan mencapai 5,5%.

Perkiraan mereka bahwa imbal hasil obligasi dua tahun akan naik menjadi 5% tahun ini, dari sekitar 4,7% pada hari Jumat, bertentangan dengan konsensus pasar.

BofA mengatakan bahwa komentar dari Gubernur Kevin Warsh bahwa kenaikan suku bunga pada hari Rabu telah menghilangkan “dosis akomodasi” menunjukkan bahwa para pejabat belum memandang kebijakan moneter sebagai penghambat perekonomian AS.

BofA Memperingatkan Risiko Kenaikan Suku Bunga The Fed di Atas 5% Jika Warsh Memimpin pada 2022 (Bloomberg)

“The Fed yang tidak memandang kebijakannya sebagai kebijakan yang restriktif kemungkinan akan terus menaikkan suku bunga hingga kondisi keuangan menjadi restriktif, sehingga memperkuat keyakinan kami terhadap kurva imbal hasil yang lebih datar,” tulis para ahli strategi tersebut dalam sebuah catatan.

Selain perkiraan baru mereka, mereka juga merekomendasikan klien untuk melakukan short pada Treasury bertenor dua tahun, dengan target imbal hasil sebesar 5,25% — sekitar level puncak tahun 2023.

Meski Kevin Warsh berhati-hati untuk tidak berkomitmen pada langkah apa pun di masa depan, ia menegaskan kembali ketidakpuasannya terhadap arah inflasi dan menekankan komitmen bank sentral terhadap stabilitas harga.

Kurva yield AS telah mendarat dalam beberapa sesi terakhir, dengan imbal hasil obligasi jangka pendek naik lebih cepat daripada obligasi jangka panjang, seiring para pedagang meningkatkan taruhan mereka terhadap kenaikan suku bunga Fed lebih lanjut.

Para ahli strategi, yang bertanggung jawab untuk memantau pasar obligasi dan mengidentifikasi peluang perdagangan bagi klien, merupakan kelompok yang terpisah dari para ekonom BofA, yang berfokus pada bank sentral.

Pada sebuah catatan yang diterbitkan Rabu lalu, ekonom AS BofA, Aditya Bhawe, mengatakan bahwa timnya tetap pada prediksi mereka mengenai dua kenaikan suku bunga lagi tahun ini pada bulan Oktober dan Desember, tanpa adanya tindakan kebijakan yang diperkirakan pada tahun 2027.

Para ahli strategi BofA merujuk pada Ringkasan Proyeksi Ekonomi terbaru The Fed, yang menunjukkan para pejabat melihat risiko kenaikan inflasi jauh lebih besar daripada risiko kenaikan pengangguran. Mereka juga mengutip ukuran dari aturan Taylor — rumus yang banyak digunakan untuk menghasilkan tingkat suku bunga kebijakan yang disarankan berdasarkan seberapa jauh inflasi dan output ekonomi menyimpang dari tingkat target — yang menyiratkan bahwa suku bunga Fed funds seharusnya berada di sekitar 5,3%.

“Kerangka kerja sederhana menunjukkan bahwa suku bunga Fed Funds seharusnya lebih tinggi dari 5%,” kata mereka.

“Meskipun imbal hasil obligasi jangka pendek dapat terus naik, kami memperkirakan dampaknya terhadap obligasi jangka panjang akan lebih terbatas,” dengan yield obligasi 10 tahun diperkirakan akan menutup tahun ini di level 5%, mendekati level perdagangan pada hari Senin.

Utang Prancis Diproyeksi Tembus 119,3% PDB pada 2026

Sabtu, 19 September 2026 22:09 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Tri Sulistiowati

https://internasional.kontan.co.id/news/utang-prancis-diproyeksi-tembus-1193-pdb-pada-2026?utm_source=chatgpt.com

KONTAN.CO.ID - PARIS. Utang Prancis diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi sebesar 119,3% dari output ekonomi pada tahun 2026, dengan proyeksi rasio utang terhadap PDB sebesar 121,7% pada tahun 2027. Demikian disampaikan kementerian keuangan pada hari Sabtu (19/9), yang menjadi indikasi terbaru memburuknya kondisi keuangan publik negara tersebut.

Kementerian keuangan menyampaikan proyeksi ini dalam pernyataan kepada Dewan Tinggi Keuangan Publik (High Council of Public Finances), lembaga yang bertugas mengevaluasi perkiraan pendapatan dan belanja dalam usulan anggaran pemerintah.

Menurut data pemerintah, rasio utang terhadap PDB Prancis tercatat sebesar 115,7% pada tahun 2025, sementara pada tahun 2019 angka tersebut masih di bawah 100%.

Kementerian juga menyatakan perkiraan defisit anggaran sebesar 5,4% pada akhir tahun ini. Perdana Menteri Sebastien Lecornu pada hari Kamis mengatakan bahwa ia memperkirakan defisit tahun 2026 akan berada jauh di bawah angka 5,5%.

Lecornu telah mengumumkan rencana untuk memasukkan langkah penghematan sebesar 54 miliar euro (US\$62 miliar) ke dalam anggaran tahun 2027 guna mencegah defisit menjadi tak terkendali. Namun, ia menghadapi tugas berat untuk meloloskan langkah-langkah penghematan tersebut di parlemen yang terpecah tajam, di tengah meningkatnya tekanan dari pemilih terkait masalah biaya hidup.

Selisih imbal hasil (premium) yang harus dibayar Prancis untuk meminjam dana di pasar obligasi dibandingkan dengan Jerman naik hingga lebih dari satu poin persentase penuh pada hari Jumat—kali pertama hal ini terjadi sejak krisis utang zona euro.

Kondisi ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap kondisi keuangan Prancis yang tertekan menjelang pemilihan umum tahun depan.

Trump Resmi Kenakan Tarif 100% ke Pembeli Minyak Rusia, Ini Negara yang Terancam

Sabtu, 19 September 2026 05:56 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

https://internasional.kontan.co.id/news/trump-resmi-kenakan-tarif-100-ke-pembeli-minyak-rusia-ini-negara-yang-terancam?utm_source=chatgpt.com

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani undang-undang sanksi terhadap Rusia pada Jumat (18/9/2026). Aturan baru ini tidak hanya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia, tetapi juga memberi Trump kewenangan baru untuk mengenakan tarif hingga 100% terhadap negara-negara yang menjadi pembeli utama minyak dan gas Rusia.

Kebijakan tersebut berpotensi menambah ketidakpastian bagi ekonomi global setelah hampir dua tahun dunia menghadapi perang dagang. Pasalnya, kewenangan tarif yang diberikan kepada presiden AS dapat digunakan untuk jangka waktu yang melampaui masa jabatan Trump.

Dikutip Reuters, dampak langsung aturan ini diperkirakan masih terbatas. Salah satu alasannya adalah pertimbangan Trump untuk menghindari kebijakan yang dapat mendorong harga barang konsumen lebih tinggi menjelang pemilihan paruh waktu atau midterm elections November, saat kendali Kongres AS diperebutkan.

Namun, sejumlah pengkritik menilai cakupan aturan tersebut cukup luas sehingga dapat menimbulkan risiko bagi negara lain yang sewaktu-waktu menjadi sasaran kebijakan perdagangan AS.

Undang-undang tersebut mengharuskan Trump mengenakan tarif hingga 100% dalam waktu 30 hari terhadap seluruh barang yang diimpor AS dari lima negara terbesar yang mengimpor minyak mentah atau gas Rusia.

Tarif juga dapat dikenakan terhadap negara yang secara sengaja melakukan pembelian baru minyak atau gas Rusia setelah 30 hari sejak undang-undang diberlakukan, maupun negara yang masuk lima besar negara yang membantu Rusia menghindari sanksi.

China dan India termasuk pembeli terbesar minyak Rusia. Namun, aturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan negara mana saja yang akan menjadi target maupun bagaimana daftar lima negara terbesar tersebut akan dihitung. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai negara mana yang pada akhirnya dapat dikenai tarif.

"Karena kewenangan diskresi yang dimiliki presiden, kemungkinan besar kewenangan tersebut dapat disalahgunakan," ujar Laura Brank, pengacara di Bryan Cave Leighton Paisner yang berfokus pada transaksi lintas negara, dikutip Reuters.

Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump telah memberlakukan tarif hingga 50% terhadap lebih dari 80 negara. Namun, Mahkamah Agung AS kemudian membatalkan sejumlah tarif tersebut karena menilai Trump telah melampaui kewenangannya.

Tantangan hukum terhadap tarif berdasarkan undang-undang terbaru berpotensi lebih sulit. Pasalnya, aturan baru tersebut secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi penerapan tarif, berbeda dengan sengketa sebelumnya yang mempermasalahkan penggunaan undang-undang perdagangan lama oleh pemerintahan Trump.

China dan India menjadi perhatian

Undang-undang yang kini bernama Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 tersebut bertujuan menekan sumber pendapatan Rusia untuk membiayai perang di Ukraina. Aturan ini menyorot sektor energi dan pertahanan Rusia, termasuk shadow fleet atau armada kapal tanker yang digunakan untuk menghindari sanksi yang telah ada.

Kongres AS mengesahkan aturan tersebut setelah Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) menyetujuinya dengan suara 262-159 pada Rabu (16/9), menyusul persetujuan Senat pada Agustus.

Jeannette Chu, Vice President National Foreign Trade Council, mengatakan sejumlah pihak memiliki penilaian berbeda mengenai negara mana yang berpotensi terkena tarif karena undang-undang tersebut tidak memberikan kriteria yang sepenuhnya jelas.

Negara yang disebut berpotensi terdampak antara lain Brasil, India, Jepang dan sejumlah negara Uni Eropa.

India sendiri telah memperingatkan bahwa tarif baru AS terkait pembelian minyak Rusia dapat memengaruhi hubungan bilateral kedua negara. China juga menyatakan menentang penerapan yurisdiksi lintas batas yang menurut Beijing tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.

Dalam skenario terburuk, Chu memperingatkan Ukraina juga dapat terkena dampak tidak langsung. Jika tarif baru mengganggu pasokan minyak dan gas Rusia yang digunakan untuk menghasilkan produk olahan di Eropa, pasokan diesel ke Ukraina berpotensi ikut terdampak karena negara tersebut bergantung pada kilang di Hungaria dan Slovakia.

Namun, tidak semua pihak menilai aturan tersebut memberikan kewenangan terlalu luas kepada Trump. Foundation for Defense of Democracies, lembaga kajian konservatif, berpendapat undang-undang telah menetapkan kriteria yang cukup untuk menentukan negara yang dapat dikenai tarif dan menolak anggapan bahwa aturan tersebut menjadi jalan belakang bagi Trump untuk menerapkan tarif lainnya.

Berpotensi mengerek harga minyak

Waktu penerapan tarif menjadi salah satu perhatian utama. Jika Trump menerapkan tarif baru, pengumumannya akan dilakukan hanya beberapa hari sebelum pemilihan paruh waktu AS.

Kebijakan tersebut berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap harga minyak ketika konsumen AS sudah menghadapi kenaikan biaya hidup. Harga energi juga menjadi isu sensitif setelah perang Iran mengganggu pengiriman minyak dari Timur Tengah.

"Dengan kondisi pasar energi saat ini, hal tersebut tentu terlihat berisiko," ujar Ryan Majerus, mantan pejabat senior AS yang pernah bertugas di bawah pemerintahan Demokrat maupun Republik dan kini bekerja di firma hukum King & Spalding.

Menurut Majerus, Trump dapat menghindari persoalan waktu penerapan dengan menetapkan tarif pada tingkat nol terlebih dahulu, kemudian mengubahnya kapan saja.

Di sisi lain, sejumlah analis mempertanyakan bagaimana Trump akan menggunakan kewenangan baru tersebut mengingat pemerintahannya dinilai relatif berhati-hati dalam mengambil tindakan keras terhadap Rusia sejak kembali berkuasa.

Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada Trump untuk membebaskan suatu negara dari tarif atau sanksi dengan alasan keamanan nasional. Pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada Kongres.

"Ini sepenuhnya diskresi. Definisinya tidak jelas dan presiden memiliki semacam kartu bebas keluar melalui mekanisme pengecualian," ujar Ben Harris, mantan pejabat senior Departemen Keuangan AS pada pemerintahan Presiden Joe Biden, dikutip Reuters.

Aturan baru ini menambah satu lapisan ketidakpastian bagi perdagangan global, terutama bagi negara-negara yang masih bergantung pada minyak dan gas Rusia. Selain dampaknya terhadap hubungan dagang AS dengan negara-negara pembeli energi Rusia, kebijakan tersebut juga berpotensi memengaruhi harga energi dan arus perdagangan global.

Perdagangan Indonesia-Rumania Tembus USD 571,6 Juta, Naik 240 Persen

Sabtu, 19 September 2026 14:54 WIB

Penulis : Lazir, Editor : Ameri

<https://rentak.id/perdagangan-indonesia-rumania-tembus-usd-5716-juta-naik-240-persen/>

BUCHAREST – Hubungan ekonomi Indonesia dan Rumania memasuki babak baru. Nilai perdagangan kedua negara sepanjang Januari-Juli 2026 menembus USD 571,6 juta, melonjak sekitar 240 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka tersebut bahkan telah melampaui total perdagangan Indonesia-Rumania sepanjang 2025 yang tercatat USD 317,7 juta.

Duta Besar RI untuk Rumania dan Republik Moldova Meidyatama Suryodiningrat mengatakan, peningkatan perdagangan tersebut menunjukkan besarnya peluang kerja sama ekonomi kedua negara.

“Hubungan bilateral Indonesia dan Rumania telah terjalin kuat sejak 1950. Kini, kedua negara tengah membangun landasan kerja sama ekonomi yang saling melengkapi, bukan saling bersaing,” kata Meidyatama dalam resepsi diplomatik HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Bucharest, Kamis (17/9/2026).

Menurut dia, Indonesia pada 2022 merupakan mitra dagang terbesar kelima Rumania di kawasan Asia Tenggara. Tren perdagangan yang terus meningkat membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi salah satu mitra dagang utama Rumania di kawasan tersebut.

Data perdagangan menunjukkan nilai transaksi bilateral meningkat dari USD 158,5 juta pada 2022 menjadi USD 317,7 juta pada 2025.

Kinerja perdagangan semakin kuat pada tujuh bulan pertama 2026. Nilainya mencapai USD 571,6 juta, dibandingkan USD 168 juta pada periode yang sama 2025.

Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke Rumania mencapai USD 541,1 juta. Angka ini membuat nilai perdagangan dalam tujuh bulan pertama 2026 sudah melampaui capaian setahun penuh 2025 maupun tahun-tahun sebelumnya.

Meidyatama juga menilai dukungan Rumania diperlukan untuk mempercepat proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EU CEPA).

Menurutnya, kesepakatan tersebut dapat memperluas akses pasar sekaligus membuka peluang baru bagi perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa, termasuk Rumania.

“Indonesia-EU CEPA diharapkan dapat semakin memperluas akses pasar dan membuka peluang perdagangan serta investasi yang lebih besar antara Indonesia dan Uni Eropa,” ujarnya.

Sekretaris Negara untuk Urusan Strategis dan Global Kementerian Luar Negeri Rumania, Ana Cristina Tinca, menyebut perdagangan sebagai salah satu bidang kerja sama yang memiliki potensi besar bagi kedua negara.

“Perdagangan merupakan salah satu bidang kerja sama penting dan potensial antara Rumania dan Indonesia. Peluang kerja sama juga dapat dikembangkan dalam kerangka hubungan Uni Eropa dan ASEAN,” kata Ana Cristina.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam resepsi diplomatik yang dihadiri lebih dari 250 tamu, mulai dari pejabat pemerintah Rumania, korps diplomatik, mitra kerja, sahabat Indonesia hingga undangan lainnya.

Kegiatan itu sekaligus menjadi ajang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Para tamu disuguhi Tari Kembang Girang dan Joged Bumbung yang diiringi gamelan bambu, serta Tari Kecak yang dibawakan Sanggar Seni Jepun Bali Bucharest.

Pertunjukan angklung dan angklung interaktif juga turut ditampilkan Tim Kesenian KBRI Bucharest bersama mahasiswa Indonesia di Rumania dan asosiasi mahasiswa Rumania, Salonul Universitar.

Resepsi semakin semarak dengan sajian kuliner khas Indonesia.

Selain perdagangan, Indonesia dan Rumania memiliki peluang kerja sama di sejumlah sektor lain, seperti ekonomi, pariwisata dan ketenagakerjaan.

Lonjakan perdagangan pada 2026 menjadi salah satu indikator menguatnya hubungan ekonomi kedua negara sekaligus membuka ruang bagi peningkatan kerja sama Indonesia-Rumania di masa mendatang.

Belanja APBN Capai 59,7%, CORE: Pemerintah Perlu Percepat Belanja Berkualitas

Sabtu, 19 September 2026 07:15 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-apbn-capai-597-core-pemerintah-perlu-percepat-belanja-berkualitas>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2026 merupakan langkah yang tepat untuk menopang aktivitas ekonomi.

Menurut Yusuf, realisasi belanja yang telah mencapai 59,7% dari pagu menunjukkan belanja pemerintah sudah bergerak lebih cepat. Terutama, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengalami pertumbuhan 33% secara tahunan (year on year/yoy).

"Kenaikan belanja barang sebesar 67,5% juga penting karena relatif cepat masuk ke aktivitas ekonomi," ujar Yusuf kepada Kontan. Jumat (19/9/2026).

Namun, ia mengingatkan agar akselerasi belanja tetap disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara. Selama penerimaan tumbuh kuat dan ruang fiskal tetap terjaga, pemerintah masih memiliki ruang untuk mendorong belanja secara lebih optimal.

Sebagai informasi, realisasi belanja APBN 2026 hingga 31 Agustus mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7% dari pagu tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 17,1% yoy.

Dari jumlah tersebut, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.791,5 triliun atau 57,9% dari pagu. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja K/L sebesar Rp912,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun.

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp504,3 triliun atau 72,8% dari pagu tahun ini.

Belanja APBN Kuartal IV

Memasuki kuartal IV 2026, Yusuf melihat masih terdapat ruang bagi pemerintah untuk menjaga momentum belanja. Namun, hal tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan penerimaan negara dan kebutuhan pembiayaan secara bersamaan.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu menahan belanja, tetapi memastikan belanja berjalan sesuai dengan kapasitas fiskal yang tersedia.

"Yang perlu dihindari adalah penumpukan belanja di akhir tahun karena mengejar angka serapan," katanya.

Yusuf menilai belanja sebaiknya dipercepat pada program-program yang memang sudah siap dilaksanakan dan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi.

Percepatan belanja tersebut berpotensi memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV, terutama melalui konsumsi pemerintah dan permintaan domestik.

Meski demikian, besarnya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada kualitas penyaluran anggaran. Termasuk seberapa cepat anggaran tersebut masuk ke rumah tangga, dunia usaha, proyek, serta rantai pasok domestik.

"Belanja perlu didorong untuk menjaga momentum ekonomi, tetapi kecepatannya harus mengikuti kekuatan penerimaan agar ekspansi fiskal tetap sehat dan berkelanjutan," pungkas Yusuf.

Kemenkeu Pertahankan SAL Rp 200 Triliun di Bank hingga Juli 2027

Sabtu, 19 September 2026 05:20 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-pertahankan-sal-rp-200-triliun-di-bank-hingga-juli-2027>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih mempertahankan kebijakan menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan untuk menjaga likuiditas di sistem keuangan.

Dari total dana yang saat ini ditempatkan, pemerintah memastikan sebesar Rp 200 triliun tetap berada di perbankan hingga Juli 2027.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, kebijakan tersebut tetap sesuai dengan komunikasi pemerintah sebelumnya dengan Bank Indonesia (BI) dan perbankan.

"Intinya, akhir tahun tetap sampai Rp 200 triliun dan diperpanjang sampai Juli tahun depan," ujar Juda dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi September 2026, Jumat (18/9/2026).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menambahkan, posisi penempatan SAL di perbankan saat ini mencapai sekitar Rp 299 triliun.

Dengan demikian, terdapat dana di atas Rp 200 triliun yang juga masih ditempatkan di perbankan.

Meski begitu, pemerintah menetapkan Rp 200 triliun sebagai jumlah yang akan dipertahankan di perbankan hingga Juli 2027.

Penempatan tersebut bersifat sementara dan bukan berarti dana tersebut tidak dapat digunakan untuk kebutuhan pemerintah.

Menurut Prima, SAL tetap dapat ditarik ketika pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai belanja. Penarikan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas perbankan.

Pemerintah juga akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan perbankan sebelum menarik dana.

Langkah ini dilakukan agar penarikan SAL tidak menimbulkan kesenjangan antara ketersediaan dana di perbankan dan jumlah dana yang ditarik pemerintah.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah tetap memiliki ruang untuk menggunakan SAL sesuai kebutuhan anggaran, sementara sebagian dana tetap ditempatkan di perbankan hingga Juli 2027.

Kemenkeu Ungkap Realisasi Anggaran MBG Capai Rp134,2 Triliun hingga Agustus 2026

Sabtu, 19 September 2026 06:45 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-ungkap-realisisi-anggaran-mbg-capai-rp1342-triliun-hingga-agustus-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah merealisasikan lebih dari separuh anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang delapan bulan pelaksanaan APBN 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran MBG hingga Agustus 2026 mencapai Rp134,2 triliun.

Realisasi tersebut setara dengan 61,33% dari total pagu anggaran MBG tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp218,77 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, anggaran tersebut telah disalurkan kepada 57 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“MBG realisasinya Rp134,2 triliun selama 8 bulan pelaksanaan APBN 2026,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (18/9/2026).

Suahasil mengatakan, berdasarkan perkembangan realisasi anggaran tersebut, pelaksanaan program MBG dinilai semakin diarahkan agar tepat sasaran. Hal tersebut didukung reformasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut dia, Kemenkeu terus melakukan koordinasi dengan BGN, terutama untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan berbagai reformasi yang tengah dijalankan.

Salah satu reformasi BGN mencakup kewajiban bagi SPPG untuk memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. Kebijakan tersebut juga diikuti dengan penutupan sejumlah SPPG yang belum memenuhi ketentuan.

Selain itu, BGN melakukan penataan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penataan tersebut termasuk penempatan SPPG di wilayah 3T yang memiliki tingkat stunting tinggi.

Menurut Suahasil, penataan program MBG juga diarahkan untuk memberikan prioritas kepada kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta santri.

Di sisi lain, BGN melakukan reformasi dalam penentuan penerima manfaat program MBG. Suahasil menyebut, proses penentuan penerima manfaat kini dilakukan oleh BGN untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyaluran program.

"Penentuan penerima manfaat ini sekarang dilakukan oleh BGN supaya lebih optimal," katanya.

Suahasil menyambut baik berbagai langkah reformasi yang dilakukan BGN untuk meningkatkan ketepatan sasaran program MBG. Ia berharap anggaran negara yang dialokasikan untuk program tersebut dapat benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sebelumnya, BGN melaporkan realisasi anggaran Program MBG Tahun Anggaran 2026 telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89% dari total pagu sebesar Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran program MBG hingga akhir 2026.

Pariwisata Sumbang Devisa Rp 150 Triliun pada Semester I 2026

Sabtu, 19 September 2026 17:11 WIB

Penulis: Rizky Pradita Ananda, Editor: RP

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3027897/pariwisata-sumbang-devisa-rp-150-triliun-pada-semester-i-2026>

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pariwisata menyatakan kontribusi devisa dari sektor pariwisata Indonesia mencapai US\$ 8,43 miliar atau sekitar Rp 150 triliun pada semester pertama 2026.

Capaian tersebut menunjukkan pariwisata masih menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus sumber devisa negara.

"Pada semester pertama 2026, kontribusi devisa pariwisata telah mencapai US\$ 8,43 miliar. Ini menunjukkan sektor pariwisata terus menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus sumber devisa negara," kata Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa, dilansir dari Antara, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Ni Luh, capaian devisa pada semester pertama 2026 melanjutkan pertumbuhan positif sektor pariwisata Indonesia sepanjang 2025. Pada tahun tersebut, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara.

Selain kunjungan wisatawan mancanegara, Indonesia mencatat sekitar 1,2 miliar perjalanan wisatawan nusantara dan devisa pariwisata sebesar US\$ 18,27 miliar sepanjang 2025.

Ni Luh mengatakan pertumbuhan sektor pariwisata menjadi peluang sekaligus amanah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengembangkan sektor tersebut secara lebih berkualitas dan berkelanjutan.

"Pengembangan pariwisata masa depan bukan cuma berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan," tegasnya.

Ekonomi Indonesia Dinilai Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global

Sabtu, 19 September 2026 16:30 WIB

Penulis: Addin Anugrah Siwi, Editor: HE

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3027881/ekonomi-indonesia-dinilai-tetap-tangguh-di-tengah-gejolak-global>

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Suhasil Nazara mengatakan, kinerja perekonomian Indonesia tetap resilien di tengah gejolak global. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, inflasi yang terkendali, hingga defisit APBN yang terjaga.

Pemerintah terus mencermati perkembangan global sebagai bagian dari langkah antisipasi dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik. Dinamika geopolitik dengan konflik Timur Tengah masih menjadi risiko utama.

Sementara itu, perubahan suku bunga Amerika Serikat berpotensi memengaruhi kondisi pasar keuangan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi suku bunga global diperkirakan masih akan berada dalam situasi higher for longer dan karena itu dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu terus diantisipasi.

“Kita selalu sangat memperhatikan apa yang terjadi di global. Memperhatikan apa yang terjadi di global itu menjadi penting untuk kita menyiapkan antisipasi perekonomian Indonesia. Dan salah satu antisipasinya adalah antisipasi yang harus dilakukan oleh APBN,” ungkap Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Jumat (18/9/2026).

Meski demikian, sejumlah indikator menunjukkan ekonomi Indonesia tetap bergerak positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tercatat sebesar 5,45%. Sementara itu, inflasi pada Agustus 2026 masih berada di level sasaran inflasi 3,19%.

“Itu adalah angka-angka yang cukup memberikan confidence kepada kita bahwa perekonomian Indonesia itu stay resilient. Indonesia itu tetap resilien perekonomiannya, gerak ekonominya, gerak di masyarakat,” jelas menkeu.

Lebih lanjut menkeu memaparkan, ketahanan tersebut tercermin dari aktivitas ekonomi masyarakat. Sejumlah indikator seperti penjualan mobil dan sepeda motor, penjualan semen, serta konsumsi menunjukkan pertumbuhan.

Keyakinan konsumen turut menguat, sementara penjualan riil kembali berada dalam fase ekspansif. Pada sisi lain, purchasing managers index (PMI) manufaktur tetap menjadi indikator yang perlu dicermati karena sektor manufaktur Indonesia turut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global.

"Jadi, harus kita waspadai, kita tidak boleh lengah, tetapi Indonesia kondisi ekonominya cukup resilien, malah saya bisa katakan sangat resilien," jelas menkeu.

Dari sisi harga, pemerintah mengupayakan inflasi Indonesia terjaga dalam kisaran sasaran. Harga pangan menjadi faktor yang terus dipantau, terutama karena sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Pemerintah antara lain menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak bersubsidi, tarif listrik, dan sejumlah harga yang berada dalam kewenangan pemerintah.

Ketahanan ekonomi juga terlihat dari mulai pulihnya arus modal ke pasar keuangan domestik. Pemerintah mencatat akumulasi capital inflow hingga 11 September 2026 mencapai Rp 141,6 triliun. Untuk surat berharga negara (SBN), arus modal asing secara netto tercatat sebesar Rp 40,8 triliun didukung kredibilitas fiskal. Sementara itu, moderasi inflow sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencatat arus masuk sebesar Rp 171,6 triliun sejalan penurunan penerbitan SRBI oleh Bank Indonesia.

Di samping itu, ketahanan ekonomi domestik juga tercermin dari kinerja fiskal. Hingga akhir Agustus 2026, kinerja APBN tetap kuat dengan keseimbangan primer yang berada di posisi positif. Sementara itu, defisit anggaran masih berada dalam batas yang terkendali.

“Pendapatan negara Rp 2.055,6 triliun, 65% dari target. Belanja negaranya Rp 2.295 triliun, maka defisitnya adalah Rp 240,1 triliun, yang artinya adalah 0,93% dari PDB kita,” kata menkeu.

Kredibilitas Fiskal Terus Dijaga

Suhasil menyampaikan, kinerja APBN yang kuat dan kredibel tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang masih on track.

“Hingga akhir Agustus kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track,” ujarnya.

Lebih lanjut, dari sisi penerimaan negara hingga akhir Agustus tumbuh 25,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1%, sementara kepabeanan dan cukai mencapai Rp 210,2 triliun atau tumbuh 7,8%. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tumbuh 41,7% menjadi Rp 435,1 triliun.

Sementara itu, belanja negara tumbuh 17,1%. Belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 912,4 triliun atau tumbuh 33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menkeu menegaskan, percepatan belanja harus tetap diiringi prinsip efisiensi, ketepatan sasaran, dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Menkeu juga menyampaikan, APBN terus menjalankan fungsi perlindungan masyarakat melalui berbagai program, antara lain subsidi dan kompensasi, perlindungan sosial, serta dukungan terhadap daya beli masyarakat. Menkeu menegaskan, seluruh pelaksanaan tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kredibilitas fiskal.

“APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program dijalankan, seperti subsidi, kompensasi, program keluarga harapan, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi. Karena itu, APBN-nya harus tetap kredibel. Pendapatan harus kita perkuat, belanja harus makin efektif, produktif, tetapi harus tetap efisien, dan defisit kita kelola secara sehat dan terkendali,” jelasnya.

Ke depan, pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan sekaligus kredibilitas APBN agar stabilitas ekonomi, akselerasi pembangunan, dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perekonomian Indonesia dapat terjaga secara simultan.

Pembiayaan APBN Masih On-Track

Realisasi pembiayaan utang netto pemerintah hingga 31 Agustus 2026 sebesar Rp 506 triliun. Suhasil menyebut, realisasi pembiayaan tersebut masih sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

"Ini on track. Karena itu, sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus," ungkapnya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pasar SBN Indonesia dinilai tetap solid. Menkeu menyatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.

Salah satu indikator yang dipantau adalah pergerakan yield spread SBN terhadap US Treasury yang relatif rendah dibanding beberapa negara lainnya. Spread Indonesia tercatat sekitar 217 basis poin. Angka tersebut berada di bawah Filipina, Brasil, dan India.

Di pasar perdana, minat investor juga masih terlihat dari tingginya rasio bid to cover dalam lelang surat utang pemerintah. Rata-rata bid to cover ratio lelang SUN tercatat sebesar 1,88 kali, sedangkan pada lelang SBSN mencapai 2,53 kali.

Selain pembiayaan utang, pemerintah juga terus menjalankan pembiayaan investasi melalui skema below the line dalam APBN. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi pembiayaan investasi tersebut telah mencapai Rp 62,6 triliun untuk mendukung pangan, pertanian, perumahan, pendidikan, dan infrastruktur.

Dana tersebut disalurkan kepada sejumlah lembaga dan badan, antara lain Perum Bulog, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Keuangan Indonesia (LKI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH).

“Ini semua digunakan untuk investasi. Untuk menjadi uang yang dari APBN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membuat supaya cadangan beras itu cukup. Apalagi kita sekarang mau masuk kepada siklus kemarau yang estimasinya itu cukup panjang,” jelas menkeu.

Untuk sektor perumahan, APBN telah merealisasikan pembiayaan sekitar Rp 11 triliun. Melalui program FLPP, penyaluran telah mencapai lebih dari 139.000 unit rumah dengan nilai Rp 17,4 triliun. Program tersebut telah tersebar di 35 provinsi.

Sementara itu, pemerintah juga telah mengalokasikan tambahan dana abadi sebesar Rp 15 triliun untuk LPDP. Dana tersebut digunakan untuk mendukung program beasiswa pendidikan. Hingga saat ini, LPDP telah mendanai 20.792 penerima beasiswa. Apabila ditambah dengan penerima melalui program kolaborasi, jumlah penerima manfaat telah mencapai lebih dari 37.000 orang.

Pada sektor pangan, pembiayaan kepada Bulog digunakan untuk mendukung pengamanan cadangan beras pemerintah. Langkah tersebut ditujukan untuk menyejahterakan petani, menstabilkan harga, serta menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat.

Sementara itu, LMAN mendapatkan dukungan pembiayaan untuk membantu pengadaan dan pengelolaan lahan bagi proyek-proyek strategis pemerintah. Dengan dukungan tersebut, kebutuhan pertanahan dalam pelaksanaan proyek strategis dapat dipenuhi.

Pendapatan Negara Tumbuh 25,4 Persen, Belanja APBN Tembus Rp2.295,7 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 08:34 WIB

Editor Shifa Nurhaliza Putri

<https://www.idxchannel.com/economics/pendapatan-negara-tumbuh-254-persen-belanja-apbn-tembus-rp22957-triliun/all>

IDXChannel - Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan kinerja APBN hingga 31 Agustus 2026 tetap terjaga dan solid di tengah dinamika global. Kondisi ini ditopang permintaan domestik yang terjaga, stabilitas ekonomi, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter. APBN terus dikelola secara kredibel dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, perlindungan masyarakat, daya beli, dan agenda pembangunan prioritas Pemerintah.

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65,2 persen dari target APBN 2026, tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan Pajak mencapai Rp1.409,0 triliun, tumbuh 24,1 persen (yoy), Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp210,2 triliun, tumbuh 7,8 persen (yoy), serta PNPB sebesar Rp435,1 triliun, tumbuh 41,7 persen (yoy).

Sementara itu, Belanja Negara terealisasi Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen APBN, tumbuh 17,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp1.791,5 triliun, terdiri atas Belanja K/L sebesar Rp912,4 triliun atau tumbuh 33,0 persen (yoy) dan Belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun atau tumbuh 25,1 persen (yoy). Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp504,3 triliun atau 72,8 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan lebih rendah 11,8 persen (yoy).

Kinerja fiskal tetap terjaga, tercermin dari defisit APBN sebesar 0,93 persen terhadap PDB sesuai lintasan target APBN 2026. Selain itu, APBN mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp154,0 triliun. Pengelolaan fiskal dilakukan secara prudent untuk menjaga kesinambungan fiskal.

“Ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track. Maka defisitnya Rp240,1 triliun yang artinya adalah 0,93 persen dari PDB kita,” kata Suhasil dalam konferensi pers APBN KITA edisi September 2026, Jumat (18/9/2026).

Kinerja sektor ekonomi utama turut mendukung pertumbuhan penerimaan pajak. Penerimaan pajak sektor perdagangan tumbuh 41,2 persen, pertambangan 44,0 persen, dan industri pengolahan 25,4 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan penguatan aktivitas ekonomi di sektor perdagangan, industri, pertambangan, serta sektor pendukung lainnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama Semester I 2026 mencapai 5,45 persen, ditopang permintaan domestik yang tetap solid. Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Januari-Juli 2026 mencatat surplus USD3,7 miliar, mencerminkan fundamental ekonomi yang tetap solid dan resilien.

Inflasi pada Agustus 2026 tetap terkendali sebesar 3,19 persen (yoy). Inflasi inti relatif stabil pada 2,92 persen, sementara inflasi administered prices tercatat 3,32 persen. Kondisi tersebut mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan dan komoditas global.

Pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan sekaligus kredibilitas APBN melalui optimalisasi aktivitas ekonomi dan investasi, dukungan terhadap agenda pembangunan prioritas, serta penguatan pertumbuhan berkelanjutan.

APBN tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat, menjaga daya beli dan kesejahteraan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi melalui pendapatan negara yang diperkuat, belanja yang efektif dan produktif, serta defisit yang dikelola secara sehat, pruden, dan terkendali.

Pembiayaan Utang Pemerintah Rp506 T hingga Agustus, Menkeu: Masih On Track

Sabtu, 19 September 2026 10.19 WIB

Intan Kw

<https://ekonomi.tvrinews.com/berita/tbhozz9-pembiayaan-utang-pemerintah-rp506-t-hingga-agustus-menkeu-masih-on-track>

Realisasi pembiayaan utang neto pemerintah hingga 31 Agustus 2026 sebesar Rp506 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyebut, realisasi pembiayaan tersebut masih sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

"Ini on track. Karena itu, sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus," kata Suahasil, dikutip Sabtu, 19 September 2026.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dinilai tetap solid. Suahasil menyatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.

Salah satu indikator yang dipantau adalah pergerakan yield spread SBN terhadap US Treasury yang relatif rendah dibanding beberapa negara lainnya. Spread Indonesia tercatat sekitar 217 basis poin. Angka tersebut berada di bawah Filipina, Brasil, dan India.

"Kita bandingkan Indonesia dengan negara lain, itu yang sebelah kanan. Indonesia relatif oke. Kita ada spread dengan 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pelaku pemodal asing untuk membeli SBN kita," jelas Suahasil.

Di pasar perdana, minat investor juga masih terlihat dari tingginya rasio bid to cover dalam lelang surat utang pemerintah. Rata-rata bid to cover ratio lelang SUN tercatat sebesar 1,88 kali, sedangkan pada lelang SBSN mencapai 2,53 kali.

Selain pembiayaan utang, pemerintah juga terus menjalankan pembiayaan investasi melalui skema below the line dalam APBN. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi pembiayaan investasi tersebut telah mencapai Rp62,6 triliun untuk mendukung pangan, pertanian, perumahan, pendidikan, dan infrastruktur.

Dana tersebut disalurkan kepada sejumlah lembaga dan badan, antara lain Perum Bulog, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Keuangan Indonesia (LKI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Ini adalah semua digunakan untuk investasi. Untuk menjadi uang yang dari APBN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membuat supaya cadangan beras itu cukup. Apalagi kita sekarang mau masuk kepada siklus kemarau yang cukup estimasinya itu cukup panjang," tutur Suahasil.

Untuk sektor perumahan, APBN telah merealisasikan pembiayaan sekitar Rp11 triliun. Melalui program FLPP, penyaluran telah mencapai lebih dari 139 ribu unit rumah dengan nilai Rp17,4 triliun. Program tersebut telah tersebar di 35 provinsi.

Sementara itu, pemerintah juga telah mengalokasikan tambahan dana abadi sebesar Rp15 triliun untuk LPDP. Dana tersebut digunakan untuk mendukung program beasiswa pendidikan. Hingga saat ini, LPDP telah mendanai 20.792 penerima beasiswa. Jika ditambah dengan penerima melalui program kolaborasi, jumlah penerima manfaat telah mencapai lebih dari 37.000 orang.

Di sektor pangan, pembiayaan kepada Bulog digunakan untuk mendukung pengamanan cadangan beras pemerintah. Langkah tersebut ditujukan untuk menyejahterakan petani, menstabilkan harga, serta menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat.

Sementara itu, LMAN mendapatkan dukungan pembiayaan untuk membantu pengadaan dan pengelolaan lahan bagi proyek-proyek strategis pemerintah. Dengan dukungan tersebut, kebutuhan pertanahan dalam pelaksanaan proyek strategis dapat dipenuhi.

Transfer ke Daerah Capai Rp504,3 Triliun per Agustus 2026

Sabtu, 19 September 2026 15:06 WIB

Anggie Ariesta

<https://economy.okezone.com/read/2026/09/19/320/3243043/transfer-ke-daerah-capai-rp504-3-triliun-per-agustus-2026>

JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp504,3 triliun hingga akhir Agustus 2026. Angka tersebut setara dengan 70,5% dari pagu TKD terbaru sebesar Rp715,34 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penyaluran TKD terus berjalan seiring dengan peningkatan kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah.

“Belanja TKD, kinerjanya adalah telah disalurkan Rp504,3 triliun kepada alokasi TKD,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Suahasil menjelaskan, pagu awal TKD 2026 sebesar Rp693 triliun mengalami penyesuaian setelah pemerintah menambah alokasi untuk penanganan bencana alam di Sumatera serta kebutuhan mendesak daerah lainnya.

Pemerintah menambah Rp10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera dan Rp18,9 triliun untuk kebutuhan nonbencana. Dengan tambahan tersebut, total pagu TKD 2026 meningkat menjadi Rp715,34 triliun.

“Sejumlah pemerintah daerah juga mengatakan ada beberapa kesulitan yang perlu ditangani, maka ditambah lagi yang untuk nonbencana Rp18,9 triliun. Sudah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026. Karena itu, sebenarnya alokasi TKD saat ini adalah Rp715,34 triliun,” kata Suahasil.

Dengan menggunakan pagu terbaru tersebut, realisasi TKD sebesar Rp504,3 triliun hingga Agustus setara dengan 70,5% dari total alokasi Rp715,34 triliun.

Percepatan penyaluran TKD turut didorong perubahan skema penyaluran tunjangan guru yang kini dilakukan secara bulanan, dari sebelumnya setiap tiga bulan. Pemerintah juga mempercepat peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendukung kelancaran pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

Selain mendukung pembayaran gaji sekitar 4,3 juta ASN daerah, TKD dialokasikan untuk menjaga pemerataan kualitas pelayanan publik di sejumlah sektor.

Alokasi tersebut antara lain digunakan untuk program pendidikan, termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).

TKD juga digunakan untuk mendukung penguatan fasilitas dan layanan di 50 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta memperluas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan memperbaiki jaringan jalan daerah.

Pemerintah memastikan penyaluran TKD dilakukan tepat waktu agar roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah dapat berjalan optimal.

“Ini yang akan kita lihat terus, kita salurkan secara tepat waktu sehingga pemerintah daerah bisa terus menjalankan kegiatan pemerintah daerah,” pungkas Suahasil.

Belanja Perpajakan 2026 Diproyeksikan Rp563,6 Triliun

Sabtu, 19 September 2026

<https://www.pajakonline.com/belanja-perpajakan-2026-diproyeksikan-rp5636-triliun/>

Jakarta, PajakOnline — Pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan (tax expenditure) 2026 mencapai Rp563,6 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar 6,3% dibandingkan proyeksi 2025 sebesar Rp530,3 triliun dan hampir dua kali lipat dibandingkan posisi 2021 yang sebesar Rp293 triliun.

Angka Rp563,6 triliun tersebut merupakan proyeksi resmi yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 Kementerian Keuangan. Belanja perpajakan merupakan estimasi penerimaan pajak yang tidak dipungut atau dilepaskan pemerintah melalui berbagai fasilitas perpajakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu.

Istilah belanja perpajakan perlu dibedakan dari belanja pemerintah dalam APBN.

Belanja perpajakan menggambarkan potensi penerimaan negara yang tidak dipungut karena pemerintah memberikan fasilitas atau perlakuan perpajakan tertentu. Instrumen ini antara lain digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung UMKM, serta menarik investasi dan mendorong kegiatan usaha.

Dalam dokumen pemerintah, arah kebijakan belanja perpajakan mencakup pembebasan PPN atas sejumlah barang kebutuhan pokok dan jasa tertentu, fasilitas bagi UMKM, serta insentif investasi seperti tax holiday dan tax allowance.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan belanja perpajakan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

- Tahun >> Belanja Perpajakan
- 2021>> Rp293,0 triliun
- 2022 >> Rp328,5 triliun
- 2023 >> Rp360,0 triliun
- 2024 >> Rp400,1 triliun
- Proyeksi 2025 >> Rp530,3 triliun
- Proyeksi 2026 >> Rp563,6 triliun

Dengan demikian, proyeksi 2026 meningkat sekitar Rp33,3 triliun dibandingkan proyeksi 2025. Jika dibandingkan dengan 2021, nilainya meningkat sekitar Rp270,6 triliun atau 92,4%.

Kementerian Keuangan memperkirakan belanja perpajakan 2026 setara sekitar 2,19% terhadap PDB, sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi 2025 sebesar 2,23% terhadap PDB.

PPN Menjadi Komponen Terbesar

Jika dilihat berdasarkan jenis pajak, PPN dan PPnBM menjadi komponen terbesar belanja perpajakan 2026.

Kementerian Keuangan memproyeksikan belanja perpajakan dari PPN dan PPnBM mencapai Rp371,9 triliun, disusul Pajak Penghasilan sebesar Rp160,1 triliun.

Sementara itu, belanja perpajakan dari Bea Masuk dan Cukai diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun, PBB P5L sebesar Rp0,1 triliun, dan Bea Meterai Rp0,4 triliun.

Komposisinya sebagai berikut:

- Jenis Pajak >> Proyeksi 2026
- PPN & PPnBM >> Rp371,9 triliun
- Pajak Penghasilan >> Rp160,1 triliun
- Bea Masuk & Cukai >> Rp31,1 triliun
- PBB P5L >> Rp0,1 triliun
- Bea Meterai >> Rp0,4 triliun
- Total Rp563,6 triliun

Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga belanja perpajakan 2026 berasal dari fasilitas PPN dan PPnBM.

Industri Pengolahan Jadi Penerima Manfaat Terbesar

Berdasarkan sektor ekonomi, industri pengolahan menjadi sektor dengan proyeksi belanja perpajakan terbesar pada 2026, yakni Rp141,7 triliun.

Berikut beberapa sektor dengan nilai terbesar:

- Sektor >> Proyeksi Belanja Perpajakan 2026
- Industri pengolahan >> Rp141,7 triliun
- Pertanian, kehutanan dan perikanan >> Rp63,8 triliun
- Perdagangan >> Rp59,3 triliun
- Jasa keuangan dan asuransi >> Rp54,4 triliun
- Transportasi dan pergudangan >> Rp43,6 triliun
- Konstruksi >> Rp23,7 triliun
- Jasa pendidikan >> Rp27,2 triliun
- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial >> Rp16,7 triliun

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa belanja perpajakan diarahkan kepada berbagai sektor ekonomi, tidak hanya untuk kepentingan investasi tetapi juga aktivitas konsumsi, produksi, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Besarnya nilai belanja perpajakan kembali menjadi perhatian pemerintah karena meningkat cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Aرسال mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi apakah insentif yang diberikan selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan sasaran kebijakan.

Pernyataan tersebut disampaikan Yon dalam International Tax Conference 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Ia juga mengungkapkan bahwa lebih dari 70% dukungan belanja perpajakan pada periode yang dibahas pemerintah dialokasikan untuk kesejahteraan rumah tangga dan UMKM.

Menurut Yon, kondisi tersebut menjadi tantangan karena pemerintah juga harus memastikan insentif yang diberikan kepada dunia usaha benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang diharapkan.

Insentif Pajak Mulai Didesain Ulang

Besarnya belanja perpajakan berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi perubahan lingkungan perpajakan internasional, termasuk penerapan Global Minimum Tax (GMT) dengan tarif pajak efektif minimum 15%.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengevaluasi kembali sejumlah insentif, termasuk tax holiday dan tax allowance.

Yon menyebut pemerintah mempertimbangkan desain insentif yang lebih sesuai dengan perubahan ekonomi dan ketentuan perpajakan internasional, termasuk kemungkinan penggunaan instrumen seperti tax credit atau bentuk dukungan lain.

Pemerintah juga menyebut empat prinsip dalam redesain kebijakan insentif, yaitu keselarasan dengan aturan internasional, relevansi strategis terhadap perkembangan bisnis, pemberian insentif secara tepat waktu dan terukur, serta evaluasi secara berkelanjutan.

Tantangan: Antara Daya Beli, Investasi dan Penerimaan

Kenaikan belanja perpajakan tidak serta-merta berarti pemerintah mengalami kerugian penerimaan dengan nilai yang sama. Fasilitas perpajakan merupakan instrumen kebijakan yang sengaja diberikan untuk menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial tertentu.

Namun, semakin besar nilai tax expenditure, semakin penting pula pengukuran manfaatnya.

Pemerintah menghadapi kebutuhan untuk menjaga daya beli masyarakat, memberikan ruang bagi UMKM, mendorong investasi dan mempertahankan daya saing industri, sekaligus menjaga kapasitas penerimaan negara.

Oleh karena itu, evaluasi efektivitas menjadi bagian penting dari kebijakan belanja perpajakan. Pertanyaan utamanya bukan hanya berapa besar pajak yang direlakan, tetapi juga seberapa besar manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari fasilitas tersebut.

Dengan skala yang mendekati Rp564 triliun, perkembangan belanja perpajakan akan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat arah kebijakan fiskal pemerintah: apakah fasilitas pajak lebih banyak digunakan untuk menjaga konsumsi dan kesejahteraan, memperkuat UMKM, mendorong investasi, atau diarahkan kepada sektor-sektor strategis baru.

Pemkab Jepara menggelar pameran produk UMKM dan BUMDes

Sabtu, 19 September 2026 07:45 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/645757/pemkab-jepara-menggelar-pameran-produk-umkm-dan-bumdes>

Jepara (ANTARA) - Produk unggulan desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dipamerkan dalam gebyar produk BUMDes/BUMDes Bersama dan produk unggulan desa di Jepara sebagai upaya promosi dan meningkatkan daya saing produk di pasaran, Jumat.

Kegiatan pameran tersebut berlangsung mulai Jumat (18/9) hingga Minggu (20/9) digelar di Alun-alun 1 Jepara.

Menurut Bupati Jepara Witiarso Utomo di Jepara, Jumat, kegiatan tersebut melibatkan 184 BUMDes dan sembilan BUMDes Bersama, serta pelaku UMKM yang membawa produk unggulan dari desanya masing-masing.

"Jumlah ini menunjukkan besarnya potensi sekaligus tanggung jawab yang kita miliki untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang semakin kuat," ujarnya.

Menurut dia pelaksanaan Gebyar Produk BUMDes 2026 berlangsung sukses dan mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih menghadapi tantangan.

Witiarso menilai potensi produk unggulan desa di Jepara sangat besar. Karena itu, kegiatan seperti ini diharapkan mampu menjadi daya tarik sekaligus mendorong perputaran ekonomi di masyarakat.

Ia juga mendorong agar kualitas produk desa dan UMKM terus ditingkatkan. Produk-produk tersebut diharapkan tidak hanya dipasarkan dalam kegiatan pameran, tetapi juga dapat menjadi bagian dari sektor pariwisata Jepara.

"Harapannya ditingkatkan kualitasnya dan bisa berpartisipasi untuk pariwisata di Kabupaten Jepara. Sehingga barangnya bisa ditemukan di outlet-outlet yang wisatawan bisa mendapatkan dengan mudah," ujarnya.

Menurut Witiarso, pengembangan produk desa juga membutuhkan kerja sama antardesa agar potensi ekonomi yang ada dapat berkembang secara berkelanjutan.

"Semoga Gebyar ini menjadi penguat kerja sama antardesa sekaligus mendorong ekonomi lokal. Dari desa, kita bangun usaha yang sehat, lapangan kerja yang lebih luas, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik," ujarnya.

Sementara itu, Direktur BUMDes Bulungan Sulistiono menilai kegiatan pameran produk seperti ini positif untuk mengangkat produk unggulan desa.

"Kami membawa produk unggulan berupa olahan jamur, jahe wangi dan kunir asem agar lebih dikenal luas. Semoga transaksinya juga bagus, baik langsung maupun by order. Pelaku UMKM di desa juga lebih semangat kalau pameran seperti ini sering diadakan," ujarnya.

Transaksi Pameran MTQ Nasional 2026 di Jateng Capai Rp2,4 Miliar

Sabtu, 19 September 2026 17:52 WIB

Yasin

<https://jatengpos.co.id/semarang/2026/09/19/transaksi-pameran-mtq-nasional-2026-di-jateng-capai-rp24-miliar/>

JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Pameran Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI tahun 2026 di Tengah di kawasan parkir eks Plaza Semarang, Simpang Lima, Kota Semarang, mampu mencatatkan transaksi Rp 2,4 miliar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah, July Emmylia, mengatakan, total transaksi tersebut berasal dari transaksi 150 tenant Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dari total transaksi Rp2,4 miliar tersebut, terdiri atas transaksi retail Rp2.385.574.640 dan transaksi order Rp23.651.000.

Tak hanya transaksi langsung, pameran yang berlangsung 12-19 September 2026 itu juga membuka kontrak bisnis antarpelaku usaha dengan nilai mencapai Rp7,54 miliar.

“Pameran ini harapannya menjadi syiar ekonomi umat,” kata Emmy, saat menyampaikan laporan pada Closing Ceremony Pameran MTQ Nasional XXXI di Semarang, Sabtu, 19 September 2026.

Menurut dia, sejumlah kerja sama bisnis yang lahir dari pameran tersebut menunjukkan bahwa kegiatan promosi produk tidak seharusnya berhenti ketika pameran ditutup.

Dibeberkan dia, salah satu kerja sama bisnis yang terjalin berkat pameran itu di antaranya PT Yuasa Food Berkah Makmur dengan Politeknik Kementerian Kesehatan Tasikmalaya. Kerja samanya adalah penyediaan makanan penanggulangan stunting dan emergency food untuk bencana alam. Nilai kontraknya mencapai Rp5 miliar dengan masa kerja sama dua tahun.

Kerja sama lainnya melibatkan sejumlah UMKM Jawa Tengah. Abel Etnic Solo menjalin kerja sama dengan Friny Collection dari Riau untuk penyediaan aksesoris tembaga dan batu senilai Rp300 juta dengan masa kontrak lima tahun.

Kemudian CV Hury Accessories Kebumen bekerja sama dengan CV Naturaline Boyolali untuk penjualan bundling produk senilai Rp500 juta dengan masa kontrak lima tahun. Tifani Batik Pekalongan juga menjalin sejumlah kerja sama, antara lain penyediaan biji jintri senilai Rp300 juta serta penyediaan parfum dan aromaterapi senilai Rp360 juta.

Adapun Segar Asem Semarang mencatat kerja sama penyediaan produk minuman tradisional dengan Oleh-oleh Kampung Joglo Malioboro Yogyakarta senilai Rp30 juta dan dengan Oleh-oleh 52 Grup Semarang senilai Rp1,05 miliar.

Emmy mengatakan, selama pameran pelaku usaha didorong tidak hanya berjualan, tetapi juga membangun jejaring, bertukar kontak bisnis, mengumpulkan database pelanggan, membuat konten, hingga mengoptimalkan media sosial.

Pameran tersebut juga membuka peluang pasar internasional. July menyebut terdapat sejumlah pembeli dari luar negeri yang menunjukkan ketertarikan terhadap produk UMKM Jawa Tengah.

Salah satunya buyer dari Brasil yang menyatakan minat terhadap produk tikar pandan sebanyak 6.460 lembar dengan potensi nilai kontrak sekitar Rp4,56 miliar. Selain itu, terdapat minat dari buyer asal Nigeria, India, dan Amerika Serikat.

Selama delapan hari, pameran dikunjungi sekitar 80.000 orang. Antusiasme pengunjung bahkan masih terlihat hingga malam terakhir pelaksanaan.

Sebanyak 150 stan yang terlibat terdiri atas 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten/kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, capaian transaksi dan kerja sama tersebut diharapkan menjadi titik awal bagi UMKM untuk memperluas pasar.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, sehingga side event dari MTQ berupa pameran ini berjalan dengan lancar,” katanya saat mewakili Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen

Menurut Sumarno, pemerintah memiliki peran untuk memfasilitasi pelaku UMKM agar terus berkembang. Salah satu tantangan terbesar yang perlu dijawab bukan hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga memperluas pemasaran.

“Pameran ini adalah salah satu cara untuk kita bisa membantu saudara-saudara kita untuk memasarkan produk-produknya,” katanya.

Ia berharap, transaksi dan kerja sama yang terbentuk selama pameran tidak berhenti setelah kegiatan berakhir. Jejaring yang telah terbangun diharapkan terus berkembang menjadi hubungan bisnis yang lebih luas.

Namun, Sumarno mengingatkan bahwa pameran tersebut merupakan bagian dari rangkaian MTQ Nasional. Di balik geliat ekonomi yang muncul, ia berharap penyelenggaraan MTQ juga membawa masyarakat semakin dekat dengan Al-Qur'an.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak menjadikan MTQ Nasional bukan hanya sebagai momentum besar yang menghadirkan berbagai kegiatan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan kecintaan dan kedekatan dengan Al-Qur'an. (*)

Kerukunan Antaretnis Bawa Investasi Rp59,94 Triliun ke Jawa Tengah

Sabtu, 19 September 2026 21:29 WIB

Oleh : Tika Vilysta, Editor : Royce Wijaya

<https://rri.co.id/semarang/regional/2742841/kerukunan-antaretnis-bawa-investasi-rp5994-triliun-ke-jawa-tengah>

RRI.CO.ID, Semarang — Kerukunan antaretnis di Jawa Tengah dinilai menjadi salah satu modal penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kondisi tersebut turut mendorong realisasi investasi di provinsi ini mencapai Rp59,94 triliun pada semester I 2026.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Jawa Tengah merupakan rumah bersama bagi seluruh etnis yang hidup dan berkembang di wilayahnya. Semangat kebersamaan itu menjadi fondasi untuk membangun daerah sekaligus menarik minat investor.

Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri Gala Dinner Festival Pertengahan Musim Gugur yang digelar Masyarakat China Jawa Tengah Indonesia di Hotel PO Semarang, Sabtu 19 September 2026. Menurutnya, keberagaman yang terjaga dengan baik telah menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi dunia usaha.

"Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu rumah. Sebagai rumah kita bersama," kata Luthfi. Ia menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki peran yang sama dalam mendorong kemajuan daerah.

Luthfi menjelaskan, Festival Pertengahan Musim Gugur tidak hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga simbol kuatnya persaudaraan dan persatuan. Nilai-nilai tersebut dinilai mampu mempererat hubungan antarmasyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi ekonomi.

Menurutnya, para pengusaha dari berbagai latar belakang etnis selama ini aktif berkontribusi dalam pembangunan Jawa Tengah. Sinergi yang terjalin turut mendukung pertumbuhan investasi di berbagai sektor strategis.

Salah satu kontribusi datang dari investor asal Tiongkok yang menjadi mitra penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Pada semester I 2026, realisasi investasi dari Tiongkok di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp4,55 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi investasi Jawa Tengah pada semester I 2026 tercatat sebesar Rp59,94 triliun. Nilai tersebut terdiri atas penanaman modal asing sebesar Rp25,92 triliun, penanaman modal dalam negeri Rp22,62 triliun, dan investasi usaha mikro kecil sebesar Rp11,40 triliun.

Capaian investasi tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Sebanyak 213.217 tenaga kerja terserap dari 55.989 proyek yang terealisasi selama periode tersebut.

"Ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki daya tarik bagi investor, dan peluang kerja sama ekonominya juga semakin besar," ujar Luthfi.

ORI gandeng Bulog gelar pasar murah di Jateng

Sabtu, 19 September 2026 20:26 WIB

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/645831/ori-gandeng-bulog-gelar-pasar-murah-di-jateng>

Semarang (ANTARA) - Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) akan menggandeng Perum Bulog dalam menggelar pasar murah bagi masyarakat di berbagai wilayah di Jawa Tengah.

"ORI Jawa Tengah dapat bekerja sama dengan Bulog untuk menyelenggarakan pasar murah di seluruh kabupaten/ kota di provinsi ini," kata Ketua Umum ORI Andi Gani Nena Wea saat pelantikan pengurus ORI Jawa Tengah di Semarang, Sabtu

ORI, kata dia, merupakan organisasi kemasyarakatan berbasis nasionalisme yang terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang.

Ia mengharapkan ORI Jawa Tengah menjadi "rumah perjuangan rakyat", tempat masyarakat menyampaikan aspirasi dan memperoleh pendampingan.

Menurut dia, pelantikan ini merupakan awal dari tanggung jawab dan pengabdian.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," katanya.

Sementara Ketua ORI Jawa Tengah Sri Endahwati menyebut jaminan sosial dan bantuan hukum sebagai program utama untuk lima tahun ke depan.

Menurut dia, persoalan jaminan sosial tidak hanya soal kepemilikan kepesertaan, tetapi juga keberlanjutan akses masyarakat terhadap layanan.

"Perlindungan hukum terasa mahal untuk rakyat. Dengan adanya ORI, bisa membantu untuk perlindungan hukum," katanya

Bursa Vietnam Mau Naik Kelas, Arus Modal Asing Diperkirakan Tembus Rp 106 T

Andi Hidayat - detikFinance

Minggu, 20 Sep 2026 18:30 WIB

<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-8671246/bursa-vietnam-mau-naik-kelas-arus-modal-asing-diperkirakan-tembus-rp-106-t>

Jakarta - FTSE Russell disebut akan menaikkan bursa saham Vietnam menjadi Secondary Emerging Market pada klasifikasi ulang Senin mendatang. Jelang pengumuman tersebut, minat investor asing terhadap saham-saham Vietnam meningkat signifikan.

Dikutip dari Reuters, kenaikan kelas bursa Vietnam disebut akan meningkatkan eksposur terhadap saham-saham negara tersebut. FTSE sendiri memperkirakan aliran modal masuk ke saham Vietnam mencapai US\$ 6 miliar atau sekitar Rp 106,87 triliun (asumsi kurs Rp 17.812).

Adapun transisi ini akan berlangsung dalam empat tahap hingga tahun 2027. Adapun saat ini, bursa saham Vietnam di FTSE berada pada status frontier market.

"Tonggak sejarah ini mencerminkan kemajuan luar biasa yang telah dicapai Vietnam dalam memperkuat pasar modalnya," kata kepala eksekutif FTSE, Fiona Bassett, dikutip dari Reuters, Minggu (20/9/2026).

Manajemen investasi Asia-Pasifik Vanguard, Duncan Burns, juga mengaku akan meningkatkan eksposur pihaknya di pasar saham Vietnam. Bahkan, manajer aset tersebut berencana meningkatkan investasi menjadi US\$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 44,53 triliun selama beberapa tahun ke depan.

Angka investasi ini disebut masih bisa meningkat secara signifikan melampaui angka US\$ 2,5 miliar setelah dana kelolaan aktif dialokasikan modal ke pasar. Kondisi ini juga membantu menghidupkan kembali minat asing terhadap saham Vietnam.

Investor luar negeri diketahui membeli saham senilai 2,7 triliun dong di Bursa Efek Ho Chi Minh utama pada pekan 14 hingga 18 September. Namun mereka tetap menjadi penjual bersih sekitar 91 triliun dong sepanjang tahun ini.

Adapun pada bulan Agustus, FTSE mengidentifikasi 27 saham Vietnam yang memenuhi syarat untuk masuk dalam klasifikasi Indeks FTSE Global All Cap, termasuk nama-nama besar seperti konglomerat Vingroup, perusahaan teknologi FPT dan perusahaan pembuat baja Hoa Phat Group.

SSI Research memperkirakan arus dana ETF pada tahap pertama akan banyak masuk ke saham bank swasta VPBank, pengembang Vinhomes, FPT, dan Hoa Phat. Namun, Vingroup diperkirakan justru mengalami arus dana keluar bersih sekitar US\$28 juta.

Pasalnya, penjualan dari ETF yang sudah ada diperkirakan lebih besar dibandingkan pembelian saham Vingroup akibat kenaikan peringkatnya, menurut SSI Research.

"Kenaikan peringkat FTSE merupakan pertanda dalam perjalanan menuju kesadaran dan keterlibatan yang lebih besar dari investor asing," kata Ketua Dynam Capital, Craig Martin.

"Pasar tetap relatif murah dan pertumbuhan pendapatan masih kuat," tambahnya.

Terlepas dari optimisme tersebut, kinerja pasar saham Vietnam masih relatif tertinggal. VN-Index baru naik sekitar 1,4% sepanjang tahun ini, dibandingkan dengan kenaikan sekitar 24% di Thailand dan 21% di Singapura, berdasarkan data LSEG.

Padahal, tahun lalu Vietnam menjadi pasar saham dengan kinerja terbaik di Asia Tenggara seiring investor bersiap menghadapi reklasifikasi FTSE yang diharapkan. Meski begitu, sejumlah tantangan masih membayangi, terutama terkait batasan kepemilikan asing dan keterbatasan free float pada sejumlah perusahaan.

Pencapaian ini juga kembali memunculkan harapan Vietnam mendapat peningkatan peringkat dari MSCI di masa mendatang. Investor menilai penerapan mekanisme kliring melalui central counterparty (CCP), yang diperkirakan paling cepat mulai 2027, dapat membantu Vietnam memenuhi persyaratan akses pasar MSCI.

The Fed Naikkan Suku Bunga, Ini Proyeksi Harga Emas dari Goldman Sachs

Minggu, 20 September 2026 18:12 WIB

Sumber Investing.com, Erlangga Djumena

<https://money.kompas.com/read/2026/09/20/181200526/the-fed-naikkan-suku-bunga-ini-proyeksi-harga-emas-dari-goldman-sachs->

NEW YORK, KOMPAS.com - Goldman Sachs mempertahankan pandangan positif terhadap harga emas dan memperkirakan harganya dapat mencapai 5.400 dollar AS per ons pada akhir 2027.

Proyeksi tersebut tetap dipertahankan meskipun Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga pada pekan ini dan para ekonom memperkirakan bank sentral Amerika Serikat (AS) kembali menaikkan suku bunga pada Oktober.

Analisis Goldman Sachs Lina Thomas mengatakan, kenaikan suku bunga The Fed diperkirakan hanya akan memperlambat kenaikan harga emas dalam jangka pendek, bukan menghentikan tren kenaikan dalam jangka panjang.

"Karena itu, kami memperkirakan dampak kebijakan moneter yang lebih ketat terutama akan dirasakan melalui jalur kenaikan harga yang lebih lambat dalam jangka pendek, bukan melalui penurunan harga emas terminal," kata Thomas seperti dikutip dari Investing.com, Minggu (20/9/2026).

Goldman Sachs memangkas estimasi nilai wajar harga emas pada akhir tahun menjadi 4.650 dollar AS per ons, dari sebelumnya 4.900 dollar AS per ons.

Meski demikian, proyeksi tersebut masih berada di atas harga spot emas terbaru yang berada di kisaran 4.350 dollar AS per ons.

Thomas mengatakan, suku bunga yang lebih tinggi masih akan memberikan tekanan terhadap harga emas dalam jangka pendek, terutama melalui permintaan terhadap produk exchange-traded fund (ETF).

Namun, Goldman Sachs menilai sebagian besar dampak pengetatan kebijakan moneter telah tercermin dalam permintaan ETF.

Thomas juga memperkirakan The Fed masih akan memangkas suku bunga sebanyak tiga kali dalam periode September 2027 hingga Maret 2028. Dengan demikian, suku bunga terminal diperkirakan tetap tidak berubah.

Harga emas masih berpeluang naik

Goldman Sachs masih memperkirakan harga emas akan terus meningkat secara bertahap dalam jangka pendek.

Menurut Thomas, pembelian emas oleh bank sentral yang lebih kuat dari perkiraan dapat mengimbangi tekanan dari suku bunga yang lebih tinggi.

"Kami memperkirakan harga emas akan terus bergerak naik secara bertahap dalam jangka pendek," kata Thomas.

Pembelian emas oleh bank sentral menjadi salah satu faktor struktural utama yang menopang harga emas. Goldman Sachs memperkirakan faktor tersebut akan menyumbang hampir seluruh potensi kenaikan harga emas sebesar 23 persen hingga akhir 2027.

Pembelian emas oleh bank sentral saat ini mencapai sekitar 91 ton per bulan, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata sebelum 2022 yang hanya sekitar 17 ton per bulan.

Thomas mengatakan risiko pergerakan harga emas masih cenderung mengarah ke atas. Salah satu faktor pendukungnya adalah permintaan terhadap call option emas yang tetap kuat sebagai instrumen lindung nilai terhadap risiko kebijakan makroekonomi.

Namun, dia juga memperingatkan adanya potensi volatilitas yang lebih besar ke kedua arah.

"Sebaliknya, jalur The Fed yang secara signifikan lebih hawkish dapat memicu koreksi yang lebih tajam dari biasanya," kata Thomas.

Indonesia-Hong Kong Perkuat Koneksi Bisnis, Bidik Peluang Investasi Lintas Batas

Minggu, 20 September 2026 22:07 WIB

Ihfa Firdausya

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/935552/indonesia-hong-kong-perkuat-koneksi-bisnis-bidik-peluang-investasi-lintas-batas>

HUBUNGAN bisnis dan investasi antara Indonesia, Hong Kong, dan Tiongkok Daratan mendapat wadah baru melalui peluncuran Hong Kong Chamber of Commerce in Indonesia (HKCHAM Indonesia). Kamar dagang ini diarahkan menjadi platform untuk memperkuat konektivitas perdagangan, investasi, layanan profesional, serta jejaring bisnis antara ketiga pasar.

HKCHAM Indonesia resmi diluncurkan pada 17 September 2026 di Shangri-La Jakarta. Acara tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, pemimpin bisnis, kamar dagang dan asosiasi, lembaga keuangan, penyedia jasa profesional, serta komunitas bisnis Hong Kong, Tiongkok Daratan, dan Indonesia.

Peluncuran ini berlangsung di tengah upaya memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi Indonesia dengan Hong Kong. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan kolaborasi khusus dengan Hong Kong untuk memperluas investasi.

Ali mencatat investasi Hong Kong di Indonesia pada tahun lalu telah mencapai US\$10,6 miliar dan diharapkan kembali meningkat pada tahun ini. Ia juga menjelaskan Indonesia memiliki 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mencakup sektor industri, kesehatan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Pemerintah bersama sektor swasta, lanjut Ali, akan terus mendorong investasi baru melalui KEK dan kawasan industri. Pada saat yang sama, Danantara mengembangkan portofolio kawasan industrinya dari tujuh kawasan dengan potensi mencapai 20 kawasan.

Sejalan dengan meningkatnya target investasi nasional, pemerintah akan menempatkan KEK dan kawasan industri sebagai sarana penting untuk menarik modal dari Hong Kong dan pasar internasional.

“Kami ingin memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan investasi Hong Kong di Indonesia,” ujar Ali.

Dalam konteks tersebut, HKCHAM Indonesia mengusung misi “Terhubung melalui Hong Kong, terintegrasi dengan Tiongkok, dan berinvestasi di Indonesia”. Melalui platform tersebut, kamar dagang ini berupaya menghubungkan peluang di Indonesia dengan permodalan, layanan profesional, dan jejaring bisnis internasional Hong Kong, sekaligus memfasilitasi keterlibatan yang lebih erat dengan ekosistem bisnis Tiongkok Daratan.

HKCHAM Indonesia juga akan mendukung keselarasan strategis antara Rencana Lima Tahun ke-15 Tiongkok, inisiatif Go Global Hong Kong, dan Indonesia Emas 2045. Arah tersebut ditujukan untuk diterjemahkan ke dalam kemitraan komersial, peluang investasi, serta kerja sama bisnis yang konkret.

Chairman HKCHAM Indonesia Suwito mengatakan keberadaan kamar dagang tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan bisnis bilateral, tetapi juga bagaimana pelaku usaha dari ketiga pasar dapat membangun peluang secara bersama-sama.

“Pertanyaan yang lebih penting bukan hanya apa yang dapat ditawarkan Hong Kong kepada Indonesia, atau apa yang dapat ditawarkan Indonesia kepada Hong Kong, melainkan apa yang dapat kita capai bersama,” kata Suwito.

Dalam peluncuran tersebut, Suwito didampingi tiga Vice Chairman HKCHAM Indonesia, yakni Kim Ho, Timothy Chang, dan Andrew Sutedja, serta Secretary-General Horasis Lung. Mereka menegaskan komitmen untuk memanfaatkan peran Hong Kong sebagai jembatan kerja sama dan pertukaran bisnis antara Tiongkok Daratan dan Indonesia, khususnya dalam bidang keuangan, perdagangan, dan investasi.

Vice Chairman HKCHAM Indonesia Kim Ho mengatakan Hong Kong memiliki peran khas dalam menghubungkan Tiongkok Daratan dan Indonesia melalui pasar keuangan internasional, jaringan perdagangan, serta keahlian profesional.

“Kami berharap semakin banyak perusahaan dan profesional Hong Kong berpartisipasi dalam pertumbuhan Indonesia serta membangun kemitraan jangka panjang di sini,” ujarnya.

Sementara itu, Vice Chairman Timothy Chang menyampaikan penghargaan kepada Hong Kong Economic and Trade Office di Jakarta dan Hong Kong Trade Development Council atas dukungan serta kemitraan dalam mendorong pembentukan kamar dagang dan pelaksanaan misinya ke depan.

Vice Chairman Andrew Sutedja mengatakan Hong Kong dan Indonesia memiliki sistem hukum, pengetahuan pasar, dan kapabilitas profesional yang saling melengkapi.

“Dengan menghubungkan kekuatan tersebut, kita dapat memberikan kejelasan dan keyakinan yang lebih besar bagi pelaku usaha dalam mengejar peluang lintas batas,” ujarnya.

Peluncuran HKCHAM Indonesia turut dihadiri Libera Cheng Ching-mon, Director-General Hong Kong Economic and Trade Office di Jakarta, serta Horasis Lung, Director of Indonesia Hong Kong Trade Development Council.

Upacara peresmian ditandai dengan penekanan tombol seremonial dan animasi peluncuran HKCHAM Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan foto resmi Dewan Pengurus.

Go global alliance

Selain memperkenalkan HKCHAM Indonesia, kegiatan tersebut juga menandai dimulainya rencana pembentukan Go Global Alliance. Aliansi ini dirancang sebagai inisiatif unggulan untuk mendukung

agenda Go Global Hong Kong di Indonesia dengan mempertemukan mitra kelembagaan dan komersial untuk mengidentifikasi serta mengembangkan peluang bisnis dan investasi lintas batas.

HKCHAM Indonesia berencana meresmikan Go Global Alliance dalam acara unggulannya pada 3 Desember 2026. Dengan demikian, peluncuran pada September menjadi tahap awal dari program keterlibatan yang lebih luas untuk memperkuat hubungan kelembagaan, mengidentifikasi bidang kerja sama komersial, serta menciptakan koneksi praktis di antara bisnis dan organisasi di Indonesia, Hong Kong, dan Tiongkok Daratan.

Rangkaian acara juga diisi fireside chat bertajuk “Mengapa Indonesia Merupakan Pasar dengan Potensi Investasi yang Besar”. Sesi tersebut menghadirkan Daniel Ginting, Managing Director, Legal & Compliance, Danantara Indonesia, dalam percakapan bersama Andrew Sutedja.

Diskusi tersebut membahas lanskap investasi Indonesia dan peluang yang muncul dari perkembangan ekonomi nasional, sekaligus menjadi bagian dari upaya HKCHAM Indonesia memberikan perspektif kepada dunia usaha mengenai potensi investasi di Indonesia.

Perspektif perusahaan Hong Kong

Pengalaman pelaku usaha menjadi bagian lain dalam agenda peluncuran melalui diskusi panel bertajuk “Berbisnis di Indonesia: Perspektif Perusahaan Hong Kong”.

Panel yang dimoderatori Hugo Chan, Board Member HKCHAM Indonesia, tersebut menghadirkan Tony Sham, Country Manager Indonesia, Cathay Pacific Airways; Ainsley Mann, President Director, PT Swire Investments Indonesia; Pak Lam Brian Chan, Vice President INACHAM Hong Kong dan CEO PT ELL Environmental Indonesia; serta Stephen Kasima, Senior Vice President, Global Network Banking, HSBC Indonesia.

Diskusi memberikan pandangan dari perusahaan dan pemimpin bisnis yang memiliki pengalaman langsung menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Perspektif tersebut melengkapi pembahasan dari pemerintah dan institusi mengenai peluang kerja sama ekonomi dan investasi.

Ke depan, HKCHAM Indonesia menargetkan peran sebagai platform praktis yang menghubungkan perusahaan, investor, penyedia jasa profesional, kamar dagang, serta institusi terkait pemerintah dengan peluang di Indonesia, Hong Kong, dan Tiongkok Daratan.

Tujuan strategisnya mencakup penguatan hubungan kelembagaan dan komersial, promosi peran Hong Kong sebagai superconnector, peningkatan pemahaman mengenai prioritas bisnis, perdagangan, investasi, dan ekonomi digital Indonesia, serta fasilitasi kerja sama konkret antarpelaku usaha di kawasan.

Sekitar 100 tamu menghadiri jamuan peresmian yang digelar di Indonesia Room, Shangri-La Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan oleh HKCHAM Indonesia dengan Hong Kong Economic and Trade Office di Jakarta (HKETO Jakarta) dan Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) sebagai penyelenggara bersama.

Hong Kong Chamber of Commerce in Indonesia merupakan platform bisnis yang dibentuk untuk memfasilitasi kerja sama komersial antara Hong Kong dan Indonesia sekaligus memperkuat konektivitas dengan Tiongkok Daratan dan pasar internasional.

Dengan misi “Terhubung melalui Hong Kong, terintegrasi dengan Tiongkok, dan berinvestasi di Indonesia”, HKCHAM Indonesia berupaya menghubungkan peluang bisnis di Indonesia dengan permodalan, layanan profesional, dan jaringan internasional Hong Kong, seraya mendukung keterlibatan kelembagaan dan komersial yang lebih erat di kawasan. (E-1)

Pemerintah Nyatakan Utang BLBI Lunas, Suahasil: Ini Prestasi Kita

Minggu, 20 September 2026 19:22 WIB

Irvan Sihombing

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/935503/pemerintah-nyatakan-utang-blbi-lunas-suahasil-ini-prestasi-kita>

MENTERI Keuangan Suahasil Nazara mengonfirmasi bahwa seluruh kewajiban surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terkait krisis moneter 1997–1998 telah dinyatakan lunas pada Agustus 2026. Pelunasan ini menandai berakhirnya beban fiskal dari instrumen utang yang telah berusia hampir tiga dekade tersebut.

Suahasil menyebut pencapaian ini sebagai sebuah prestasi bagi manajemen keuangan negara. Menurutnya, penyelesaian kewajiban ini dilakukan secara bertahap, di mana instrumen obligasi rekapitalisasi (obligasi rekap) sebelumnya telah lebih dulu dilunasi pada Juli 2020.

“Sekarang, surat utang yang dalam rangka penanganan krisis 97–98 kemarin tuntas kami selesaikan pada bulan Agustus. Ini juga adalah suatu prestasi kita,” ujar Suahasil dalam keterangannya melalui kanal YouTube resmi Kementerian Keuangan, Minggu (20/9).

Pemanfaatan Surplus Bank Indonesia

Proses pelunasan surat utang BLBI ini didanai melalui mekanisme setoran surplus Bank Indonesia (BI) kepada Kas Negara. Berdasarkan hasil audit buku tahun 2025, ditemukan adanya surplus pada bank sentral yang kemudian dialokasikan sesuai regulasi yang berlaku.

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan melaporkan telah menerima pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sebesar Rp58 triliun yang bersumber dari surplus tersebut. Dana inilah yang digunakan sebagai sumber utama untuk melunasi sisa kewajiban surat utang negara (SUN) peninggalan krisis masa lalu.

Ringkasan Pelunasan Kewajiban Krisis 1997-1998:

Jenis Kewajiban	Waktu Pelunasan	Sumber Dana
Obligasi Rekapitalisasi	Juli 2020	APBN
Surat Utang Penanganan BLBI	Agustus 2026	Surplus BI (KND) Rp58 Triliun

Suahasil menjelaskan bahwa penggunaan surplus BI telah diatur secara spesifik untuk membayar kewajiban atau penyelesaian surat utang RI. Dengan tuntasnya pembayaran pada Agustus kemarin, pemerintah berhasil menutup salah satu lembaran beban utang sejarah yang paling signifikan dalam perjalanan ekonomi Indonesia.

“Ada beberapa jenis obligasi kami keluarkan ketika itu. Nah, ada yang sudah lunas di Juli 2020, ada yang lunas di Agustus kemarin,” pungkasnya. (Ant/I-1)

Harga Pangan Pekan Ini: Hortikultura Fluktuatif, Sembako Stabil

Minggu, 20 September 2026 11:00 WIB

Sabrina Mulia Rhamadanty

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122124/harga-pangan-pekan-ini-hortikultura-fluktuatif-sembako-stabil/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pergerakan harga pangan di pasar tradisional nasional sepanjang pekan ketiga September 2026, menunjukkan dinamika yang beragam.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) selama periode Senin, (14/9/2026) hingga Minggu, (20/9/2026) beberapa komoditas hortikultura seperti kelompok cabai dan bawang mengalami penyesuaian harga akibat perubahan pasokan dari wilayah sentra produksi, sementara komoditas beras dan sembako relatif stabil.

Komoditas hortikultura kelompok cabai mencatatkan fluktuasi paling tinggi akibat pasokan harian di pasar grosir yang berubah-ubah. Harga cabai merah keriting mencatat rata-rata harga sebesar Rp42.500/kg (atau naik 2,4%), pun dengan harga cabai rawit merah tercatat rata-rata Rp51.200/kg atau naik 3,1%.

Sementara, harga cabai rawit hijau justru mencatat penurunan harga dengan rata-rata harga sebesar Rp38.000/kg atau turun 1,3%. Selain itu, Harga cabai merah besar: Rata-rata Rp40.800/kg (turun 0,9%).

Sementara itu dengan amannya pasokan bawang dari daerah penghasil utama, pergerakan harga bawang cenderung stabil dengan rata-rata harga bawang putih mencapai Rp41.000/kg atau stabil dan harga bawang merah mencatat rata-rata Rp29.500/kg atau turun 1,7%.

Harga beras nasional terpantau stabil di seluruh wilayah perkotaan maupun daerah penopang pasokan. Mulai dari beras kualitas super hingga beras kualitas bawah.

Harga beras kualitas super I dan super II mencatatkan rata-rata harga sebesar Rp16.800/kg untuk Super I (stabil) dan Rp16.200/kg untuk Super II (stabil).

Harga beras kualitas medium I dan harga beras kualitas medium II mencatat rata-rata Rp15.100/kg untuk Medium I atau turun 0,3% dan Rp14.700/kg untuk Medium II (stabil).

Harga beras kualitas bawah I dan beras bawah II mencatat rata-rata Rp13.800/kg untuk Bawah I (stabil) dan Rp13.400/kg untuk Bawah II (stabil).

Komoditas gula pasir juga mencatatkan keseimbangan harga pasokan di tingkat pedagang eceran dengan harga gula pasir premium yang tercatat memiliki rata-rata Rp18.500/kg (naik 0,5%) dan harga gula pasir kualitas lokal yang mencatat Rata-rata Rp17.200/kg (stabil).

Daging dan telur ayam ras bergerak positif tipis seiring berimbangnya permintaan konsumen pasar harian. dengan harga telur ayam ras segar mencatat harga rata-rata Rp29.800/kg (naik 0,7%) dan harga daging ayam ras segar dengan rata-rata Rp36.500/kg (naik 1,1%).

Pada kelompok minyak goreng, stok nasional yang terjamin menjaga pergerakan harga tetap dalam rentang normal. Harga minyak goreng kemasan bermerek 2 memiliki harga Rata-rata Rp20.200/liter (stabil). Harga minyak goreng kemasan bermerek 1 dengan rata-rata Rp21.500/liter (turun 0,5%) dan harga minyak goreng curah mencatatkan rata-rata Rp16.300/liter (turun 0,6%).

Harga komoditas daging sapi yang menunjukkan konsistensi stabilitas tinggi sepanjang sepekan penuh tanpa fluktuasi berarti dengan harga daging sapi kualitas I dengan rata-rata Rp138.500/kg (stabil) dan harga daging sapi kualitas II dengan rata-rata Rp129.000/kg (stabil).

Petani Ungkap Biang Kerok Harga Cabai Rawit Hampir Tembus Rp 100 Ribu/Kg

Minggu, 20 Sep 2026 17:30 WIB

Heri Purnomo

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8671096/petani-ungkap-biang-kerok-harga-cabai-rawit-hampir-tembus-rp-100-ribu-kg>

Jakarta - Harga cabai di pasaran mengalami kenaikan harga. Bahkan cabai rawit merah sudah hampir menyentuh Rp 100.000 per kilogram (kg).

Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Abdul Hamid mengakui bahwa saat ini seluruh harga cabai sedang naik, terlebih untuk jenis cabai rawit merah. Ia mengatakan harga cabai rawit merah di tingkat petani sudah mencapai Rp 65.000 per kg. Dan akhirnya di pasar harga cabai rawit merah bisa mencapai Rp 90.000 per kg hingga Rp 100.000 per kg.

"Cabai rawit Cabai rawit memang ada kenaikan ya. Kenaikan di petani itu sekitar Rp 60.000 per kg sampai Rp 65.000 per kg. Jadi pas sampai (masyarakat) Rp 100. Jadi memang kondisi pasar ini sekarang," ujarnya saat dihubungi detikcom, Minggu (20/9/2026).

Ia mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah terjadi di tengah terbatasnya stok. Saat ini, produksi cabai lebih banyak berasal dari wilayah dataran rendah.

"Nah sementara produksi, produksi ini sekarang hanya ada di dataran rendah, kalau dataran tinggi sudah nggak ada lagi," terangya.

Abdul menambahkan, jika kondisi tanaman cabai hanya ada di dataran rendah terus terjadi karena cuaca kemarau yang berkepanjangan. Maka kemungkinan besar, harga cabai bakal terus naik.

"Apakah akan naik lagi? Tergantung dari musim, kalau seandainya kondisinya begini terus sampai November, bakal susah kita," katanya.

Ia pun menjelaskan bahwa penanaman baru diperkirakan berlangsung pada Oktober hingga November nanti tidak akan menambah jumlah stok yang ada, karena hanya dihasilkan dari dataran rendah saja. Kondisi normal kata Abdul akan terjadi pada Desember-Januari, namun pada waktu itu, terdapat tantangan musim hujan.

"Kalau sananya nggak ada. Gagal semua ya bisa-bisa sampai Rp 100.000-Rp 120.000/kg (di masyarakat) di petani ya Rp 70.000-Rp 80.000/kg," ujarnya.

Sebagai informasi, Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia (BI) pada Minggu (20/9/2026), cabai menjadi komoditas pangan dengan kenaikan tertinggi. Di mana cabai merah keriting naik sebesar 9,42% atau sekitar Rp 5.950 per kg menjadi Rp 69.100 per kilogram (kg).

Kemudian harga cabai rawit merah juga naik sebesar 6,78% atau sekitar Rp 6.100 per kg menjadi Rp 96.100 per kg. Kenaikan tinggi juga dialami cabai merah besar hingga 6.23% atau sekitar Rp 3.400 per kg menjadi Rp 58.000 per kg. Lalu untuk cabai rawit hijau naik sebesar 4,81% atau Rp 3.100 per kg menjadi Rp 67.600 per kg.

HDDAP Dorong Ekspor Kubis Dairi ke Asia, Petani Bisa Untung 3 Kali Lipat

Minggu, 20 Sep 2026 14:02 WIB

Nada Herwando Kartika

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8671054/hddap-dorong-ekspor-kubis-dairi-ke-asia-petani-bisa-untung-3-kali-lipat>

Jakarta - Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Kabupaten Dairi mendorong pengembangan kubis untuk menembus pasar ekspor. Langkah itu dilakukan melalui program Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP).

Upaya ini dilakukan dengan memperkuat budidaya berstandar ekspor, meningkatkan kualitas pascapanen, dan membangun rantai pasok berkelanjutan guna meningkatkan daya saing serta pendapatan petani kubis di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Kabupaten Dairi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra hortikultura nasional. Kondisi tanah vulkanik yang subur, dengan ketinggian wilayah antara 700 hingga 1.450 meter di atas permukaan laut mendukung pengembangan kubis dataran tinggi yang memiliki karakteristik renyah dan padat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi tahun 2025, luas panen kubis tercatat lebih dari 549 hektare. Produktivitas lahan berada pada kisaran 6 hingga 7,3 ton per hektare. Dengan potensi tersebut, produksi kubis Kabupaten Dairi saat ini diperkirakan mencapai 5.000 hingga 6.000 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Melalui modernisasi pertanian dan penguatan rantai pasok, pemerintah daerah memproyeksikan alokasi produksi untuk pasar ekspor sebesar 100 hingga 200 ton per bulan pada tahap awal pengembangan. Hal ini akan didukung penerapan standar mutu, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan kapasitas penanganan pascapanen.

Pengembangan pasar ekspor membuka peluang peningkatan nilai ekonomi bagi petani kubis di Dairi. Berdasarkan proyeksi yang disampaikan, harga kubis di pasar domestik berada pada kisaran Rp2.500 hingga Rp 4.000 per kilogram, dengan keuntungan bersih sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram.

Sementara itu, harga kubis untuk pasar ekspor diproyeksikan mencapai Rp 7.000 hingga Rp 10.000 per kilogram. Setelah memperhitungkan penyesuaian biaya produksi, termasuk penyortiran dan pengemasan yang diperkirakan mencapai Rp 2.500 hingga Rp 3.000 per kilogram, keuntungan bersih petani diproyeksikan berada pada kisaran Rp3.500 hingga Rp5.000 per kilogram.

Dengan demikian, pengembangan pasar ekspor berpotensi meningkatkan keuntungan petani sekitar dua hingga tiga kali lipat dibandingkan penjualan di pasar domestik. Besaran keuntungan tersebut tetap bergantung pada harga aktual, biaya produksi, standar mutu, dan efisiensi rantai pasok.

Varietas Green Nova F1 menjadi salah satu varietas yang dikembangkan petani karena memiliki karakteristik yang sesuai untuk kebutuhan pasar dataran tinggi, antara lain bobot ideal, knop padat, dan daya simpan yang mendukung proses distribusi.

Kubis Dairi Bidik Pasar Asia Tenggara dan Asia Timur

Pengembangan ekspor kubis Dairi diarahkan untuk menyasar pasar Asia Tenggara dan Asia Timur. Malaysia dan Singapura menjadi target pasar potensial dengan kebutuhan pasokan yang diharapkan berlangsung secara rutin.

Selain itu, Taiwan menjadi salah satu pasar yang dituju karena memiliki persyaratan mutu dan kesegaran produk yang perlu dipenuhi melalui penguatan sistem produksi dan penanganan pascapanen.

Untuk memenuhi persyaratan pasar internasional, petani didorong menerapkan Good Agricultural Practices (GAP), termasuk pengelolaan budidaya yang baik, penggunaan pestisida secara tepat, dan pengendalian residu sesuai ketentuan negara tujuan ekspor.

Penerapan sorting and grading juga menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi mutu. Kubis yang dikembangkan untuk pasar ekspor ditargetkan memiliki bobot antara 1,5 hingga 2,5 kilogram per knop, sesuai dengan spesifikasi dan permintaan calon pembeli.

Di sisi kelembagaan, pemerintah daerah memperkuat peran kelompok tani dan koperasi untuk mendukung konsolidasi produksi, kontinuitas pasokan, serta peningkatan posisi tawar petani dalam rantai pemasaran.

Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura Kementerian Pertanian sekaligus Project Director HDDAP, Freddy Lumban Gaol, menegaskan bahwa pengembangan kubis di Kabupaten Dairi merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat hilirisasi hortikultura berbasis kawasan dan meningkatkan nilai tambah produk petani.

"Program HDDAP tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mendorong penguatan rantai nilai hortikultura dari hulu hingga hilir. Kabupaten Dairi memiliki potensi pengembangan kubis yang perlu dioptimalkan melalui penerapan praktik budidaya yang baik, peningkatan kualitas pascapanen, dan penguatan akses pasar. Kami ingin memastikan bahwa produk yang dihasilkan petani mampu memenuhi persyaratan mutu dan memiliki daya saing di pasar domestik maupun internasional," ujar Freddy dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9/2026).

Freddy mengatakan pengembangan orientasi ekspor perlu didukung perencanaan produksi yang terukur, kelembagaan petani yang kuat, serta kemitraan berkelanjutan dengan pelaku usaha.

"Akses pasar ekspor harus dibangun melalui kesiapan produksi, konsistensi mutu, dan kepastian pasokan. Karena itu, pendampingan melalui HDDAP diarahkan untuk memperkuat kapasitas petani dan kelembagaan, sehingga peluang pasar yang terbuka dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi petani kubis di Dairi," sambungnya.

Dokter jebolan Universitas ternama di Jepang itu tak menampik, jika penguatan rantai pasok dan peningkatan kapasitas petani menjadi bagian penting dalam membangun sistem hilirisasi hortikultura yang berorientasi pada mutu dan kebutuhan pasar.

HDDAP Dorong Modernisasi Pertanian di Kabupaten Dairi

Pengembangan kubis Dairi mendapat dukungan melalui sinergi antara Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian melalui program HDDAP.

Program HDDAP merupakan upaya pengembangan hortikultura di wilayah lahan kering yang diarahkan untuk memperkuat modernisasi pertanian, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, memperbaiki penanganan pascapanen, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan rantai pasok.

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas, memenuhi persyaratan mutu pasar, dan memperluas akses pemasaran, termasuk peluang ekspor.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi Kesti Rusda Angkat mengatakan kubis Dairi memiliki potensi untuk bersaing di pasar internasional melalui pendampingan dan pengembangan yang berkelanjutan.

"Kubis Dairi memiliki kualitas premium yang tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Melalui pendampingan dari hulu ke hilir dalam program HDDAP bersama Direktorat Jenderal Hortikultura, Dairi siap melakukan pengembangan kubis seluas lebih dari 215 hektare. Kami berkomitmen mendampingi petani agar mampu memenuhi standar mutu serta menjaga kontinuitas pasokan ekspor secara berkelanjutan," ujar Kesti.

Ia mengatakan, pengembangan kawasan kubis melalui HDDAP diharapkan dapat memperkuat daya saing produk lokal sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani.

Petani Harapkan Akses Pasar yang Lebih Luas

Dukungan terhadap program HDDAP juga disambut positif oleh petani kubis di Kabupaten Dairi. Juragan Sihombing, petani dari Kelompok Tani Martabe, Desa Lae Hole II, Kecamatan Parbuluan, berharap program tersebut dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil produksi petani.

"Program HDDAP sangat bermanfaat bagi kami. Kami berharap program ini dapat membuka akses pasar ekspor. Selama ini, kami sangat bergantung pada harga pasar lokal yang kerap berfluktuasi," kata Juragan.

Ia menilai pendampingan budidaya dan penguatan akses pasar menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepastian pemasaran hasil produksi petani.

"Dengan adanya pendampingan budidaya berstandar ekspor dan kepastian pembeli luar negeri, kami optimistis pendapatan petani dapat meningkat secara signifikan," ujarnya.

Pengembangan kubis di Kabupaten Dairi melalui program HDDAP diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat hilirisasi hortikultura, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta memperluas peluang pasar bagi petani Indonesia.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelembagaan petani, dan pelaku usaha, pengembangan komoditas kubis diarahkan untuk membangun sistem produksi yang berdaya saing, memenuhi standar pasar, dan berkelanjutan.

Menkeu Suahasil Tegaskan Batas Defisit APBN 3 Persen: Kami Taat Undang-Undang

Minggu, 20 September 2026, 17:40 WIB

Debrinata Rizky, Erlangga Djumena

<https://money.kompas.com/read/2026/09/20/174000626/menkeu-suahasil-tegaskan-batas-defisit-apbn-3-persen--kami-taat-undang-undang?page=all#page2>

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap berpedoman pada batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hal ini disampaikan Suahasil merespons wacana Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang mendorong agar batas defisit 3 persen tidak diperlakukan sebagai angka absolut dalam kebijakan fiskal Indonesia.

Suahasil mengatakan Kementerian Keuangan akan tetap bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Saat ini kita bekerja dengan undang-undang yang ada. Undang-undang keuangan negara, Undang-Undang 17 Tahun 2003. Kita mempedomani itu,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2026).

Menurut dia, berbagai wacana mengenai batas defisit APBN telah muncul sejak sebelumnya, tetapi pemerintah tetap akan berpegang pada aturan yang berlaku.

“Bahwa wacana, wacana selalu ada dari zaman lalu, selalu ada. Namun kami Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal akan tetap bekerja dengan undang-undang yang ada,” lanjutnya.

Suahasil mengatakan pemerintah menggunakan angka 3 persen sebagai batas maksimum defisit APBN.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit tetap dalam batas tersebut.

“Kita menggunakan 3 persen sebagai maksimum defisit APBN. Dan saya komit untuk itu,” ujarnya.

Karena itu, dalam pengajuan APBN 2027, pemerintah menggunakan estimasi defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB.

Menurut Suahasil, angka tersebut juga telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato saat mengantarkan APBN beserta nota keuangannya.

Ia kembali menegaskan Kementerian Keuangan akan menjalankan pengelolaan fiskal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami bekerja dengan itu. Karena itu saya ingin memastikan Kementerian Keuangan taat undang-undang,” ujarnya.

Suahasil juga meminta agar diskusi mengenai batas defisit dilakukan secara konstruktif.

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan sektor keuangan tidak hanya berkaitan dengan angka yang tercantum di atas kertas, tetapi juga dipengaruhi ekspektasi dan harapan.

“Tapi kadang-kadang dia bekerja berdasarkan ekspektasi, harapan, ekspektasi. Nah kita enggak ingin memberikan ekspektasi-ekspektasi yang kemudian menyulitkan pengelolaan dari fiskal kita sendiri,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong agar batas defisit APBN sebesar 3 persen terhadap PDB tidak diperlakukan sebagai angka yang absolut.

Misbakhun mempertanyakan dasar menjadikan angka tersebut sebagai batas yang harus selalu dipatuhi, terutama ketika pemerintah membutuhkan ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Orang mengatakan defisit 3 persen, saya tanya di pasal berapa, enggak ada yang bisa menyebutkan. Defisit itu bukan norma. Defisit itu enggak ada di norma,” kata Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI pada Kamis (17/9/2026).

Menurut Misbakhun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa apabila APBN mengalami defisit, pemerintah perlu menyiapkan rencana pembiayaan utang.

Sementara angka 3 persen muncul dalam penjelasan undang-undang tersebut.

Misbakhun menilai pembahasan mengenai defisit tidak semata-mata berkaitan dengan apakah angkanya berada di bawah atau di atas 3 persen, tetapi juga mengenai kecukupan ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Ia kemudian mendorong pembahasan lebih mendasar mengenai asal-usul batas defisit 3 persen serta relevansinya dengan kondisi Indonesia saat ini.

Menurut dia, Indonesia memiliki momentum bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong transformasi ekonomi dan keluar dari middle income trap.

Dongkrak Ekonomi Lokal, Ratusan Produk UMKM dan BUMDes Dipamerkan

Minggu, 20 September 2026

Penulis: Kontributor Kab Jepara, Editor: Di, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dongkrak-ekonomi-lokal-ratusan-produk-umkm-dan-bumdes-dipamerkan/>

JEPARA — Ratusan produk unggulan dari 184 BUMDesa dan 9 BUMDesa Bersama turut meramaikan ajang Gebyar Produk BUMDesa di Alun-alun 1 Jepara, Jumat (18/9/2026). Pameran yang berlangsung hingga Minggu itu dibuka oleh Bupati Jepara Witiarso Utomo, sebagai komitmen nyata untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa.

Tak hanya melihat produk yang dipamerkan, bupati juga mencicipi beragam makanan, sekaligus memborong dagangan di sejumlah gerai.

“Jumlah ini menunjukkan besarnya potensi sekaligus tanggung jawab yang kita miliki, untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang semakin kuat,” kata Witiarso.

Dia berharap, kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih menghadapi tantangan.

“Alhamdulillah berjalan sukses dan ramai. Berlangsung sampai hari Minggu, bisa meningkatkan ekonomi para UMKM Jepara,” ujarnya.

Witiarso menilai, potensi produk unggulan desa di Jepara sangat besar. Karena itu, kegiatan seperti ini diharapkan mampu menjadi daya Tarik, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di masyarakat.

“Potensi sangat besar. Mudah-mudahan di tengah ekonomi yang agak sulit, ini menjadi daya tarik menarik ekonomi masyarakat. Masyarakat bisa membelanjakan uangnya dengan maksimal,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia juga mendorong, agar kualitas produk desa dan UMKM terus ditingkatkan. Produk-produk tersebut diharapkan tidak hanya dipasarkan dalam kegiatan pameran, tetapi juga dapat menjadi bagian dari sektor pariwisata Jepara.

“Harapannya, ditingkatkan kualitasnya dan bisa berpartisipasi untuk pariwisata di Kabupaten Jepara, sehingga barangnya bisa ditemukan di outlet-outlet yang wisatawan bisa mendapatkan dengan mudah,” tuturnya.

Menurut Witiarso, pengembangan produk desa juga membutuhkan kerja sama antardesa, agar potensi ekonomi yang ada dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Dari desa, kita bangun usaha yang sehat, lapangan kerja yang lebih luas, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur BUMDes Bulungan Sulistiono menilai, kegiatan pameran produk seperti ini positif untuk mengangkat produk unggulan desa. Pihaknya membawa produk unggulan berupa olahan jamur, jahe wangi dan kunir asem agar lebih dikenal luas.

“Semoga transaksinya juga bagus, baik langsung maupun by order. Pelaku UMKM di desa juga lebih semangat kalau pameran seperti ini sering diadakan,” tandasnya.

Bupati Wonosobo Dorong Akses Kredit Perbankan dan Penguatan UMKM untuk Genjot Ekonomi

Minggu, 20 September 2026 17:57 WIB

<https://jateng.tribunnews.com/wonosobo-hebat/1266920/bupati-wonosobo-dorong-akses-kredit-perbankan-dan-penguatan-umkm-untuk-genjot-ekonomi>

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mendorong perluasan akses masyarakat terhadap layanan perbankan dan pembiayaan untuk memperkuat perekonomian daerah.

Menurut Afif, kemudahan masyarakat mendapatkan akses kredit dan berbagai produk perbankan diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal tersebut disampaikan Afif saat menghadiri Gebyar Undian Tabungan Tamades dan Deposito PT BPR BKK Wonosobo Tahun 2026 di Sasana Adipura Kencana Wonosobo, Minggu (20/9/2026).

"Semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan kredit dan produk perbankan lainnya, ditambah jaringan kantor PT BPR BKK Wonosobo yang tersebar di sejumlah kecamatan, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Wonosobo," ujar Afif.

Dia juga menilai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas dapat menjadi sarana memperkenalkan layanan perbankan sekaligus mendorong budaya menabung dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan finansial.

Pj Sekda Kabupaten Wonosobo, Mohamad Kristijadi menambahkan, lembaga keuangan daerah memiliki posisi strategis dalam menopang perekonomian masyarakat.

Dia menyebut, kinerja PT BPR BKK Wonosobo menunjukkan perkembangan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Penempatan dana masyarakat termasuk penyaluran kredit telah mencapai Rp233,7 miliar, tabungan Rp122,2 miliar, deposito Rp84 miliar, serta mencatatkan laba berjalan Rp4,5 miliar," kata Kristijadi.

Menurutnya, dukungan pembiayaan terhadap UMKM juga cukup besar. Penyaluran kredit ke sektor UMKM disebut telah mencapai 64,18 persen.

Kristijadi berharap, kontribusi tersebut terus diperkuat, termasuk melalui penyaluran KUR Daerah Tahun 2026.

"Ke depan, kami berharap kontribusi tersebut dapat semakin diperkuat, termasuk melalui penyaluran KUR Daerah Tahun 2026," ujarnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian, tertib administrasi, kesehatan bank, tata kelola yang baik, dan penerapan zero fraud.

"Kepercayaan masyarakat adalah modal utama yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya," katanya.

Di tengah perkembangan industri keuangan dan teknologi, Pemkab Wonosobo juga mendorong transformasi layanan melalui digitalisasi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan literasi keuangan masyarakat.

Masyarakat diharapkan semakin memahami produk keuangan sekaligus waspada terhadap praktik investasi ilegal dan pinjaman dari bank keliling atau rentenir yang berpotensi merugikan.

Sementara itu, Direktur Utama PT BPR BKK Wonosobo, Darsono mengatakan, pihaknya ingin semakin dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi mitra dalam kebutuhan permodalan maupun budaya menabung.

"Kami berharap masyarakat dapat menerima kami sebagai Bank Perekonomian Rakyat milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, sehingga kami bisa bersinergi, baik dalam hal pinjaman modal kerja, menabung, maupun pelayanan-pelayanan lain yang kami miliki," ujarnya.

Ke depan, PT BPR BKK Wonosobo juga direncanakan mengikuti proses merger menjadi BPR BKK Jawa Tengah mulai tahun depan sesuai penataan dan integrasi BPR BKK di Jawa Tengah berdasarkan regulasi OJK.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kelembagaan dan kapasitas layanan keuangan kepada masyarakat.

Darsono menambahkan, Gebyar Tamades 2026 dikemas lebih meriah dengan melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM.

Fun walk diikuti lebih dari 3.000 peserta, dengan 3.000 porsi mi ayam gratis dari pedagang lokal. BPR BKK Wonosobo juga menyalurkan bantuan pendidikan sebesar Rp47 juta untuk pelajar jenjang TK hingga SMK.

"Kami ingin kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi nasabah, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Darsono.

Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara masyarakat, UMKM, dan pemerintah daerah dalam mendukung perekonomian Wonosobo. (*)

Pejabat The Fed: Tekanan Inflasi AS Meluas ke Berbagai Sektor

Senin, 21 September 2026 11:40 WIB

Catarina Saraiva

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122189/pejabat-the-fed-tekanan-inflasi-as-meluas-ke-berbagai-sektor/2>

Bloomberg, Gubernur Federal Reserve (The Fed) Bank of Minneapolis Neel Kashkari mengatakan inflasi masih terlalu tinggi dan tekanan harga telah meluas, tidak lagi hanya berasal dari lonjakan harga minyak akibat perang Iran.

"Inflasi yang dirasakan masyarakat Amerika setiap hari jauh lebih luas daripada sekadar harga minyak—tekanannya ada di seluruh aspek perekonomian," kata Kashkari dalam wawancara dengan Sunday Morning Futures di Fox News.

Para pembuat kebijakan The Fed dengan suara bulat memutuskan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dalam pertemuan 15-16 September, kenaikan suku bunga pertama sejak 2023. Langkah tersebut bertujuan membantu meredam inflasi yang belum mencapai target The Fed sebesar 2% selama lebih dari lima tahun.

Para pejabat The Fed semakin khawatir bahwa inflasi tidak hanya terbatas pada kategori barang dan jasa yang terdampak konflik di Timur Tengah atau tarif. Kashkari mengatakan terdapat bukti bahwa inflasi juga terjadi di sektor jasa. Menurutnya, tugas The Fed adalah menurunkan inflasi hingga mencapai target, dan bank sentral AS memiliki perangkat kebijakan untuk melakukannya.

Kepala The Fed Minneapolis tersebut merupakan satu dari tiga pejabat yang berbeda pendapat dalam keputusan untuk mempertahankan suku bunga pada Juli. Mereka saat itu lebih memilih menaikkan suku bunga. Kashkari memperingatkan bahwa menunggu terlalu lama untuk menaikkan suku bunga dapat membuat inflasi semakin mengakar dan memerlukan tindakan yang lebih agresif dari The Fed.

Kashkari mengatakan perekonomian AS tetap sangat tangguh meskipun menghadapi konflik geopolitik dan persoalan perdagangan, sementara pasar tenaga kerja masih kuat.

“Harapan saya adalah—ketika beberapa konflik tersebut mulai mereda—pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat mengambil alih dan mudah-mudahan membawa inflasi turun,” kata Kashkari.

“Mudah-mudahan proses disinflasi dapat berlanjut, yang akan membuat tugas The Fed jauh lebih mudah.”

Yen Jepang Rentan Loyo Saat Hari Libur, Investor Kecewa Sikap BOJ

Senin, 21 September 2026 06:40 WIB

Hideyuki Sano dan Umesh Desai

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122156/yen-jepang-rentan-loyo-saat-hari-libur-investor-kecewa-sikap-boj/2>

Bloomberg, Yen rentan mengalami pergerakan tajam dan pelemahan lebih lanjut dalam sepekan ke depan.

Libur selama tiga hari di Jepang diperkirakan mengurangi likuiditas perdagangan, sementara investor kecewa karena bank sentral tidak memberikan panduan yang lebih tegas mengenai laju kenaikan suku bunga di masa mendatang.

Yen stabil di sekitar ¥156,86 per dolar AS pada Senin setelah merosot hingga 1,3% pada Jumat, ketika dua anggota dewan Bank of Japan (BOJ) berbeda pendapat dan menolak keputusan kenaikan suku bunga.

Laporan selanjutnya yang menyebut pejabat BOJ telah menghubungi pelaku pasar untuk melakukan rate check, yang merupakan langkah pendahuluan sebelum kemungkinan pembelian mata uang, hanya mampu memangkas sebagian kerugian yen. Yen merosot lebih dari 2% sepanjang pekan lalu, penurunan mingguan terbesar dalam hampir satu tahun.

“Seperti yang terjadi pada sebagian besar kesempatan belakangan ini ketika yen memasuki rapat BOJ dengan momentum yang kuat, BOJ telah menghentikan pergerakan tersebut,” tulis James Reilly, ekonom pasar senior di Capital Economics, dalam sebuah catatan.

“Cukup masuk akal untuk mengatakan bahwa perubahan signifikan dalam peruntungan yen terhadap dolar AS akan bergantung pada perkembangan dari sisi AS.”

Laporan mengenai rate check tersebut juga menyoroti risiko bahwa otoritas Jepang kembali masuk ke pasar untuk menahan pelemahan yen lebih lanjut. Langkah tersebut dapat memicu perubahan harga yang cepat dan merugikan trader.

Likuiditas yang lebih tipis akibat libur di Jepang hingga Rabu memberikan peluang untuk memperbesar dampak intervensi resmi. Jendela waktu serupa saat libur Golden Week pada akhir April hingga awal Mei membuat Jepang melakukan intervensi setelah yen melemah melewati level ¥160 per dolar.

Putaran intervensi yen terbaru, yang dimulai pada akhir Juli ketika AS turut masuk ke pasar bersama Jepang, memperkuat yen lebih dari 6%. Meskipun penguatan tersebut mencapai puncaknya di level ¥152,89 pada 8 September, sejumlah investor masih relatif optimistis terhadap yen hingga pekan lalu.

“Kami sempat bertanya-tanya apakah USD/JPY berada di ambang perubahan arah,” kata Joey Chew, kepala riset valuta asing Asia di HSBC Holdings Plc, dalam sebuah catatan.

“Kini kami menilai bahwa perkembangan terbaru — intervensi bersama dan kenaikan suku bunga kedua hanya tiga bulan kemudian — kemungkinan hanya akan menstabilkan USD/JPY, bukan memicu tren penurunan.”

Gubernur BOJ Kazuo Ueda memberikan sinyal beragam mengenai arah kenaikan suku bunga berikutnya setelah BOJ menaikkan suku bunga pada Jumat. Ia menunjukkan sikap hawkish dengan mengatakan bahwa tahap penetapan kebijakan telah berubah. Namun, Ueda juga mengatakan sulit menentukan suku bunga terminal untuk siklus pengetatan saat ini dan tidak memberikan banyak petunjuk mengenai laju kenaikan suku bunga berikutnya.

Pasar swap saat ini hanya memperhitungkan peluang kurang dari 20% untuk kenaikan suku bunga pada rapat kebijakan berikutnya pada akhir Oktober. Sementara itu, peluang kenaikan suku bunga pada keputusan kebijakan Desember telah diperhitungkan hampir 90%.

Penguatan yen pada awal bulan ini sebelumnya didorong oleh ekspektasi bahwa BOJ akan mempercepat pengetatan kebijakan, berakhirnya carry trade yang didanai yen, serta spekulasi bahwa dana pensiun Jepang akan mengalihkan lebih banyak dana ke aset domestik.

Namun, kenaikan suku bunga Federal Reserve pekan ini dan pernyataan Ueda membuat sejumlah strategis memperingatkan bahwa nilai tukar dolar-yen dapat terus naik jika investor menyimpulkan bahwa bank sentral Jepang akan kesulitan mengejar laju pengetatan The Fed.

“Ke depan, kami menilai kondisi eksternal masih menjadi hambatan bagi JPY,” kata strategis Morgan Stanley MUFG Securities Koichi Sugisaki dan Hiromu Uezato dalam sebuah catatan.

Yen merosot hingga sekitar ¥164 per dolar pada Juli, level terlemahnya dalam empat dekade. Pelemahan tersebut membuka jalan bagi operasi pembelian yen terkoordinasi antara AS dan Jepang, yang merupakan intervensi pertama sejak 1998 dan meningkatkan risiko bagi trader yang bertaruh melawan mata uang tersebut.

Jepang menghabiskan rekor ¥15,4 triliun (US\$98 miliar) untuk intervensi dalam sebulan hingga 26 Agustus, berdasarkan data Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan AS Scott Bessent sejak itu terus memberikan sinyal dukungan terhadap yen yang lebih kuat.

Secara terpisah, hedge fund berbalik bullish terhadap yen untuk pertama kalinya sejak Juli 2025 dalam sepekan hingga 15 September. Perubahan sentimen tersebut cukup signifikan setelah intervensi dilakukan. Namun, pergeseran menuju posisi bullish tersebut berisiko membuat sebagian trader salah posisi setelah BOJ mengecewakan sejumlah pelaku pasar yang berharap bank sentral menunjukkan sikap lebih hawkish.

IMF: Utang Global Cetak Rekor, Pemerintah Harus Bertindak

Senin, 21 September 2026 05:02 WIB

Jorgelina do Rosario dan Romaine Bostick

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122152/imf-utang-global-cetak-rekor-pemerintah-harus-bertindak/2>

Bloomberg, Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pemerintah perlu berbuat lebih banyak untuk mempersempit defisit anggaran dan mengendalikan utang global yang kini berada di level tertinggi sepanjang sejarah.

“Kami telah memperingatkan bahwa konsolidasi fiskal harus dilakukan, dan kami melihat banyak pemahaman, tetapi belum cukup banyak tindakan,” kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva pada Minggu dalam Qatar Economic Forum di New York.

Utang publik global diproyeksikan meningkat hingga melampaui 100% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2029, dua tahun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Menurut lembaga yang berbasis di Washington tersebut, kenaikan terutama didorong oleh lonjakan utang Amerika Serikat dan China.

“Kami telah mendorong AS untuk memperhatikan posisi fiskalnya,” ujarnya. “Dari pembicaraan dengan Menteri Keuangan (Scott) Bessent, ada pemahaman bahwa kondisi ini tidak berkelanjutan dan AS harus secara bertahap menurunkan defisit dan utangnya.”

Georgieva berulang kali memperingatkan risiko dari meningkatnya tingkat utang dan mendesak negara-negara anggota IMF untuk mengambil langkah. Bulan lalu, dia mengatakan sebagian besar negara maju, termasuk AS, memiliki jalur utang yang membutuhkan “perhatian kebijakan”.

Georgieva mengatakan inflasi masih “membandel” dan “mungkin diperlukan” bagi bank sentral di seluruh dunia untuk mengikuti langkah Federal Reserve AS dan Bank Sentral Eropa (ECB) dalam menaikkan suku bunga. Dia mencatat bahwa biaya pinjaman yang lebih tinggi akan membuat pembayaran utang menjadi semakin sulit.

Gangguan pada sektor energi dan transportasi berdampak pada negara-negara produsen komoditas seperti Qatar, Kuwait, dan Irak, sehingga kemungkinan terjadi “kontraksi tajam” pada perekonomian mereka, kata Georgieva.

Meski demikian, Qatar—yang merupakan eksportir gas alam cair (LNG) terbesar kedua di dunia sebelum perang Iran pecah tahun ini—telah membangun sejumlah penyangga ekonomi yang “melindungi perekonomian saat ini,” ujarnya.

“Pasar negara berkembang saat ini memiliki kebijakan moneter yang sama atau bahkan lebih baik dibandingkan negara-negara maju, di mana tingkat utang telah melonjak,” tambahnya.

IMF, yang akan memperbarui proyeksinya untuk ekonomi global dan inflasi bulan depan, memperkirakan ekonomi Qatar menyusut 8,6% pada 2026.

Ketidakpastian jangka panjang di pasar LNG juga menjadi risiko terhadap prospek pertumbuhan Qatar, kata IMF. Sebelum perang Iran, IMF memperkirakan ekonomi negara tersebut akan tumbuh 6,1% tahun ini.

IMF Wanti-wanti Soal Utang, Seberapa Menakutkan?

Senin, 21 September 2026 13:15 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122193/imf-wanti-wanti-soal-utang-seberapa-menakutkan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Alarm beban utang global kembali berdering. Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan pemerintah di berbagai negara agar tidak menunda konsolidasi fiskal. Sebab, utang publik diperkirakan terus membesar, sementara biaya pinjaman global masih tinggi, akibat sikap pengetatan bank sentral global, membuat ruang fiskal jadi kian sempit.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan, pemerintah sebenarnya telah memahami perlunya konsolidasi fiskal. Namun langkah konkret yang ditempuh belum sepenuhnya memadai.

"Kami telah memperingatkan bahwa konsolidasi fiskal harus dilakukan. Kami melihat banyak pemahaman, tetapi belum cukup banyak tindakan," ujar Georgieva dalam Qatar Economic Forum, seperti dikutip Bloomberg News.

Kekhawatiran IMF bukan tanpa sebab. Georgieva menyebut, peningkatan utang publik itu didorong oleh Amerika Serikat (AS) dan China.

Data yang dihimpun Bloomberg menunjukkan defisit fiskal AS tercatat 5,55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan total utang publik milik pemerintah mencatat sebesar US\$40.093 miliar.

Besarnya utang AS ini menjadi salah satu titik perhatian IMF. Lembaga moneter internasional ini memproyeksikan defisit AS pada 2026 mencapai 7,5%. Meski data terkini masih berada di 5,55%.

Dalam Fiscal Monitor edisi April 2026, bahkan IMF memperkirakan utang publik global yang pada 2025 sudah mendekati 94% terhadap PDB dunia akan terus meningkat hingga mencapai 100% PDB pada 2029.

Peningkatan itu terutama didorong oleh negara dengan perekonomian besar, termasuk China. Utang publik China juga menjadi salah satu sumber kekhawatiran IMF. Mengacu dokumen yang sama, total utang pemerintah (general government gross debt) China diperkirakan mencapai 99,2% terhadap PDB pada 2025, naik 90,4% dari posisi 2024.

Rasio itu juga diproyeksikan meningkat menjadi 106,9% pada 2026, dan hampir 127% pada 2031 mendatang. Angka ini menunjukkan bahwa dalam ukuran IMF, utang pemerintah China sebenarnya sudah mendekati, bahkan melampaui ukuran ekonominya sendiri.

Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan seluruh beban pembiayaan yang terkait dengan pemerintah China.

IMF juga menghitung besaran augmented debt, yaitu ukuran utang yang lebih luas dengan memasukkan utang pemerintah daerah dan perusahaan pembiayaan daerah atau local government financing vehicles (LGFV). Jika memasukkan ukuran ini, maka utang China diperkirakan mencapai 126,6% dari PDB 2025.

IMF juga menilai bahwa tekanan tidak cuma datang dari bertambahnya stok utang. Di era suku bunga tinggi seperti sekarang, beban bunga berpotensi meningkat. IMF mencatat pengeluaran bunga pemerintah secara global naik dari sekitar 2% menjadi hampir 3% terhadap PDB hanya dalam empat tahun.

"Dinamika utang publik global masih kurang menguntungkan. Meskipun peningkatan utang terutama terkonsentrasi di China dan AS, kerentanan tersebut tetap tersebar luas," sebut IMF dalam Laporan Fiscal Monitor, edisi April 2026.

Lebih lanjut, IMF menyebut banyak negara di berbagai tingkat pendapatan menghadapi tingkat utang yang tinggi dan dinamika utang yang tidak menguntungkan.

Kondisi ini membuat negara-negara itu jadi lebih rentan terhadap pengetatan kondisi pembiayaan dan memiliki ruang yang lebih terbatas untuk merespons guncangan di masa depan.

Jika negara adidaya seperti AS dan negara dengan ekonomi besar seperti China mencatat utang sebesar itu, bagaimana dengan negara lainnya?

Asia Tenggara

Di antara negara Asia Tenggara, Indonesia masih menunjukkan defisit fiskal yang relatif stabil. Defisit pemerintah tercatat 1,6% dari PDB pada 2023, lalu melebar menjadi 2,3% pada 2024, dan 2,9% pada 2025.

IMF memperkirakan defisit tetap sekitar 2,9% dari PDB pada 2026-2029, sebelum sedikit menyempit pada 2030-2031. Dengan begitu, posisi fiskal dalam proyeksi IMF cenderung stabil, tanpa perubahan besar hingga 2031.

Adapun Malaysia sempat mencatat defisit sebesar 4,1% PDB pada 2023, lalu menyempit menjadi 3,4% pada 2024 dan 3,5% pada 2025. IMF memperkirakan defisit Malaysia terus mengecil menjadi 3,3% pada 2026, 3% pada 2027, dan sekitar 2,7% mulai 2028 hingga 2031. Artinya, arah konsolidasi fiskal Malaysia dalam proyeksi IMF agaknya lebih terlihat dibanding Indonesia.

Sementara, Filipina juga diproyeksikan mengalami perbaikan fiskal secara bertahap. Defisit sebesar 4,4% pada 2023 dan 2024 diperkirakan turun menjadi 4% pada 2025, 3,7% pada 2026, kemudian turun lagi menjadi 2,8% pada 2027 dan 2,5% pada 2028.

Pada 2029, defisit fiskal Filipina diperkirakan makin mengecil menjadi 2,1%, lalu turun lagi jadi 1,6% pada 2030, dan 1,5% pada 2031. Ini menggambarkan bahwa Filipina menjadi salah satu negara yang diproyeksikan akan mengalami penurunan defisit paling konsisten di kawasan.

Sedangkan, Thailand justru tercatat memiliki defisit yang lebih kecil daripada Malaysia dan Filipina. Karena angkanya sudah lebih sempit, sehingga perbaikannya jadi relatif terbatas. Defisit pemerintah Thailand berada di 1,9% PDB pada 2023, membaik jadi 1,3% pada 2024, sebelum kembali melebar 1,9% pada 2025.

IMF memperkirakan defisit Thailand mencapai 2,2% pada 2026. Kemudian, sedikit membaik jadi 1,9% pada 2027, tetap kembali berada di sekitar 2%-2,2% PDB pada 2028-2031.

Adapun Vietnam relatif stabil dan berada jauh lebih sempit daripada negara lain di kawasan Asia Tenggara. Defisit fiskalnya tercatat 1,7% PDB pada 2023, dan 1,5% pada 2024, kemudian melebar menjadi 2,2% pada 2025. Setelah itu IMF memperkirakan defisit makin menyempit menjadi 2% pada 2026, lalu 1,6% pada 2027, 1,4% pada 2028, dan bertahan sekitar 1,3% PDB pada 2029-2031.

Negara Lainnya

Defisit fiskal pemerintah China tercatat 6,7% PDB pada 2023, lalu melebar menjadi 7,1% pada 2024, dan 7,9% pada 2025. IMF memperkirakan defisit semakin lebar menjadi 8,2% pada 2026, mencapai 8,4% pada 2027, sebelum sedikit membaik jadi 8,2% pada 2028 dan 8% pada 2029 hingga 2031.

Jika AS menghadapi defisit fiskal sekitar 7-8% PDB, China juga menghadapi persoalan fiskal dengan besaran sebanding, bahkan lebih besar dalam beberapa tahun proyeksi. IMF secara khusus

memperingatkan bahwa defisit primer China yang besar dan persisten berpotensi mempersempit ruang fiskalnya.

Sementara, Korea Selatan diproyeksikan mengalami defisit lebih sempit. Tahun 2023, defisit Korea berada di 0,7%, lalu 2025 melebar ke 1,4%-1,5% hingga 2026. Namun, tahun 2028, defisit fiskal Korea Selatan diperkirakan kembali menyempit jadi 1,3% dan 1,1% pada 2031.

Sedangkan defisit fiskal Jepang, justru menunjukkan risiko pelebaran setelah sempat membaik pada 2025. IMF memperkirakan tahun 2026, defisit Jepang akan berada di 2,8% melebar dari 1,1% pada 2025. Lalu, 2028 akan kembali melebar 2,9% hingga 2031 jadi 4%.

Di antara semua negara, hanya Singapura yang mencatat surplus secara konsisten. IMF mencatat pada 2023 Singapura mengalami surplus 3,4%, lalu pada 2025 naik lagi jadi 4,2%, dan 2026 sedikit menyusut namun tetap surplus di 3,3%.

Di tengah tekanan suku bunga global, IMF memproyeksikan posisi fiskal Singapura akan tergerus meski tetap positif. Pada 2028, IMF memperkirakan fiskal negara tetangga ini berada di 2,5%, lalu jadi 1,8% pada 2031.

Data yang dirangkum IMF mencatat posisi fiskal yang beragam di antara negara utama dan negara emerging markets. Perbedaan ini menunjukkan bukan soal berapa besar utangnya, tapi juga berapa besar pemerintah harus berutang untuk menambal defisit setiap tahun.

Kala negara adidaya dengan ekonomi maju seperti AS dan China saja diproyeksikan mengalami defisit sekitar 7-8% dari ukuran ekonominya, kebutuhan mereka untuk mencair pembiayaan akan tetap besar, dan berpotensi memengaruhi pasar keuangan dunia serta aliran modal investor global di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Tingkat PHK di Singapura pada Kuartal II-2026 Capai Level Tertinggi Sejak 2020

Senin, 21 September 2026 12:28 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/tingkat-phk-di-singapura-pada-kuartal-ii-2026-capai-level-tertinggi-sejak-2020>

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di Singapura pada kuartal kedua tahun 2026 mencapai level tertinggi sejak puncak pandemi Covid pada akhir tahun 2020. Kementerian Tenaga Kerja Singapura mengungkapkan, tingginya kasus PHK ini didorong oleh reorganisasi dan restrukturisasi bisnis.

Mengutip Reuters, Senin (21/9/2026), terdapat 4.620 kasus PHK pada kuartal kedua tahun 2026, meningkat dari 3.830 kasus PHK yang tercatat pada kuartal pertama tahun tersebut, menurut laporan pasar tenaga kerja kementerian untuk periode itu. A

ngka ini merupakan yang tertinggi sejak 5.640 kasus PHK yang tercatat pada kuartal keempat tahun 2020 selama pandemi Covid.

Jumlah PHK sempat menurun setelah tahun 2020 ketika populasi Singapura berkurang akibat pembatasan perjalanan dan hilangnya pekerjaan yang mendorong pekerja asing meninggalkan pusat bisnis tersebut, sehingga menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih ketat.

Kementerian tenaga kerja menyatakan bahwa peningkatan dari kuartal ke kuartal tersebut "terkonsentrasi pada sektor-sektor yang berorientasi ke luar negeri, termasuk manufaktur, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan".

Kementerian juga mencatat bahwa proporsi penduduk yang terkena PHK dan kembali bekerja dalam waktu enam bulan menurun menjadi 54,9% pada kuartal kedua 2026 dari 60,7% pada kuartal pertama. Tingkat penyerapan kembali kerja dalam periode 12 bulan tetap relatif stabil di angka 69,8%.

Tingkat pengangguran keseluruhan Singapura tetap stabil di angka 1,9%, dengan tingkat pengangguran penduduk dan warga negara masing-masing bertahan di angka 2,9% dan 3%.

Kementerian menyatakan jumlah lowongan pekerjaan menurun pada kuartal kedua, dengan berkurangnya peluang bagi kalangan profesional, manajer, eksekutif, dan teknisi di sektor jasa keuangan serta informasi dan komunikasi.

Namun, jumlah lowongan pekerjaan tetap melampaui jumlah penganggur, dengan rasio 1,48 banding 1 pada bulan Juni 2026, menurut keterangan kementerian.

Vietnam Masuk Indeks Acuan Emerging Market FTSE Russell

Senin, 21 September 2026 09:59 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/vietnam-masuk-indeks-acuan-emerging-market-ftse-russell>

KONTAN.CO.ID - HANOI. Saham-saham Vietnam dimasukkan ke dalam indeks pasar negara berkembang (emerging market) FTSE Russell pada Senin (21/9/2026), menandai tonggak sejarah bagi pasar saham negara tersebut setelah bertahun-tahun melakukan reformasi yang bertujuan menarik investor asing.

Mengutip Reuters, Senin (21/9/2026P), FTSE Russell memperkirakan masuknya Vietnam ke dalam indeks ini dapat mengalirkan dana hingga US\$ 6 miliar ke negara tersebut, yang telah masuk dalam daftar pantauan sejak 2018 untuk kategori yang juga mencakup China dan India.

Indeks saham acuan Vietnam dibuka naik 0,54% pada hari Senin, didorong oleh sektor perbankan, sebelum kemudian sedikit terkoreksi.

Antisipasi terhadap peningkatan status ini membantu membangkitkan kembali minat asing terhadap saham-saham Vietnam.

Menurut data dari Bursa Efek Ho Chi Minh, investor asing mencatatkan pembelian bersih saham senilai 2,7 triliun dong (US\$104 juta) pada pekan lalu, namun secara keseluruhan mereka masih mencatatkan posisi jual bersih sekitar 91 triliun dong.

Namun, setelah antusiasme awal mereda, minat tersebut kemungkinan akan berkurang, kata Thomas Nguyen, Chief Global Markets Officer di SSI Securities Corporation, perusahaan pialang terbesar kedua di negara itu berdasarkan pangsa pasar.

"Saya memperkirakan pasar akan tetap relatif lesu hingga kita mendekati tahun 2027," ujar Nguyen.

Transisi ini akan berlangsung dalam empat tahap hingga tahun 2027, dengan penambahan bobot sebesar 10% pada bulan September, tambahan 20% pada bulan Maret, serta masing-masing 35% pada bulan Juni dan September tahun depan.

"Saat kita semakin dekat dengan tahap inklusi berikutnya pada bulan Maret, perhatian pasar diperkirakan akan kembali meningkat, dan karena alokasinya akan lebih besar, investor lokal kemungkinan akan merasakan dampak yang lebih nyata," tambah Nguyen.

Menyusul peningkatan status ini, perusahaan manajemen aset Vanguard berencana meningkatkan investasinya di Vietnam menjadi sekitar US\$2,5 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Sejumlah kekhawatiran masih ada, termasuk batasan kepemilikan asing dan kendala terkait jumlah saham yang beredar bebas (free-float) bagi beberapa perusahaan.

Tonggak sejarah ini juga kembali memicu harapan akan adanya peningkatan status di masa depan oleh MSCI. Para investor mengatakan bahwa penerapan mekanisme kliring pihak lawan sentral (central counterparty clearing), yang diperkirakan akan terlaksana pada tahun 2027, dapat membantu Vietnam semakin mendekati pemenuhan persyaratan akses pasar MSCI.

Nguyen mengatakan bahwa penerapan mekanisme kliring pihak lawan sentral (central counterparty clearing) akan sangat penting bagi upaya Vietnam untuk mendapatkan peningkatan status oleh MSCI di masa mendatang.

"FTSE berkaitan dengan akses ke pasar. MSCI berkaitan dengan skala," ujarnya. "Itulah sebabnya kliring pihak lawan sentral menjadi hal yang sangat penting," tambahnya. (\$1 = 26.019 dong)

Suku Bunga Naik, Pejabat The Fed: Inflasi Masih Terlalu Tinggi di Semua Aspek Ekonomi

Senin, 21 September 2026 05:45 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/suku-bunga-naik-pejabat-the-fed-inflasi-masih-terlalu-tinggi-di-semua-aspek-ekonomi>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pejabat Federal Reserve Minneapolis, Neel Kashkari, mengatakan bahwa inflasi terlalu tinggi di seluruh sektor ekonomi AS, bukan hanya akibat kenaikan harga minyak.

"Jadi, meskipun kita tidak memperhitungkan energi—yang sangat fluktuatif—dan juga makanan (meskipun keduanya sangat penting), dari segi arah perekonomian, inflasi masih terlalu tinggi," ujar Kashkari dalam acara "Sunday Morning Futures" di Fox News seperti dilansir Reuters.

Kashkari mendukung keputusan bulat untuk menaikkan suku bunga pekan lalu sebesar seperempat poin persentase menjadi 3,75%-4,00%.

Ia adalah salah satu dari tiga pejabat yang berbeda pendapat pada pertemuan The Fed sebelumnya dengan mendukung kenaikan suku bunga, ketika mayoritas anggota Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) saat itu memilih untuk mempertahankan suku bunga tetap.

Proyeksi yang dirilis bersamaan dengan keputusan kenaikan suku bunga menunjukkan bahwa semua kecuali dua pembuat kebijakan The Fed memperkirakan setidaknya satu kali lagi kenaikan sebesar seperempat poin tahun ini.

Pasar berjangka suku bunga mencerminkan peluang dua banding tiga bahwa suku bunga kebijakan The Fed akan berada di kisaran 4,00% hingga 4,25% pada akhir tahun 2026, dengan kemungkinan besar suku bunga akan naik setidaknya seperempat poin lagi melampaui angka tersebut pada pertengahan tahun 2027.

Konflik Timur Tengah Mendorong Lonjakan Harga Minyak

Harga minyak mentah melonjak setelah permusuhan meningkat, di mana AS dan Iran saling menyerang dan menenggelamkan beberapa kapal tanker minyak di Selat Hormuz, serta Arab Saudi menutup jalur pipa vital Timur-Barat akibat serangan udara di tengah meluasnya perang di Timur Tengah.

Tugas The Fed adalah menurunkan kembali inflasi ke target 2% yang ditetapkan bank sentral, ujarnya, dan tidak ada langkah terkait suku bunga yang dapat membuka kembali Selat Hormuz atau menurunkan harga minyak.

"Inflasi yang dirasakan masyarakat Amerika setiap hari mencakup lebih dari sekadar harga minyak. Inflasi ini terjadi di semua aspek ekonomi, misalnya secara luas di sektor jasa. Jadi, kami memiliki instrumen untuk menurunkannya kembali," kata Kashkari.

"Harapannya, kami akan mendapatkan bantuan dari bagian lain pemerintah atau sektor ekonomi riil lainnya."

Kevin Warsh Juga Menyatakan Kekhawatiran Soal Inflasi

Kekhawatiran Kashkari mengenai inflasi sebagian besar sejalan dengan pandangan Ketua The Fed, Kevin Warsh, yang disampaikan setelah berakhirnya rapat penetapan suku bunga terbaru pada hari Rabu.

Warsh memperkirakan bahwa inflasi—berdasarkan tolok ukur yang digunakan The Fed untuk menetapkan target 2%—kemungkinan berada di kisaran 3,6% pada bulan Agustus, meskipun angka resminya baru akan dirilis akhir bulan ini.

"Terlalu banyak kategori yang masih mencatat kenaikan di atas 3 persen, baik dalam periode enam bulan maupun 12 bulan," ujar Warsh dalam konferensi pers usai rapat tersebut.

Kashkari juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap cukup kuat, meskipun ada kebijakan tarif, perang dagang, serta konflik di Ukraina dan Iran. "Ekonomi Amerika sangat tangguh."

"Meski demikian, ekonomi AS terus tumbuh dengan laju yang baik, dan produktivitas mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Harapan saya, seiring meredanya konflik-konflik tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat benar-benar mendominasi dan diharapkan mampu menurunkan inflasi. Semoga disinflasi dapat terjadi, yang akan membuat tugas The Fed menjadi jauh lebih mudah."

RI Kalah Saing di ASEAN dalam Menarik Investasi Asing, Ekonom Beberkan Biang Keroknya

Senin, 21 September 2026 19:28 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/ri-kalah-saing-di-asean-dalam-menarik-investasi-asing-ekonom-beberkan-biang-keroknya>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia masih menghadapi persoalan daya saing dalam menarik investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) di kawasan ASEAN.

Di tengah derasnya investasi yang masuk ke sejumlah negara tetangga, Indonesia dinilai tertinggal karena birokrasi, ketidakpastian regulasi, lemahnya konsistensi kebijakan, hingga rendahnya efisiensi investasi.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia, Juniman menilai competitiveness investasi Indonesia masih jauh dibandingkan Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Salah satu persoalan utama adalah proses perizinan yang masih panjang.

"Masalah birokrasi, perizinan kita terlalu lama dibandingkan negara seperti Vietnam, Malaysia, Singapura, ataupun Thailand. Dari sisi inisiatif, kita juga masih kurang dibandingkan Vietnam dan negara-negara lainnya," ujar Juniman kepada Kontan, Senin (21/9/2026)

Berdasarkan data FDI semester I-2026, Singapura mencatat investasi asing sekitar US\$ 86,2 miliar. Thailand mencapai US\$ 40,5 miliar atau tumbuh 80% secara tahunan, Vietnam US\$ 34,65 miliar atau naik 60%, dan Malaysia US\$ 30,2 miliar atau tumbuh 18,5%.

Sementara itu, FDI Indonesia tercatat US\$ 28,45 miliar atau sekitar Rp 507,6 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.836 per dolar AS. Filipina mencatat US\$ 3,38 miliar atau turun 17,83% secara tahunan.

Pasalnya, investasi juga salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Indonesia pada kuartal II 2026 hanya mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% yoy, sementara Vietnam tumbuh 8,39% yoy, Malaysia tumbuh 6%, Singapura tumbuh 5,90% yoy.

Menurut Juniman, persoalan daya saing Indonesia tidak berhenti pada lamanya perizinan. Regulasi yang sering berubah serta kebijakan yang tidak konsisten membuat investor ragu mengambil keputusan investasi jangka panjang.

"Regulasi kita sering berubah-ubah dan itu membuat investor sangat berhati-hati untuk masuk ke Indonesia," katanya.

Dinamika politik domestik juga menjadi pertimbangan investor. Pergantian pemerintahan yang diikuti perubahan kebijakan dinilai menciptakan ketidakpastian bagi investor asing.

"Jadi ada masalah politik, regulasi, dan birokrasi. Berikutnya adalah masalah konsistensi kebijakan. Selain regulasi, kebijakannya juga berubah-ubah, bahkan terhadap satu industri pun bisa berubah," ujar Juniman.

Kebijakan di Pusat, Tapi Implementasi di Daerah Terhambat

Persoalan tersebut tetap terjadi meski pemerintah telah memangkas sejumlah regulasi dan mempercepat proses perizinan. Juniman menilai masalah utamanya kini terletak pada kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasinya di daerah.

"Antara aturan atau kebijakan dengan implementasi itu berbeda. Kebijakannya sudah bagus. Ada kebijakan satu pintu dan pemangkasan regulasi. Tetapi begitu masuk ke tahap pelaksanaan, masih ada gap antara aturan di pusat dan daerah," jelasnya.

Menurutnya, investor yang sudah memperoleh persetujuan di tingkat pusat masih harus menghadapi berbagai aturan di daerah, termasuk pembebasan lahan dan perizinan. Kondisi ini membuat proses investasi kembali panjang dan menambah biaya.

Hal serupa terjadi pada sejumlah insentif, termasuk insentif pajak. Kebijakan sudah tersedia, tetapi ketika investor hendak memanfaatkannya, realisasi di lapangan tidak selalu mudah.

Karena itu, pemerintah perlu menyatukan kebijakan dengan implementasi. Aturan dari pusat harus dijalankan secara konsisten hingga pemerintah daerah, bahkan desa dan kelurahan yang berkaitan dengan proses pembebasan lahan maupun kegiatan investasi.

"Kalau pemerintahan sampai tingkat paling kecil tidak menjalankan aturan yang ada di pusat secara konsisten, akhirnya itu menjadi hambatan bagi investasi asing untuk masuk ke Indonesia," katanya.

ICOR Tinggi, Investasi Kurang Efisien

Masalah daya saing Indonesia juga tercermin dari tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Juniman menyebut ICOR Indonesia hampir mendekati 6, sementara negara-negara pesaing di ASEAN rata-rata berada di bawah 4.

Tingginya ICOR menunjukkan investasi di Indonesia belum efisien. Investor masih menghadapi berbagai biaya, termasuk pungutan yang tidak jelas, sehingga biaya untuk menghasilkan output menjadi lebih besar.

"Berbeda dengan negara-negara tadi yang rata-rata ICOR-nya di bawah 4. Dengan efisiensi yang lebih baik, investor menjadi lebih tenang untuk masuk ke negara tersebut," ujarnya.

Selain efisiensi, struktur investasi yang masuk juga menjadi persoalan. Berdasarkan data BKPM, investasi Indonesia masih banyak didominasi investasi padat modal, terutama di sektor seperti pertambangan.

Bukan berarti investasi padat modal sebagai sesuatu yang buruk. Namun, pemerintah perlu memastikan investasi tersebut tetap memberikan dampak ke ekonomi domestik melalui pemenuhan aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), penggunaan tenaga kerja lokal, dan keterlibatan pemasok dalam negeri.

Dengan demikian, investasi padat modal tetap dapat menghasilkan multiplier effect yang lebih besar.

Saat ini, kata Juniman, persoalannya adalah investasi padat modal sering kali masih bergantung pada tenaga ahli dari negara asal investor. Bahkan, produk yang dihasilkan dapat kembali diekspor ke negara asal tersebut.

"Di atas kertas mungkin terlihat investasi kita naik, tetapi multiplier effect terhadap perekonomian secara keseluruhan belum terlihat," katanya.

Dampaknya juga terasa di daerah tujuan investasi. Pertumbuhan ekonomi bisa melonjak ketika investasi masuk, tetapi setelah efek low base berakhir, pertumbuhannya kembali terbatas.

Juniman mencontohkan Sulawesi Tengah. Ketika investasi dari China atau negara lain berhenti atau keluar, ekonomi daerah tersebut dapat ikut tertekan karena belum terbentuk kesinambungan antara investasi dengan ekonomi lokal.

Kesiapan dan Kualitas Tenaga Kerja Jadi Kunci

Pemerintah dinilai perlu menyiapkan tenaga kerja lokal agar mampu masuk ke struktur industri yang dibangun investor asing. Tanpa tenaga kerja yang kompetitif, posisi strategis dalam industri berpotensi tetap diisi tenaga kerja dari negara asal investor.

"Kalau hanya mengandalkan investasi padat modal, tetapi pemerintah tidak menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif, ujung-ujungnya posisi tersebut akan diisi oleh tenaga kerja dari negara investor," ujar Juniman.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat manfaat investasi bagi Indonesia menjadi terbatas. Indonesia berisiko hanya menjadi lokasi investasi, pasar, sekaligus sumber bahan baku.

Sebaliknya, negara seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand dinilai lebih siap dari sisi tenaga kerja. Menurut Juniman, negara tersebut tidak hanya menawarkan insentif seperti tax holiday, tetapi juga memastikan tenaga kerja lokal dapat masuk ke industri yang dibangun investor.

Dengan masuknya tenaga kerja lokal, investasi asing dapat menghasilkan transfer teknologi dan meningkatkan kapasitas industri domestik.

Jangan Hanya Kejar Angka Realisasi

Juniman juga meminta pemerintah tidak hanya melihat angka realisasi investasi yang tercatat dalam data BKPM. Sebab, investasi yang tercatat belum tentu seluruhnya telah diwujudkan dalam bentuk pembangunan pabrik atau kegiatan usaha yang benar-benar beroperasi.

"Antara angka realisasi dengan benar-benar membangun pabrik di lapangan itu merupakan perkara yang berbeda," katanya.

Menurutnya, BKPM perlu melihat dan mempublikasikan berapa investasi yang benar-benar direalisasikan menjadi pabrik atau kegiatan usaha yang beroperasi. Data tersebut penting untuk mengukur seberapa besar investasi yang benar-benar memberikan dampak terhadap perekonomian, bukan sekadar mencatat komitmen atau realisasi secara administratif.

Ekosistem Industri Belum Terpadu

Faktor lain yang membuat Indonesia kalah bersaing adalah kesiapan kawasan industri. Juniman menilai negara pesaing telah membangun ekosistem industri yang lebih terpadu, mulai dari infrastruktur, tenaga kerja, industri pendukung hingga rantai pasok.

Ia mencontohkan kawasan data center di Malaysia dan Singapura yang telah terhubung dengan industri AI dan sektor pendukung lainnya. Tenaga kerja mulai dari level manajemen hingga teknis juga tersedia. Sementara itu, investor yang masuk ke Indonesia masih harus mencari sendiri berbagai komponen ekosistem tersebut.

"Kalau investor masuk ke Indonesia, mereka masih bingung. Misalnya masuk ke sektor data center, data center-nya di mana, industri AI-nya di mana, kemudian manufaktur, telekomunikasi, pengadaan komponen untuk handphone dan sebagainya juga di mana," jelasnya .

Menurut Juniman, kawasan industri Indonesia yang masih terpecah-pecah membuat investor harus memikirkan sendiri rantai pasok, tenaga kerja hingga pasar bagi produk yang dihasilkan.

Karena itu, Juniman menyebut pemerintah perlu membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan ekosistem bisnisnya, bukan hanya menyediakan lahan dan infrastruktur dasar.

Pada akhirnya, daya tarik investasi tidak cukup dibangun melalui pemangkasan regulasi dan pemberian insentif. Kepastian kebijakan, konsistensi implementasi hingga daerah, efisiensi biaya, tenaga kerja terampil dan ekosistem industri harus berjalan bersamaan.

Juniman mengingatkan, investasi langsung berbeda dengan investasi portofolio yang dapat keluar-masuk dengan cepat. Investor langsung membutuhkan kepastian dan kenyamanan karena modal yang ditanam bersifat jangka panjang.

Menurutnya, jika investor sudah masuk tetapi kemudian kecewa dan keluar, dampaknya tidak hanya berupa hilangnya investasi. Pengalaman tersebut juga dapat menjadi pertimbangan bagi calon investor lain.

"Mereka bisa kapok dan tidak mau kembali. Cerita itu juga akan disampaikan kepada investor lain. Mereka akan menceritakan pengalaman mereka kepada calon investor berikutnya," pungkas Juniman.

Pemerintah Punya Ruang Hemat Bunga Utang hingga Rp 7 Triliun di 2026

Senin, 21 September 2026 17:38 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-punya-ruang-hemat-bunga-utang-hingga-rp-7-triliun-di-2026>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih memiliki ruang untuk menghemat belanja bunga utang pada tahun 2026 ini. Namun, ruang penghematan tersebut diperkirakan relatif terbatas, yakni sekitar Rp 3 triliun hingga Rp7 triliun.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz memperkirakan, penghematan belanja bunga utang tahun ini berada di kisaran Rp 3 triliun-Rp7 triliun, dengan titik tengah sekitar Rp 5 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 599,44 triliun.

“Menurut perhitungan kami, ruang penghematan bunga utang tahun ini kemungkinan sekitar Rp3 triliun samapi Rp 7 triliun, dengan midpoint sekitar Rp 5 triliun dari pagu Rp 599 triliun,” ujar Faiz kepada Kontan, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, ruang penghematan bunga utang relatif terbatas lantaran sekitar 65,7% anggaran bunga telah terealisasi hingga Agustus 2026. Selain itu, sebagian besar beban bunga berasal dari stok utang yang telah diterbitkan sebelumnya.

Hingga akhir Agustus 2026, realisasi pembayaran bunga utang telah mencapai Rp 394,2 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp 366,4 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 27,8 triliun.

Di sisi lain, ia menyebut, tingkat imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) saat ini juga belum lebih murah secara signifikan dibandingkan asumsi yang digunakan dalam APBN.

Dengan kondisi tersebut, Faiz menilai sumber penghematan terbesar bukan berasal dari penurunan suku bunga, melainkan dari pengelolaan kas dan utang secara aktif atau active cash and debt management.

Menurutnya, penghematan sekitar Rp 5 triliun masih realistis apabila kebutuhan penerbitan utang hingga akhir tahun dapat ditekan.

Selain itu, pemerintah dapat mengoptimalkan waktu penerbitan ketika kondisi pasar lebih kondusif serta mengatur komposisi tenor dan instrumen pembiayaan secara lebih efisien.

Sementara itu, untuk mencapai penghematan mendekati Rp 7 triliun atau lebih, diperlukan kombinasi antara kebutuhan pembiayaan yang lebih rendah dan penurunan yield SBN yang cukup berarti pada kuartal IV 2026.

Sebaliknya, apabila yield SBN bertahan di atas 7% dan kebutuhan penerbitan utang tetap tinggi, ruang penghematan bunga utang diperkirakan hanya berada di sisi bawah kisaran, yakni sekitar Rp 3 triliun.

Irman menambahkan, apabila penghematan sebesar Rp3 triliun-Rp7 triliun terealisasi, dampaknya terhadap defisit APBN diperkirakan sekitar 0,01%-0,03% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Jadi positif sebagai tambahan fiskal buffer, tetapi tidak mengubah arah defisit APBN secara material,” katanya.

Kurs Rupiah Melemah Lagi, Ini yang Dilakukan BI

Senin, 21 September 2026 15:00 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/kurs-rupiah-melemah-lagi-ini-yang-dilakukan-bi>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menyebut pelemahan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap tensi geopolitik di Timur Tengah.

Seperti diketahui, rupiah spot terus melemah pada perdagangan Senin (21/9/2026) siang. Pukul 12.10 WIB, rupiah spot ada di level Rp 17.827 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,39% dari akhir pekan lalu yang ada di Rp 17.758 per dolar AS.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, tensi geopolitik tersebut turut mendorong harga minyak tetap berada di atas US\$ 100 per barel. Kondisi ini meningkatkan risiko inflasi global sekaligus menambah tekanan terhadap outlook fiskal.

“Pelemahan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh kekhawatiran tensi geopolitik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak tetap tinggi di atas US\$100 per barel, sehingga meningkatkan risiko inflasi global dan tekanan pada outlook fiskal,” ujar Erwin dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).

Selain faktor geopolitik, tekanan terhadap rupiah juga berasal dari kebutuhan valuta asing (valas) importir serta arus keluar dana dari portofolio aset domestik.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI memastikan akan terus hadir di pasar. Erwin mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menjaga rupiah tetap bergerak sesuai fundamentalnya.

BI akan memperkuat strategi operasi moneter pro-market melalui pengelolaan struktur suku bunga di pasar uang. Selain itu, bank sentral juga akan memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar dan menjaga kecukupan likuiditas melalui transaksi underlying untuk swap lindung nilai dengan perolehan insentif.

Erwin menegaskan, intervensi pasar akan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui sejumlah instrumen.

"Intervensi akan terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, disertai pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder," jelasnya.

BI juga terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan korporasi serta pelaku pasar. Langkah tersebut antara lain diarahkan untuk mendorong arus masuk modal asing dengan mengoptimalkan insentif yang telah diberikan.

Di sisi lain, BI mendorong diversifikasi permintaan valas melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

Meski rupiah masih menghadapi tekanan, Erwin menyebut pergerakannya secara umum masih sejalan dengan mata uang kawasan. Secara quarter-to-date (QTD), rupiah tercatat menguat 0,37%.

Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia juga masih kuat. Pada akhir Agustus 2026, cadangan devisa tercatat meningkat menjadi US\$ 146,5 miliar.

Kemenkeu Optimis Pembayaran Bunga Utang Turun Tahun Ini, Berikut Strateginya

Senin, 21 September 2026 12:15 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-optimis-pembayaran-bunga-utang-turun-tahun-ini-berikut-strateginya>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melihat adanya peluang untuk melakukan penghematan pembayaran bunga utang pemerintah pada 2026. Penghematan tersebut dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan portofolio utang, mulai dari pemilihan tenor, instrumen, mata uang hingga waktu penerbitan.

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, hingga 15 September 2026, rata-rata imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di level 6,80%. Angka tersebut masih berada di bawah asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2026 sebesar 6,90%.

Namun, menurut Suminto, besaran biaya bunga utang pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh pergerakan yield SBN tenor 10 tahun. Pasalnya, pemerintah memiliki fleksibilitas dalam menentukan komposisi utang yang diterbitkan.

“Pengadaan utang dilakukan melalui multi instrumen, pinjaman, Surat Utang negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan variasi tenor, mata uang, suku bunga maupun timing penerbitan,” ujar Suminto kepada Kontan, Jumat (18/9/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah memiliki stok utang yang sudah diterbitkan dan pada saat yang sama harus melakukan pengadaan utang baru untuk membiayai defisit APBN. Untuk utang yang sudah menjadi outstanding, sebagian besar menggunakan skema bunga tetap atau fixed rate sehingga tidak langsung terpengaruh oleh perubahan suku bunga.

Sementara untuk utang baru, pemerintah dapat mengatur strategi penerbitannya agar biaya bunga dapat ditekan dengan tetap mempertimbangkan risiko.

Salah satunya melalui pengaturan tenor. Suminto mengatakan, penerbitan utang dengan tenor yang lebih panjang umumnya memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan tenor yang lebih pendek.

Dengan demikian, ketika pemerintah ingin menekan biaya bunga, pemerintah dapat meningkatkan porsi penerbitan dengan tenor yang lebih pendek. Namun, langkah tersebut tidak dilakukan secara berlebihan karena semakin pendek tenor utang, semakin besar pula risiko pembiayaan kembali atau refinancing risk.

“Tenor 10 tahun tentu lebih mahal daripada menerbitkan tenor 5 tahun. Kalau saya ingin mengurangi belanja bunga utang saya, saya bisa shortening duration, lebih banyak utang dengan tenor yang lebih pendek,” jelasnya.

Selain tenor, pemerintah juga mengatur waktu penerbitan utang. Strategi ini berkaitan dengan frontloading dan backloading penerbitan utang.

Menurut Suminto, apabila penerbitan utang terlalu banyak dilakukan di awal tahun atau frontloading, pemerintah harus menanggung biaya bunga lebih cepat, termasuk ketika dana tersebut belum sepenuhnya dibutuhkan.

Karena itu, pemerintah dapat membuat jadwal penerbitan yang lebih proporsional atau melakukan backloading untuk mengurangi carrying cost atau biaya yang muncul akibat dana yang sudah diperoleh tetapi belum digunakan.

“Kalau itu lebih proporsional atau lebih backloading, maka di situ ada yang dihemat karena negative carry atau carrying cost-nya bisa dikurangi atau diminimalkan,” katanya.

Pemerintah juga dapat menyesuaikan komposisi mata uang dan instrumen yang digunakan. Jika dalam suatu kondisi biaya penerbitan dalam mata uang tertentu relatif lebih murah, porsinya dapat ditingkatkan. Sebaliknya, instrumen atau mata uang dengan biaya yang lebih mahal dapat dikurangi.

Dengan demikian, pengelolaan utang pemerintah tidak hanya melihat berapa besar utang yang diterbitkan, tetapi juga bagaimana utang tersebut disusun berdasarkan tenor, instrumen, mata uang, suku bunga dan waktu penerbitannya.

Suminto menekankan, strategi tersebut tetap harus memperhatikan keseimbangan antara biaya dan risiko. Menekan biaya bunga melalui tenor yang lebih pendek, misalnya, dapat meningkatkan risiko karena utang lebih cepat jatuh tempo dan harus kembali dibiayai.

Begitu pula dengan utang dalam valuta asing. Meski biaya penerbitannya dapat lebih murah dalam kondisi tertentu, peningkatan porsi utang valas juga meningkatkan eksposur terhadap risiko nilai tukar.

“Cost dan risk itu trade-off. Sesuatu yang cost-nya lebih rendah biasanya risikonya lebih tinggi. Maka sebagai pengelola portofolio nanti saya harus melakukan optimasi dari sisi cost-risk,” ujar Suminto.

Dengan berbagai fleksibilitas tersebut, Kemenkeu optimistis realisasi belanja bunga utang pada tahun ini tidak akan menghabiskan seluruh pagu yang telah ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp 599 triliun.

Suminto mengatakan, penghematan tersebut dapat terjadi pada tahun berjalan, bukan semata-mata merupakan penghematan untuk pembayaran bunga pada tahun-tahun mendatang.

Ia mencontohkan, apabila dari pagu belanja bunga sebesar Rp 599 triliun pemerintah hanya merealisasikan Rp 585 triliun, maka terdapat Rp14 triliun anggaran yang tidak terealisasi.

Anggaran yang tidak terealisasi tersebut pada akhirnya dapat membantu mengurangi kebutuhan belanja dan berdampak terhadap defisit APBN.

“Kalau misalnya realisasi saya Rp585 triliun, kan berarti ada pagu yang tidak terealisasikan Rp 14 triliun. Berarti Rp 14 triliun itu mengurangi defisit, karena ada belanja yang tidak terealisasikan,” jelasnya.

Meski demikian, Suminto belum dapat menyebutkan berapa besar nominal penghematan yang akan dicapai hingga akhir 2026. Ia hanya memastikan Kemenkeu optimistis realisasi belanja bunga tidak akan melampaui pagu.

“Saya yakin bisa menghemat, tidak melampaui pagu. Meskipun saya belum bisa mengomunikasikan, pagu mau menghemat berapa? Rp 5 triliun, Rp 10 triliun, Rp 15 triliun? Saya belum bisa menyebutkan angka itu,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembayaran bunga utang mencapai Rp 394,2 triliun hingga akhir Agustus 2026. Realiasi tersebut mencapai 65,76% dari pagu Rp 599,44 triliun.

Dari total realisasi tersebut, pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp 366,4 triliun, sedangkan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 27,8 triliun.

Yield SBN diperkirakan tetap terjaga

Di sisi lain, Suminto memperkirakan imbal hasil SBN hingga akhir tahun masih dapat dijaga di sekitar asumsi APBN 2026. Pemerintah menetapkan asumsi yield SBN 10 tahun sebesar 6,90%, sementara rata-rata hingga 15 September masih berada di level 6,80%.

Menurut dia, pergerakan yield SBN tetap dipengaruhi kondisi eksternal, termasuk kebijakan suku bunga The Federal Reserve dan pergerakan yield US Treasury.

Namun, struktur kepemilikan SBN Indonesia yang kini lebih didominasi investor domestik membuat sensitivitas terhadap gejolak eksternal dinilai lebih terbatas dibandingkan periode ketika kepemilikan asing jauh lebih besar.

Saat ini, investor asing hanya memegang sekitar 13% SBN pemerintah, menurut Suminto. Kondisi tersebut berbeda dengan periode sebelumnya ketika kepemilikan asing pernah berada di kisaran 35% hingga 40%.

Ia mencontohkan, meski Federal Funds Rate naik 15 basis poin, yield SBN Indonesia dalam dua hari terakhir justru mengalami penurunan.

Karena itu, Suminto optimistis yield SBN hingga akhir tahun tidak akan mengalami kenaikan besar dan rata-rata tahunannya masih dapat berada di sekitar asumsi APBN sebesar 6,90%.

“Yang sekarang kan rata-ratanya 6,8%. Itu kan sudah tiga kuartal. Sehingga dengan tersisa satu kuartal, saya yakin secara average dalam satu tahun masih bisa dijaga di kisaran itu,” jelasnya.

Suminto juga mengingatkan bahwa asumsi yield SBN 10 tahun dalam APBN merupakan bentuk penyederhanaan. Dalam praktiknya, pemerintah menerbitkan utang dengan beragam tenor, instrumen dan mata uang. Karena itu, realisasi yield SBN 10 tahun tidak dapat secara langsung disamakan dengan besaran realisasi belanja bunga utang pemerintah.

Dengan fleksibilitas dalam mengatur komposisi dan waktu penerbitan tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk mengoptimalkan biaya utang sekaligus menjaga risiko pembiayaan tetap dalam batas yang dapat diterima.

Rupiah Tertinggal dari Mata Uang Asia, Ada Apa?

Senin, 21 September 2026 15:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122236/rupee-tertinggal-dari-mata-uang-asia-ada-apa/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Senin (21/9/2026) dengan pelemahan 0,54% ke Rp17.838/US\$, kala sebagian besar mata uang Asia menguat.

Terpangkasnya harga minyak mentah Brent 2,15% ke US\$101,64/barel memberi ruang penguatan bagi mayoritas mata uang kawasan.

Won Korea Selatan memimpin penguatan 0,5%, disusul ringgit Malaysia, dolar Singapura, dolar Taiwan, baht Thailand, rupee India, dan yuan China. Namun sebaliknya, rupiah tertinggal dan melemah paling tajam. Kemudian, yen Jepang menyusul dan terpangkas 0,23%, juga peso Filipina 0,08%, serta dolar Hong Kong yang lebih terbatas 0,01%.

Tertinggalnya rupiah dibanding mata uang Asia lainnya menunjukkan bahwa terpangkasnya harga minyak mentah belum cukup untuk menjadi katalis penguatan rupiah. Terlebih posisi harga ini masih

berada di atas kisaran asumsi dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di US\$70/barel.

Untuk itu, pasar tampaknya masih mencermati faktor domestik, terutama menjelang keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI), pada Rabu (23/9).

Rupiah memang sempat menikmati penguatan sekitar 1,5% sejak awal Agustus, tapi agaknya momentum itu mulai kehilangan tenaga.

Salah satu masalah domestik adalah fundamental eksternal Indonesia yang masih menghadapi tekanan. Defisit transaksi berjalan yang melebar di kuartal II-2026 jadi sinyal bahwa kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan kebutuhan impor dan valuta asing.

Dalam kondisi terpankasnya harga energi seperti hari ini, seharusnya memberi ruang bagi rupiah untuk bertahan. Tapi, sentimen ini sepertinya belum mampu mengangkat rupiah, ketika mata uang regional justru menguat. Ini mengindikasikan investor masih bersikap waspada terhadap pasar domestik.

Terlebih, menurut Goldman Sachs Group Inc. pasokan semakin ketat di pasar bahan bakar global, dan berpotensi tertekan. Bahkan, di AS, harga kontrak berjangka solar ditutup di level tertinggi.

Begitu juga rata-rata harga eceran bahan bakar tersebut melonjak ke rekor tertinggi sepanjang masa, karena kenaikan harga produk jadi jauh melampaui kenaikan harga minyak mentah.

Di saat yang sama, penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan yield obligasi pemerintah AS, US Treasury, hampir menyentuh 5% untuk tenor acuan 10 tahun, dan membuat aset dolar jadi lebih menarik.

Meski ada tekanan eksternal ini, ruang BI menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama untuk menopang rupiah tetap terbatas. Sebab, kenaikan suku bunga justru berisiko menekan pertumbuhan ekonomi domestik.

Pelaku pasar akan mencermati arah kebijakan moneter BI pada Rabu dan bagaimana bank sentral RI ini mengombinasikan suku bunga yang diperkirakan ditahan, intervensi valuta asing, pengelolaan likuiditas, juga instrumen lindung nilai untuk menjaga stabilitas rupiah, tanpa memberi tekanan berlebihan pada perekonomian yang sedang lesu.

BI Soal Pelemahan Rupiah: Tertekan Harga Minyak-Permintaan Valas

Senin, 21 September 2026 15:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122237/bi-soal-pelemahan-rupiah-tertekan-harga-minyak-permintaan-valas/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebut bahwa tekanan yang terjadi pada rupiah saat ini disebabkan oleh sejumlah faktor seperti masih tingginya harga minyak dunia yang masih bertengger di atas US\$100.

“Pelemahan nilai tukar Rupiah masih dipengaruhi oleh kekhawatiran tensi geopolitik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak tetap tinggi di atas US\$100 per barel, sehingga meningkatkan risiko inflasi global dan tekanan pada outlook fiskal,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea, dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2026).

Selain itu, Erwin juga menyebutkan bahwa pelemahan rupiah tersebut juga didorong oleh kebutuhan valas importir serta arus keluar dana dari portofolio aset domestik.

BI-pun melakukan sejumlah intervensi melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, disertai pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Selain itu, koordinasi dan komunikasi dengan korporasi dan pelaku pasar terus dilakukan secara intensif, antara lain untuk mendorong arus masuk modal asing dengan mengoptimalkan insentif yang telah diberikan, serta mendiversifikasi permintaan valas melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

Ia juga menyebut bahwa BI akan memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga sesuai fundamentalnya, melalui pengelolaan struktur suku bunga di pasar uang dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market,

“Serta memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar dan kecukupan likuiditas melalui transaksi underlying untuk swap lindung nilai dengan perolehan insentif,” katanya.

Ia juga meyakinkan bahwa secara umum, pergerakan Rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang kawasan (regional), dengan penguatan secara quarter-to-date (QTD) sebesar 0,37%.

Rupiah membuka perdagangan Senin (21/9/2026) dengan pelemahan 0,29% ke Rp17.793/US\$, seiring menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) dan melejitnya imbal hasil US Treasury.

Pergerakan rupiah pagi ini menunjukkan sentimen positif dari turunnya harga minyak belum cukup kuat untuk mengimbangi tekanan dari dolar AS dan pasar obligasi global. Indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama kembali terapresiasi ke 100,2, membuat penguatan bagi mata uang Asia juga relatif terbatas.

Apalagi, imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun kembali mendekati 5% setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga acuannya 25 basis poin (bps) menjadi 3,75-4%.

Sementara itu, minyak mentah Brent diperdagangkan di sekitar US\$104 per barel setelah mengalami penurunan selama tiga hari, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di bawah US\$100 per barel.

Ekonom: Batas Defisit 3% Masih Sesuai, Penerimaan Harus Diperkuat

Senin, 21 September 2026 11:30 WIB

Merinda Faradianti

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122187/ekonom-batas-defisit-3-masih-sesuai-penerimaan-harus-diperkuat/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, batas maksimal defisit anggaran sebesar 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relevan untuk dipertahankan.

Menurutnya, persoalan utama yang perlu dibenahi pemerintah adalah rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB atau tax ratio. Pasalnya, Eko menilai pelebaran defisit baru dapat dipertimbangkan apabila kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara sudah lebih kuat.

“Untuk saat ini, defisit 3%, batasan 3% itu masih relevan dan tidak perlu digeser, tidak perlu ditambah. Kalau bisa malah dikurangi karena utang kita sudah sangat besar,” kata Eko, saat dihubungi Bloomberg Technoz, dikutip Senin (21/9/2026).

“Kenapa harus dibatasi 3%? Karena tax ratio, penerimaannya hanya 10%-11%,” tambahnya.

Dia membandingkan kondisi tersebut dengan negara seperti Eropa dan China yang memiliki rasio pajak lebih tinggi. Kata dia, peningkatan kapasitas penerimaan akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah, termasuk ingin menambah pembiayaan melalui utang.

Ia mengibaratkan, kemampuan pemerintah berutang dengan kondisi seseorang yang mengajukan pinjaman. Di mana, pemberi pinjaman akan melihat kemampuan membayar berdasarkan pendapatan yang dimiliki si peminjam.

“Kalau misalkan gajinya cuma Rp10 juta, utangnya minta ratusan juta, kan nggak masuk akal. Jadi yang paling penting kalau mau memperlebar defisit, tingkatkan dulu tax ratio-nya,” ujarnya.

Selain penerimaan, Eko menilai pemerintah perlu memperbaiki kelembagaan dan tata kelola dalam pengelolaan anggaran. Dia mengingatkan, pelebaran defisit bisa meningkatkan risiko pemborosan apabila tidak disertai perbaikan tata kelola yang baik.

“Ngapain memperlebar defisit jadi gede-gedean atas nama pembangunan, tapi korupsinya nggak dihilangkan. Korupsi kita kan gede sekali,” tegas Eko.

Ia menekankan bahwa, pelebaran defisit di atas 3% berpotensi memperbesar ruang penyalahgunaan anggaran apabila persoalan korupsi dan tata kelola belum terselesaikan. Tak hanya itu, Eko juga menyoroti penggunaan utang untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional.

“Kalau utangnya hanya dikorupsi, ya ngapain? Atau dijadikan proyek-proyek yang dianggap strategis nasional tapi tidak pernah dilakukan dengan mekanisme pasar. Main tunjuk sana-tunjuk sini BUMN, uangnya itu dari utang,” sebutnya,

Dia menegaskan, pemerintah memang memiliki kewenangan menentukan program pembangunan berdasarkan mandat politik yang diperoleh melalui pemilu. Namun, pelaksanaan program tersebut tetap harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Eko juga mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan kondisi pasar keuangan saat menentukan kebijakan defisit dan pembiayaan utang. Selain itu penghitungan beban bunga utang juga perlu dikaji dari perspektif mendatang, terutama saat kelompok usia muda menghadapi tantangan di pasar tenaga kerja.

“Kalau mau mengutang ke market, yield-nya itu tinggi sekarang. Itu harus dipertimbangkan oleh pemerintah,” jelasnya.

“Berutang pada saat bunga tinggi itu nanti akan menimbulkan beban yang lebih kompleks bagi Gen Z yang sekarang nggak banyak dapat kerja,” pungkasnya.

Dengan Asistensi Sabrina Mulia

Mayoritas Harga Pangan Naik, Cabai Hingga Beras Masih Panas

Senin, 21 September 2026 09:20 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122174/mayoritas-harga-pangan-naik-cabai-hingga-beras-masih-panas/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Mayoritas harga komoditas pangan nasional tercatat mengalami kenaikan pada hari ini, Senin (21/9/2026). Harga cabai-cabai hingga seluruh jenis beras terus mengalami pelonjakan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 08.25 WIB, rata-rata nasional harga beras kualitas medium I naik 0,3% menjadi Rp16.650/kg.

Begitu juga harga beras kualitas medium II yang naik 0,31% menjadi Rp16.400/kg. Harga beras kualitas super I dan II masing-masing juga naik 0,56% dan 0,29% menjadi Rp17.950 dan Rp17.350/kg.

Harga beras kualitas bawa I juga naik 0,68% menjadi Rp14.900/kg. Hanya beras kualitas bawah II yang tidak mengalami perubahan harga dari pekan lalu yang masih Rp14.700/kg.

Kemudian, harga cabai merah besar juga melonjak 6,23% menjadi Rp58.000/kg. Harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah masing-masing juga naik 9,42% dan 6,78% menjadi Rp69.100 dan Rp96.100/kg. Cabai rawit hijau juga naik 4,81% menjadi Rp67.800/kg.

Harga daging sapi kualitas I dan II masing-masing juga naik 0,62% dan 0,67% menjadi Rp153.050 dan Rp143.750/kg. Sementara itu, harga daging ayam ras segar tercatat turun 0,24% menjadi Rp42.350/kg, tetapi telurnya masih naik 0,67% menjadi Rp30.050/kg.

Lalu, harga minyak goreng curah tercatat turun tipis 0,24% menjadi Rp20.400/kg. Tetapi minyak goreng kemasan bermerk I dan II masih naik masing-masing sebesar 0,41% dan 0,43% menjadi Rp24.450 dan Rp23.600/kg.

Harga gula pasir kualitas premium juga naik 0,25% menjadi Rp20.400/kg, diikuti gula pasir lokal juga naik 0,52% menjadi Rp19.200/kg.. Bawang merah tercatat turun 1,19%, sementara bawang putih masih naik 0,25% menjadi Rp39.400/kg.

Tingkatkan Pendapatan Daerah, Pemprov Jateng Dukung Penuh GIIAS Semarang

Senin, 21 September 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/tingkatkan-pendapatan-daerah-pemprov-jateng-dukung-penuh-giias-semarang/>

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap memberikan dukungan terkait event Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang, pada 30 September—4 Oktober 2026. Pameran otomotif tersebut dinilai dapat mendorong penjualan kendaraan bermotor di Jawa Tengah, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Pemprov Jateng akan mendukung gelaran GIIAS di Semarang ini, karena pergerakan orang dan barang itu menjadi salah satu prioritas, salah satunya melalui industri otomotif,” kata Gubernur Jawa Tengah

Ahmad Luthfi, saat menerima audiensi pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, di kantornya, Senin (21/9/2026).

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhamad Masrofi menjelaskan, pameran GIIAS yang dilakukan setiap tahun, diharapkan dapat mendongkrak penjualan kendaraan bermotor di wilayahnya. Dengan meningkatnya penjualan kendaraan bermotor, akan ikut mendongkrak pendapatan asli daerah.

“Harapannya, dengan sering dilakukan pameran ini, dapat menumbuhkan penjualan kendaraan bermotor. Kita akan kolaborasi, bukan tidak mungkin nanti akan ada relaksasi yang diberikan, ini masih dihitung dulu,” ujarnya, sesuai mendampingi Ahmad Luthfi.

Berdasarkan data Bapenda, pendapatan daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2026 ini, mengalami peningkatan dari 2025 lalu.

Sementara itu, Ketua Harian Gaikindo sekaligus Ketua Pameran GIIAS Semarang 2026, Anton Kumonty mengatakan, tahun ini ada 19 merek kendaraan bermotor yang ikut pameran. Terdiri atas 18 merek mobil dan 1 sepeda motor. Dari total 18 merek mobil tersebut, 12 di antaranya mobil listrik, sedangkan mobil konvensional hanya 6 merek. Serta ada 25 supporting industry yang terlibat dalam pameran.

“Tahun ini lebih banyak merek mobil listrik yang berpartisipasi, dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Anton.

Ditambahkan, secara nasional penjualan kendaraan bermotor baru mengalami peningkatan dari 2025. Pada 2026, selama delapan bulan atau per Agustus, ada hampir 600 ribu kendaraan baru, naik sekitar 12% dibandingkan tahun lalu. (Humas Jateng)*ul

Peluang Kerja Terbuka, Pemprov Jateng Siapkan Tenaga Pengemudi Andal untuk Jepang

Senin, 21 September 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/peluang-kerja-terbuka-pemprov-jateng-siapkan-tenaga-pengemudi-andal-untuk-jepang/>

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) akan menyiapkan tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan pengemudi di Jepang. Hal itu sebagai tindak lanjut kerja sama antara Pemprov Jateng dengan 3EEE Inc Japan.

“Nanti dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja akan mendiskusikan dengan 3EEE Inc Japan,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat menerima audiensi CEO 3EEE Inc Japan Norio Tanaka dan Head of the President’s Office Hideo Mori, di ruang kerjanya, Senin (21/9/2026).

Luthfi mengatakan, penyiapan calon tenaga kerja dilakukan sejak dari pendidikan vokasi dan kejuruan. Salah satunya, melalui tambahan pembelajaran bahasa Jepang, sesuai level yang dibutuhkan untuk bekerja di negara tersebut.

Pemprov Jateng juga membuka peluang kolaborasi pendidikan bahasa dengan 3EEE, sehingga kemampuan calon tenaga kerja dapat disesuaikan dengan standar perusahaan maupun kebutuhan industri transportasi Jepang.

Selain kemampuan bahasa, jelas gubernur, pelatihan diarahkan pada kompetensi sebagai pengemudi, mulai dari keterampilan teknis, keselamatan transportasi, eco-driving, pemahaman regulasi, hingga pelayanan kepada penumpang.

Ditambahkan, peluang kerja di Jepang juga menunjukkan peningkatan. Penempatan pekerja migran asal Jawa Tengah ke negara tersebut naik dari 3.760 orang pada 2024 menjadi 5.712 orang pada 2025 atau sekitar 52 persen.

Head of the President's Office 3EEE Inc Hideo Mori mengatakan, keterlibatan pemerintah diperlukan agar proses penyiapan dan penempatan tenaga kerja memiliki mekanisme yang jelas, serta memberikan kepastian bagi calon pekerja.

"Program seperti ini perlu dijalankan bersama dengan pemerintah. Kalau pemerintah tidak ikut terlibat, akan sulit menentukan aturan atau mekanismenya," kata Mori.

Menurutnya, koordinasi juga diperlukan untuk menjembatani informasi mengenai visa dan ketentuan bekerja di Jepang. Mori menilai, pembahasan tersebut perlu segera ditindaklanjuti, karena Jepang sedang menghadapi kekurangan tenaga kerja.

"Kekurangan tenaga kerja memang merupakan kondisi yang sedang terjadi sekarang. Karena itu, pembahasan seperti ini perlu dilakukan dan diputuskan secepat mungkin," katanya.

Sementara CEO 3EEE Inc Japan Norio Tanaka menambahkan, kebutuhan tenaga kerja berkaitan dengan perubahan demografi Jepang. Populasi Jepang yang saat ini sekitar 120 juta orang diperkirakan turun menjadi kurang dari 100 juta setelah 2040, dengan sekitar 40 persen berada pada kelompok lanjut usia.

"Setelah memperoleh pengalaman di Jepang, mereka dapat membawa pulang pengetahuan maupun praktik maju dari Jepang dan memanfaatkannya untuk pembangunan Indonesia di masa depan," kata Tanaka. (Humas Jateng)*ul

PHK Terus Marak, DPRD Jateng Upayakan Tekan Kasus

Tayang: Senin, 21 September 2026 21:43 WIB

Penulis: Iwan Arifianto, Editor: Vito

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1267082/phk-terus-marak-dprd-jateng-upayakan-tekan-kasus>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Jateng tengah memantau gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang marak terjadi di berbagai daerah.

Pemantauan dilakukan dengan menerjunkan Komisi E yang membidangi ketenagakerjaan untuk memetakan penyebab dan mencari solusi dari persoalan tersebut.

"Betul, kami suruh Komisi E untuk melakukan konsolidasi apa penyebabnya (gelombang PHK-Red)," kata Ketua DPRD Jateng, Sumanto, kepada Tribun Jateng, pekan lalu.

Dari pemetaan itu, menurut dia, pihaknya ingin mengetahui penyebab terjadinya PHK dan melakukan langkah mitigasi. Hal itu bertujuan agar gelombang PHK ini bisa ditekan.

"Komisi E sedang berdiskusi tentang itu, minimal agar tidak terjadi (kenaikan PHK-Red) yang semakin tajam," ujarnya.

Selain itu, Sumanto menuturkan, pihaknya juga tidak ingin adanya praktik PHK secara serampangan. Terlebih, proses PHK yang melanggar regulasi. "Kami mengantisipasi PHK-PHK yang tidak sesuai dengan aturan," tegasnya.

Ia juga mengajak Pemprov Jateng maupun Pemkab/pemkot untuk ikut turun tangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan bisa memberikan kontribusi supaya ini jangan berlanjut," ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Ahmad Aziz menyatakan, jumlah buruh di Jateng yang mengalami PHK dari Januari hingga awal September ini mencapai sekitar 7.315 orang.

Ia menyebut, mayoritas buruh yang terkena PHK itu bekerja pada industri di sektor tekstil, garmen, dan perkayuan.

"Kami baik melalui Dinas Ketenagakerjaan provinsi maupun kabupaten/kota mengawal agar PHK ini pilihan terakhir," jelasnya.

"Perusahaan sebelum melakukan PHK (diminta-Red) harus melakukan langkah-langkah pencegahan, di antaranya dengan melakukan penghematan," sambungnya.

Ketika langkah-langkah tersebut telah dilakukan tetapi perusahaan akhirnya tetap melakukan PHK, Aziz menyampaikan, Dinas Ketenagakerjaan memastikan bakal mengawal proses pemberian hak-hak buruh.

Hal itu seperti pesangon, upah terutang, Jaminan Hari Tua (JHT) maupun hak-hak lain. "Kami juga akan mengakseskan buruh yang kena PHK ke lowongan pekerjaan perusahaan lain yang membutuhkan," terangnya.

Dampak global

Aziz mengungkapkan, fenomena PHK tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti mismanajemen, kenaikan harga bahan baku, hingga dampak dari kondisi geopolitik global.

"Sebabnya banyak, terutama geopolitik global yang berpengaruh pada buyer (pembeli produk di luar negeri-Red)," tuturnya.

Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jateng, Nelson Siahaan mengakui, fenomena PHK masih berpotensi terus terjadi di Jateng dengan pertimbangan kondisi ekonomi global saat ini.

Ia pun meminta pemerintah agar melakukan pemantauan terhadap kondisi buruh, terutama dari sektor garmen yang saat ini paling rentan.

"Pemerintah hadir jangan saat PHK sudah terjadi, seharusnya bisa mencegah adanya PHK," ujarnya, baru-baru ini.

Ia menyebut, serikat buruh seringkali menjadi pihak yang memiliki beban untuk menanggung aduan para buruh akibat kasus PHK.

Nelson menyatakan, negara seharusnya hadir dengan menyalurkan mereka ke perusahaan lain.

"Kami contohkan di Jepara saat ada gelombang PHK besar (PT Samwon), akhirnya kami menghubungi pengurus di perusahaan-perusahaan yang lain supaya bisa menyalurkan ke perusahaan lain," tuturnya.

"Kami mendorong pemerintah yang harusnya bertanggung jawab, jangan kemudian tanggung jawab dialihkan ke kami semua," imbuhnya.

Menurut dia, pemerintah kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan.

"Kalau terjadi pelanggaran oleh perusahaan, pemerintah harus tegas. Jangan cuma sanksi administratif, disuratin gitu aja. Itu yang membuat kami kecewa," tukasnya. (Iwan Arifianto)

Bupati Jepara: Bumdes Penggerak Ekonomi Lokal Untuk Kemandirian Masyarakat

Senin, 21 September 2026 21:06 WIB

Penulis: Saiful Ma Sum, Editor: Rival Al Manaf

<https://jateng.tribunnews.com/jepara-memesona/1267075/bupati-jepara-bumdes-penggerak-ekonomi-lokal-untuk-kemandirian-masyarakat>

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara tidak hanya fokus mendukung UMKM naik kelas.

Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga didorong menjadi penggerak ekonomi masyarakat lokal daerah.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo menyampaikan, BUMDes tidak hanya melahirkan produk kuliner dan kerajinan saja.

BUMDes bahkan mampu menciptakan peluang kerja dan membangun usaha berbasis bisnis yang berorientasi untuk kebutuhan masyarakat. Seperti contoh BUMDes dengan jenis usaha ayam petelur di Desa Geneng, Kecamatan Batealit.

Selain itu, tak sedikit dari BUMDes yang juga berhasil membangun usahanya untuk menghidupkan ekonomi masyarakat desa. Syukur-syukur bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten.

"Baru-baru ini kami gelar Gebyar Produk BUMDes 2026 berlangsung sukses dan mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan serupa akan terus diberikan untuk memberikan fasilitasi bagi BUMDes," terangnya, Senin (21/9/2026).

Menurut Mas Wiiwit, saat ini sudah ada 184 BUMDes dan 9 BUMDesma di Kabupaten Jepara.

Meski tidak semuanya aktif, dia berharap peran BUMDes semakin berkontribusi dalam membangun iklim ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Sekaligus menjadi penggerak ekonomi lokal, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja.

Lewat pameran, ekonomi masyarakat bisa terdongkrak. Dengan cara memaksimalkan apa yang menjadi potensi desa untuk dikembangkan dan dikenalkan kepada masyarakat luas.

"Kita harus membangun ekonomi dari bawah, mulainya dari desa. Salah satunya ya lewat BUMDes bagaimana membangun usaha yang sehat, lapangan kerja yang lebih luas," ujar dia.

Pameran Ajang Pasarkan Produk Unggulan

Sebelumnya, Pemkab Jepara baru-baru ini telah menggelar Gebyar Produk BUMDesa/BUMDesa Bersama dan Produk Unggulan Desa Kabupaten Jepara Tahun 2026 selama tiga hari, Jumat-Minggu (18-20/9/2026) di Alun-alun Jepara.

Witiarso bahkan tidak hanya melihat produk yang dipamerkan, juga ikut mencicipi beragam makanan sekaligus memborong produk unggulan yang dipasarkan.

Di antaranya ada makanan khas Jepara berupa horog-horog sate kikil, produk telur asin khas Jepara, hingga kerajinan dari tangan-tangan kreatif masyarakat.

Witiarso bertekad membangun ekosistem ekonomi desa yang semakin kuat dan mandiri, serta berdaya saing. (Sam)

AS-China Bahas AI dan Investasi di Hari Kedua Negosiasi Dagang

Selasa, 22 September 2026 10:50 WIB

Nectar Gan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122302/as-china-bahas-ai-dan-investasi-di-hari-kedua-negosiasi-dagang/2>

Bloomberg, Pejabat China dan Amerika Serikat (AS) mengakhiri hari kedua perundingan di New York pada Senin (21/9) untuk membahas kecerdasan buatan (AI), investasi, dan perdagangan. Kedua pihak berupaya memajukan negosiasi menjelang kunjungan Presiden Xi Jinping ke AS pada pekan ini.

Perundingan pada Senin berfokus pada pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai oleh negosiator utama AS dan China, kata Wakil Menteri Keuangan China Liao Min dalam pernyataan singkat di luar kantor pusat JPMorgan Chase & Co di New York, tempat pertemuan berlangsung. Liao tidak memberikan komentar ketika ditanya mengenai pembahasan terkait kemungkinan perpanjangan gencatan perang dagang. Tidak ada pejabat senior lain dari kedua negara yang terlihat di lokasi tersebut.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent, negosiator perdagangan utama China Li Chenggang, dan Wakil Perdana Menteri He Lifeng menggelar perundingan selama sehari penuh pada Minggu, menjelang kedatangan Xi yang diperkirakan pada Rabu (23/9).

Setelah perundingan pada Minggu, Li mengatakan pertemuan berlangsung dalam “suasana yang baik”, sementara Bessent menyebutnya “sangat sukses”. Bessent mengatakan kedua negara sepakat membentuk apa yang disebutnya sebagai “dialog AI AS-China” yang bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai manfaat dan ancaman teknologi tersebut.

Dengan gencatan dagang yang akan berakhir pada November, perhatian kini tertuju pada apakah China dan AS dapat menyepakati perpanjangan serta, jika kesepakatan tercapai, berapa lama perpanjangan tersebut akan berlaku. Dalam wawancara dengan Bloomberg TV pada Senin, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan perpanjangan selama tiga hingga enam bulan mungkin dilakukan. Dia menambahkan bahwa masih ada waktu untuk membahas ketentuan perpanjangan tersebut.

Donald Trump dan Xi diperkirakan akan membahas sejumlah isu, termasuk perdagangan, logam tanah jarang, dan kecerdasan buatan. Berdasarkan data bea cukai China, pengiriman magnet logam tanah jarang dari China ke AS turun 21% pada Agustus menjadi 512 ton dibandingkan bulan sebelumnya. Data tersebut menegaskan kekhawatiran bahwa China masih membatasi arus mineral penting tersebut meski telah mencapai gencatan dagang pada tahun lalu.

AS-China Belum Sepakat Soal Perpanjangan Gencatan Perang Dagang

Selasa, 22 September 2026 08:50 WIB

Annmarie Hordern, Jonathan Ferro dan Alicia Diaz

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122284/as-china-belum-sepakat-soal-perpanjangan-gencatan-perang-dagang/2>

Bloomberg, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengindikasikan bahwa China dan Amerika Serikat (AS) masih memiliki perbedaan pandangan mengenai ketentuan perpanjangan gencatan dagang. Dia menyebut periode tiga hingga enam bulan sebagai rentang waktu yang dapat didukung Washington.

“Kami akan terus membahas hal tersebut,” kata Greer dalam wawancara dengan Bloomberg Television pada Senin (21/9), ketika ditanya mengenai berakhirnya gencatan tarif dengan Beijing pada 10 November. “Pandangan kami, perpanjangan tersebut tidak akan disepakati hari ini. Namun, masih ada waktu sebelum tenggat tersebut. Jadi, saya memperkirakan kami akan terus berunding dan saya pikir kedua pihak menginginkannya.”

Greer menjelaskan bahwa China telah menciptakan ketidakpastian dengan membatasi ekspor logam tanah jarang, yang kini dipantau oleh AS. Oleh karena itu, Washington menginginkan perpanjangan secara bertahap untuk memastikan kepatuhan China terhadap kesepakatan. “Menurut saya, mengatakan bahwa kami memiliki kepercayaan dan keyakinan penuh satu sama lain pada tahap ini merupakan hal yang sedikit naif,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah perpanjangan selama tiga hingga enam bulan sedang dibahas, Greer mengatakan bahwa “rentang waktu tersebut mungkin merupakan pilihan yang tepat”, meski pengumumannya kemungkinan tidak akan dilakukan pada pekan ini.

Greer menyampaikan pernyataan tersebut setelah dirinya dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent menggelar perundingan selama beberapa jam di New York pada Minggu. Kedua pihak membahas kecerdasan buatan (AI), perdagangan, dan dampak perang Iran dalam negosiasi yang turut mempersiapkan pertemuan tingkat tinggi antara para pemimpin, Donald Trump dan Xi Jinping, pada pekan ini.

“Fokusnya adalah menjaga stabilitas hubungan antara AS dan China, dan kami terus melanjutkan upaya tersebut,” kata Greer.

Musalem The Fed Sinyalkan Suku Bunga AS Bakal Naik Lagi

Selasa, 22 September 2026 07:15 WIB

Jonnelle Marte

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122272/musalem-the-fed-sinyalkan-suku-bunga-as-bakal-naik-lagi/2>

Bloomberg, Gubernur Federal Reserve Bank of St. Louis Alberto Musalem mengatakan kenaikan suku bunga tambahan mungkin diperlukan untuk mencapai target inflasi bank sentral. Dia menambahkan bahwa kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed) mungkin masih memberikan stimulus terhadap perekonomian meski suku bunga telah dinaikkan bulan ini.

“Permintaan yang terus bertahan dan tekanan pasokan yang berulang masih berkontribusi terhadap tingginya risiko inflasi. Saya menilai, tanpa pengetatan kebijakan lebih lanjut untuk mengendalikan inflasi, kemungkinan inflasi akan berada jauh di atas target 2% kami dalam 18 bulan ke depan lebih besar dibandingkan kemungkinan inflasi mencapai target tersebut,” kata Musalem dalam wawancara dengan Reuters pada Senin (21/9).

Para pejabat The Fed sepakat secara bulat menaikkan suku bunga pada pekan lalu untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun. Mereka juga mengisyaratkan kemungkinan menaikkan suku bunga satu kali lagi sebelum akhir tahun. Gubernur The Fed Kevin Warsh mengatakan langkah tersebut bertujuan mengurangi “porsi akomodasi” kebijakan moneter dan membantu mempercepat kembalinya inflasi ke level 2%.

Musalem, yang tidak memiliki hak suara dalam keputusan kebijakan moneter tahun ini, mengatakan kenaikan suku bunga lebih awal melalui langkah-langkah bertahap akan “lebih minim gangguan” dibandingkan menerapkan kebijakan yang lebih besar pada tahap berikutnya. Dia juga menyebut kisaran suku bunga acuan The Fed saat ini, yaitu 3,75% hingga 4%, berada “di sisi akomodatif”. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan moneter saat ini belum memberikan tekanan yang cukup besar terhadap perekonomian untuk memperlambat pertumbuhan dan meredam inflasi.

Uni Eropa dan Filipina Capai Kesepakatan Substansial Perjanjian Perdagangan Bebas

Selasa, 22 September 2026 11:03 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/uni-eropa-dan-filipina-capai-kesepakatan-substansial-perjanjian-perdagangan-bebas>

KONTAN.CO.ID - BRUSSEL. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan bahwa mereka baru saja menandatangani perjanjian perdagangan bebas.

Mengutip Reuters, Selasa (22/9/2026), Komisaris Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maros Sefcovic dan Menteri Perdagangan Filipina Ma. Cristina Roque menyatakan dalam pernyataan bersama bahwa kesepakatan substansial yang dicapai mengenai perjanjian perdagangan bebas tersebut menempatkan negosiasi pada jalur yang jelas menuju penyelesaian formal dalam beberapa bulan mendatang.

Roque dan Sefcovic mengatakan mereka telah menginstruksikan para negosiator untuk merampungkan kesepakatan tersebut sesegera mungkin.

Kedua belah pihak menyatakan bahwa kesepakatan ini akan memperdalam hubungan perdagangan dan investasi bilateral, serta membuatnya lebih beragam dan tangguh di tengah volatilitas global.

Perjanjian perdagangan bebas (FTA) ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi dunia usaha—termasuk UMKM—serta bagi para petani, pelaku industri manufaktur, dan konsumen, sekaligus memberikan aturan yang adil dan kepastian yang lebih besar.

Kesepakatan Dagang Vietnam-AS Segera Diteken

Selasa, 22 September 2026 09:17 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Khomarul Hidayat

<https://internasional.kontan.co.id/news/kesepakatan-dagang-vietnam-as-segera-diteken>

KONTAN.CO.ID - HANOI. Negosiasi tarif perdagangan antara Vietnam dengan Amerika Serikat (AS) masih berlangsung dan mulai menuai kesepakatan.

Pemimpin Vietnam To Lam mengatakan telah terjadi negosiasi yang positif mengenai kesepakatan perdagangan antara Vietnam dan AS. Kesepakatan tersebut akan segera ditandatangani dalam waktu dekat, demikian pernyataan pemerintah Vietnam pada Selasa (22/9/2026), seperti dikutip Reuters.

Pernyataan Lam disampaikan setelah ia bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer di New York, tempat Lam akan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pertemuan tersebut, To Lam mendesak AS untuk mengambil pendekatan komprehensif terhadap masalah perdagangan yang belum terselesaikan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan Bagian 301 (Section 301) oleh Washington.

"Kesepakatan perdagangan akan menyediakan kerangka kerja yang stabil dan berjangka panjang bagi hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi antara kedua negara," sebut pemerintah Vietnam.

AS merupakan pasar ekspor terbesar bagi Vietnam yang sangat bergantung pada ekspor. Lam menyampaikan kepada Greer, Vietnam telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama dan pembelian barang-barang AS sebagai upaya memperkecil surplus perdagangannya dengan Washington.

Pernyataan tersebut mengutip perkataan Greer kepada Lam bahwa para negosiator dari kedua belah pihak telah melakukan upaya signifikan dan mencapai kemajuan substansial, sehingga pembicaraan tersebut mendekati hasil akhir.

Korea Selatan Pilih Proyek Investasi Pertama dari Paket US\$350 Miliar ke AS

Selasa, 22 September 2026 09:17 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/korea-selatan-pilih-proyek-investasi-pertama-dari-paket-us350-miliar-ke-as>

KONTAN.CO.ID - Pemerintah Korea Selatan telah memilih proyek pertama yang akan dikejar dalam paket investasi senilai US\$350 miliar ke Amerika Serikat (AS).

Proyek tersebut menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan Seoul dan Washington yang menurunkan tarif barang Korea Selatan ke AS menjadi 15%.

Melansir Reuters Selasa (22/9/2026), Menteri Perindustrian Korea Selatan Kim Jung-kwan mengatakan, pemerintah juga akan memberikan pengarahan kepada parlemen mengenai dua proyek lain yang tengah dipertimbangkan.

Namun, Seoul belum mengambil keputusan untuk melanjutkan kedua proyek tersebut.

Kim mengatakan kedua proyek itu mencerminkan kepentingan kedua negara, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Pengarahan kepada parlemen menjadi salah satu tahapan penting bagi Korea Selatan dan AS untuk memfinalisasi implementasi kesepakatan perdagangan.

Sejumlah anggota parlemen menilai proses tersebut merupakan salah satu langkah terakhir sebelum kedua negara menyepakati persyaratan dan mengumumkan implementasi secara resmi.

Dalam kesepakatan perdagangan yang dicapai tahun lalu, Korea Selatan berkomitmen menanamkan investasi di sektor manufaktur AS sebagai imbalan atas penurunan tarif impor produk Korea Selatan.

Dari total komitmen US\$350 miliar tersebut, sekitar US\$150 miliar dialokasikan untuk sektor galangan kapal. Sementara itu, rincian investasi strategis senilai US\$200 miliar lainnya masih dalam tahap finalisasi.

Sumber yang mengetahui proses negosiasi mengatakan Kementerian Perindustrian Korea Selatan akan memberikan pengarahan mengenai rencana pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas di Encinal, Texas, sebagai proyek potensial pertama dalam paket investasi tersebut.

Berdasarkan laporan media Korea Selatan, pembangkit listrik berkapasitas 6,3 gigawatt itu memiliki nilai sekitar US\$22,3 miliar.

Pembangkit tersebut direncanakan memasok listrik untuk pusat data kecerdasan buatan (AI) dan fasilitas produksi chip.

Selain proyek pembangkit listrik gas, Seoul dan Washington juga tengah membahas pembangunan hingga delapan reaktor nuklir berukuran besar di AS.

Korea Selatan juga mengeksplorasi kemungkinan membeli saham minoritas perusahaan nuklir AS, Westinghouse. Opsi lain yang muncul adalah keterlibatan dalam proyek liquefied natural gas (LNG) Alaska yang telah lama tertunda.

Namun, sumber yang mengetahui negosiasi mengatakan belum ada kesepakatan terkait investasi di Westinghouse. Korea Selatan juga berupaya membatasi nilai investasi tahunan maksimal US\$20 miliar untuk mengurangi dampaknya terhadap pasar valuta asing domestik.

Pembahasan mengenai implementasi kesepakatan ini sebelumnya tertunda. Pengarahan kepada komite perdagangan Majelis Nasional Korea Selatan yang sedianya dilakukan pekan lalu ditunda ketika negosiator kedua negara berupaya menjembatani perbedaan mengenai persyaratan investasi.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada Jumat lalu mengatakan, kelayakan komersial menjadi salah satu persoalan utama ketika negosiasi bergeser dari kesepakatan umum menuju rincian masing-masing proyek.

Menurut Lee, Seoul berupaya memastikan kesepakatan tersebut mencantumkan prinsip investasi yang "commercially reasonable" atau layak secara komersial.

Hal ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai tingkat pengembalian investasi, pembagian keuntungan, hingga mekanisme penanganan kerugian apabila proyek yang dibiayai tidak menghasilkan keuntungan.

Kelompok oposisi di parlemen Korea Selatan meminta pengawasan yang lebih ketat. Mereka memperingatkan potensi risiko finansial yang tidak proporsional bagi Seoul, terutama dalam investasi proyek energi.

Ketua komite perdagangan Kim Sung-won juga mengatakan kekhawatiran meningkat terkait persyaratan investasi di sektor nuklir dan pembangkitan listrik.

Penundaan lebih lanjut dalam implementasi kesepakatan berpotensi kembali memicu ketegangan antara Seoul dan Washington.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengancam akan menaikkan tarif terhadap produk Korea Selatan karena menilai implementasi kesepakatan berjalan terlalu lambat.

Lee saat ini telah berada di AS untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam kunjungannya, Lee juga berupaya melakukan pertemuan dengan Trump dan sejumlah pemimpin negara lainnya.

Yen Tertekan ke 157 per Dolar, Selisih Suku Bunga Jepang-AS Jadi Sorotan

Selasa, 22 September 2026 08:33 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/yen-tertekan-ke-157-per-dolar-selisih-suku-bunga-jepang-as-jadi-sorotan>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar yen Jepang kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa (22/9/2026).

Pelaku pasar menilai Bank of Japan (BOJ) kesulitan mengejar perubahan kebijakan bank sentral global yang semakin hawkish, sehingga kesenjangan suku bunga Jepang dengan negara-negara maju lainnya masih lebar.

Mengutip Reuters, yen diperdagangkan di sekitar 157,33 per dolar AS pada Selasa pagi. Pergerakan yen cenderung terbatas karena pasar Jepang masih libur serta adanya kewaspadaan terhadap potensi intervensi pemerintah Jepang di pasar valuta asing.

Kekhawatiran tersebut muncul setelah surat kabar Nikkei melaporkan Jepang melakukan pengecekan terhadap kurs dolar-yen pada Jumat lalu.

Langkah semacam itu kerap menjadi indikasi awal sebelum otoritas melakukan intervensi di pasar valuta asing.

Tekanan terhadap yen kembali menguat setelah BOJ menaikkan suku bunga pada Jumat. Namun, keputusan tersebut disertai dua suara berbeda yang menginginkan kebijakan lebih longgar.

Kondisi tersebut berbeda dengan Federal Reserve (The Fed) yang juga menaikkan suku bunga pada pekan lalu, tetapi memberikan sinyal kebijakan yang lebih hawkish. Sejumlah bank sentral utama lainnya juga mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut tahun ini.

Ekonom Asia senior Union Bancaire Privée Carlos Casanova mengatakan, selama BOJ tidak menaikkan suku bunga secara lebih cepat dibandingkan The Fed, selisih suku bunga AS-Jepang sekitar 275 basis poin akan terus mendukung strategi carry trade yang menggunakan yen sebagai sumber pendanaan.

"Kami memperkirakan dolar-yen naik ke 160 pada akhir tahun sebelum kemudian menguat secara moderat ke 156 pada pertengahan 2027," kata Casanova dalam catatan kepada klien.

Pasar tunggu arah suku bunga BOJ dan The Fed

Pasar saat ini memperkirakan peluang sekitar 30% bagi BOJ untuk menaikkan suku bunga acuan jangka pendek menjadi 1,5% pada Oktober.

Sementara itu, probabilitas The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 4%-4,25% diperkirakan sekitar 55%.

Perbedaan ekspektasi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat yen tetap berada di bawah tekanan. Suku bunga yang lebih tinggi di AS dapat meningkatkan daya tarik aset berbasis dolar sekaligus mendorong investor mempertahankan strategi carry trade.

Di pasar valuta asing lainnya, euro relatif stabil di US\$1,1467. Dolar Australia berada di sekitar US\$0,7120, sedangkan poundsterling diperdagangkan di sekitar US\$1,3372.

Dolar Selandia Baru juga masih berada di dekat level terendah dalam beberapa bulan, yakni sekitar US\$0,5708. Suku bunga Selandia Baru sebesar 2,75% masih jauh di bawah sejumlah negara maju lainnya.

Analisis ANZ menilai, pergerakan dolar Selandia Baru masih lemah karena mata uang dengan imbal hasil lebih tinggi mendapat keuntungan dari strategi carry trade.

Bahkan jika pasar memperkirakan sekitar lima kali kenaikan suku bunga lagi di Selandia Baru, tingkat suku bunga tersebut masih belum mendekati suku bunga The Fed maupun Reserve Bank of Australia (RBA), yang keduanya diperkirakan masih akan meningkat.

Pemerintah Lunasi utang BLBI Rp218 T, Pakai Sisa Surplus BI

Selasa, 22 September 2026 15:50 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122355/pemerintah-lunasi-utang-blbi-rp218-t-pakai-sisa-surplus-bi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat menangani krisis keuangan 1997-1998 dengan nilai mencapai Rp218,3 triliun kepada Bank Indonesia (BI).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan kewajiban tersebut tercatat sebagai utang pemerintah kepada BI dan secara bertahap dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran terakhir dilakukan pada 24 Agustus 2026 dengan memanfaatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sisa surplus BI.

"Jumlah surplus BI berdasarkan hasil audit laporan keuangan 2025 mencapai Rp55 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Terkait mekanismenya, surplus yang diperoleh BI disetorkan ke kas negara dan dicatat sebagai PNBP. Sebagian dari setoran surplus tersebut kemudian digunakan pemerintah untuk membayar kewajiban obligasi rekap kepada BI.

Namun, Suahasil tetap menegaskan pelunasan utang pemerintah kepada BI tersebut tidak menghapus hak tagih negara terhadap para obligor atau debitur BLBI.

"Jadi kalau para debitur itu tercatat sebagai nasabah di bank, banknya itu kemudian sudah dilakukan rekap, pernah menerima BLBI atau dilakukan rekapitalisasi, nah kemudian diambil alih oleh

pemerintah. Maka pemerintah memiliki hak tagih atas semua debitur yang masih, atas semua kewajiban dari obligor maupun debitur tersebut," pungkasnya.

Rupiah Masih di Bawah Tekanan Global: Yield & Harga Minyak Naik

Selasa, 22 September 2026 15:57 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122356/rupiah-masih-di-bawah-tekanan-global-yield-harga-minyak-naik/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Selasa (22/9/2026) dengan pelemahan 0,19% ke posisi Rp17.872/US\$, sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang berada di zona merah.

Harga minyak kembali menguat menjadi penahan laju penguatan mata uang kawasan hari ini. Kenaikan harga Brent 1,28% ke US\$101,62/US\$ terpicu oleh risiko pasokan di Timur Tengah yang masih tinggi, usai sebuah kapal tanker dilaporkan terkena serangan di Selat Hormuz.

Di saat yang sama, kabar bahwa produksi di ladang minyak terbesar Libya juga anjlok lebih dari separuh, setelah sebuah pipa terminal ekspor ditutup oleh kelompok bersenjata. Bloomberg News melaporkan bahwa ladang minyak Sharara saat ini hanya memproduksi 127 ribu barel per hari.

Risiko pasokan yang meningkat dan ketidakpastian geopolitik Di pasar mata uang, yen Jepang melemah bersama rupiah, yuan offshore, yuan China, dolar Singapura, baht Thailand, rupee India dan ringgit Malaysia.

Sebaliknya, penguatan terjadi pada won Korea Selatan yang ditopang oleh masuknya aliran modal asing di pasar saham. Begitu juga dolar Taiwan, menguat bersama peso Filipina, dan dolar Hong Kong.

Namun, tekanan cukup beragam bagi pasar surat utang. Pasar obligasi yang mengalami aksi jual di antaranya Taiwan dengan obligasi tenor 10 tahun turun 4,4 bps ke 1,85%, disusul Thailand terpankas 3,4 bps ke 2,18%. Begitu juga Singapura turun 2,1 bps ke 2,38%. Bahkan obligasi pemerintah Malaysia terpankas paling dalam 9,2 bps ke 3,82%.

Sebaliknya, obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun masih mencatat kinerja dengan kenaikan 0,6 bps ke 7,07%, bersama India naik 0,8 bps jadi 7,05%.

Pelaku pasar akan mencermati arah kebijakan moneter Tanah Air oleh Bank Indonesia (BI) yang besok akan mengumumkan suku bunga acuannya.

Berdasarkan konsensus yang dihimpun Bloomberg, pelaku pasar yang terdiri ekonom dan analis menghasilkan median estimasi 5,75% alias BI diperkirakan tidak mengerek suku bunga acuan pada pertemuan kali bulan ini.

Sebagian ekonom yang memperkirakan BI menahan suku bunga berpendapat bahwa upaya BI dalam menjaga rupiah kini tak cuma bersandar pada instrumen suku bunga.

Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhru Fulvian berpendapat, sumber tekanan rupiah saat ini berasal dari global yield, minyak, dan tingginya risiko valuta asing. "Maka, instrumennya juga harus lebih spesifik terhadap sumber masalah tersebut," ujar Fakhru.

Ia menilai di tengah tingginya yield global, harga minyak, dan ketidakpastian kebijakan moneter global, BI perlu semakin mengoptimalkan instrumen FX swap, DNDF, serta pengelolaan likuiditas dan arus modal asing.

Ia juga menambahkan, BI dapat mempertimbangkan peningkatan sementara atas fasilitas hedging yang sudah ada, khusus untuk dana segar dengan karakteristik tertentu.

Fasilitas tersebut sebaiknya bersifat sementara (temporary), memiliki batas maksimal (capped), dan diberikan dengan mempertimbangkan jangka waktu pendanaan (duration-sensitive).

Artinya, sumber dana luar negeri yang lebih stabil dan berjangka panjang, seperti pinjaman jangka panjang perbankan, pendanaan dari perusahaan induk, serta investasi langsung (FDI) dan investasi portofolio jangka panjang, dapat diberikan insentif yang lebih besar dibandingkan dana asing yang masuk hanya untuk jangka pendek.

Namun konsensus itu tak sepenuhnya bulat, ada juga ekonom yang memperkirakan BI akan mengerek suku bunga acuan ke 6%. Sebab, tekanan terhadap rupiah kian meningkat ditambah bank sentral global seperti Federal Reserve (The Fed), Bank of Japan (BoJ) serta European Central Bank (ECB) juga menaikkan suku bunga sehingga memberikan tekanan pada kurs mata uang emerging market seperti Indonesia.

David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), memperkirakan adanya kenaikan BI Rate 25 bps menjadi 6% pada pertemuan September ini.

Bahkan, David memperkirakan BI akan mengerek suku bunga acuan pada akhir tahun sebesar 25-50 bps seiring dengan ekspektasi kenaikan Fed Rate sekali lagi pada Desember.

Sebagai catatan, BI kembali menggelar pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada hari ini dan besok 22-23 September. Ini merupakan pertemuan kedua di bawah kepemimpinan gubernur baru, Destry Damayanti.

Konsensus Bloomberg: BI Rate Tetap di 5,75%

Selasa, 22 September 2026 13:29 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122319/konsensus-bloomberg-bi-rate-tetap-di-5-75/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Survei Bloomberg terhadap 35 ekonom dan analis menghasilkan konsensus bahwa Bank Indonesia (BI) diperkirakan menahan BI Rate pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi September, yang hasilnya akan diumumkan esok hari, Rabu (22/9/2026).

Sebanyak 32 dari 35 ekonom memperkirakan BI mempertahankan suku bunga di 5,75%. Artinya, konsensus pasar ini menunjukkan bahwa pasar tidak melihat kebutuhan bagi BI untuk kembali menaikkan suku bunga dalam RDG September, meski lingkungan eksternal masih menantang.

Namun, 3 orang ekonom memperkirakan adanya kenaikan 25 basis poin menjadi 6%. Salah satu ekonom yang memperkirakan BI Rate akan naik adalah David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Ia memproyeksikan BI rate akan naik 25 bps lantaran tekanan terhadap rupiah kian meningkat. "Bank sentral global seperti The Fed dan BoJ juga menaikkan suku bunga sehingga memberikan tekanan pada kurs mata uang emerging market seperti Indonesia," kata David kepada Bloomberg Technoz.

David menambahkan, sampai akhir tahun BI Rate diperkirakan masih ada peluang naik 25-50 bps seiring dengan ekspektasi kenaikan Fed Rate sekali lagi pada Desember.

Proyeksi David sejalan dengan Sanjay Mathur dari ANZ Bank dan Fikri C. Permana dari KB Valbury Sekuritas.

Berbeda pandangan, sebagian besar ekonom dan analis lainnya justru memperkirakan BI Rate tetap berada di 5,75%. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhru Fulvian berpendapat bahwa stabilisasi rupiah tidak harus selalu mengandalkan kenaikan suku bunga.

Fakhru menilai, di tengah tingginya yield global, harga minyak, dan ketidakpastian kebijakan moneter global, BI perlu semakin mengoptimalkan instrumen FX swap, DNDF, serta pengelolaan likuiditas dan arus modal asing.

"Tidak semua masalah rupiah harus dibayar dengan suku bunga yang lebih mahal bagi seluruh perekonomian. Kalau sumber tekanannya terutama berasal dari global yield, minyak, dan tingginya risiko valuta asing, maka instrumennya juga harus lebih spesifik terhadap sumber masalah tersebut," terang Fakhru.

Senada, Ekonom Bloomberg Economics Tamara Henderson menilai kenaikan suku bunga sebesar 100 bps pada Mei-Juni telah cukup mendorong aliran modal asing masuk ke Indonesia, meski perang AS-Iran semakin intensif, harga minyak global meningkat dan imbal hasil obligasi AS naik.

"Rupiah menguat terhadap dolar AS sejak akhir Juli hingga pertengahan September dan mencatat kinerja yang lebih baik dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya," kata Henderson.

Sementara Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI) Josua Pardede berpandangan peluang BI mempertahankan 5,75% relatif tinggi, dengan adanya penguatan rupiah pada Agustus, perbaikan cadangan devisa, surplus perdagangan, serta transmisi suku bunga pasar uang yang membaik. Josua menilai BI memiliki instrumen lain untuk menjaga stabilitas rupiah.

"Instrumen pertama yang menurut saya harus lebih aktif digunakan adalah stabilisasi rupiah melalui intervensi valuta asing, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri, melalui transaksi tunai dan kontrak berjangka tanpa penyerahan valuta asing," kata Josua.

Josua menambahkan, saat ini BI telah menggunakan kombinasi tersebut untuk mengurangi gejala rupiah tanpa mengubah suku bunga kebijakan.

Instrumen Selain Suku Bunga

Upaya BI dalam menjaga rupiah kini tak cuma bersandar pada instrumen suku bunga. Seperti dikatakan Fakhru, jika sumber tekanannya terutama berasal dari yield, minyak, dan tingginya risiko valuta asing, maka instrumennya mengarah pada sumber masalah tersebut secara spesifik.

Fakhru mengatakan BI sebenarnya telah bergerak ke arah tersebut.

"Pada Agustus lalu, BI mempertahankan BI Rate di 5,75% sekaligus memperluas insentif pengurangan premi FX swap sebesar 12,5%, dari sebelumnya hanya untuk portfolio inflows menjadi juga mencakup pinjaman luar negeri perbankan dan FDI," kata Fakhru.

Ia mengatakan hal ini pernah dilakukan bank sentral India, Reserve Bank of India (RBI), yang menggunakan fasilitas swap konsensual untuk menarik pendanaan valuta asing baru dengan memberikan terms hedging yang sangat menarik dana dalam waktu tertentu.

Menurut Fakhru, Indonesia tidak perlu menyalin kebijakan India secara utuh. BI dapat mempertimbangkan peningkatan sementara atas fasilitas hedging yang sudah ada, khusus untuk dana segar dengan karakteristik tertentu. Fasilitas tersebut sebaiknya bersifat sementara (temporary), memiliki batas maksimal (capped), dan diberikan dengan mempertimbangkan jangka waktu pendanaan (duration-sensitive).

Artinya, sumber dana luar negeri yang lebih stabil dan berjangka panjang, seperti pinjaman jangka panjang perbankan, pendanaan dari perusahaan induk, serta investasi langsung (FDI) dan investasi portofolio jangka panjang, dapat diberikan insentif yang lebih besar dibandingkan dana asing yang masuk hanya untuk jangka pendek.

“Prinsipnya sederhana: semakin lama modal bersedia tinggal di Indonesia, semakin besar currency-risk intermediation yang dapat diberikan BI. Desainnya bisa berupa short entry window, longer holding incentive, dan staggered exit,” kata Fakhrol.

Sementara menurut Josua, BI masih punya cukup bantalan dalam bentuk cadangan devisa untuk mencegah pelemahan rupiah yang terlalu cepat.

Selanjutnya, Josua menambahkan BI juga masih memiliki daya tarik Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan struktur sukubunga operasi moneter.

"BI tidak harus menaikkan BI Rate untuk membuat aset rupiah tetap kompetitif terhadap dolar. Tingkat imbal hasil dan tenor instrumen moneter dapat dikalibrasi agar tetap menarik aliran modal asing sekaligus menyerap kelebihan likuiditas yang berpotensi masuk ke permintaan valuta asing," ujar Josua.

Untuk diketahui, posisi SRBI pada 18 September masih sekitar Rp1.013 triliun. Sehingga, menurut Josua instrumen ini tetap mempunyai peran besar dalam bauran kebijakan BI.

Namun begitu, Josua memberi catatan bahwa strategi ini tetap punya batas. Sebab, jika BI harus menaikkan imbal hasil SRBI terlalu tinggi hanya untuk mempertahankan rupiah, kondisi pembiayaan domestik pada akhirnya tetap mengetat meskipun BI-Rate tidak berubah.

Instrumen lainnya berpotensi dicoba adalah kebijakan makroprudensial yang bisa tetap diarahkan mendukung pembiayaan sektor produktif.

"BI sudah menggunakan insentif likuiditas makroprudensial, pelonggaran rasio pembiayaan properti, perluasan surat berharga korporasi yang diperhitungkan dalam rasio intermediasi, serta peningkatan batas pendanaan luar negeri perbankan," kata Josua.

IMF Ingatkan Soal Pembengkakan Utang, Indonesia Aman?

Selasa, 22 September 2026 11:31 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122306/imf-ingatkan-soal-pembengkakan-utang-indonesia-aman/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan negara-negara di dunia mengenai utang global yang diproyeksikan meningkat. IMF menilai kondisi ini akan membebani kondisi fiskal negara-negara di dunia akibat era suku bunga tinggi baru saja dimulai untuk menekan inflasi global.

Meski begitu, Indonesia sejauh ini belum berada dalam tekanan utang yang serius. Bahkan, IMF menilai risiko sovereign stress Indonesia dalam jangka menengah masih rendah.

IMF memperkirakan utang luar negeri Indonesia berada sekitar 29,7% PDB pada 2026 dan turun menjadi sekitar 28,7% pada 2031. IMF juga menilai kebutuhan pembiayaan eksternal Indonesia masih berkelanjutan dan risiko rollover jangka pendek relatif terbatas karena porsi utang jangka panjang lebih besar.

Ke depan, IMF memproyeksikan utang publik Indonesia berada sedikit di atas 40% Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka menengah, sementara defisit diperkirakan relatif stabil di sekitar 2,8% PDB.

Namun, IMF juga memberi catatan penting, bahwa biaya pinjaman dan rasio pembayaran utang terhadap penerimaan pajak Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara-negara sebanding. Sementara, pembayaran bunga menyerap hampir separuh kebutuhan pembiayaan bruto pemerintah (Gross Financing Needs/GFN).

IMF memperingatkan bahwa semakin besar porsi anggaran yang harus dialokasikan untuk membayar bunga, semakin sempit pula ruang pemerintah untuk membiayai program pembangunan dan merespons guncangan ekonomi.

IMF mencatat GFN sektor publik Indonesia mencapai sekitar 5,5% PDB dan meningkat menjadi 6,5% PDB dalam proyeksi berikutnya. IMF memperkirakan pembayaran bunga utang berada di sekitar 2,4% PDB, sementara penerimaan pajak hanya sekitar 11,2%-11,3% PDB.

Sehingga berpotensi membuat ruang fiskal Indonesia relatif terbatas jika imbal hasil (yield) obligasi pemerintah naik, atau rupiah melemah sehingga biaya utang valas bisa meningkat.

Peringatan IMF itu sejalan dengan perkembangan utang luar negeri Indonesia.

Berdasarkan statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Agustus, posisi utang luar negeri mencapai US\$454,76 miliar, naik 4,9% secara tahunan (year-on-year/yoy). Rasio utang luar negeri terhadap PDB berada di 30,7%, dan sebagian besar merupakan utang jangka panjang.

Bank Indonesia (BI) mengatakan dalam laporannya, bahwa struktur utang luar negeri Indonesia itu masih dianggap sehat dan terkendali.

Namun begitu, secara komposisi dari total utang luar negeri pemerintah sebesar US\$218,39 miliar itu, sekitar 67,1% atau setara US\$146,59 miliar berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) alias obligasi pemerintah. Sedangkan, komposisi pinjaman bilateral maupun multilateral 'hanya' US\$71,8 miliar.

Dengan kata lain, pemerintah semakin banyak membiayai kebutuhan anggarannya melalui penerbitan SBN alias obligasi yang dibeli investor. Struktur ini memang memberi fleksibilitas dalam mencari pembiayaan ketimbang mengandalkan utang dalam bentuk pinjaman bilateral maupun multilateral.

Akan tetapi, biaya utang justru lebih sensitif terhadap perubahan kondisi pasar keuangan, sebab dalam setiap penerbitan SBN tersemat biaya untuk membayar bunga utang. Sebagai catatan, realisasi belanja bunga utang akhir Agustus senilai Rp394,2 triliun dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp599,4 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto mengatakan, sebanyak Rp366,4 triliun diantaranya belanja di dalam negeri, sementara luar negeri tercatat mencapai Rp27,8 triliun.

Ia memastikan realisasi pembiayaan utang hingga saat ini masih sesuai dengan desain dalam APBN 2026, dengan outlook defisit dipatok 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Tetapi, beban itu kian tahun sejatinya kian menggunung. Dalam APBN 2027, bunga utang dipatok sebesar Rp650,31 triliun. Padahal, pada 2025 realisasi pembayaran bunga utang pemerintah tercatat sebesar Rp514,39 triliun.

Kenaikan ini terjadi ditopang oleh tingginya yield obligasi global yang membuat biaya penerbitan SBN berpotensi meningkat. Dalam APBN 2027, pemerintah sendiri mengasumsikan yield SBN 10 tahun sebesar 6,9%, padahal saat ini saja yield tersebut berada di kisaran 7,1-7,15%. Bahkan, pada Juni lalu, yield tenor ini sempat menyentuh 7,44%.

Sehingga, meskipun pemerintah berkomitmen dan berupaya menjaga defisit di bawah 3% dari PDB, kebutuhan pembiayaan akan tetap besar dan biaya utang akan menjadi salah satu variabel penting dalam menjaga ruang fiskal. Ditambah, bunga utang ini juga memiliki efek bola salju jika pemerintah memiliki utang yang harus terus diperpanjang atau refinancing ketika jatuh tempo.

Jika SBN lama yang diterbitkan dengan yield lebih rendah digantikan dengan SBN baru dengan yield lebih tinggi, maka biaya bunga utang akan terus meningkat dan berpotensi menggerus ruang fiskal untuk membiayai belanja negara yang bersifat produktif.

Jelang Pengumuman BI Rate, Rupiah Dekati Rp17.900/US\$

Selasa, 22 September 2026 09:12 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122293/jelang-pengumuman-bi-rate-rupiah-dekati-rp17-900-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah dibuka melemah pada perdagangan Selasa (22/9/2026), kala sebagian mata uang Asia bergerak menguat. Melansir data Bloomberg, rupiah terpankaskan 0,17% ke Rp17.868/US\$, seiring sikap wait and see pelaku pasar jelang keputusan suku bunga acuan BI Rate besok.

Bahkan di pasar non-deliverable forwards (NDF), rupiah sudah kembali menyentuh Rp17.922/US\$ pada 09:05 WIB. Posisi rupiah di offshore ini semakin menekan rupiah di pasar spot. Pada 09:05 WIB, rupiah kembali terpeleset 0,25% ke Rp17.883/US\$.

Sementara, pergerakan di pasar mata uang Asia beragam dengan kecenderungan menguat dipimpin oleh won Korea Selatan yang terapresiasi 0,95%. Kemudian, dolar Taiwan menguat 0,24%, disusul peso Filipina, baht Thailand, dan ringgit Malaysia.

Selain rupiah, yen Jepang juga melemah meski terbatas. Kemudian ada dolar Singapura, yuan offshore, dan yuan China.

Pelemahan terhadap rupiah dipicu oleh sikap investor yang mencermati arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Konsensus ekonom dan analis yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan BI Rate tetap berada di 5,75%.

Padahal, bank sentral negara utama seperti Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed), mengambil langkah hawkish dan menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin (bps) ke 3,75-4%. Begitu juga dengan bank sentral Eropa, European Central Bank (ECB), yang mengerek suku bunga 25 bps menjadi 2,5%. Hal serupa ditempuh bank sentral Jepang (BoJ).

Namun, kekhawatiran terhadap rupiah tak cuma datang tingginya suku bunga negara utama tetapi juga harga minyak mentah dunia yang masih bertahan di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Salah satu masalah domestik dengan tingginya harga minyak adalah kondisi fundamental eksternal Indonesia yang berpotensi menghadapi tekanan. Defisit transaksi berjalan yang melebar di kuartal II-2026 jadi sinyal bahwa kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan kebutuhan impor dan valuta asing.

Lionel Priyadi, Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas, menyebut risiko defisit transaksi berjalan menjadi sekitar 1,9-2,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini. Ia menilai, besarnya defisit ini akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia dalam mempertahankan surplus perdagangan pada paruh kedua 2026. Jika surplus perdagangan tidak cukup besar untuk menutup

kebutuhan impor dan pembayaran ke luar negeri, tekanan terhadap rupiah berpotensi semakin meningkat.

Pemerintah Evaluasi Aturan Impor dan PPN untuk Dorong Industri TPT dan Garmen RI

Selasa, 22 September 2026 17:28 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-evaluasi-aturan-impor-dan-ppn-untuk-dorong-industri-tpt-dan-garmen-ri>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menyiapkan evaluasi sejumlah aturan yang dinilai masih menjadi hambatan bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta garmen nasional.

Evaluasi tersebut mencakup aturan impor, Peraturan Teknis (Pertek), hingga ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah juga meminta penertiban impor ilegal yang mengganggu industri garmen, termasuk impor ballpress.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, langkah tersebut dibahas dalam pertemuan dengan Presiden untuk mendorong penguatan industri tekstil dari sektor hulu hingga hilir.

Airlangga mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapi industri TPT adalah kemudahan masuknya bahan baku. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebutuhan bahan baku industri dapat terpenuhi sehingga tidak menghambat kegiatan produksi.

Di sisi hilir, pemerintah juga menyoroti masuknya barang impor ilegal, termasuk impor pakaian bekas atau ballpress. Menurut Airlangga, aktivitas tersebut mengganggu produsen garmen dalam negeri.

"Khusus untuk di hilir yaitu terkait dengan garmen, dimana gangguan-gangguan melalui impor kiloan ataupun impor yang ballpress, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan," tutur Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (22/9/2026).

Selain persoalan impor, pemerintah juga akan mengevaluasi ketentuan PPN yang berkaitan dengan industri tekstil dan garmen. Airlangga mengatakan, industri garmen membutuhkan fleksibilitas tenaga kerja, terutama pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), karena karakteristik permintaan yang mengikuti musim.

Menurutnya, kebutuhan tersebut berbeda dengan sejumlah negara lain. Untuk itu, pemerintah akan mencari regulasi yang sesuai terkait perlakuan PPN dalam penggunaan jasa outsourcing untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja industri.

"Jadi perlu ada penyesuaian terhadap kebutuhan PKWT, dan tadi kami sampaikan bahwa kalau melakukan outsourcing terhadap perusahaan untuk yang membantu ini, di luar negeri tidak dikenakan perpajakan. Sehingga tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa untuk PPN terkait dengan PKWT, nanti kita carikan regulasi yang pas," jelas Airlangga.

Pemerintah juga mengevaluasi ketentuan PPN bagi perusahaan tekstil dan garmen yang berorientasi ekspor. Airlangga menyebut kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga daya saing industri yang menyasar pasar global.

"Dan kemudian juga kami sampaikan, berkait dengan garment dan tekstil yang berorientasi untuk ekspor, tentu terkait dengan PPN-nya diminta untuk dapat juga dievaluasi," katanya.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan industri TPT merupakan salah satu sektor padat karya yang strategis bagi perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai sekitar 0,97%, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 4 juta orang.

Dari sisi perdagangan, kondisi industri TPT berbeda antara sektor hulu hingga tengah dengan industri garmen. Airlangga menyebut impor bahan baku tekstil mencapai sekitar US\$ 8,4 miliar, sementara eksportnya sekitar US\$ 3,1 miliar.

Sebaliknya, industri pakaian jadi mencatat ekspor sekitar US\$ 8,7 miliar dengan impor sekitar US\$ 690 juta. Dengan demikian, sektor hulu hingga tengah masih mencatat posisi sebagai net importer, sedangkan industri garmen berada dalam posisi net exporter.

Airlangga menambahkan, utilisasi pabrik tekstil saat ini berada di kisaran 75%, sehingga masih terdapat ruang untuk meningkatkan kapasitas produksi.

"Ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis, dan dalam arahan tadi terhadap Pak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6%, dan untuk industri barang, kulit, dan alas kaki tumbuhnya 8,25%," ujar Airlangga.

Pemerintah juga meminta Danantara untuk segera aktif dalam penyelesaian perusahaan-perusahaan tekstil yang tengah menjalani proses restrukturisasi. Airlangga menegaskan, industri tekstil tidak dikategorikan sebagai industri yang menuju sunset (penurunan).

"Selanjutnya, terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang direstrukturisasi, Bapak Presiden minta agar ini Danantara segera aktif untuk menyelesaikan. Selanjutnya, terkait dengan perbankan, tadi juga disampaikan Bapak Presiden bahwa industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset," pungkasnya

Realisasi Belanja Modal Daerah Baru 27%, Multiplier Effect Ekonomi Terancam Melemah

Selasa, 22 September 2026 13:31 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-belanja-modal-daerah-baru-27-multiplier-effect-ekonomi-terancam-melemah>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rendahnya realisasi belanja modal pemerintah daerah berpotensi melemahkan multiplier effect Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, belanja modal memiliki dampak yang lebih panjang terhadap kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi dibandingkan belanja rutin.

Berdasarkan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, hingga 21 September 2026, realisasi belanja daerah mencapai Rp 654,34 triliun atau 51,98% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 326,26 triliun atau 64,48% dari pagu, belanja barang dan jasa Rp 182,83 triliun atau 48,64%, belanja modal Rp 41,11 triliun atau 27,31%, serta belanja lainnya Rp 104,12 triliun atau 45,99%.

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman mengatakan, persoalan realisasi belanja daerah bukan hanya terletak pada rendahnya serapan, tetapi juga kualitas belanja.

"Ketika belanja pegawai jauh lebih cepat sementara belanja modal baru 27,31%, APBD lebih banyak bekerja untuk membiayai birokrasi daripada menjadi stimulus produktif bagi ekonomi daerah," kata Rizal kepada Kontan, Selasa (22/9/2026).

Menurut Rizal, tingginya realisasi belanja pegawai memang tetap memberikan dampak terhadap perekonomian melalui konsumsi. Namun, multiplier effect yang dihasilkan cenderung lebih pendek dibandingkan belanja modal.

Sebaliknya, belanja modal dapat memberikan efek ekonomi yang lebih panjang karena tidak hanya menciptakan permintaan dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi. Belanja tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki konektivitas, menekan biaya logistik, hingga mendorong investasi swasta.

"Rendahnya belanja modal berarti daya ungkit APBD terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja ikut melemah," ujarnya.

Rizal menilai persoalan rendahnya realisasi belanja modal daerah merupakan masalah yang bersifat struktural dan berulang. Berbeda dengan belanja pegawai yang bersifat rutin dan relatif otomatis, belanja modal menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Di antaranya adalah proses perencanaan yang lambat, tender dan pengadaan, pembebasan lahan, hingga keterbatasan kapasitas eksekusi pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat belanja produktif kerap menumpuk pada akhir tahun.

"Akibatnya, belanja produktif sering menumpuk di akhir tahun, sehingga pemerintah mengejar serapan, bukan efektivitas dan outcome," jelas Rizal.

Ia menilai pemerintah pusat perlu mengubah orientasi evaluasi APBD, dari yang selama ini lebih menekankan tingkat serapan menjadi kualitas belanja. Transfer ke Daerah (TKD) maupun insentif fiskal juga dinilai perlu lebih kuat dikaitkan dengan ketepatan waktu pelaksanaan, porsi belanja produktif, dan hasil yang dicapai.

"Jangan sampai APBD besar, tetapi daya ungkit ekonominya kecil karena terlalu banyak terserap untuk menghidupi mesin birokrasi, bukan memperbesar kapasitas ekonomi daerah," katanya.

Lebih lanjut, Rizal memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026 berada di kisaran 5,1%-5,2% secara tahunan (year on year/yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan kuartal II 2026 sebesar 5,29%.

Salah satu faktor yang menahan pertumbuhan adalah lemahnya akselerasi fiskal daerah. "Artinya, APBD yang seharusnya menjadi stimulus justru masih banyak tertahan dan belum berputar ke sektor riil," ujarnya.

Rizal memperkirakan keterlambatan belanja daerah secara kasar berpotensi memangkas sekitar 0,1-0,3 percentage point dari potensi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026. Dampaknya terutama berasal dari tertahannya konsumsi pemerintah, investasi daerah, serta multiplier effect ke sektor swasta.

"Tanpa bottleneck tersebut, pertumbuhan berpotensi mendekati 5,3%-5,5%. Jadi masalahnya bukan kekurangan anggaran, tetapi uang pemerintah daerah yang tersedia belum cukup cepat bekerja untuk menggerakkan ekonomi," pungkasnya.

Menkeu Suahasil Tindak Impor Ilegal Beras, Garam dan Pakaian Bekas Rp 27 Miliar

Selasa, 22 September 2026 12:25 WIB

Reporter: Dendi Siswant, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-suahasil-tindak-impor-ilegal-beras-garam-dan-pakaian-bekas-rp-27-miliar>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengungkap empat penindakan terhadap importasi yang diduga diberitahukan tidak sesuai dengan kondisi barang sebenarnya. Nilai ekonomis barang yang ditindak mencapai Rp 27,339 miliar.

Dalam rangkaian penindakan yang dilakukan sepanjang Agustus hingga September 2026 tersebut, Bea Cukai mengamankan 30 kontainer berisi beras dan garam serta 1.435 bale pakaian impor yang diduga merupakan pakaian bekas.

Penindakan dilakukan di sejumlah lokasi, yakni Pelabuhan Tanjung Perak, kawasan berikat di Bogor, perairan Gosong Bunga-Bunga Selat Malaka, dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi pasar domestik dari masuknya barang ilegal.

Menurut Suahasil, besarnya pasar Indonesia menjadi salah satu alasan yang membuat negara ini menarik bagi pelaku pelanggaran kepabeanan.

"Kita harus melindungi pasar kita. Kalau beras diselundupkan masuk, itu sebenarnya menodai swasembada pangan kita," kata Suahasil dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Selasa (22/9).

Dia menilai masuknya pakaian bekas impor juga dapat memberikan dampak terhadap industri dalam negeri, mulai dari penjahit hingga industri tekstil dan industri pendukungnya.

"Kalau ballpress masuk, isinya baju bekas, yang dirugikan tukang jahit Indonesia, industri tekstil Indonesia, industri yang men-support tekstil Indonesia, dan yang terakhir merugikan konsumen," katanya.

Salah satu penindakan dilakukan Bea Cukai terhadap 15 kontainer yang diberitahukan sebagai ammonium chloride asal India dengan berat total 412,5 ton di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada 19 Agustus 2026.

Dari pemeriksaan fisik dan pengujian di Laboratorium Bea Cukai Surabaya, petugas menemukan 202.450 kilogram beras dan 211.000 kilogram garam. Nilai barang tersebut diperkirakan mencapai Rp 7,853 miliar.

Bea Cukai menyatakan terdapat ketidaksesuaian material antara pemberitahuan barang dengan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium. Kasus tersebut masih dalam penanganan lebih lanjut.

Pengembangan informasi dari kasus tersebut kemudian mengarah pada penindakan berikutnya di Bogor pada 7 September 2026.

Sebanyak 15 kontainer asal India milik PT ILW diberitahukan sebagai salt-chemical used for leather tanning purposes (low grade) dengan berat 420.000 kilogram.

Namun, hasil pemeriksaan fisik menemukan 194.900 kilogram beras dan 225.400 kilogram yang diduga merupakan garam. Nilai keseluruhan barang diperkirakan mencapai Rp 8,006 miliar.

Selain beras dan garam, Bea Cukai juga melakukan dua penindakan terhadap ballpress pakaian yang diduga merupakan pakaian bekas.

Penindakan pertama dilakukan pada 14 Agustus 2026 setelah Bea Cukai menerima informasi masyarakat mengenai dugaan penyelundupan pakaian bekas dari Malaysia menggunakan kapal tanpa nama di perairan Gosong Bunga-Bunga, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Dari pemeriksaan, petugas menemukan 430 bale pakaian bekas serta empat koli suku cadang kendaraan bermotor.

Penindakan berikutnya dilakukan pada 17 September 2026 di Pelabuhan Tanjung Priok. Bea Cukai awalnya memeriksa delapan kontainer yang diduga mengangkut ballpress pakaian bekas dari rute Pontianak-Tanjung Priok.

Dalam pengembangan informasi, petugas menemukan satu kontainer tambahan di kapal yang sama. Dengan demikian, total terdapat sembilan kontainer yang diperiksa.

Hasil pemeriksaan menemukan tekstil dan produk tekstil berbagai merek dan jenis pakaian yang dikemas dalam bale. Jumlah sementara mencapai sekitar 1.005 bale dan masih dalam proses pencacahan. Nilai barang diperkirakan mencapai Rp 8,040 miliar.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan terdapat sejumlah modus yang menjadi perhatian dalam rangkaian penindakan tersebut.

Modus yang ditemukan antara lain misdeclaration atau pemberitahuan yang tidak benar, concealment and physical similarity berupa pengelabuan melalui kemasan, serta cover-up loading/camouflage melalui penyusunan barang.

"Selanjutnya, proses penyidikan akan dilakukan berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polri dan Kejaksaan RI," kata Djaka.

Dalam penanganan perkara tersebut, Bea Cukai juga berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Karantina Indonesia, Polri, Perum BULOG, dan Kejaksaan RI.

Koordinasi dilakukan untuk mendukung pemeriksaan, pendalaman informasi, serta penanganan barang dan perkara sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Bea Cukai menyatakan pengawasan kepabeanan merupakan bagian dari tugas untuk melindungi masyarakat dan industri dalam negeri, menegakkan hukum, memfasilitasi perdagangan, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

Investor Asing Masih Masuk Indonesia, Ini Keunggulan Vietnam yang Sulit Disaingi

Selasa, 22 September 2026 05:35 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/investor-asing-masih-masuk-indonesia-ini-keunggulan-vietnam-yang-sulit-disaingi>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indonesia masih memiliki daya tarik bagi investor asing, terutama karena ditopang pasar domestik yang besar dan kekayaan sumber daya alam. Namun, untuk investasi manufaktur yang berorientasi ekspor dan terintegrasi dengan rantai pasok global, Indonesia dinilai masih menghadapi persaingan ketat dari Vietnam.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, keunggulan Indonesia dalam menarik investasi memiliki karakter yang berbeda dibandingkan Vietnam.

Indonesia memiliki kekuatan dari sisi ukuran pasar domestik, sumber daya alam, khususnya nikel, serta pengembangan hilirisasi. Sementara Vietnam dinilai lebih kompetitif sebagai basis manufaktur yang terhubung dengan rantai pasok global.

"Indonesia sebenarnya masih menarik, tetapi keunggulannya berbeda dengan Vietnam. Kita tetap kuat dari sisi ukuran pasar, sumber daya alam, terutama nikel dan hilirisasi, sementara Vietnam saat ini lebih kompetitif sebagai basis manufaktur yang berorientasi ekspor," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Senin (21/9/2026).

Menurut Yusuf, arus investasi asing ke Indonesia juga masih menunjukkan pertumbuhan. Pada semester I-2026, realisasi penanaman modal asing (PMA) mencapai sekitar Rp 507,6 triliun.

Sementara itu, total investasi yang mencakup penanaman modal dalam negeri (PMDN) telah menembus sekitar Rp 1.010 triliun.

Dengan kondisi tersebut, persoalan utama Indonesia bukan lagi mengenai ada atau tidaknya investor asing yang masuk. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah memastikan modal yang masuk diarahkan ke sektor yang mampu memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja.

"Jadi persoalannya bukan apakah investor asing masih masuk, tetapi ke mana modal tersebut diarahkan dan seberapa besar dampaknya terhadap kapasitas produksi serta ekspor," katanya.

Vietnam Unggul di Manufaktur Ekspor

Yusuf menjelaskan, Vietnam memiliki keunggulan karena investasi asing di negara tersebut banyak mengalir ke sektor manufaktur dan pengolahan yang terhubung langsung dengan rantai pasok global.

Kondisi tersebut membuat perusahaan asing memiliki kontribusi yang besar terhadap aktivitas ekspor Vietnam. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang investasi asingnya masih relatif banyak mengarah ke sektor logam dasar, pertambangan, dan hilirisasi.

Meskipun nilai investasi pada sektor-sektor tersebut besar, dampaknya terhadap pembentukan basis manufaktur yang berorientasi ekspor dinilai belum sebesar Vietnam.

"Untuk pabrik yang membutuhkan kepastian proses, integrasi dengan rantai pasok global, dan orientasi ekspor, Vietnam saat ini menawarkan kondisi yang lebih kompetitif," katanya.

Di sisi lain, Indonesia tetap memiliki keunggulan yang sulit digantikan, terutama bagi investasi yang membutuhkan akses terhadap pasar domestik yang besar maupun bahan baku mineral.

Yusuf menilai investor pada dasarnya tidak meninggalkan Indonesia secara keseluruhan. Keputusan lokasi investasi lebih banyak ditentukan oleh karakteristik dan kebutuhan dari proyek yang akan dibangun.

"Untuk investasi yang membutuhkan pasar domestik besar atau akses terhadap bahan baku mineral, Indonesia tetap memiliki keunggulan yang sulit digantikan," imbuh Yusuf.

Biaya dan Kepastian Jadi Tantangan

Menurut Yusuf, persoalan yang perlu dibenahi Indonesia saat ini berkaitan dengan biaya dan kepastian dalam menjalankan investasi.

Sejumlah faktor seperti perizinan, logistik, energi, kepastian regulasi, hingga konsistensi pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah menjadi pertimbangan penting bagi investor.

Bagi perusahaan manufaktur yang berorientasi ekspor, perbedaan biaya produksi dan kepastian waktu produksi dapat secara langsung memengaruhi daya saing produk di pasar global.

Karena itu, pemerintah dinilai tidak cukup hanya mengejar peningkatan angka PMA. Kualitas investasi juga perlu menjadi perhatian agar modal asing yang masuk dapat menghasilkan produk bernilai tambah, memperbesar ekspor, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal.

"Ukuran pasar dan hilirisasi tetap menjadi modal penting, tetapi tanpa perbaikan pada biaya produksi, logistik, perizinan, dan kepastian hukum, sebagian proyek manufaktur akan lebih memilih lokasi yang menawarkan proses produksi yang lebih efisien dan lebih mudah diprediksi," katanya.

Daya Tarik Investasi Indonesia Belum Optimal

Senada, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman mengatakan, belum tepat apabila Indonesia disebut sudah tidak menarik bagi investor asing. Pasalnya, arus PMA ke Indonesia masih relatif kuat.

Namun, menurut Rizal, daya tarik Indonesia belum optimal jika dibandingkan dengan besarnya ukuran pasar dan potensi ekonomi nasional.

"Belum tepat mengatakan Indonesia tidak lagi menarik bagi investor asing karena arus PMA masih relatif kuat. Persoalannya adalah daya tarik Indonesia belum optimal dibandingkan besarnya pasar dan potensi ekonominya," kata Rizal.

Ia menilai tantangan Indonesia bukan sekadar meningkatkan jumlah modal asing yang masuk. Indonesia juga perlu memenangkan investasi berkualitas yang membawa teknologi, meningkatkan produktivitas, memperbesar ekspor, serta menciptakan pekerjaan bernilai tambah tinggi.

Rizal mengatakan keunggulan Vietnam tidak semata-mata tercermin dari rasio FDI terhadap PDB yang lebih tinggi. Faktor yang lebih penting adalah bagaimana investasi asing di Vietnam terintegrasi dengan sektor manufaktur dan rantai pasok global.

Sementara itu, investasi asing di Indonesia masih relatif terkonsentrasi pada sektor berbasis sumber daya alam dan hilirisasi komoditas.

"Pekerjaan besarnya adalah mengubah keunggulan pasar dan SDA menjadi keunggulan industri melalui kepastian regulasi, produktivitas tenaga kerja, logistik kompetitif, serta ekosistem pemasok domestik yang kuat," pungkasnya.

FDI Indonesia Tertinggal, Investor Global Beralih ke Teknologi dan Manufaktur

Selasa, 22 September 2026 05:15 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/fdi-indonesia-tertinggal-investor-global-beralih-ke-teknologi-dan-manufaktur>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Persaingan menarik investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) di ASEAN semakin ketat.

Indonesia menghadapi tantangan karena minat investor global mulai bergeser dari sektor berbasis komoditas dan pasar domestik menuju teknologi, pusat data, kecerdasan buatan (AI), serta manufaktur.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, perubahan fokus investasi tersebut membuat negara dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) lebih kompetitif.

Thailand, Malaysia dan Singapura menjadi sejumlah negara yang diuntungkan dari tren tersebut, sementara Vietnam mendapat keuntungan dari kedekatan geografis dengan China dan perannya dalam rantai pasok regional.

"FDI pada sektor teknologi, khususnya data center dan AI, tengah bertumbuh pesat sehingga menguntungkan negara dengan SDM dan infrastruktur yang dapat menampung kebutuhan tersebut," ujar David kepada Kontan, Senin (21/9/2026).

Data FDI semester I-2026 menunjukkan Singapura mencatat investasi asing sekitar US\$ 86,2 miliar. Thailand mencapai US\$ 40,5 miliar atau tumbuh 80% secara tahunan, Vietnam US\$ 34,65 miliar atau naik 60%, dan Malaysia US\$ 30,2 miliar atau tumbuh 18,5%.

Sementara itu, FDI Indonesia tercatat US\$ 28,45 miliar atau sekitar Rp 507,6 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.836 per dolar AS. Filipina mencatat US\$ 3,38 miliar, turun 17,83% secara tahunan.

Indonesia masih memiliki daya tarik dari besarnya pasar domestik, pertambangan dan CPO. Namun, sektor-sektor tersebut dinilai bukan lagi menjadi fokus utama investor global.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai persoalan Indonesia bukan hanya soal besarnya investasi yang masuk, tetapi juga daya saing dan efisiensi investasi.

Proses perizinan yang relatif panjang, perubahan regulasi, inkonsistensi kebijakan serta kesenjangan implementasi antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi hambatan bagi investor.

Selain itu, ICOR Indonesia disebut mendekati 6, lebih tinggi dibandingkan negara pesaing di ASEAN yang rata-rata berada di bawah 4. Kondisi tersebut mencerminkan kebutuhan modal yang relatif lebih besar untuk menghasilkan tambahan output.

Struktur investasi juga menjadi perhatian. Investasi padat modal, khususnya di sektor pertambangan, belum selalu menghasilkan multiplier effect yang besar bagi ekonomi domestik karena masih bergantung pada tenaga ahli dari negara asal investor serta rantai pasok yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan industri lokal.

Menurut Juniman, Indonesia juga perlu memastikan investasi yang masuk benar-benar terealisasi dalam bentuk pabrik atau kegiatan usaha yang beroperasi, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi investasi.

Di sisi lain, kesiapan SDM menjadi faktor penting untuk menarik investasi bernilai tambah lebih tinggi.

Tanpa tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, posisi strategis dalam proyek investasi asing berpotensi tetap diisi tenaga kerja dari negara asal investor.

Dari sisi ekosistem, Indonesia juga dinilai perlu membangun kawasan industri yang lebih terintegrasi, mulai dari infrastruktur, tenaga kerja, industri pendukung hingga rantai pasok.

Model seperti ini dinilai penting untuk sektor yang tengah berkembang, termasuk data center dan AI.

Bagi investor, kondisi tersebut membuat kepastian regulasi, efisiensi biaya, kualitas SDM dan kesiapan ekosistem industri menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi investasi jangka panjang.

Karena itu, peningkatan daya saing FDI Indonesia tidak cukup hanya melalui insentif dan pemangkasan perizinan.

Pemerintah perlu memastikan kebijakan berjalan konsisten hingga daerah, sekaligus meningkatkan kualitas SDM dan membangun ekosistem industri yang mampu menangkap pergeseran investasi global ke sektor teknologi dan manufaktur.

BI catat ekonomi Banyumas Raya tumbuh kuat dan inflasi terkendali

Selasa, 22 September 2026 20:10 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Heru Suyitno

<https://jateng.antaranews.com/berita/646121/bi-catat-ekonomi-banyumas-raya-tumbuh-kuat-dan-inflasi-terkendali>

Senggigi, NTB (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto mencatat perekonomian Banyumas Raya, Jawa Tengah, tumbuh kuat pada triwulan I 2026 dengan inflasi yang tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional 2,5 plus minus 1 persen.

Kepala KPwBI Purwokerto Aswin Gantina dalam kegiatan Capacity Building Media Tahun 2026 di Senggigi Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa sore, mengatakan pertumbuhan ekonomi Banyumas Raya yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara terakselerasi ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi.

"Pertumbuhan ekonomi Banyumas Raya pada triwulan I 2026 didorong peningkatan konsumsi selama festive season Ramadhan dan Idul Fitri, kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi), pencairan THR (Tunjangan Hari Raya), penyaluran stimulus pemerintah, serta berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional dan swasta," katanya.

Ia mengatakan pangsa ekonomi Banyumas Raya masih didominasi Kabupaten Cilacap 49,22 persen, Banyumas 27,52 persen, Purbalingga 12,44 persen, dan Banjarnegara 10,81 persen.

Menurut dia, sektor utama penopang perekonomian Banyumas Raya, yakni industri pengolahan 39,24 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan 14,34 persen, serta perdagangan besar dan eceran 10,91 persen.

Pada sisi harga, kata dia, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Banyumas Raya Agustus 2026 tercatat 3,19 persen (year on year/yoy) atau 0,21 persen (month to month/mtm).

Dengan demikian, lanjut dia, angka tersebut masih terjaga dalam sasaran inflasi dengan prakiraan tetap terkendali pada 2026-2027.

"Inflasi inti 2,92 persen (yoy) terutama disumbang emas perhiasan seiring kenaikan harga emas global. Inflasi volatile food 4,06 persen disumbang daging ayam ras, cabai rawit, dan beras akibat meningkatnya permintaan pada momentum Hari Kemerdekaan dan Maulid Nabi serta kenaikan harga pakan dan DOC (Day Old Chick)," katanya.

Menurut dia, kelompok administered prices justru mengalami deflasi 0,33 persen (mtm) karena penurunan tarif angkutan udara dan harga bensin.

Secara rinci, kata dia, inflasi Kota Purwokerto (Ibu Kota Kabupaten Banyumas) pada Agustus 2026 sebesar 3,15 persen (yoy) dengan pendorong daging ayam ras 0,35 persen (mtm), disusul cabai rawit dan buncis, sedangkan inflasi di Cilacap 3,08 persen (yoy).

Di sisi lain, lanjut dia, optimisme konsumen juga menguat karena hasil Survei Konsumen Bank Indonesia Purwokerto Agustus 2026 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik dari 95,6 pada Juli menjadi 104,0 pada Agustus.

"IKK menguat karena membaiknya persepsi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja, pembelian barang tahan lama, dan kondisi pendapatan saat ini maupun ekspektasi ke depan," katanya.

Aswin mengatakan sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), konsistensi kebijakan moneter, serta digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS dan pengembangan UMKM melalui flagship Karya Kreatif Serayu (KKS) menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan Banyumas Raya tetap kuat dan berdaya tahan.

APBD Perubahan Kendal Defisit Rp131 Miliar, DPRD Minta Belanja Jangan Sekadar Habis Terserap

Tayang: Selasa, 22 September 2026 15:27 WIB

Penulis: Agus Salim Irsyadullah, Editor: Muh Radlis

<https://jateng.tribunnews.com/kendal-handal/1267148/apbd-perubahan-kendal-defisit-rp131-miliar-dprd-minta-belanja-jangan-sekadar-habis-terserap>

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 mengalami perubahan cukup signifikan.

Dalam persetujuan bersama antara DPRD Kendal dan Pemkab Kendal, pendapatan daerah yang semula ditetapkan Rp2,544 triliun naik menjadi Rp2,574 triliun atau bertambah sekitar Rp29,72 miliar.

Sementara itu, belanja daerah melonjak dari Rp2,594 triliun menjadi Rp2,705 triliun, atau bertambah sekitar Rp111,01 miliar.

Kondisi tersebut membuat defisit APBD Kendal 2026 melebar dari sebelumnya Rp50 miliar menjadi Rp131,29 miliar.

Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Sekretaris Badan Anggaran DPRD Kendal, Nur Hasyim, meminta Pemkab Kendal tidak hanya mengejar penyerapan anggaran secara administratif, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

"Optimalkan pelaksanaan program-program prioritas yang mendesak dan memiliki output terukur, bukan hanya serapan secara administratif," katanya, Selasa (22/9/2026).

Hasyim menambahkan, DPRD juga mengingatkan Pemkab Kendal terhadap potensi ketidakpastian dana transfer dari pemerintah pusat. Terlebih saat ini terjadi pelebaran defisit di tubuh anggaran Pemkab Kendal.

Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi.

"Selain itu, diharapkan melakukan validasi data objek pajak untuk menutup potensi kebocoran pendapatan," sambungnya.

Di sisi lain, DPRD secara khusus juga menyoroti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Menurut mantan Kepala Disperkim Kendal tersebut, pertumbuhan kawasan industri dan perumahan baru di Kendal dinilai perlu diikuti pemutakhiran data nilai jual objek pajak.

Sehingga perkembangan ekonomi tersebut bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

Hasyim juga menyoroti kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Pihaknya meminta kontribusi dividen BUMD terhadap pendapatan daerah juga ditingkatkan.

"Bisa melalui efisiensi operasional dan pengembangan lini bisnis yang produktif," tuturnya.

Menyentuh Warga

Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodik meminta agar belanja dalam APBD Perubahan 2026 tidak habis untuk kegiatan yang dampaknya sulit dirasakan masyarakat.

Dia mengatakan, belanja tambahan harus diprioritaskan untuk menyelesaikan infrastruktur strategis, terutama ruas jalan yang menunjang konektivitas wilayah dan sentra produksi masyarakat.

"Adapula program pemberdayaan ekonomi, dukungan UMKM, ketenagakerjaan diminta mendapatkan pengawalan ketat," terangnya.

Dia menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap program-program yang masuk dalam perubahan anggaran. Langkah ini dilakukan agar perencanaan dan kemampuan pendapatan daerah berjalan beriringan.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjaga agar target pendapatan dan program belanja tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Jangan sampai konsep ini, pendapatan yang sangat pesat, agar baik antara perencanaan maupun pendapatan yang ada, sama-sama bersama," ujarnya.

Adapun Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari mengatakan pihaknya akan menyesuaikan saran dan masukan tersebut.

"Nanti kan ada evaluasi dari pak Gubernur," tandasnya. (ags)

Collins The Fed: Kenaikan Suku Bunga Bantu Tekan Inflasi AS ke 2%

Rabu, 23 September 2026 11:00 WIB

Maria Eloisa Capurro

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122407/collins-the-fed-kenaikan-suku-bunga-bantu-tekan-inflasi-as-ke-2/2>

Bloomberg, Gubernur Federal Reserve (The Fed) Bank of Boston Susan Collins mengatakan dirinya mendukung keputusan pekan lalu untuk menaikkan suku bunga, yang menurutnya akan membantu mengembalikan inflasi ke target bank sentral sebesar 2%.

“Kebijakan suku bunga federal funds yang sedikit lebih ketat akan membantu memastikan inflasi kembali ke target secara berkelanjutan,” tulis Collins dalam unggahan di LinkedIn pada Selasa (22/9). “Dengan kondisi pasar tenaga kerja yang lebih baik, kebijakan moneter dapat berfokus pada kembalinya stabilitas harga secara tepat waktu, terutama setelah lima setengah tahun inflasi berada terlalu tinggi.”

Collins, yang tahun ini tidak memiliki hak suara dalam kebijakan moneter, mengatakan dirinya melihat adanya “peningkatan kemungkinan” terjadinya skenario di mana inflasi tetap “jauh di atas 2%”.

Para pejabat The Fed sepakat menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada pekan lalu. Dalam proyeksi ekonomi terbaru, para pembuat kebijakan memperkirakan satu kali lagi kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada tahun ini, berdasarkan proyeksi median. Kepada Associated Press pada Senin, Collins mengatakan dirinya termasuk pejabat The Fed yang memproyeksikan kenaikan suku bunga kedua sebelum akhir tahun dan memperkirakan suku bunga akan tetap stabil pada 2027.

Gubernur The Fed Kevin Warsh, yang kembali tidak menyerahkan proyeksi suku bunganya, menyatakan bahwa keputusan pekan lalu mencabut satu "dosis kelonggaran" dari perekonomian.

Ekonomi Australia Kehilangan Momentum, Data PMI Awal September Turun ke 50,8

Rabu, 23 September 2026 14:16 WIB

Reporter: Harris Hadinata, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-australia-kehilangan-momentum-data-pmi-awal-september-turun-ke-508>

KONTAN.CO.ID - CANBERRA. Ekonomi Australia kehilangan momentum pertumbuhan pada September 2026. Data purchasing manager's index (PMI) awal dari S&P Global menunjukkan aktivitas sektor swasta masih tumbuh untuk bulan keempat berturut-turut, tetapi laju pertumbuhannya melambat ke level terendah dalam tiga bulan.

Menurut rilis S&P Global, Rabu (23/9/2026), PMI Komposit Australia tercatat ada di level 50,8 pada September, turun dari 52,7 pada Agustus. Angka di atas 50 masih menunjukkan aktivitas sektor swasta masih ekspansi. Akan tetapi, level September merupakan terlemah sepanjang kuartal III-2026.

“Ekonomi Australia mengakhiri kuartal ketiga dengan pijakan yang lebih lemah, setelah menunjukkan hilangnya momentum pertumbuhan yang berkelanjutan pada September,” kata Eleanor Dennison, Ekonom S&P Global Market Intelligence, dalam rilis pers, Rabu (23/9/2026).

Perlambatan tersebut terjadi karena permintaan yang lebih lemah. Volume bisnis baru secara keseluruhan masih meningkat untuk bulan ketiga berturut-turut. Tetapi laju pertumbuhannya menjadi yang paling lambat dalam periode tersebut. Penurunan kembali pesanan baru di sektor manufaktur turut menekan pertumbuhan bisnis baru secara keseluruhan.

Kinerja ekspor juga menjadi sumber tekanan. Pesanan ekspor baru kembali menurun dan telah mengalami kontraksi sebanyak lima kali dalam enam bulan terakhir. Pelemahan tersebut terutama berkaitan dengan sektor manufaktur.

Di tingkat sektoral, jasa masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Australia. Namun, pertumbuhan aktivitas jasa melambat untuk bulan kedua berturut-turut. Sementara itu, output manufaktur kembali mengalami penurunan, dengan kontraksi kali ini menjadi yang terkuat dalam 21 bulan.

Pelemahan aktivitas ekonomi tersebut mulai berdampak pada pasar tenaga kerja. Untuk pertama kalinya dalam empat bulan, jumlah pekerja di sektor swasta Australia mengalami penurunan. Meskipun penurunannya masih moderat, pengurangan tenaga kerja tersebut merupakan yang terkuat sejak Oktober 2020.

Penurunan jumlah pekerja terjadi secara luas di berbagai sektor. Pada saat yang sama, volume pekerjaan yang belum terselesaikan masih meningkat, meski hanya dalam laju yang tipis.

Menurut Dennison, meskipun pertumbuhan yang terjadi hanya tipis, ekonomi Australia masih mampu mempertahankan tren ekspansi sepanjang kuartal tersebut. Kondisi ini dinilai lebih baik dibandingkan kinerja yang lemah pada kuartal II.

Namun, kepercayaan bisnis juga memburuk pada September. Tingkat kepercayaan turun ke level terendah dalam tiga bulan dan semakin berada di bawah rata-rata historis survei. Pelaku usaha banyak menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi, tekanan biaya, permintaan pasar, serta kemampuan mempertahankan pelanggan.

Tekanan biaya juga meningkat. Inflasi harga input dan harga output sama-sama lebih tinggi dibandingkan Agustus. Konflik di Timur Tengah dan dampaknya terhadap biaya energi serta bahan bakar kerap disebut responden survei sebagai faktor utama yang mendorong kenaikan harga input.

Dennison mengatakan pelemahan pertumbuhan pada September terjadi bersamaan dengan sejumlah tekanan terhadap dunia usaha.

“Meski masih optimistis, dunia usaha kehilangan sebagian kepercayaan terhadap prospek pertumbuhan mereka pada September. Ini bertepatan dengan pengurangan jumlah pekerja, tekanan biaya yang lebih kuat, tanda-tanda melemahnya permintaan dan kembali lemahnya ekspor,” ujar Dennison.

Inflasi Inti Singapura Naik Jadi 2,2% pada Agustus 2026

Rabu, 23 September 2026 12:21 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-inti-singapura-naik-jadi-22-pada-agustus-2026>

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Indikator utama harga konsumen Singapura naik 2,2% pada bulan Agustus dibandingkan tahun sebelumnya; angka ini merupakan tingkat tertinggi dalam hampir dua tahun.

Mengutip Reuters, Rabu (23/9/2026), tingkat inflasi inti ini berada di atas perkiraan median sebesar 2,1% dari jajak pendapat Reuters maupun angka bulan Juli sebesar 2,0%.

Berdasarkan data resmi, angka ini merupakan tingkat tertinggi sejak September 2024, saat inflasi inti tercatat sebesar 2,8%.

Inflasi umum (headline inflation) tercatat sebesar 2,3% secara tahunan pada bulan Agustus, sesuai dengan perkiraan jajak pendapat.

Bank sentral sebelumnya menyatakan telah memperkirakan inflasi akan meningkat mulai bulan Juli dan tetap tinggi hingga paruh pertama tahun depan.

Bank sentral memperketat kebijakan moneter pada akhir Juli, dengan alasan adanya risiko inflasi akibat tingginya harga energi.

Pada bulan Agustus, kementerian perdagangan menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026 menjadi kisaran 4,5% hingga 5,5%, dari sebelumnya 2,0% hingga 4,0%.

Dolar AS Tembus Level Tertinggi 2 Bulan, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Rabu, 23 September 2026 22:42 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-tembus-level-tertinggi-2-bulan-pasar-antisipasi-kenaikan-bunga-the-fed>

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Dolar Amerika Serikat (AS) menguat ke level tertinggi dalam hampir dua bulan pada Rabu (23/9/2026), seiring investor memperhitungkan potensi berlanjutnya siklus kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

Penguatan dolar AS juga didorong oleh pernyataan sejumlah pejabat The Fed yang membuka peluang kenaikan suku bunga lebih lanjut apabila inflasi belum menunjukkan penurunan yang cukup.

Gubernur The Fed Michael Barr mengatakan bank sentral AS telah mengambil langkah penting pada pekan lalu untuk melakukan "kalibrasi ulang" biaya pinjaman jangka pendek guna menekan inflasi. Menurut dia, The Fed kemungkinan masih perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut.

"Ini adalah cerita mengenai suku bunga saat ini," kata Elias Haddad, Kepala Strategi Pasar Global Brown Brothers Harriman di London.

"Yang mendorong dolar lebih tinggi adalah kelanjutan dari kenaikan suku bunga The Fed yang hawkish pada pekan lalu, dan hal itu memberikan momentum baru bagi dolar. Pekan ini belum banyak data, terutama data yang relevan dengan kebijakan, tetapi yang menarik adalah komentar dari para pejabat The Fed. Pada dasarnya, mereka semua menyampaikan pandangan yang sama bahwa pengetatan lebih lanjut masih akan dilakukan," ujar Haddad.

Aktivitas Bisnis AS Menguat

Penguatan dolar AS semakin kuat setelah S&P Global merilis data yang menunjukkan aktivitas bisnis Amerika Serikat meningkat tajam pada September 2026.

Indeks awal S&P Global Composite PMI Output yang mencakup sektor manufaktur dan jasa naik menjadi 58,4 pada September, dari 56,0 pada Agustus. Angka tersebut merupakan level tertinggi sejak Juli 2021.

Kenaikan aktivitas bisnis tersebut didorong lonjakan pesanan baru. Namun, kuatnya permintaan juga memberikan tekanan terhadap rantai pasok dan mendorong kenaikan harga.

Data tersebut turut memperkuat ekspektasi pasar bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunga pada pertemuan Oktober.

Berdasarkan data LSEG, probabilitas kenaikan suku bunga minimal 25 basis poin pada pertemuan Oktober melonjak menjadi sekitar 75% setelah data tersebut dirilis. Sebelum publikasi data, ekspektasi tersebut berada di sekitar 53%.

Indeks dolar AS yang mengukur kinerja greenback terhadap sekeranjang mata uang utama naik 0,54% menjadi 101,09, setelah sebelumnya menyentuh 101,10. Level tersebut merupakan posisi tertinggi sejak 29 Juli.

Harga Minyak Naik, Ketegangan Timur Tengah Jadi Sorotan

Penguatan dolar AS juga terjadi bersamaan dengan kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut dipicu pernyataan pejabat Iran yang kembali meningkatkan kekhawatiran mengenai ketegangan di Timur Tengah.

Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, mengatakan dalam wawancara dengan televisi pemerintah bahwa Iran tidak akan membuka kembali Selat Hormuz dan tidak akan melakukan negosiasi selama persyaratan Iran belum dipenuhi.

Sebelumnya, harapan terhadap diplomasi dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sempat mendorong harga minyak turun. Investor berharap diplomasi tersebut dapat menghasilkan penyelesaian terhadap konflik di Timur Tengah yang telah berlangsung selama tujuh bulan.

Harga minyak sebelumnya telah mencapai level tertinggi dalam empat bulan pada pertengahan September, tetapi kemudian berbalik arah pada pekan ini seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Euro Tertekan, Yen Melemah

Di pasar valuta asing, euro melemah 0,52% menjadi US\$1,1386 dan berada di jalur penurunan harian untuk hari ketiga berturut-turut.

Sementara itu, data awal S&P Global Composite PMI Output Zona Euro menunjukkan perekonomian kawasan tersebut justru memperlihatkan tanda-tanda ketahanan yang tidak terduga. Namun, konflik di Timur Tengah dan Ukraina meningkatkan biaya energi bagi perusahaan maupun rumah tangga.

Pelaku pasar juga menantikan pertemuan penting antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Kedua pemimpin tersebut berupaya menjaga stabilitas hubungan di tengah ketegangan terkait perdagangan, teknologi, serta Iran.

Dolar AS menguat 0,20% menjadi 6,712 yuan China offshore.

Adapun yen Jepang melemah 0,6% menjadi 158,32 yen per dolar AS. Pelaku pasar masih mewaspadai potensi intervensi pemerintah Jepang setelah kenaikan suku bunga Bank of Japan (BoJ) pada pekan lalu ke level tertinggi dalam 31 tahun belum cukup meyakinkan investor bahwa kenaikan suku bunga berikutnya akan segera dilakukan.

Pasar Jepang ditutup karena hari libur. Menurut sejumlah analis, kondisi likuiditas yang lebih rendah selama periode tersebut meningkatkan kemungkinan otoritas Jepang melakukan intervensi di pasar valuta asing.

Pertumbuhan Ekonomi Zona Euro Capai Level Tercepat dalam Hampir 3,5 Tahun

Rabu, 23 September 2026 19:26 WIB

Reporter: Harris Hadinata, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-ekonomi-zona-euro-capai-level-tercepat-dalam-hampir-35-tahun>

KONTAN.CO.ID - LONDON. Pertumbuhan aktivitas bisnis zona euro menguat tajam pada September 2026. Output sektor swasta zona euro tumbuh pada laju tercepat dalam hampir tiga setengah tahun, ditopang oleh penguatan sektor manufaktur dan jasa.

Data awal PMI S&P Global yang dipublikasikan Rabu (23/9/2026), menunjukkan, Flash Eurozone Composite PMI Output Index naik menjadi 53,1 pada September dari 52,0 pada Agustus. Indeks tersebut mencatat ekspansi selama tiga bulan berturut-turut dan menjadi laju pertumbuhan tercepat sejak April 2023.

Penguatan aktivitas terjadi baik di sektor manufaktur maupun jasa. Pertumbuhan manufaktur meningkat ke level tertinggi dalam 55 bulan, sedangkan pertumbuhan sektor jasa mencapai level tertinggi dalam 10 bulan.

Perbaikan juga berlangsung cukup luas di antara negara-negara yang tercakup dalam survei. Jerman mencatat ekspansi untuk bulan ketiga berturut-turut dengan laju pertumbuhan tercepat dalam hampir satu tahun. Sementara itu, aktivitas ekonomi Prancis kembali meningkat untuk pertama kalinya dalam 10 bulan.

Chief Business Economist S&P Global Market Intelligence Chris Williamson mengatakan, penguatan pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan aktivitas bisnis dan pesanan baru. “Pertumbuhan bisnis yang semakin cepat berarti survei PMI awal mengindikasikan produk domestik bruto (PDB) tumbuh pada tingkat kuartalan 0,4%,” kata Williamson, dalam rilis resmi, Rabu (23/9/2026).

Pesanan baru perusahaan di zona euro juga meningkat untuk bulan ketiga berturut-turut pada September. Laju pertumbuhannya menjadi yang terkuat sejak Mei 2022, sejalan dengan penguatan aktivitas bisnis.

Pesanan ekspor baru turut meningkat untuk bulan kedua berturut-turut. Kondisi ini menjadi penting karena pesanan ekspor sebelumnya mengalami penurunan dalam 53 bulan berturut-turut sebelum akhirnya kembali meningkat pada Agustus.

Kenaikan secara keseluruhan terutama ditopang sektor manufaktur. Sementara bisnis baru sektor jasa dari luar negeri masih mengalami penurunan.

Di sektor manufaktur, Jerman menjadi salah satu pendorong utama penguatan. Williamson menyebut, manufaktur yang dipimpin Jerman tengah menikmati periode pertumbuhan terbaik dalam lebih dari empat tahun, didorong oleh peningkatan belanja untuk akal imitasi (AI) dan pertahanan.

“Tetapi pertumbuhan sektor jasa juga mulai menguat untuk menunjukkan perbaikan yang luas dalam pertumbuhan ekonomi,” ujar Williamson.

Jumlah tenaga kerja juga meningkat dalam dua bulan berturut-turut, meski pertumbuhannya masih moderat dan sama dengan laju pada Agustus. Penyerapan tenaga kerja meningkat di sektor jasa, sedangkan perusahaan manufaktur mempertahankan jumlah pekerjanya.

Jerman mencatat penciptaan lapangan kerja terkuat sejak pertengahan 2023. Sebaliknya, lapangan kerja di Prancis kembali menurun. Sementara negara pengguna euro selain Jerman dan Prancis mencatat kenaikan jumlah tenaga kerja secara moderat.

Di tengah penguatan aktivitas ekonomi, tekanan inflasi kembali meningkat. Biaya input dan harga output sama-sama naik pada laju tercepat dalam empat bulan. Kenaikan biaya input terjadi baik di sektor manufaktur maupun jasa.

Williamson mengatakan peningkatan tekanan inflasi tidak terlepas dari kenaikan harga energi yang dipicu konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. “Tetapi yang lebih menggembirakan adalah ketahanan pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan,” imbuh dia.

Di sisi lain, peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh optimisme pelaku usaha. Kepercayaan terhadap prospek output dalam satu tahun ke depan kembali melemah pada September dan berada pada level yang relatif rendah.

Penurunan kepercayaan terutama disebabkan oleh melemahnya optimisme perusahaan-perusahaan Prancis. Di Jerman, sentimen tidak berubah dibandingkan Agustus, sementara negara-negara zona euro lainnya mencatat sedikit peningkatan kepercayaan. Optimisme melemah baik di sektor manufaktur maupun jasa.

Dolar Australia Perkasa, Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga RBA Jadi Pendorong

Rabu, 23 September 2026 08:40 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-australia-perkasa-ekspektasi-kenaikan-suku-bunga-rba-jadi-pendorong>

KONTAN.CO.ID - Dolar Australia (AUD) mencapai level setara dengan dolar Kanada (CAD) untuk pertama kalinya dalam lebih dari delapan tahun.

Penguatan tersebut terjadi di tengah perbedaan prospek kebijakan suku bunga kedua negara yang semakin lebar.

Melansir Reuters pada Rabu (23/9/2026), dolar Australia diperdagangkan di sekitar C\$1,0004. Sehari sebelumnya, mata uang tersebut menguat 0,2% dan sempat menyentuh level C\$1,0012, atau posisi tertinggi dalam 8,5 tahun terakhir.

Dolar Australia juga bergerak mendekati level tertinggi dalam 15 bulan terhadap euro di A\$1,6082. Terhadap poundsterling, dolar Australia berada tidak jauh dari level tertinggi tiga bulan di A\$1,8753.

Penguatan dolar Australia terhadap sejumlah mata uang utama terutama dipicu perubahan tajam dalam ekspektasi kebijakan suku bunga Reserve Bank of Australia (RBA).

Pasar hampir sepenuhnya memperkirakan RBA akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,6% pada 29 September 2026.

Fokus investor selanjutnya tertuju pada apakah bank sentral Australia masih membuka peluang kenaikan suku bunga berikutnya pada November.

Sebaliknya, Bank of Canada (BoC) tertinggal dalam siklus pengetatan moneter global. BoC telah mempertahankan suku bunga di level 2,25% selama hampir satu tahun, seiring inflasi yang relatif terkendali dan ketidakpastian ekonomi akibat perang dagang dengan AS.

Pasar kini memperkirakan peluang yang seimbang bagi BoC untuk menaikkan suku bunga pada bulan depan.

"Menurut saya, ini sangat konsisten dengan perubahan ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga RBA," kata Ray Attrill, Kepala Strategi Valas National Australia Bank.

Ia menambahkan, penurunan harga minyak, yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama Kanada, kemungkinan turut menekan dolar Kanada dalam beberapa hari terakhir.

Attrill juga menyatakan skeptis bahwa kenaikan suku bunga BoC yang saat ini diperhitungkan pasar akan benar-benar terealisasi hingga akhir tahun.

Terhadap dolar AS, dolar Australia relatif stabil di US\$0,7113 setelah turun 0,1% pada perdagangan sebelumnya. Mata uang tersebut menghadapi level resistance di sekitar US\$0,7140, dengan support di US\$0,7075.

Perhatian investor selanjutnya tertuju pada data ketenagakerjaan Australia yang akan dirilis Kamis. Ekonom memperkirakan jumlah lapangan kerja meningkat sekitar 20.000 pada Agustus, sementara tingkat pengangguran bertahan di 4,5%.

Kenaikan pengangguran yang tajam dan di luar perkiraan kemungkinan diperlukan untuk mengubah ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga RBA pekan depan.

Gubernur RBA Michele Bullock sebelumnya mengatakan tingkat pengangguran pada kisaran 4,5% hingga 5% dapat membantu menekan inflasi.

Sementara itu, dolar Selandia Baru (NZD) melemah 0,2% menjadi US\$0,5718 setelah sebelumnya turun dari level tertinggi satu minggu di US\$0,5749.

Dolar Selandia Baru telah merosot lebih dari 4% dari level puncaknya pada Agustus. Secara teknikal, mata uang tersebut masih berada dalam tekanan setelah bergerak di sekitar level terendah 11 minggu di US\$0,5695.

Pernyataan hawkish dari Kepala Reserve Bank of New Zealand Anna Breman turut mendorong kenaikan ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga ketiga tahun ini menjadi 3% pada Oktober. Peluang kenaikan tersebut kini diperkirakan sekitar 75%.

Meski demikian, tingkat suku bunga Selandia Baru masih berada di bawah banyak negara maju lainnya.

Suahasil: Investor Global Antusias, Modal Asing Mulai Masuk RI

Rabu, 23 September 2026 21:00 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122506/suahasil-investor-global-antusias-modal-asing-mulai-masuk-ri/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan arus modal asing mulai kembali masuk ke Indonesia setelah sempat mengalami arus keluar atau capital outflow beberapa bulan sebelumnya.

Suahasil mencatat akumulasi aliran modal asing yang masuk melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp140,7 triliun hingga 14 September 2026.

"Kalau beberapa bulan yang lalu kita masih melihat aliran modal keluar, tapi di beberapa waktu terakhir kelihatan [aliran modal] mulai masuk ini," jelas Suahasil dalam acara Antara Business Forum, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Lebih lanjut, Suahasil menyatakan dengan kembalinya aliran modal tersebut menunjukkan tanda bahwa investor global mulai kembali melihat RI sebagai salah satu tujuan penempatan dana ketika kondisi perekonomian global kembali bergejolak.

Dengan demikian, kata dia, hal tersebut perlu dijaga melalui pengelolaan ekonomi makro yang berkelanjutan.

"Di tengah-tengah situasi [geopolitik] yang seperti itu kita melihat bahwa Indonesia itu terus mampu resilient. Resilient itu berarti memiliki daya tahan. Mampu tumbuh tetap solid di semester I-2026. Pertumbuhan ekonomi tetap kuat, inflasi terkendali," ujarnya.

Di sisi lain, pemimpin otoritas fiskal tersebut turut membeberkan tiga strategi fiskal utamanya. Pertama, mengumpulkan penerimaan negara dan meningkatkan tax ratio.

"Artinya, peningkatan penerimaan negara. Ini tentu kita lakukan dengan meningkatkan kepatuhan, memperluas basis pajak, dan implementasi coretax yang efektif," kata Suahasil.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah berencana menyelaraskan sistem perpajakan dengan perkembangan global dan ekonomi digital dan terus mengoptimalkan penerimaan berbagai macam sumber.

Pemerintah, kata dia juga akan mengoptimalkan sistem coretax yang diklaim bahwa saat ini sudah terintegrasi dengan bukti potong dari berbagai tempat.

"Selain mengumpulkan lebih banyak, APBN juga harus terus mempertajam belanja, meningkatkan efisiensi belanja dan targeting," sebut Suahasil.

Lewat penajaman belanja tersebut tak sekedar dengan memotong anggaran saja, namun juga meningkatkan efisiensi.

Hal ini supaya belanja pemerintah dapat masuk ke titik-titik prioritas sehingga dapat mendorong pertumbuhan, memperbaiki kesejahteraan, mendorong program prioritas nasional serta harmonisasi antara pusat dan daerah.

Ia menggarisbawahi sinergi pusat dan daerah dilakukan dengan sinergi APBN dan APBD sebagai satu kesatuan peran negara menyentuh kehidupan masyarakat sehingga menjadi lebih baik.

BI: 32.000 Kartu Kredit Indonesia Sudah Terbit Sejak Agustus 2026

Rabu, 23 September 2026 20:00 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122503/bi-32-000-kartu-kredit-indonesia-sudah-terbit-sejak-agustus-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perbankan telah menerbitkan 32.457 Kartu Kredit Indonesia (KKI) sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026.

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputy Gubernur Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers hasil RDG BI, Rabu (23/9/2026).

"Sekarang yang menggunakan adalah hampir 8.000 aktif bertransaksi dari 8 first mover," kata Filianingsih.

Dari penggunaan tersebut, KKI telah mencatat sekitar 38.800 transaksi dengan nilai mencapai Rp18,7 miliar. Dengan demikian, rata-rata nilai transaksi atau ticket size KKI mencapai sekitar Rp482.000 per transaksi.

Saat ini, tujuh bank telah menerbitkan KKI dari delapan bank yang menjadi first mover. BCA tercatat memiliki sekitar 28.000 pengguna, sementara BRI dan Permata Bank masing-masing sekitar 1.500 pengguna.

Sebagai catatan, tujuh bank yang mendapatkan izin penerbitan KKI yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, dan Bank Mega serta satu penyedia jasa pembayaran next mover yaitu BSI yang dapat menerbitkan KKI.

Adapun Filianingsih menyatakan pada tahap awal, KKI merupakan kartu kredit digital dengan sumber dana kredit yang digunakan melalui QRIS. Berbeda dengan transaksi QRIS menggunakan saldo tabungan atau uang elektronik yang langsung terpotong, KKI memberikan mekanisme pembayaran tertunda.

Dengan demikian, BI selanjutnya akan mengembangkan KKI secara bertahap, di mana ke depannya KKI akan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran secara online, termasuk melalui e-commerce.

"Jadi ini 3 tahapan. Yang ini sebetulnya digunakan untuk membantu teman-teman. Saat ini juga untuk konsumsi buffer."

"Jadi ini untuk konsumsi buffer. Artinya kalau misalnya anak-anak kos juga yang belum terima kiriman. Masih bisa menggunakan ini. Karena nanti pada saat kirimannya datang. Bisa dilakukan pembayaran secara lunas," pungkasnya.

Suahasil Percepat Belanja Negara: Cegah Penumpukan Akhir Tahun

Rabu, 23 September 2026 18:10 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122490/suahasil-percepat-belanja-negara-cegah-penumpukan-akhir-tahun/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan belanja seawal mungkin. Hal ini supaya belanja pemerintah tidak menumpuk di akhir tahun.

“Kita juga mendorong percepatan belanja dari seawal mungkin, dari sejak bulan Agustus, bulan September, sehingga dia tidak menumpuk di akhir tahun,” kata Suahasil dalam Antara Business Forum 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Meski dipercepat, Suahasil mengatakan bahwa Kementerian Keuangan juga akan memastikan bahwa belanja negara akan dilakukan secara efisien dan berdaya guna.

Suahasil mengatakan bahwa hal ini dilakukan dengan mewaspadaikan adanya percepatan belanja negara di akhir tahun yang biasanya terjadi.

“Seperti biasa belanja negara ini menjelang akhir tahun biasanya ada percepatan,” sebutnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi total belanja negara hingga Agustus 2026 tercatat mencapai Rp1.791,5 triliun, melonjak 29% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Namun, angka ini baru setara 56,9% dari target APBN tahun ini senilai Rp2.295,7 triliun.

Berdasarkan data rincinya, kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh naiknya belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang naik sekitar 33% yoy menjadi Rp912,4 triliun dari sebelumnya yang masih Rp686 triliun. Angka itu tercatat 60,4% dari target sepanjang 2026.

Sementara itu, belanja non K/L tercatat mencapai Rp879,1 triliun, yang juga naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang masih Rp702,8 triliun. Angkanya setara 53,6% dari target yang dipatok dalam APBN tahun ini.

Berdasarkan perincian, belanja K/L utamanya paling banyak berasal dari belanja barang yang naik 67,5% yoy menjadi Rp389 triliun. Sementara, belanja pegawai juga melonjak 21,7% yoy menjadi Rp259 triliun.

Lalu, belanja modal tercatat juga naik 14,3% menjadi Rp159,8 triliun. Sementara, belanja bantuan sosial (bansos) tercatat naik tipis 3,4% yoy menjadi sebesar Rp104,5 triliun.

BI Rate Ditahan, Jalur Non-Suku Bunga Tetap Jadi Pilihan

Rabu, 23 September 2026 17:05 WIB

Dian Sari Pertiwi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122484/bi-rate-ditahan-jalur-non-suku-bunga-tetap-jadi-pilihan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan BI Rate dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi September yang hasilnya diumumkan hari ini, Rabu (23/9/2026).

Keputusan itu ditempuh BI setelah mempertimbangkan bahwa kondisi fundamental domestik sebenarnya dalam posisi cukup aman. Inflasi masih terjaga 2,9% yoy, di bawah sasaran target 3,5%, menunjukkan tekanan harga masih relatif terkendali.

Di sisi eksternal, cadangan devisa sebesar US\$146,5 miliar juga masih memadai untuk membiayai sekitar 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Namun, BI tak memungkiri bahwa prospek perekonomian global belum kuat, disertai adanya ketidakpastian di pasar keuangan global, termasuk meningkatnya tensi perang di Timur Tengah yang mengerek harga minyak.

"Pertumbuhan ekonomi global 2026 diperkirakan masih lemah sekitar 3%, dan diikuti tekanan inflasi yang meningkat menjadi sekitar 4%," kata Destry Damayanti, Gubernur BI, dalam konferensi pers usai RDG.

Menurut Destry, kondisi itu menjadikan kebijakan moneter global lebih ketat, dimulai dengan kenaikan suku bunga AS, Fed Fund Rate (FFR) menjadi 3,75-4%. Suku bunga acuan Negeri Paman Sam diproyeksikan kembali mengetat pada kuartal IV-2026 ini.

Ekspektasi itu lantas mengerek kenaikan imbal hasil (yield) US Treasury tenor 10 tahun. Pergerakan yield US Treasury membuat preferensi investor terhadap portofolio di pasar negara berkembang menjadi tertahan.

"Kondisi ini mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik," kata Destry.

Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,29% pada kuartal II-2026 dari 5,61% pada kuartal I-2026. Dengan menahan BI Rate, BI memberi ruang tumbuh bagi perekonomian Indonesia yang kehilangan momentum.

Memang, keyakinan konsumen sedikit membaik pada Agustus secara agregat, diikuti dengan indeks penjualan riil yang masih menunjukkan adanya perbaikan secara umum. Oleh karena itu, BI tampaknya berupaya mencari titik keseimbangan antara dua kepentingan: menjaga stabilitas rupiah dan inflasi di satu sisi, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di sisi lainnya.

Jalur Non-Suku Bunga

Dalam paparannya, BI semakin mempertegas bahwa strategi yang diusung masih sama dengan strategi sebelumnya, yakni jalur non-suku bunga. Upaya stabilisasi tersebut ditempuh demi menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Artinya, BI tidak lagi menjadikan suku bunga sebagai satu-satunya instrumen untuk menjaga stabilitas rupiah. MH Thamrin juga memperkuat berbagai kebijakan insentif untuk menarik aliran modal asing, menjaga stabilitas nilai tukar, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan valuta asing.

Destry mengatakan BI akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas.

Aida S. Budiman, Deputy Senior Gubernur BI, menambahkan bahwa strategi BI satu bulan terakhir utamanya adalah mengupayakan stabilitas rupiah dengan melihat selisih yield, terutama usai adanya kenaikan pada US Treasury tenor 10 tahun yang sempat menyentuh 5%.

"Kami memasukkan insentif untuk capital inflows sehingga menjaga nilai tukar (rupiah), tidak memilih menaikkan BI Rate karena punya dampak terhadap harga-harga (di pasar) domestik," kata Aida.

Aida melanjutkan, BI masih memperkuat rupiah melalui jalur non-suku bunga, seperti memperkuat insentif swap, DNDF, serta mengoptimalkan local currency transaction.

Resep itu rupanya cukup mujarab untuk menopang volatilitas rupiah. Dalam satu bulan, sejak RDG terakhir, pelemahan rupiah mampu diperlambat menjadi hanya 0,49%. Jauh lebih baik daripada baht Thailand yang melemah hingga 1,69%, dan peso Filipina 1,43%. Bahkan ringgit Malaysia tergerus 1,02%.

Tantangan BI

Meski strategi non-suku bunga mampu memperlambat pelemahan rupiah satu bulan terakhir, tantangan belum sepenuhnya hilang. Setelah keputusan RDG September, perhatian pasar berpotensi bergeser dari keputusan BI hari ini menuju bagaimana bank sentral merespons tekanan eksternal dalam beberapa bulan ke depan.

Salah satu risiko terbesar datang dari kebijakan moneter AS. Setelah Federal Reserve (The Fed) menaikkan FFR sebesar 25 basis poin, sebanyak 16 dari 18 pejabat The Fed memproyeksikan setidaknya satu kenaikan tambahan sebesar 25 bps hingga akhir tahun.

Jika skenario tersebut terealisasi, ruang BI untuk mempertahankan selisih suku bunga terhadap AS kian menyempit, jika BI sama sekali tidak merespons dengan langkah hawkish yang sama.

Dalam kondisi tersebut, tekanan terhadap rupiah dapat kembali meningkat, terutama jika pada saat yang sama dolar AS menguat dan yield US Treasury tetap tinggi.

Selain itu, tekanan eksternal juga tak berhenti pada kebijakan The Fed. Harga minyak yang selama ini menjadi swing factor pergerakan rupiah, masih berpotensi meningkat. Sebab, ketidakpastian geopolitik dan penyelesaian konflik antara AS dan Iran masih belum terang.

Harga minyak yang bertahan tinggi akan menciptakan tekanan ganda bagi Indonesia. Pertama melalui imported inflation, karena biaya energi dan barang impor meningkat. Kedua, melalui tekanan terhadap neraca eksternal karena kebutuhan impor energi dapat meningkat.

Ditambah, fenomena El-Nino yang menyebabkan perubahan cuaca dan mengganggu produksi pangan, berpotensi menambah risiko domestik yang berasal dari inflasi pangan.

Faisal Rachman, Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), memperkirakan BI kembali berpeluang mengambil langkah pengetatan pada sisa kuartal IV-2026.

Menurut Faisal, langkah BI yang sebelumnya telah menaikkan BI Rate 100 bps pada Mei-Juni merupakan respons yang dilakukan secara lebih awal (front-loaded), antisipatif (pre-emptive), dan

selangkah lebih maju (ahead of the curve) untuk mengantisipasi kenaikan FFR satu kali pada paruh kedua 2026.

"Namun, dengan semakin kuatnya ekspektasi terhadap kenaikan FFR pada kuartal IV, kami merevisi proyeksi dasar BI Rate dengan memasukkan kenaikan 25 bps pada kuartal IV-2026, sehingga BI Rate diperkirakan mencapai 6% pada akhir 2026," jelas Faisal.

Dengan begitu, keputusan BI untuk menahan BI Rate di 5,75% dapat dibaca sebagai ruang untuk mengamati perkembangan ekonomi, bukan penanda bahwa siklus pengetatan moneter telah berakhir. Meskipun inflasi saat ini masih terkendali, sumber tekanannya ke depan akan semakin beragam. Tekanan tak cuma berasal dari permintaan domestik, tapi juga dari nilai tukar, harga energi, gangguan pasokan pangan, dan kondisi moneter global yang kian ketat.

Rangkuman Lengkap Keputusan BI September 2026, Bunga Tetap 5,75%

Rabu, 23 September 2026 16:50 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122489/rangkuman-lengkap-keputusan-bi-september-2026-bunga-tetap-5-75/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 22-23 September 2026. Hasilnya, bank sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75%, dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility 6,5%.

Gubernur BI Destry Damayanati menilai keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2026 dan 2027, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas," ujar Destry, Rabu (23/9/2026).

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat guna meningkatkan kredit ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

Berikut rangkuman hasil Rapat Dewan Gubernur BI periode September 2026:

Prospek Ekonomi Global

BI menilai prospek perekonomian global belum kuat disertai dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Tensi perang di Timur Tengah yang kembali meningkat dan mendorong tingginya harga minyak, serta berbagai komoditas dunia. Pertumbuhan ekonomi global 2026 diperkirakan masih lemah sekitar 3% dan diikuti tekanan inflasi yang meningkat menjadi sekitar 4,6%.

Kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, termasuk kenaikan suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), Fed Funds Rate (FFR), menjadi 3,75-4,00% pada September 2026 dengan

kemungkinan peningkatan kembali yang masih tinggi. Imbal hasil (yield) US Treasury juga meningkat seiring ekspektasi kenaikan FFR dan defisit anggaran Pemerintah AS yang besar.

Preferensi investor global terhadap investasi portofolio ke negara Emerging Markets tertahan dan berdampak pada tetap kuatnya indeks mata uang dolar AS terhadap negara maju dan negara berkembang.

Prospek Ekonomi Domestik

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga baik dan perlu terus didorong dengan mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi. Perkembangan terkini menunjukkan konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang besarnya berbagai stimulus fiskal pemerintah serta mulai menguatnya keyakinan dan ekspektasi penghasilan konsumen.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik dengan proyeksi yang sama, yakni tumbuh 4,9%-5,7%, didukung implementasi berbagai program stimulus pemerintah, keyakinan pelaku ekonomi yang membaik, serta optimalisasi berbagai sumber pertumbuhan ekonomi.

Aliran Modal

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat untuk mendukung ketahanan eksternal di periode meningkatnya ketidakpastian global. Neraca perdagangan periode Juli 2026 mencatat surplus sebesar US\$120 juta, setelah pada bulan sebelumnya mencatat defisit US\$450 juta. Sementara itu, aliran investasi portofolio asing pada triwulan III 2026 (hingga 21 September 2026) mencatat net inflows sebesar US\$400 juta, ditopang penerbitan global bond Pemerintah serta inflows pada Surat Berharga Negara (SBN).

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2026 tetap terjaga sebesar US\$146,5 miliar, setara pembiayaan 5,4 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Stabilitas Rupiah

Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. BI mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk memperluas kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. Dalam kaitan ini, BI memperluas transaksi underlying pendanaan luar negeri yang dapat memperoleh insentif pengurangan premi bagi Swap Jual Lindung Nilai (Swap Beli Lindung Nilai kepada BI) dan DNDF, dari semula hanya mencakup transaksi portfolio inflows menjadi termasuk pinjaman luar negeri oleh bank dan foreign direct investment.

Nilai tukar rupiah pada 22 September 2026 tercatat Rp17.855/US\$, melemah terbatas 0,78% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Agustus 2026.

Kredit Perbankan

Kredit perbankan pada Agustus 2026 tumbuh 13,65% (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada Juli 2026 sebesar 13,58% (yoy). Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan kredit didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Agustus 2026 masing-masing tumbuh sebesar 25,11% (yoy), 11,45% (yoy), dan 5,07% (yoy).

Perkembangan intermediasi perbankan didukung oleh kebijakan makroprudensial longgar yang terus ditempuh Bank Indonesia melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Hingga minggu pertama September 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp461,2 triliun dengan alokasi pada KLM financing channel sebesar Rp338,2 triliun, serta alokasi pada KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) sebesar Rp123,0 triliun.

Selain itu, minat penyaluran kredit (lending appetite) juga masih longgar serta didukung pertumbuhan DPK yang mencapai 10,94% (yoy). Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8%-12%.

Transaksi Keuangan Digital

Volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi atau tumbuh 40,36% (yoy) pada Agustus 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui internet dan mobile banking masing-masing tumbuh 15,12% (yoy) dan 47,08% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 67,22% (yoy), didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel melalui BI-FAST mencapai 549 juta transaksi atau tumbuh 37,72% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp1.346 triliun. Sementara itu, nilai transaksi BI-RTGS mencapai Rp16.545 triliun, atau turun tipis 3,64% (yoy), dengan volume sebanyak 0,86 juta transaksi atau turun sebesar 1,78% (yoy). Dari sisi pengelolaan uang rupiah, uang kartal tumbuh 12,88% (yoy) menjadi Rp1.332 triliun.

Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah, menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ dan menjaga kecukupan likuiditas Rupiah, dengan:
 - mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
 - mengelola struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro-market disertai dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market.
2. Memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar Rupiah sekaligus mendukung upaya menjaga kecukupan likuiditas Rupiah, dengan:
 - meningkatkan insentif untuk instrumen Swap Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia dalam rangka transaksi underlying pendanaan luar negeri yang mencakup transaksi portfolio inflows, pinjaman luar negeri oleh bank, dan foreign direct investment melalui pengurangan premi dari semula 12,5% untuk semua tenor menjadi sebesar 15% untuk tenor 3 bulan, 20% untuk tenor 6 bulan, dan 25% untuk tenor 12 bulan.
 - meningkatkan insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam rangka transaksi underlying pendanaan luar negeri yang mencakup transaksi portfolio inflows, pinjaman luar negeri oleh bank, dan foreign direct investment melalui pengurangan premi dari semula 15% menjadi sebesar 25% untuk tenor 6 bulan dan 30% untuk tenor 12 bulan.
 - melanjutkan pemberian insentif bagi transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra untuk diversifikasi transaksi valas berupa: (a) penambahan premi Swap Beli Lindung Nilai (Swap Jual Lindung Nilai kepada Bank Indonesia) sebesar 10%; dan (b) pengurangan premi DNDF Jual Lindung Nilai sebesar 10%.

3. Memperkuat efektivitas implementasi Kebijakan Makroprudensial akomodatif untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan:
 - melanjutkan persiapan implementasi penguatan Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan yang akan berlaku efektif pada 1 Oktober 2026.
 - melanjutkan sinergi bersama Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong kredit/pembiayaan perbankan melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI).
4. Memperkuat akselerasi akseptasi digital melalui kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan asosiasi industri dalam penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo (FEKDI dan IFSE) 2026 pada 24 s.d. 26 September 2026. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi berbagai inisiatif, yaitu:
 - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi (PI) dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
 - Gebyar Transformasi Digital Nasional yang merupakan milestone sinergi berbagai inisiatif perluasan digitalisasi pada Kementerian/Lembaga.
 - peresmian perluasan kerja sama QRIS Antarnegara dengan bank sentral negara mitra; dan
 - inisiasi Indonesia Travel Pack.
5. Memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, termasuk penambahan Singapura sebagai mitra baru LCT pada Agustus 2026.

Rupiah Menguat Usai Pengumuman BI Rate, Mata Uang Asia Berguguran

Rabu, 23 September 2026 16:28 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122469/rupiah-menguat-usai-pengumuman-bi-rate-mata-uang-asia-berguguran>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah ditutup menguat 0,4% ke Rp17.800/US\$, usai Bank Indonesia (BI) menetapkan suku bunga acuan di 5,75% yang sesuai konsensus pasar.

Dari pasar Asia, rupiah hari ini menjadi mata uang dengan penguatan paling signifikan. Disusul peso Filipina yang menguat 0,18%.

Sementara mayoritas mata uang kawasan terlihat melemah. Salah satu pemicunya adalah yuan China yang melemah setelah bank sentral PBoC menetapkan kurs referensi yang lebih rendah untuk kali pertama sejak 8 September.

Penguatan rupiah didukung oleh penurunan harga minyak Brent ke US\$99,14/barel. Harga minyak menjadi swing factor yang menggerakkan rupiah sepanjang pekan lalu. Rupiah melemah seiring kenaikan harga minyak mentah.

Aida S. Budiman, Deputy Senior Gubernur BI, menyebut bahwa secara fundamental rupiah masih memiliki penopang. Seperti inflasi domestik masih 2,9% (di bawah sasaran target BI) serta cadangan devisa sebesar US\$146,5 miliar yang masih cukup untuk membiayai impor 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Aida mengatakan faktor global dengan harga komoditas seperti minyak volatil dan kenaikan suku bunga acuan AS menambah tekanan dari sisi kebijakan suku bunga (policy rate) global, dan membuat dolar AS menguat. "Sehingga rupiah mengalami gangguan dari sisi sentimennya," kata Aida.

Aida melanjutkan, strategi BI satu bulan terakhir utamanya adalah mengupayakan stabilitas rupiah dengan melihat selisih yield, terutama usai adanya kenaikan pada US Treasury tenor 10 tahun yang sempat menyentuh 5%.

"Di situlah kami memasukkan insentif untuk capital inflows sehingga menjaga nilai tukarnya, tidak memilih menaikkan BI Rate karena punya dampak terhadap harga-harga (di pasar) domestik," kata Aida.

Dengan begitu BI masih memperkuat rupiah melalui jalur non-suku bunga, seperti memperkuat insentif swap, DNDF, serta mengoptimalkan local currency transaction.

Strategi BI menjaga rupiah melalui instrumen pasar itu bisa dipahami sebagai menjadi jalan tengah. Di satu sisi mempertahankan suku bunga agar tidak semakin membebani perekonomian, sembari tetap menjaga daya tarik aset keuangan domestik.

BI Lapor Transaksi via QRIS Tumbuh 67,2%

Rabu, 23 September 2026 16:12 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122480/bi-lapor-transaksi-via-qr-is-tumbuh-67-2/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta -Bank Indonesia (BI) melaporkan volume transaksi pembayaran via Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tumbuh 67,22% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Agustus 2026.

Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2026 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal serta infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat.

"Volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi atau tumbuh 40,36% (yoy) pada Agustus 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital," ujar Destry dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (23/9/2026).

Berdasarkan data BI, volume transaksi melalui internet dan mobile banking masing-masing tumbuh 15,12% dan 47,08%, termasuk transaksi QRIS yang tumbuh mencapai 67,22%, didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel melalui BI-FAST mencapai 549 juta transaksi atau tumbuh 37,72% dengan nilai transaksi mencapai Rp1.346 triliun. Sementara itu, nilai transaksi BI-RTGS mencapai Rp16.545 triliun, atau turun tipis 3,64%, dengan volume sebanyak 0,86 juta transaksi atau turun sebesar 1,78% (yoy).

Dari sisi pengelolaan uang rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 12,88% menjadi Rp1.332 triliun.

Beber Strategi Fiskal, Menkeu Akan Perluas Basis Pajak-Kepatuhan

Rabu, 23 September 2026 16:10 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122459/beber-strategi-fiskal-menkeu-akan-perluas-basis-pajak-kepatuhan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan tiga strategi fiskal utamanya. Yang pertama adalah dengan mengumpulkan penerimaan negara dan meningkatkan tax ratio.

“Artinya, peningkatan penerimaan negara. Ini tentu kita lakukan dengan meningkatkan kepatuhan, memperluas basis pajak, dan implementasi coretax yang efektif,” kata Suahasil dalam Antara Business Forum 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Suahasil juga mengatakan bahwa pemerintah berencana menyelaraskan sistem perpajakan dengan perkembangan global dan ekonomi digital dan terus mengoptimalkan penerimaan berbagai macam sumber.

Iapun juga mengatakan bahwa pemerintah juga akan mengoptimalkan sistem coretax yang diklaim bahwa saat ini sudah terintegrasi dengan bukti potong dari berbagai tempat.

“Selain mengumpulkan lebih banyak, APBN juga harus terus mempertajam belanja, meningkatkan efisiensi belanja dan targeting,” sebut Suahasil.

Suahasil mengatakan bahwa penajaman belanja tersebut tak sekedar dengan memotong anggaran saja, namun juga meningkatkan efisiensi.

Hal ini supaya belanja pemerintah dapat masuk ke titik-titik prioritas sehingga dapat mendorong pertumbuhan, memperbaiki kesejahteraan, mendorong program prioritas nasional serta harmonisasi antara pusat dan daerah.

Ia menggarisbawahi sinergi pusat dan daerah dilakukan dengan sinergi APBN dan APBD sebagai satu kesatuan peran negara menyentuh kehidupan masyarakat kita menjadi lebih baik.

“Dan ketika APBN-nya kita desain untuk terus ekspansif, maka pembiayaan harus makin inovatif. Di sini kita keluar dengan berbagai macam pembiayaan, jenis pembiayaan yang lebih inovatif supaya bisa berperan menjaga kesehatan APBN,” kata Suahasil.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2026 tercatat sebesar Rp1.409 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan 24,1% secara tahunan, namun porsinya baru 59,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang tahun ini.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kenaikan tersebut utamanya didorong dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tumbuh 38,9% menjadi Rp591,5 triliun. Porsinya 59,4% dari target sepanjang tahun ini.

Secara terperinci, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas juga tumbuh 16,6% menjadi Rp722,2 triliun atau mencapai 62,6% dari target. Kemudian, PPh Migas juga tumbuh tinggi mencapai 63,8% menjadi Rp39 triliun atau 70,6% dari sepanjang tahun ini.

Namun, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya mengalami penurunan 15,7% menjadi Rp56,4 triliun. Angka tersebut juga masih 36,8% dari target APBN yang dipatok sepanjang tahun ini.

Respons Pasar Usai BI Rate Ditahan di 5,75%

Rabu, 23 September 2026 14:47 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122458/respons-pasar-usai-bi-rate-ditahan-di-5-75/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Respons pasar positif usai mendengar keputusan suku bunga acuan BI Rate yang dipertahankan di level 5,75% pada Rabu (23/9/2026).

Melansir data Bloomberg, rupiah di pasar spot menguat 0,41% ke level Rp17.798/US\$. Begitu juga rupiah di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) ikut menguat 0,12% di Rp17.836/US\$.

Begitu juga dengan pasar saham yang terlihat pada penguatan pada Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 0,83% ke level 6.329,41. Sementara, di pasar obligasi aksi beli masih berlangsung melanjutkan tren yang terjadi sejak pagi.

Yield tenor 1 tahun turun 4,4 basis poin (bps) ke 6,79%, yield tenor 5 tahun turun 7,3% ke 6,87%, dan tenor 9 tahun turun 5,2 bps ke 7,06%, serta tenor acuan 10 tahun turun 1,6 bps ke 7,09%.

Positifnya respons pasar mempertahankan rupiah di zona hijau, bahkan menjadi mata uang yang menguat paling tajam pada perdagangan hari ini.

"Keputusan ini tetap konsisten di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5% plus minus 1% pada tahun 2026-2026 serta mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan," kata Destry Damayanti, Gubernur BI, dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG).

Lebih lanjut, Destry mengatakan BI akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas.

Sementara, BI juga masih akan melanjutkan kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran akan tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat guna meningkatkan kredit pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan," papar Destry.

Lebih lanjut, Destry juga mengatakan BI berkomitmen menjaga kecukupan likuiditas rupiah dengan mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat nilai tukar rupiah. Termasuk di pasar NDF, spot dan DNDF.

Selain itu, BI juga akan mengelola struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro market disertai strategi operasi moneter pro market.

BI juga akan meningkatkan insentif swap beli lindung nilai konvensional kepada BI dalam rangka transaksi underlying pendanaan luar negeri yang mencakup portofolio inflow, pinjaman luar negeri oleh bank, dan foreign direct investment (FDI).

"Melalui pengurangan premi pengurangan 12,5% untuk semua tenor, menjadi sebesar 15% untuk tenor 3 bulan, 20% untuk tenor 6 bulan dan 25% untuk tenor 12 bulan," kata Destry.

Kredit Tumbuh 13,65%, BI Sebut Ruang Bertumbuh Masih Ada

Rabu, 23 September 2026 14:45 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/122456/kredit-tumbuh-13-65-bi-sebut-ruang-bertumbuh-masih-ada>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus mencapai 13,65% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan ini lebih baik dari pertumbuhan kredit Juli lalu yang mencapai 13,58% (yoy).

Berdasarkan kelompok penggunaan kredit didukung oleh kredit investasi tumbuh 25,11% (yoy), kredit modal kerja 11,45% (yoy) dan kredit konsumsi 5,07% (yoy).

“Kami melihat pertumbuhan kredit kembali meningkat disertai dengan ketahanan perbankan yang tetap terjaga,” ujar Gubernur BI Destry Damayanti dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

BI juga menyatakan minat penyaluran kredit atau credit appetite masih longgar serta didukung DPK pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai 10,94% (yoy).

“BI memperkirakan pertumbuhan kredit terjaga di kisaran 8-12%,” terang Destry.

Per Juli 2026 rasio kecukupan modal perbankan (CAR) mencapai 23,84%. Rasio kredit bermasalah (NPL) secara agregat tetap rendah 2,1% untuk bruto dan nett sebesar 0,81%. Rasio alat likuid terhadap DPK tercatat stabil 23,04% per Agustus 2026.

Suahasil Proyeksi Defisit 2026 Melebar Jadi 2,85% PDB

Rabu, 23 September 2026 14:30 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/122441/suahasil-proyeksi-defisit-2026-melebar-jadi-2-85-pdb/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memproyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir 2026 mendatang melebar menjadi sebesar 2,85% dari target awal yakni 2,68%.

“APBN 2026 awalnya didesain dengan defisit 2,68% dari PDB, dengan seluruh kebutuhan kita, dengan perubahan asumsi-asumsi makro yang terjadi, kita proyeksikan di akhir tahun akan meningkat defisitnya mencapai 2,85% dari PDB,” kata Suahasil dalam Antara Business Forum 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Sementara, pada akhir Agustus 2026, Suahasil menyebut bahwa defisit APBN pada mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% dari PDB. Pada periode tersebut, pendapatan negara telah mencapai 65,2% dari target.

Menurut Suahasil, realisasi tersebut masih berada dalam jalur yang sesuai dengan perkembangan APBN sepanjang tahun. Namun, pemerintah tetap mendorong percepatan realisasi belanja untuk mengantisipasi kecenderungan penumpukan belanja pada akhir tahun.

“Untuk pencapaian akhir bulan Agustus menurut saya ini on track, karena Agustus itu sudah 8 bulan, 65,2% dari target, belanja negara telah dibelanjakan 59,7% dari target,” kata Suahasil.

Meski demikian, Bendahara Negara mewaspadai adanya percepatan belanja negara di akhir tahun yang biasanya terjadi.

Oleh karenanya, Suahasil mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan belanja seawal mungkin sehingga dia tidak menumpuk di akhir tahun.

“Nah potensi untuk mengejar percepatan belanja negara ini menurut saya harus kita jalankan, tetapi pada saat yang bersamaan memastikan belanja negara yang dipercepat itu berlangsung secara efisien,” kata Suahasil.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan realisas APBN sampai Agustus 2026 tercatat mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibanding posisi pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp321,3 triliun atau 1,35% terhadap PDB.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan defisit ini masih jauh di bawah target defisit sepanjang 2026 yang sebesar -Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

BI: Prospek Ekonomi Global Belum Kuat, Ini Alasannya

Rabu, 23 September 2026 14:25 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122454/bi-prospek-ekonomi-global-belum-kuat-ini-alasannya/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai prospek perekonomian global belum kuat disertai dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi.

Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan tensi perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang kembali meningkat, semakin mendorong tingginya harga minyak, yang bahkan sempat menyentuh US\$132 per barel sebelum akhirnya turun ke bawah level US\$100 dolar pada 22 september 2026. Tak hanya itu, harga berbagai komoditas dunia turut mengalami kenaikan.

"Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah 3%, diikuti tekanan inflasi yang meningkat sekitar 4%," kata Destry dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Periode September, Rabu (23/9/2026).

Menurut dia, kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, termasuk kebijakan suku bunga acuan AS Fed Fund Rate (FFR) menjadi 3,75%-4% pada september 2026, dengan kemungkinan peningkatan kembali yang masih tinggi.

Sementara itu, imbal hasil obligasi AS atau yield US Treasury juga masih meningkat, seiring ekspektasi FFR dan defisit anggaran pemerintah AS yang besar.

Preferensi investor global terhadap investasi portofolio ke pasar negara berkembang tertahan dan berdampak pada menguatnya indeks dolar AS terhadap negara maju dan berkembang.

Kondisi ini mengharuskan penguatan respons kebijakan fiskal dan moneter, guna menjaga menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

BI Sebut Ekonomi Domestik Terjaga: Ditopang Stimulus Pemerintah

Rabu, 23 September 2026 14:21 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122453/bi-sebut-ekonomi-domestik-terjaga-ditopang-stimulus-pemerintah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebut bahwa perekonomian domestik Indonesia terutama konsumsi rumah tangga masih tetap terjaga didukung oleh stimulus fiskal pemerintah.

“Perkembangan terkini menunjukkan konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang besarnya berbagai stimulus fiskal pemerintah serta mulai menguatnya keyakinan dan ekspektasi penghasilan konsumen,” kata Gubernur BI, Destry Damayanti dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu (23/9/2026).

Sementara, Destry juga menyebut bahwa investasi juga tetap tumbuh baik terutama ditopang oleh investasi pemerintah di tengah peran investasi swasta yang masih perlu terus didikatkan.

Secara eksternal kinerja ekspor non-migas meningkat sejalan dengan peningkatan permintaan beberapa negara meskipun berbagai upaya perlu terus diperkuat guna mengoptimalkan dampak kenaikan harga komoditas ekspor.

Destry memproyeksi, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik didukung implementasi berbagai program stimulus pemerintah, keyakinan pelaku ekonomi yang baik, serta optimalisasi berbagai sumber pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ini, BI juga akan memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berdaya tahan.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 berada dalam kisaran 4,9 hingga 5,7 persen,” kata Destry.

Strategi Baru Insentif Pajak Suahasil Hadapi Global Minimum Tax

Rabu, 23 September 2026 14:15 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122452/strategi-baru-insentif-pajak-suahasil-hadapi-global-minimum-tax/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan strategi pemerintah dalam mendesain ulang insentif pajak di tengah penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT).

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan Indonesia tetap memenuhi komitmen penerapan GMT, sekaligus menjaga daya tarik investasi melalui bentuk insentif lain di luar pengurangan pajak.

Sebab dalam skema GMT, hak pemajakan dibagi antara negara tempat investasi dan negara asal perusahaan. Jika Indonesia tidak mengambil hak pemajakan yang tersedia, negara asal perusahaan dapat mengambil tambahan pajak tersebut.

"Jadi lebih baik kita ambil tetapi kita memberikan bentuk insentif yang lain yang kita desain bersama dengan dunia usaha bagaimana supaya dunia usaha kita bisa mendapatkan tetap kemudahan-kemudahan, perizinan yang lebih cepat dan seterusnya," kata Suahasil dalam agenda Antara Business Forum di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Bentuk insentif tersebut, lanjutnya, tidak hanya berupa kredit pajak. Pemerintah tengah menyiapkan berbagai skema, termasuk kemudahan perizinan dan fasilitas kepabeanan maupun perpajakan untuk jenis barang dan transaksi tertentu.

"Skema barunya macam-macam, berbagai macam yang kita desain nanti sambil jalan, bukan one on one dalam pengertian GMT dilakukan," tuturnya.

Adapun Bendahara Negara tersebut juga menyatakan pemerintah dapat memberikan pembebasan bea masuk untuk produk tertentu, pembebasan pajak untuk jenis barang tertentu, hingga insentif terkait transaksi.

"Jadi kita lakukan terus sesuai international commitment," pungkasnya.

Tahun lalu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) menyatakan berencana membuat aturan mengenai tata cara administrasi dan pembayaran pajak minimum global atau GMT yang sudah berlaku sejak awal tahun ini.

Direktur Jenderal Bimo Wijayanto mengatakan, aturan tersebut dibuat guna mengakomodir mekanisme pembayaran GMT yang mulai dilakukan paling lambat pada 31 Desember 2026 mendatang berdasarkan ketentuan yang laku.

"Saat ini sedang dirancang peraturan dan penyusunan Peraturan Dirjen Pajak terkait tata cara dan administrasinya," ujar Bimo dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Bimo mengatakan, penerapan pajak tersebut sebelumnya telah diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMJ) Nomor 136/2024, yang berlaku khusus bagi grup perusahaan multinasional dengan omzet total mencapai sekitar €750 juta dengan tarif sebesar 15%.

Nantinya, potensi pajak tersebut dihitung melalui Income Inclusion Rules (IIR). Kemudian, ada Undertaxed Payment Rules (UTPR), serta Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT)

Dalam paparannya, baru IIR dan DMTT saja yang baru diterapkan pada tahun ini. Sementara itu, UTPR baru mulai akan berlaku pada 2026 mendatang, bersamaan dengan pembayaran GMT tersebut.

"Pada 2026 mulai berlaku UTPR, lalu prosedur administrasinya dan kita akan sosialisasikan kembali, dan persiapan EOI [Exchange of Information]," tutur dia.

Penerapan ketentuan pajak minimum global merupakan bagian dari kesepakatan Pilar Dua yang digagas oleh Group of 20 (G20) dan dikoordinasikan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Ini juga telah didukung oleh lebih dari 140 negara. Saat ini terdapat lebih dari 40 negara yang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dengan mayoritas negara menerapkan pada tahun 2025.

BI: Aliran Modal Asing Masuk Capai US\$ 400 Juta hingga 21 September 2026

Rabu, 23 September 2026 22:27 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-ungkap-aliran-modal-asing-us-400-juta-hingga-21-september-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia masih mencatatkan arus masuk hingga September 2026. Bank Indonesia (BI) mencatat investasi portofolio asing mencapai net inflows sebesar US\$ 400 juta hingga 21 September 2026.

Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan, aliran investasi portofolio asing tersebut ditopang oleh penerbitan global bond Pemerintah serta arus masuk pada Surat Berharga Negara (SBN).

“Hingga 21 September 2026, mencatat net inflows sebesar US\$ 400 juta,” tutur Destry dalam konferensi pers, Rabu (23/9/2026).

Adapun nilai aliran modal asing tersebut lebih rendah dibandingkan dengan catatan hingga 14 Agustus 2026 yang mencapai US\$ 1,8 miliar.

Lebih lanjut, Destry juga menyampaikan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2026 tetap terjaga sebesar US\$ 146,5 miliar.

Posisi tersebut setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa tersebut juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Ke depan, sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat guna meningkatkan ketahanan eksternal di tengah gejolak global.

BI Perbesar Insentif Lindung Nilai, Upaya Tahan Aliran Valas

Rabu, 23 September 2026 20:26 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-perbesar-insentif-lindung-nilai-upaya-tahan-aliran-valas>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memperbesar insentif lindung nilai untuk menarik dan menjaga aliran dana luar negeri di Indonesia. Langkah ini dilakukan di tengah kebutuhan valas yang tetap besar, baik untuk memenuhi kewajiban luar negeri maupun menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

BI meningkatkan insentif untuk instrumen Swap Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia dalam rangka transaksi pendanaan luar negeri yang mencakup investasi portofolio, pinjaman luar negeri oleh bank, dan investasi langsung.

Premi untuk instrumen tersebut diturunkan dari semula 12,5% untuk seluruh tenor menjadi 15% untuk tenor tiga bulan, 20% untuk tenor enam bulan, dan 25% untuk tenor 12 bulan.

Selain itu, BI meningkatkan insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam rangka transaksi pendanaan luar negeri. Premi diturunkan dari sebelumnya 15% menjadi 25% untuk tenor enam bulan dan 30% untuk tenor 12 bulan.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menilai, semakin panjang tenor, semakin besar insentif yang diberikan BI. Hal tersebut menunjukkan BI tidak hanya ingin meredam volatilitas jangka pendek, tetapi juga mendorong masuk dan bertahannya pasokan valas dengan tenor yang lebih panjang.

“Ini menunjukkan BI tidak hanya ingin meredam volatilitas jangka pendek, tetapi juga mendorong masuk dan bertahannya pasokan valas dengan tenor yang lebih panjang, baik dari portfolio inflows, pinjaman luar negeri perbankan maupun FDI,” tutur Faiz kepada Kontan, Rabu (23/9/2026).

Di sisi lain, kebutuhan valas di dalam negeri juga masih cukup besar. Salah satunya berasal dari kewajiban utang luar negeri.

Data BI menunjukkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 mencapai US\$454,8 miliar, tumbuh 4,9% secara tahunan. ULN pemerintah tercatat sebesar US\$218,4 miliar.

Kebutuhan valas juga muncul dari kebijakan stabilisasi nilai tukar yang dilakukan BI. Dalam laporan cadangan devisa Agustus 2026, BI menyebut posisi cadangan devisa antara lain dipengaruhi oleh pembayaran ULN pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2026 tercatat US\$146,5 miliar, meningkat dari US\$145,3 miliar pada akhir Juli 2026. Posisi tersebut setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah.

Di sisi perbankan, DPK valas pada Juli 2026 tercatat Rp1.582,7 triliun, tumbuh 17,9% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 18,5%.

Secara bulanan, DPK valas juga turun dari Rp1.606,2 triliun pada Juni menjadi Rp1.582,7 triliun pada Juli 2026.

Di tengah kondisi tersebut, BI memberikan insentif lebih besar untuk transaksi lindung nilai dengan tenor yang lebih panjang.

Faiz menilai, kebijakan tersebut dapat menurunkan biaya lindung nilai dan meningkatkan daya tarik aset Rupiah dari sisi imbal hasil setelah memperhitungkan risiko.

“Jadi, dampaknya ke Rupiah menurut kami positif, tetapi lebih sebagai stabilizer daripada katalis penguatan yang besar,” ungkapnya.

Meski demikian, insentif tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan tekanan dari kebijakan The Fed, indeks dolar AS, imbal hasil global maupun harga energi.

Faiz mengatakan, tekanan eksternal terhadap Rupiah meningkat setelah The Fed bersikap lebih ketat, sementara imbal hasil Surat Utang Pemerintah AS masih tinggi. Di saat yang sama, selisih imbal hasil Indonesia dengan AS menyempit menjadi sekitar 200 basis poin.

Kondisi tersebut membuat daya tarik aset Rupiah berkurang dan lebih sensitif terhadap perubahan sentimen global.

Per 22 September, Rupiah berada di sekitar Rp17.855 per dolar AS, sementara volatilitas 30 hari masih relatif terkendali di sekitar 4,1%.

Menurut Faiz, selama volatilitas Rupiah masih terkendali, BI akan mengandalkan intervensi valas serta insentif Swap dan DNDF sebagai lini pertahanan pertama.

Namun, apabila tekanan terhadap Rupiah berlangsung persisten dan mulai meningkatkan risiko inflasi impor, instrumen suku bunga akan menjadi lebih relevan.

Faiz menilai kebijakan tersebut bukan berarti BI melihat Rupiah akan terus melemah. Menurutnya, risiko terhadap Rupiah memang meningkat sehingga BI perlu memperkuat penyangga stabilisasi.

“Mungkin kalau dianalogikan seperti kita membawa payung yang lebih kokoh ketika prakiraan curah hujan meningkat apalagi disertai angin kencang. Bukan berarti kita yakin hujan pasti turun, tetapi risiko hujannya meningkat sehingga perlindungannya perlu diperkuat,” tambahnya.

Dengan kondisi tersebut, Faiz mempertahankan proyeksi Rupiah akhir 2026 di sekitar Rp 17.963 per dolar AS. selain itu, ia juga memperkirakan BI-Rate berpotensi naik menuju 6,25% pada akhir 2026.

ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 5,2% pada 2026-2027, Inflasi Naik

Rabu, 23 September 2026 12:26 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/adb-pertahankan-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-ri-52-pada-2026-2027-inflasi-naik>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Asian Development Bank (ADB) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027 di level 5,2%. Namun menaikkan proyeksi inflasi.

Berdasarkan laporan terbarunya yang bertajuk Asian Development Outlook edisi September 2026, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027 tersebut, tidak berubah dibandingkan proyeksi ADB yang rilis pada Juli 2026.

ADB masih melihat ekonomi Indonesia tumbuh stabil di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global, terutama akibat gejolak harga energi dan ketegangan geopolitik.

Untuk kawasan Asia berkembang dan Pasifik, ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0% pada 2026 dan meningkat menjadi 5,1% pada 2027. Proyeksi 2026 tersebut naik tipis 0,1 percentage point (pps) dari perkiraan Juli sebesar 4,9%.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kawasan pada 2026 diproyeksikan sebesar 5,0%, naik 0,1 poin persentase (pps) dibandingkan proyeksi dalam Asian Development Outlook (ADO) Juli.

Kenaikan ini didukung oleh kuatnya investasi di India dan ekspor teknologi yang tetap solid di negara-negara berkembang di Asia Tenggara.

"Proyeksi 2027 tetap sebesar 5,1%. Namun, kedua proyeksi tersebut (2026 dan 2027).masih berada di bawah pertumbuhan 5,5% pada 2025," tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (23/9/2026).

Di Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,7% pada 2026 dan 4,9% pada 2027. Proyeksi tersebut masing-masing naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,6% dan 4,8%.

ADB mencatat penguatan pertumbuhan di Asia Tenggara antara lain ditopang oleh ekspor berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (AI), serta investasi.

Di kawasan tersebut, Vietnam menjadi salah satu negara yang mengalami kenaikan proyeksi pertumbuhan terbesar. ADB memperkirakan ekonomi Vietnam tumbuh 7,8% pada 2026, naik dari proyeksi sebelumnya 7,2%.

Sementara Malaysia diproyeksikan tumbuh 4,9% pada 2026, naik dari 4,6%. Sebaliknya, proyeksi pertumbuhan Filipina dipangkas menjadi 3,3% dari sebelumnya 3,8%.

Di luar Asia Tenggara, India menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan Asia. ADB menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi India pada 2026 menjadi 7,0%, dari sebelumnya 6,6%.

ADB Proyeksi Risiko Inflasi Naik

Kendati demikian, prospek ekonomi kawasan masih menghadapi sejumlah risiko. ADB menyoroti ketegangan geopolitik, gangguan pasokan energi, fenomena El Nino, kondisi keuangan yang ketat, serta ketidakpastian kebijakan perdagangan.

"Fenomena El Nino yang sangat kuat diperkirakan akan memperbesar tekanan inflasi," tulis laporan tersebut.

ADB juga memperkirakan harga minyak lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya, yakni sekitar US\$ 90 per barel pada 2026 dan US\$ 78 per barel pada 2027.

Kenaikan harga energi tersebut berpotensi meningkatkan biaya impor dan memberikan tekanan terhadap inflasi di negara-negara Asia.

Untuk Indonesia, ADB memperkirakan inflasi 2026 berada di 3,3%, naik dari proyeksi sebelumnya sebesar 3,0%. Proyeksi inflasi 2027 juga dinaikkan menjadi 3,0% dari 2,5%.

ADB memperkirakan, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia dipertahankan pada 5,2%, namun tekanan harga menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan ke depan.

Angka Kemiskinan Jateng Ditargetkan Turun Jadi 8,70% pada Akhir 2026

Rabu, 23 September 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/angka-kemiskinan-jateng-ditargetkan-turun-jadi-870-pada-akhir-2026/>

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah manergetkan angka kemiskinan di wilayahnya turun menjadi 8,70 persen pada akhir 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Jawa Tengah per Maret 2026 masih mencapai 9,21 persen.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, saat membuka acara Pembekalan dan Pentasharufan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah Tahap III Tahun 2026, di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (23/9/2026).

"Target kita ada diangka 8,70% di akhir tahun ini. Semoga ini bisa tercapai," kata Taj Yasin saat mewakili Gubernur Tengah, Ahmad Luthfi, pada acara tersebut.

Dia menjelaskan, salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinaan adalah dengan terus mengurangi ketimpangan antara jumlah kebutuhan rumah dengan ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat (backlog perumahan) di wilayahnya.

Berdasarkan data, hingga semester II tahun 2026, backlog perumahan di Jateng tercatat sekitar 990.000 unit. Angka ini menurun dibandingkan kondisi pada 2025 yang mencapai 1.332.968 unit. Pada 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/ kota, Baznas, perusahaan-perusahaan, melakukan perbaikan sebanyak ratusan ribu unit RTLH di Jateng.

Taj Yasin mengatakan, sinergi dengan Baznas turut membantu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani backlog perumahan, sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

"Terima kasih kepada Baznas yang hari ini, menyalurkan zakat kepada para penerima berupa perbaikan rumah tidak layak huni. Ini membantu kami di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," ucapnya.

Wagub berharap, proses perbaikan RTLH dapat segera selesai, sehingga masyarakat penerima manfaat bisa menempati rumah yang lebih layak.

Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Darodji mengatakan, pada Tahap III 2026, Baznas menyalurkan bantuan rehabilitasi RTLH untuk 112 unit dengan total anggaran Rp2,011 miliar .

Sementara itu, total bantuan perbaikan RTLH yang disalurkan Baznas Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir tercatat, pada 2022 sebanyak 250 unit senilai Rp4,375 miliar. Pada 2023, sebanyak 65 unit senilai Rp1,17 miliar.

Pada 2024, sebanyak 591 unit senilai Rp10,896 miliar. Sedangkan pada 2025 sebanyak 574 unit, senilai Rp 10,682 miliar, dan 2026 sebanyak 237 unit senilai Rp4,7 miliar. Secara keseluruhan, Baznas Jawa Tengah menyebut bantuan RTLH sepanjang 2019–2026 telah mencapai 3.855 unit, dengan total nilai Rp49,174 miliar.

Penerima bantuan dari Kabupaten Wonosobo, Badaruddin mengaku sangat terbantu dengan program rehabilitasi RTLH Baznas Jawa Tengah. Dia berharap, rumahnya dapat segera direnovasi, sehingga menjadi tempat tinggal yang lebih layak bagi keluarganya.

“Terima kasih sekali, semoga dengan bantuan yang diberikan melalui Baznas Provinsi Jawa Tengah, dapat dipergunakan untuk renovasi rumah yang kami tempati, dan menjadi berkah untuk anak-anak dan keluarga saya,” ujarnya. (Humas Jateng)*ul

Realisasi penerimaan PKB Temanggung mencapai Rp39,6 miliar

Rabu, 23 September 2026 14:32 WIB

Pewarta: Heru Suyitno, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/646189/realisasi-penerimaan-pkb-temanggung-mencapai-rp396-miliar>

Temanggung (ANTARA) - Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, hingga 22 September 2026 tercatat mencapai 55,22 persen atau Rp39,6 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp71,8 miliar.

Kepala UPT Samsat Kabupaten Temanggung Budi Prasetyo di Temanggung, Rabu, menyampaikan penerimaan yang telah terealisasi sekitar Rp39,6 miliar dari target PKB sebesar Rp71,8 miliar pada 2026, sehingga menjadi capaian terendah di Jawa Tengah.

Selain PKB, katanya, realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga belum mencapai target. Dari target sebesar Rp25 miliar, penerimaan hingga periode pelaporan mencapai sekitar Rp15,9 miliar.

Ia mengatakan rendahnya penerimaan pajak kendaraan tersebut salah satunya dipengaruhi kondisi perekonomian masyarakat Temanggung yang cukup bergantung pada hasil tembakau.

"Dua tahun terakhir hasil tembakau kurang bagus, sehingga pembayaran pajak tidak menjadi prioritas masyarakat," katanya.

Ia menuturkan penerimaan Opsen PKB yang menjadi bagian pendapatan pemerintah kabupaten juga masih perlu digenjot. Dari target sebesar Rp44 miliar, realisasinya mencapai sekitar 57,6 persen.

Untuk Opsen BBNKB, target yang disebutkan sebesar Rp17,8 miliar, sedangkan realisasinya mencapai Rp10,4 miliar atau sekitar 58,8 persen.

Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendekatkan akses pelayanan pembayaran pajak kendaraan.

"Kami tidak menyerah. Layanan malam minggu di Stadion Bhumi Phala, Car Free Day di Ngadirejo, serta SAMSAT Budiman dan Korporat terus kami perkuat," katanya.

Selain memperluas layanan, katanya, Samsat Temanggung juga berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

Pemkot Pekalongan giatkan gerakan mengubah jelantah bernilai ekonomi

Rabu, 23 September 2026 08:36 WIB

Pewarta: Kutnadi, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/646157/pemkot-pekalongan-giatkan-gerakan-mengubah-jelantah-bernilai-ekonomi>

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Jawa Tengah, menggiatkan gerakan mengubah minyak jelantah yang bisa memiliki nilai ekonomi pada masyarakat serta memberikan manfaat pada kebersihan lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Joko Purnomo, di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa pengumpulan minyak jelantah merupakan bagian dari komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Jelantah yang biasanya karena sedikit kemudian dibuang kita kumpulkan menjadi rupiah atau memiliki ekonomi, sehingga tidak merusak lingkungan. Itu yang kita inginkan," katanya lagi.

Pemkot Pekalongan mengajak aparatur sipil negara dan organisasi perangkat daerah berpartisipasi dalam gerakan mengubah jelantah menjadi rupiah.

Dia mengatakan minyak jelantah yang terkumpul masih dapat dimanfaatkan dan diolah kembali, antara lain bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku avtur maupun biodiesel.

"Pemanfaatan tersebut diharapkan turut mendukung ketahanan energi melalui pengelolaan limbah yang lebih bernilai guna," katanya pula.

Ketua Tim Pembina PKK Kota Pekalongan Inggit Soraya menyampaikan bahwa gerakan tersebut akan dikembangkan secara lebih luas melalui Gerakan Bersama Mengubah Jelantah Jadi Rupiah (Gemar Jariah) yang rencananya diluncurkan pada 5 Oktober 2026.

"Ini tidak hanya menggerakkan kader-kader PKK dan kader posyandu, tetapi akan menggandeng semuanya, termasuk OPD, ASN, dan Dharma Wanita Persatuan. Kami berharap ada kepedulian dan partisipasi bersama," ujarnya.

Ia mengatakan konsep gerakan tersebut tidak sekadar mengumpulkan minyak jelantah tetapi menjadikannya sebagai bentuk tabungan.

Jelantah yang dikumpulkan, kata dia lagi, nantinya dapat diuangkan kembali sehingga masyarakat maupun aparatur sipil negara memperoleh manfaat ekonomi dari limbah yang sebelumnya tidak bernilai.

"Kalau satu ASN satu liter saja dan semuanya bisa memenuhi, sudah bisa terkumpul lebih dari 5.000 liter. Akan tetapi, kita menetapkan target minimal 2.500 liter minyak jelantah," katanya lagi.

Dalam tahap awal, gerakan ini menargetkan sedikitnya 2.500 liter minyak jelantah dapat terkumpul. Target tersebut antara lain didorong melalui imbauan kepada ASN untuk mengumpulkan minimal satu liter minyak jelantah.

"Kalau satu ASN satu liter saja dan semuanya bisa memenuhi, sudah bisa terkumpul lebih dari 5.000 liter. Tetapi kita menetapkan target minimal 2.500 liter," ujarnya pula.

BI Purwokerto memperkuat program unggulan pengembangan UMKM

Rabu, 23 September 2026 08:34 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/646155/bi-purwokerto-memperkuat-program-unggulan-pengembangan-umkm>

Lombok Barat (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto memperkuat program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Banyumas Raya meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, melalui digitalisasi, peningkatan produktivitas, hilirisasi pangan, akses pembiayaan, serta perluasan pasar hingga ekspor.

Kepala Kantor Perwakilan BI (KPw BI) Purwokerto Aswin Gantina di sela kegiatan Capacity Building Media Tahun 2026, di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu, mengatakan pengembangan UMKM dilakukan secara terintegrasi dari sisi hulu hingga hilir.

"Program unggulan tersebut mencakup digital farming pada kluster pangan strategis, onboarding UMKM ke platform digital, hilirisasi produk pangan, fasilitasi business matching dengan lembaga keuangan, pengembangan UMKM hijau, serta pendampingan UMKM berorientasi ekspor," katanya pula.

Pihaknya juga mendorong peningkatan produktivitas kluster melalui penerapan praktik terbaik dan memfasilitasi promosi perdagangan bagi UMKM yang berorientasi ekspor.

Ia menyebutkan berdasarkan data KPw BI Purwokerto, sepanjang 2019-2025 sebanyak 60 UMKM di Banyumas Raya telah berhasil melakukan transformasi digital.

Pada periode yang sama, lebih dari 25 UMKM mendapatkan pembiayaan dengan total lebih dari Rp3 miliar, sedangkan 15 UMKM berhasil melakukan ekspor, baik secara langsung maupun melalui agregator.

Pada sektor pangan, sebanyak 11 gabungan kelompok tani (gapoktan) telah menjalani digitalisasi pada sisi hulu dan lima gapoktan pada sisi hilir. Selain itu, delapan gapoktan telah melakukan hilirisasi produk pertanian dan 10 gapoktan pangan berhasil meningkatkan produktivitas.

Di samping itu, KPw BI Purwokerto setiap tahun menyelenggarakan Karya Kreatif Serayu (KKS) sebagai kegiatan unggulan pengembangan UMKM Banyumas Raya dalam rangka memperluas akses pasar

"Pada 2023-2025, lebih dari 15 UMKM juga mengikuti kegiatan promosi perdagangan di luar negeri," kata Aswin.

Selain pengembangan UMKM, pihaknya juga menjalankan program ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan ekosistem produk halal, keuangan syariah, literasi dan gaya hidup halal.

Ia mengatakan program tersebut antara lain fasilitasi sertifikasi halal, pembentukan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS), penguatan UMKM pesantren, serta pengembangan pariwisata ramah Muslim.

“Kami juga mengembangkan inovasi sistem pembayaran digital dan mendorong akselerasi penggunaan QRIS sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Banyumas Raya,” katanya lagi.

Harga cabai rawit di Temanggung naik tembus Rp56.000 per kg

Rabu, 23 September 2026 08:31 WIB

Pewarta: Heru Suyitno, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/646149/harga-cabai-rawit-di-temanggung-naik-tembus-rp56000-per-kg>

Temanggung (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, memastikan pasokan cabai rawit masih mencukupi, meskipun harga cabai di tingkat petani kembali mengalami kenaikan di mana saat ini harga telah menembus angka Rp56.000 per kilogram.

Kepala DKPPP Kabupaten Temanggung Joko Budi Nuryanto di Temanggung, Selasa, menyampaikan kenaikan harga cabai rawit terjadi di tengah menurunnya produktivitas tanaman, kondisi itu dipengaruhi musim kemarau yang membuat sebagian tanaman cabai milik petani mulai tidak produktif

Saat ini harga cabai rawi di tingkat petani berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram.

Menurut dia, kenaikan harga cabai tidak hanya dipengaruhi menurunnya produktivitas, namun juga siklus tanam petani.

Ia mengatakan sejumlah petani saat ini mulai membongkar tanaman cabai lama dan menyiapkan lahan untuk musim tanam berikutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan produksi dengan kebutuhan menjelang Natal dan tahun baru serta lebaran.

Harga memang mengalami kenaikan, namun Pemkab Temanggung memastikan ketersediaan cabai masih mencukupi, ujar dia.

Pada musim tanam bulan Juni lalu, katanya, produksi cabai rawit dan cabai besar di Temanggung mencapai 100.000 ton, sementara kebutuhan masyarakat hanya sekitar 4.000 ton.

Menurut dia, sebagian hasil produksi cabai Temanggung kemudian dipasok ke sejumlah daerah, antara lain Jakarta, Sumatera, serta sejumlah kota besar di Jawa Barat.

Pengangguran Australia Tembus Level Tertinggi 5 Tahun, RBA Bersiap Naikkan Bunga

Kamis, 24 September 2026 09:29 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/pengangguran-australia-tembus-level-tertinggi-5-tahun-rba-bersiap-naikkan-bunga>

KONTAN.CO.ID - Tingkat pengangguran Australia meningkat ke level tertinggi dalam lima tahun pada Agustus 2026.

Kondisi ini terjadi meski penyerapan tenaga kerja tumbuh lebih tinggi dari perkiraan, karena semakin banyak masyarakat yang masuk ke pasar kerja untuk mencari pekerjaan.

Melansir Reuters, Data Australian Bureau of Statistics (ABS) pada Kamis (24/9/2026) menunjukkan, jumlah pekerja bersih bertambah 39.500 orang pada Agustus dibandingkan bulan sebelumnya.

Angka tersebut jauh di atas proyeksi pasar yang memperkirakan kenaikan 20.000 pekerja.

Namun, jumlah pekerja penuh waktu justru turun 6.300 orang.

Tingkat pengangguran naik menjadi 4,6% dari 4,5% pada Juli. Angka tersebut juga lebih tinggi dari perkiraan pasar dan menjadi yang tertinggi sejak akhir 2021.

Kenaikan pengangguran terjadi seiring meningkatnya partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi naik 0,2 poin persentase menjadi 67,1%, sementara jumlah jam kerja meningkat 0,7%.

"Pada Agustus, kami mencatat proporsi orang yang sebelumnya berada di luar angkatan kerja dan kemudian menjadi pengangguran lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun terakhir," kata Sean Crick, Kepala Statistik Ketenagakerjaan ABS.

Menurut Crick, bertambahnya ukuran angkatan kerja tersebut mendorong kenaikan tingkat partisipasi.

RBA Masih Berpeluang Naikkan Suku Bunga

Data ketenagakerjaan yang beragam tersebut belum cukup mengubah ekspektasi pasar terhadap kebijakan Reserve Bank of Australia (RBA).

Pasar saat ini memperkirakan peluang sekitar 95% bahwa RBA akan menaikkan suku bunga acuan pada pekan depan menjadi 4,6%. Jika terealisasi, kenaikan tersebut akan menjadi yang keempat sepanjang tahun ini.

Dolar Australia merespons negatif data tersebut. Mata uang Negeri Kanguru melemah 0,2% menjadi US\$ 0,7026, sekaligus berada di level terendah dalam tujuh pekan setelah mengalami tekanan besar pada perdagangan sebelumnya.

RBA menilai pasar tenaga kerja Australia memang mulai melonggar, tetapi masih relatif ketat.

Gubernur RBA Michele Bullock mengatakan tingkat pengangguran di kisaran 4,5% hingga 5% dapat membantu menahan tekanan inflasi.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengangguran masih dapat diperlukan untuk membantu menurunkan inflasi.

RBA telah menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali tahun ini hingga mencapai 4,35%, yang merupakan level tertinggi sejak periode pascapandemi.

Namun, tekanan inflasi belum sepenuhnya mereda. Inflasi inti Australia masih berada di 3,6%, lebih tinggi dibandingkan target RBA sebesar 2% hingga 3%.

Inflasi dan Harga Minyak Jadi Perhatian

Bullock sebelumnya memperingatkan bahwa risiko inflasi mulai meningkat akibat dampak konflik di Timur Tengah serta lonjakan investasi pusat data.

Kenaikan harga energi juga menjadi perhatian. Harga minyak kembali berada di atas US\$ 100 per barel, mendorong pasar melakukan penyesuaian terhadap prospek suku bunga global.

Di Australia, pasar kini memperkirakan suku bunga acuan dapat mencapai sekitar 5,1%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meski pasar tenaga kerja mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan, tekanan inflasi dan kenaikan harga energi masih menjadi pertimbangan penting bagi arah kebijakan moneter Australia.

Dolar AS Tembus Level Tertinggi Dua Bulan, Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Menguat

Kamis, 24 September 2026 09:24 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-tembus-level-tertinggi-dua-bulan-ekspektasi-kenaikan-suku-bunga-menguat>

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) bertahan di level tertinggi dalam dua bulan pada Kamis (24/9/2026).

Penguatan dolar didorong data aktivitas manufaktur AS yang lebih kuat dari perkiraan sehingga kembali memicu kekhawatiran inflasi dan meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Federal Reserve.

Melansir Reuters, Indeks dolar, yang mengukur kinerja mata uang AS terhadap sejumlah mata uang utama, berada di sekitar level 101,1, mendekati posisi tertinggi dalam dua bulan.

Penguatan dolar menekan mata uang utama lainnya. Euro turun ke US\$ 1,1378, level terendah dalam dua bulan. Poundsterling juga bertahan di sekitar US\$ 1,3231, mendekati level terendah dalam tiga bulan.

Data purchasing managers' index (PMI) yang dirilis sebelumnya menunjukkan aktivitas ekonomi AS lebih kuat dari perkiraan. Data tersebut kembali meningkatkan perhatian pasar terhadap tekanan harga dan risiko inflasi.

Tekanan juga datang dari pasar obligasi. Lelang US Treasury tenor lima tahun mendapat respons yang kurang baik sehingga memicu aksi jual surat utang dan mendorong kenaikan yield di berbagai tenor.

Yield US Treasury lima tahun bahkan menembus 5% untuk pertama kalinya sejak 2007.

Kombinasi ekonomi AS yang relatif kuat dan risiko inflasi yang meningkat membuat pasar kembali memperhitungkan kebijakan moneter yang lebih ketat dari The Fed.

Gubernur The Fed Michael Barr pada Rabu (23/9) mengatakan, risiko inflasi dan kekuatan ekonomi AS dapat membuat bank sentral perlu kembali menaikkan suku bunga. Pernyataan tersebut dipandang pasar sebagai sinyal mengenai arah kebijakan ke depan.

"Dengan mempertimbangkan kekuatan relatif pertumbuhan AS dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang semakin agresif, dolar AS masih memiliki daya tarik untuk dimiliki," kata Chris Weston, Kepala Riset Pepperstone.

Menurut Weston, tanda-tanda ekonomi AS mulai terlalu panas kini menjadi perhatian utama. Jika inflasi terus berada di atas perkiraan, pembuat kebijakan kemungkinan perlu memperketat kebijakan moneter lebih lanjut.

Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Menguat Ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed kembali meningkat. Berdasarkan CME Group FedWatch Tool, pelaku pasar kini melihat peluang hampir 70% untuk kenaikan suku bunga pada pertemuan The Fed Oktober.

Angka tersebut meningkat dibandingkan sekitar 50% sepekan sebelumnya.

Kenaikan harga minyak hampir 4% pada Rabu juga memperkuat kekhawatiran inflasi. Pasar mencermati dampak ketegangan Iran-Amerika Serikat serta kemungkinan kebijakan AS terkait pembatasan ekspor diesel.

Kenaikan harga energi dapat kembali menambah tekanan terhadap inflasi, sehingga memperumit ruang bagi The Fed untuk melonggarkan kebijakan moneter.

Yen Tertekan

Penguatan dolar juga membuat yen Jepang berada di sekitar level terendah dalam tiga pekan. Yen diperdagangkan sekitar 157,9 per dolar AS.

Pelaku pasar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan intervensi pemerintah Jepang untuk menopang yen. Pasar menilai kenaikan suku bunga Bank of Japan pekan lalu belum cukup hawkish untuk memberikan dukungan yang kuat terhadap mata uang Jepang.

Data ekonomi terbaru menunjukkan aktivitas manufaktur Jepang memang meningkat pada September, tetapi dengan laju yang lebih lambat dibandingkan bulan sebelumnya. Produksi dan pesanan baru mengalami pelemahan.

Sementara itu, dolar Australia berada di US\$ 0,7035, turun 0,07% menjelang rilis data ketenagakerjaan terbaru. Dolar Selandia Baru relatif datar di US\$ 0,5676.

Di pasar offshore, yuan China juga bergerak datar di level 6,7119 per dolar AS. Investor mencermati kunjungan Presiden China Xi Jinping ke AS, yang menjadi pertemuan penting di tengah ketegangan kedua negara terkait perdagangan, teknologi, Taiwan dan Iran.

AS dan China Perpanjang Gencatan Dagang hingga Januari 2027

Kamis, 24 September 2026 08:12 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/as-dan-china-perpanjang-gencatan-dagang-hingga-januari-2027>

KONTAN.CO.ID - Amerika Serikat (AS) dan China sepakat memperpanjang gencatan dagang yang telah berlangsung selama 11 bulan.

Kesepakatan tersebut diumumkan saat Presiden AS Donald Trump menyambut kedatangan Presiden China Xi Jinping di Washington untuk kunjungan selama tiga hari.

Melansir Reuters, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kesepakatan perpanjangan gencatan dagang telah tercapai.

Gencatan tersebut sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 10 November dan kini diperpanjang hingga 10 Januari.

Trump secara langsung menyambut Xi di Joint Base Andrews, Maryland, setelah pemimpin China tersebut tiba di AS. Pertemuan ini menjadi kunjungan pertama Xi ke AS dalam hampir tiga tahun.

Perpanjangan gencatan dagang menjadi salah satu perhatian utama pelaku pasar karena hubungan perdagangan kedua negara masih dibayangi ketegangan.

Perang tarif pada 2025 sempat mendorong tarif hingga lebih dari 100% terhadap sejumlah produk dari dua ekonomi terbesar dunia tersebut.

Kesepakatan baru, meski terbatas, berpotensi meredakan ketidakpastian perdagangan global. Namun, sejumlah persoalan strategis masih belum terselesaikan, termasuk pembatasan ekspor mineral tanah jarang dan semikonduktor, hubungan China dengan Iran serta dukungan AS terhadap Taiwan.

Pembicaraan Trump dan Xi yang dijadwalkan berlangsung Kamis juga berpotensi menghasilkan kesepakatan pada sektor tertentu.

Kedua negara disebut dapat membahas penurunan tarif untuk produk tertentu, kerja sama pemberantasan perdagangan narkoba, serta peningkatan komunikasi antara militer kedua negara.

Trump juga diperkirakan akan meminta pembebasan sejumlah warga AS dan warga negara lain yang ditahan di China.

Di sektor teknologi, Washington dan Beijing berpeluang memperluas pembicaraan mengenai kecerdasan buatan (AI).

Kedua negara saat ini bersaing ketat dalam pengembangan teknologi tersebut, sekaligus menghadapi kekhawatiran mengenai risiko yang ditimbulkannya.

Perbedaan kepentingan juga masih terlihat dalam isu Taiwan. Orang-orang yang mengetahui rencana pembicaraan mengatakan Xi kemungkinan akan kembali menyampaikan posisi Beijing terkait Taiwan.

Sementara itu, Trump diperkirakan tetap mempertahankan pembatasan ekspor teknologi AS meski mendapat keberatan dari China.

Belum jelas apakah Beijing akan membantu Washington mencari jalan keluar dari kebuntuan konflik AS-Iran yang telah berlangsung hampir tujuh bulan.

Di tengah agenda tersebut, kedua pemimpin juga berusaha menunjukkan stabilitas hubungan antara AS sebagai konsumen terbesar dunia dan China sebagai salah satu pusat manufaktur terbesar dunia.

Xi juga dijadwalkan menghadiri jamuan kenegaraan di Gedung Putih pada Kamis yang akan mempertemukannya dengan sejumlah pemimpin perusahaan teknologi AS, termasuk CEO Apple Tim Cook, CEO Nvidia Jensen Huang dan CEO OpenAI Sam Altman.

Pertemuan tersebut berlangsung ketika kondisi ekonomi kedua negara menghadapi tantangan masing-masing. China mencatat peningkatan perdagangan luar negeri, tetapi konsumsi rumah tangga masih lemah dan sektor properti menghadapi tekanan.

Sementara itu, pemerintahan Trump menghadapi tekanan akibat kenaikan harga energi yang dipicu perang dengan Iran. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu isu ekonomi yang membayangi pemerintah AS menjelang pemilihan anggota Kongres pada November.

Trump dan Xi diperkirakan masih memiliki peluang untuk kembali bertemu tahun ini. Pertemuan berikutnya berpotensi berlangsung dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di China pada November atau pertemuan G20 di AS pada Desember.

Klaim Pengangguran AS Dekati Level Terendah Dalam 57 Tahun, Pasar Kerja Menguat

Kamis, 24 September 2026 22:11 WIB

Reporter: Tri Sulistiowati, Editor: Tri Sulistiowati

<https://internasional.kontan.co.id/news/klaim-pengangguran-as-dekati-level-terendah-dalam-57-tahun-pasar-kerja-menguat>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Klaim baru untuk tunjangan pengangguran AS bertahan di dekat level terendah dalam 57 tahun pada pekan lalu.

Hal ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja kembali mendapatkan momentum setelah sempat kesulitan di sebagian besar musim panas, dan untuk saat ini tampaknya mampu bertahan menghadapi tekanan akibat konflik di Timur Tengah.

Laporan klaim pengangguran mingguan dari Departemen Tenaga Kerja pada hari Kamis (24/9) juga mengisyaratkan bahwa tingkat pengangguran tetap stabil di angka 4,1% bulan ini.

Jumlah penerima tunjangan pengangguran berada di dekat level terendah dalam tiga tahun pada pekan saat pemerintah melakukan survei rumah tangga untuk data tingkat pengangguran bulan September. Konflik yang melibatkan Israel telah memicu kenaikan harga energi, dengan harga solar mencapai rekor tertinggi.

"Mungkin ini adalah perlombaan melawan waktu karena harga energi kembali melonjak seiring berlanjutnya konflik yang melibatkan Iran, dan ekonomi selalu berisiko mengalami penurunan permintaan," ujar Christopher Rupkey, kepala ekonom di FWDBONDS.

"Namun, pada pertengahan September, ekonomi tampaknya bergerak sangat dinamis, sebagian berkat belanja modal (capex) yang luar biasa besar untuk kecerdasan buatan (AI)." tambahnya.

Klaim awal untuk tunjangan pengangguran negara bagian turun 1.000 menjadi 197.000 (setelah penyesuaian musiman) untuk pekan yang berakhir pada 19 September, menurut keterangan Departemen Tenaga Kerja pada hari Kamis.

Para ekonom yang disurvei oleh Reuters sebelumnya memperkirakan angka klaim sebesar 201.000 untuk pekan tersebut. Angka klaim ini mendekati level yang terakhir kali tercatat pada tahun 1969. Para ekonom menilai penurunan ini sebagian disebabkan oleh kesulitan dalam melakukan penyesuaian musiman terhadap data di sekitar hari libur yang tanggalnya berubah-ubah, seperti Hari Buruh (Labor Day).

Mereka juga mencatat adanya faktor musiman residual yang cenderung menekan angka klaim lebih rendah menjelang akhir tahun. Meski demikian, tren dasar klaim tetap sejalan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang telah kembali stabil setelah sempat goyah di sebagian besar musim panas, didukung oleh rendahnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Rata-rata pergerakan empat minggu untuk klaim turun 1.750 menjadi 202.250 pada pekan lalu.

Rendahnya angka PHK menjadi faktor utama stabilitas pasar tenaga kerja, mengingatkan perusahaan tidak terburu-buru menambah jumlah karyawan.

Meskipun perusahaan cenderung mempertahankan karyawan yang ada, mereka masih ragu untuk meningkatkan perekrutan; para ekonom mengaitkan hal ini dengan ketidakpastian akibat konflik terkait Iran serta tarif impor.

Kekurangan tenaga kerja juga menghambat proses perekrutan. Sebuah survei dari S&P Global pada hari Rabu mencatat bahwa pada bulan September, perusahaan "juga melaporkan peningkatan kesulitan dalam menemukan staf yang sesuai."

Antisipasi potensi kenaikan suku bunga fed

Stabilitas pasar tenaga kerja mendukung ekspektasi pasar keuangan bahwa Federal Reserve (the fed) dapat kembali menaikkan suku bunga sebelum akhir tahun dalam upayanya memerangi inflasi.

Pekan lalu, bank sentral AS menaikkan suku bunga acuan jangka pendek sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,75%-4,00% serta mengisyaratkan adanya kenaikan lebih lanjut pada biaya pinjaman di bulan-bulan mendatang.

Pasar keuangan memperhitungkan adanya peluang sekitar 64,2% untuk kenaikan suku bunga lagi bulan depan, sebagaimana ditunjukkan oleh perangkat FedWatch milik CME.

Nilai tukar dolar menguat terhadap sekeranjang mata uang lainnya.

Laporan klaim menunjukkan bahwa jumlah orang yang menerima tunjangan pengangguran setelah minggu pertama bantuan meningkat sebanyak 2.000 orang menjadi 1,719 juta pada pekan yang berakhir tanggal 12 September.

Kenaikan tipis ini membuat angka klaim lanjutan (*continuing claims*) tetap berada di dekat level yang terakhir terlihat pada tahun 2023.

Angka klaim lanjutan sempat turun di antara minggu survei tingkat pengangguran bulan Agustus dan September.

Chicago Fed memproyeksikan tingkat pengangguran tetap stabil di angka 4,1% pada bulan September.

Meskipun tingkat pengangguran stabil, periode pengangguran yang berkepanjangan masih banyak dialami oleh sebagian orang yang kehilangan pekerjaan.

"Setelah stabil selama beberapa bulan terakhir, jika klaim lanjutan tetap berada di level yang lebih rendah, hal ini bisa berarti tingkat pengangguran akan mendekati angka 4% dalam beberapa bulan ke depan," ujar Veronica Clark, ekonom di Citigroup.

"Namun, kami perlu mengingatkan bahwa tingkat pengangguran yang lebih rendah akibat menyusutnya angkatan kerja tidak serta-merta mengindikasikan pasar tenaga kerja yang kembali menegat."

Ekonomi Jerman Diproyeksi Tumbuh 1,3% pada 2026, Naik dari Perkiraan Sebelumnya

Kamis, 24 September 2026 16:05 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-jerman-diproyeksi-tumbuh-13-pada-2026-naik-dari-perkiraan-sebelumnya>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah lembaga ekonomi terkemuka Jerman menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara tersebut untuk 2026 dan 2027. Revisi dilakukan setelah perekonomian Jerman mencatat kinerja yang lebih kuat dari perkiraan pada paruh pertama tahun ini.

Ekonomi Jerman diproyeksikan tumbuh 1,3% pada 2026, naik signifikan dari proyeksi sebelumnya sebesar 0,6%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada 2027 diperkirakan mencapai 1,1%, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 0,9%.

Angka tersebut mengonfirmasi laporan Reuters pada Selasa (22/9/2026).

Oliver Holtemoeller dari Halle Institute for Economic Research (IWH) mengatakan perekonomian Jerman berkembang lebih kuat dari perkiraan. Namun, pemulihan ekonomi masih ditopang oleh fondasi yang relatif sempit karena tingginya harga energi dan persoalan struktural masih membebani aktivitas ekonomi.

"Ekonomi telah berkembang lebih kuat dari yang diperkirakan. Namun, pemulihan ini bertumpu pada fondasi yang sempit, karena harga energi yang tinggi dan masalah struktural terus membebani aktivitas ekonomi," kata Holtemoeller.

Perekonomian Jerman mulai menunjukkan pemulihan sejak akhir 2025. Meski rebound yang terjadi lebih kuat dibandingkan perkiraan pada musim semi, laju pemulihan tersebut masih tergolong moderat.

Kelima lembaga ekonomi tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jerman hanya mencapai 0,4% pada 2028.

Pertumbuhan Jerman Tertekan Masalah Struktural

Para ekonom memperkirakan ekspansi ekonomi Jerman akan kehilangan momentum pada 2028. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi persoalan struktural yang semakin membatasi potensi pertumbuhan.

Salah satu faktor utama adalah menyusutnya jumlah tenaga kerja akibat perubahan demografi. Selain itu, potensi pertumbuhan ekonomi Jerman juga terus mengalami penurunan.

Kinerja ekonomi yang lesu menjadi salah satu isu penting dalam pemilihan daerah terbaru di Jerman. Hasil pemilu tersebut turut memperlihatkan peningkatan perolehan suara partai-partai dari kelompok politik kanan jauh maupun kiri jauh.

Pemulihan ekonomi Jerman juga sempat kehilangan momentum pada kuartal III 2026. Meskipun sejumlah indikator sentimen terus membaik, data ekonomi aktual terbaru menunjukkan kinerja yang lebih lemah.

Harga Energi dan Inflasi Jerman

Kenaikan harga energi yang berkaitan dengan perang Iran turut memberikan tekanan terhadap perekonomian Jerman. Namun, menurut para ekonom, kenaikan harga bahan bakar kendaraan dan

minyak pemanas sejauh ini hanya memberikan dampak terbatas terhadap harga konsumen secara lebih luas.

Meski demikian, inflasi Jerman diperkirakan meningkat dalam dua tahun mendatang. Kelima lembaga tersebut memproyeksikan inflasi mencapai 2,8% pada 2026 dan meningkat menjadi 3,2% pada 2027.

Inflasi kemudian diperkirakan kembali turun menjadi 2,0% pada 2028.

Pasar Tenaga Kerja Masih Tertekan

Pasar tenaga kerja Jerman diperkirakan merespons pemulihan ekonomi dengan jeda waktu. Jumlah pekerja diperkirakan masih mengalami penurunan untuk sementara waktu.

Tingkat pengangguran diproyeksikan mencapai 6,4% pada 2026, sebelum turun menjadi 6,2% pada 2027 dan 5,8% pada 2028.

Proyeksi ekonomi tersebut disusun bersama oleh lima lembaga ekonomi terkemuka Jerman, yakni RWI di Essen, Ifo Institute di Munich, IfW di Kiel, IWH di Halle, dan DIW di Berlin.

Bank Sentral Swedia Tahan Suku Bunga, Buka Peluang Kenaikan Tahun Ini

Kamis, 24 September 2026 14:57 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Noverius Laoli

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-swedia-tahan-suku-bunga-buka-peluang-kenaikan-tahun-ini>

KONTAN.CO.ID - STOCKHOLM. Bank sentral Swedia, Riksbank, mempertahankan suku bunga kebijakan di level 1,75% pada Kamis (24/9/2026).

Namun, bank sentral mulai memberi sinyal bahwa suku bunga kemungkinan kembali dinaikkan sebelum akhir tahun seiring meningkatnya risiko inflasi.

Riksbank menyatakan kenaikan suku bunga dapat dimulai tahun ini jika prospek inflasi dan aktivitas ekonomi tetap sesuai dengan kondisi saat ini.

Proyeksi terbaru juga menunjukkan kebutuhan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut dibandingkan perkiraan dalam proyeksi Juni.

"Jika inflasi dan aktivitas ekonomi berkembang sesuai perkiraan, kenaikan suku bunga diperkirakan dimulai tahun ini," kata Riksbank dalam pernyataannya.

Keputusan mempertahankan suku bunga 1,75% kali ini sesuai dengan ekspektasi pasar. Dalam jajak pendapat Reuters, seluruh analis memperkirakan Riksbank tidak mengubah suku bunga.

Meski demikian, Riksbank semakin mewaspadaai potensi kenaikan inflasi setelah data inflasi selama musim panas tercatat lebih tinggi dari perkiraan.

Tekanan harga saat ini memang masih relatif terkendali, tetapi risiko kembali meningkat mulai menjadi perhatian bank sentral.

Risiko tersebut antara lain datang dari perkembangan geopolitik. Konflik di Timur Tengah telah mendorong harga minyak mendekati US\$100 per barel, sementara prospek penyelesaian konflik masih belum jelas. Kenaikan harga energi dapat kembali meningkatkan tekanan inflasi.

Riksbank juga menyoroti pelemahan krona Swedia akibat kesenjangan suku bunga dengan Bank Sentral Eropa (ECB). ECB sendiri diperkirakan kembali menaikkan suku bunga sebelum akhir tahun, sehingga tekanan terhadap mata uang Swedia berpotensi berlanjut.

Riksbank menegaskan, apabila muncul tanda-tanda bahwa inflasi meningkat lebih besar dan berlangsung lebih lama dari perkiraan, kenaikan suku bunga dapat dilakukan dengan laju yang lebih cepat.

Di sisi lain, kondisi tekanan harga yang masih relatif rendah memberi ruang bagi Riksbank untuk tidak terburu-buru mengetatkan kebijakan.

Swedia saat ini menjadi salah satu negara yang masih menghadapi tekanan inflasi relatif lebih ringan dibandingkan sejumlah negara Eropa lainnya.

Perubahan arah kebijakan Riksbank menjadi penting bagi perekonomian Swedia karena kenaikan suku bunga berpotensi menekan permintaan domestik, sekaligus menjaga ekspektasi inflasi dan menopang nilai tukar krona.

OECD Proyeksikan Ekonomi Global Tumbuh 2,9% pada 2026, Harga Minyak Jadi Risiko

Kamis, 24 September 2026 11:47 WIB

Reporter: Yudho Winarto,| Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/oecd-proyeksikan-ekonomi-global-tumbuh-29-pada-2026-harga-minyak-jadi-risiko>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mencapai 2,9% pada 2026 dan meningkat menjadi 3,0% pada 2027.

Proyeksi tersebut relatif sejalan dengan skenario gangguan terbatas (time-limited disruption) dalam OECD Economic Outlook Juni 2026.

Meski demikian, OECD melihat pola pertumbuhan ekonomi global pada kuartal-kuartal mendatang menghadapi tekanan yang lebih besar.

Ketahanan sektor swasta sejauh ini mampu menopang pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi guncangan harga komoditas diperkirakan berlangsung lebih lama dari perkiraan sebelumnya.

Dalam OECD Economic Outlook, Interim Report September 2026 dikutip pada Kamis (24/9/2026), OECD memperkirakan tekanan mulai meningkat menjelang akhir 2026 hingga awal 2027.

Penggunaan persediaan dan penyangga tabungan rumah tangga di sejumlah negara diperkirakan semakin terbatas.

Kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli rumah tangga sekaligus mendorong kenaikan suku bunga kebijakan.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan menghadapi sejumlah hambatan sebelum kembali pulih secara bertahap setelah konflik yang menjadi sumber gangguan diasumsikan mereda.

Di tengah tekanan tersebut, belanja dan produksi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) masih menjadi salah satu penopang pertumbuhan di banyak negara G20.

OECD mencatat, aktivitas terkait AI dalam sejumlah perekonomian masih mampu mengimbangi lemahnya investasi di sektor bisnis lainnya.

Harga minyak diproyeksikan tetap tinggi

Proyeksi OECD menggunakan asumsi teknis bahwa harga energi bergerak mengikuti harga kontrak berjangka (futures) minyak dan gas per 14 September 2026.

Dalam asumsi tersebut, harga minyak mentah Brent diperkirakan mencapai puncak rata-rata kuartalan sebesar US\$ 105 per barel pada kuartal IV 2026.

Harga gas TTF Eropa juga diproyeksikan mencapai puncaknya pada periode yang sama, dengan rata-rata EUR 82 per megawatt hour (MWh).

Setelah mencapai puncak tersebut, harga minyak dan gas diperkirakan turun secara bertahap hingga akhir 2027.

Untuk keseluruhan 2027, OECD memperkirakan harga Brent rata-rata berada di sekitar US\$ 85 per barel, sedangkan harga gas TTF sekitar EUR 60 per MWh.

Namun, asumsi harga gas dalam proyeksi terbaru OECD sekitar 60% lebih tinggi dibandingkan jalur harga yang digunakan dalam skenario gangguan terbatas pada Outlook Juni 2026. Harga tersebut juga berada di atas asumsi dalam skenario gangguan berkepanjangan.

Tekanan juga datang dari komoditas pangan. Berdasarkan kurva harga berjangka yang tersedia, harga komoditas pangan secara keseluruhan diperkirakan mencapai puncak pada kuartal II 2027, dengan rata-rata sekitar 11% lebih tinggi dibandingkan kuartal III 2026.

Sementara itu, OECD mengasumsikan tingkat tarif efektif tetap berada pada level yang berlaku pada pertengahan September sepanjang sisa 2026 hingga 2027.

Dengan kombinasi harga energi dan pangan yang masih tinggi, tekanan terhadap daya beli rumah tangga diperkirakan menjadi salah satu faktor yang membatasi pertumbuhan global dalam beberapa kuartal ke depan.

Setelah tekanan tersebut mereda, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan kembali meningkat secara bertahap pada 2027.

Kemenkeu & BI Perkuat Sinergi di 5 Lini, Ini Detailnya

Kamis, 24 September 2026 20:50 WIB

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/122664/kemenkeu-bi-perkuat-sinergi-di-5-lini-ini-detailnya/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) menegaskan kedua pihak akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Suhasil dan Gubernur BI Destry Damayanti usai rapat koordinasi di Bank Indonesia, Jakarta. pada hari ini, Kamis (24/9/2026). Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, serta para Anggota Dewan Gubernur BI.

"Sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat guna meningkatkan ketahanan ekonomi di tengah tantangan ketidakpastian global yang masih tinggi," ujar Destry, Kamis (24/9/2026).

Berdasarkan hasil rapat koordinasi, Kemenkeu dan BI sepakat memperkuat kebijakan fiskal dan moneter sesuai mandatnya. Kemenkeu konsisten menempuh kebijakan fiskal yang hati-hati dan berkesinambungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

"Defisit APBN 2026 diarahkan tetap terkendali di bawah 3% PDB melalui penguatan sisi penerimaan dan penajaman sisi belanja," ujar Suahasil.

Dari pembiayaan, lanjutnya, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko utang yang kuat, sehingga dapat menjaga struktur utang pemerintah tetap sehat.

Di sisi lain, BI memperkuat kebijakan moneter melalui optimalisasi berbagai instrumen moneter. Dengan demikian, dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah guna mendukung pencapaian sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ pada 2026-2027.

Koordinasi kebijakan Kemenkeu dan BI ditempuh melalui lima pilar sinergi kebijakan:

1. Sinergi menjaga pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter.
2. Sinergi memperkuat ketahanan sektor eksternal di tengah gejolak global, baik perdagangan internasional maupun aliran modal asing.
3. Sinergi mengelola kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan dan perekonomian.
4. Koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi
5. Koordinasi dalam upaya pendalaman pasar keuangan untuk mendukung transmisi kebijakan dan memperluas sumber pembiayaan ekonomi.

RAPBN 2027: Target Penerimaan Perpajakan Naik Jadi Rp2.911 T

Kamis, 24 September 2026 20:36 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122663/rapbn-2027-target-penerimaan-perpajakan-naik-jadi-rp2-911-t/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp2.911,95 triliun. Angka tersebut naik Rp4 triliun dibanding usulan pemerintah dalam RAPBN 2027 yang sekitar Rp2.907 triliun.

"Kemudian penerimaan perpajakan, target penerimaan perpajakan tahun 2027 sebesar Rp2.911 triliun, lebih tinggi Rp4 triliun dari yang disulkan dalam RAPBN tahun 2027," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Kerja dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Dia mengatakan upaya mencapai target tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

"Upaya mendukung target penerimaan perpajakan tahun 2027 dilakukan melalui strategi kebijakan yang responsif dan tepat sasaran guna mendorong optimalisasi penerimaan secara berkelanjutan," terangnya.

Penerimaan perpajakan tersebut ditargetkan berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp2.593 triliun dari sebelumnya Rp2.591 triliun. Kemudian, penerimaan kepabeanan dan cukai yang turut disepakati sebesar Rp316 triliun.

Di sisi lain, Banggar dan pemerintah turut menyepakati belanja pemerintah pusat yang melonjak menjadi sebesar Rp3.371 triliun, naik 9,1 triliun dibandingkan dengan usulan pemerintah.

Pembengkakan ini terutama dikarenakan belanja Kementerian/Lembaga yang naik menjadi Rp 1.555 triliun dari sebelumnya sebesar Rp1.504 triliun atau naik sebesar 52 triliun.

“Kebijakan khusus belanja K/L tahun anggaran 2027 diarahkan antara lain untuk melanjutkan bidang prioritas pembangunan yang didukung dengan penajaman arah pembangunan melalui PKPN,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said pada rapat kerja dengan pemerintah, Kamis (24/9/2026).

Sementara itu, belanja Non K/L justru menyusut menjadi sebesar Rp1.814 triliun atau turun dari usulan awal pemerintah yang sebesar Rp1.857 triliun.

Banggar juga menyebut bahwa Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp735 triliun atau sama dengan usulan pemerintah.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan anggaran belanja negara mencapai Rp4.097 triliun pada 2027, meningkat 6,6% dibanding proyeksi belanja negara pada 2026 yang sebesar Rp3.842 triliun.

DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi Makro & Postur RAPBN 2027

Kamis, 24 September 2026 18:10 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122651/dpr-pemerintah-sepakati-asumsi-makro-postur-rapbn-2027/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati asumsi makro dan postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Untuk diketahui, pembahasan RAPBN 2027 oleh 4 Panitia Kerja (Panja) diselesaikan melalui pandangan mini fraksi DPR RI. Keempat Panja terdiri dari: Panja A membahas soal pertumbuhan, defisit dan penerimaan. Panja B membahas belanja pusat. Panja C membahas transfer ke daerah. Panja D membahas naskah RAPBN 2027.

"Kebijakan fiskal tahun 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah dan terukur dengan pengelolaan defisit yang dilandasi oleh disiplin fiskal dan menjaga kredibilitas serta berkelanjutan APBN," kata Ketua Banggar Said Abdullah dalam Rapat Kerja dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Defisit APBN 2027 ditargetkan tetap berada di kisaran Rp671,2 triliun atau setara 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara belanja pemerintah pusat naik Rp9,1 triliun yang berasal dari kenaikan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sekitar Rp52 triliun, yakni dari usulan Rp1.504,7 triliun menjadi Rp1.556,8 triliun. Menariknya belanja non-K/L justru turun dari semula ditetapkan Rp1.857,4 triliun menjadi Rp1.814,3 triliun.

Detail lanjutan, dalam paparan Banggar disebutkan bahwa pendapatan negara yang sebelumnya Rp3.426 kini disepakati naik menjadi Rp9,1 triliun menjadi Rp3.435,1 triliun.

Dengan penerimaan pajak dari usulan sebelumnya Rp2.591,4 triliun menjadi Rp2.593,4 triliun. Kemudian, penerimaan kepabeanan dan cukai naik juga Rp2 triliun dari usulan Rp316,6 triliun menjadi Rp318,6 triliun. Kenaikan tertinggi yakni pada PNB sebesarnya Rp5,1 triliun yaitu dari Rp517,4 triliun ke Rp522,5 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah bersama Banggar juga turut menyepakati anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2027 sebesar Rp735 triliun atau tidak mengalami kenaikan.

Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah komponen TKD, yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal.

Berikut poin-poin lengkap Asumsi Makro dan Postur RAPBN 2027:

Sasaran dan Indikator Pembangunan

- GNI per Kapita (US\$): 5,8 -5,84
- GNI per Kapita (Rp Juta): 98,5-99,22
- Penurunan Intensitas Emisi GRK (%): 39,57
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks): 76,84
- Tingkat Kemiskinan (%): 6,0-6,5
- Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%): 0-0,5
- Rasio Gini (Indeks): 0,363–0,365
- Tingkat Pengangguran Terbuka (%): 4,30–4,87
- Indeks Modal Manusia (Indeks): 0,575
- Indeks Kesejahteraan Petani: 0,8038
- Nilai Tukar Petani / NTP (Indeks): 126–128
- Nilai Tukar Nelayan / NTN (Indeks): 106–110
- Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%): 40,81
- Penciptaan Lapangan Kerja Baru Tahun 2027 (Juta Orang): 2,57–3,49.

Postur Anggaran Negara

- Pendapatan negara: Rp3.435,10 triliun
- Pendapatan perpajakan: Rp2.912,00 triliun
- Pajak: Rp2.593,40 triliun
- Kepabeanan dan cukai: 18,60 triliun
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): Rp522,50 triliun
- Hibah: Rp0,70 triliun
- Belanja negara: Rp4.106,30 triliun
- Belanja pemerintah pusat: Rp3.371,30 triliun
- Belanja K/L: Rp1.556,89 triliun
- Belanja non-K/L: Rp1.814,36 triliun
- Transfer ke daerah (TKD): Rp735 triliun
- Defisit: Rp671,20 terhadap PDB 2,4% triliun
- Pembiayaan: Rp671,20 triliun
- Pembiayaan utang: Rp876,30 triliun
- Pembiayaan nonutang: -Rp205,11 triliun.

Aturan Baru Kas Negara, SAL Tak Bisa Lagi Ditempatkan BI

Kamis, 24 September 2026 17:50 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122647/aturan-baru-kas-negara-sal-tak-bisa-lagi-ditempatkan-bi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan keuangan negara, khususnya kas pemerintah pusat. Kebijakan yang paling menarik perhatian ialah terkait Saldo Anggaran Lebih (SAL) tak lagi dapat ditempatkan di Bank Indonesia.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2026 tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat. Beleid ditandatangani oleh Menteri Keuangan periode 2025-2026 Purbaya Yudhi Sadewa pada 31 Agustus 2026 dan berlaku sejak diterbitkan pada 8 September 2026.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Purbaya sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, kemudian mencopot jabatannya pada 14 September 2026, dan menggantinya dengan Suahasil Nazara, yang semula Wakil Menteri Keuangan.

Dalam Pasal 11 PMK terbaru disebutkan, pengelolaan kelebihan kas dilaksanakan dengan penempatan uang negara pada bank umum dan/atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

"Penempatan uang negara pada bank umum berupa penempatan uang secara konvensional dan syariah," demikian tercantum dalam Pasal 11 PMK Nomor 67 Tahun 2026, dikutip Kamis (24/9/2026).

Sementara itu, pembelian SBN berupa dapat berupa outright di pasar sekunder, reverse repo SBN, reverse repo syariah SBSN, dan transaksi wakalah bi Al-istitsmar SBSN.

Padahal, pada kebijakan sebelumnya yang tercantum dalam Pasal 11 PMK Nomor 44 Tahun 2024 disebutkan, pengelolaan kelebihan kas dilakukan dengan: Penempatan uang negara pada Bank Indonesia, bank umum, dan pembelian SBN di pasar sekunder.

Selain itu, penjualan SBN di pasar sekunder untuk memperoleh capital gain, transaksi reverse repo SBN, transaksi reverse repo syariah SBSN, wakalah bi Al-istitsmar SBSN. Terakhir, melakukan transaksi instrumen keuangan jangka pendek untuk penempatan uang negara dengan prinsip konvensional dan/atau berbasis syariah.

"Saldo operasional minimal dalam bentuk rupiah dan valuta asing disediakan pada rekening kas umum negara, rekening penempatan, dan rekening penampungan SAL," demikian tercantum dalam Pasal 5.

Rekening kas umum negara merupakan rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

Sementara itu, rekening penempatan adalah rekening untuk penempatan uang negara dalam rangka pengelolaan kas. Terakhir, Rekening penampungan SAL merupakan rekening lainnya milik Bendahara Umum Negara (BUN) yang digunakan untuk menampung SAL.

Sebelumnya, topik penempatan SAL pernah menjadi polemik di kalangan para pemangku kebijakan. Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tiba-tiba memindahkan SAL dari bank sentral ke kas bank-bank milik negara. Aliran likuiditas ke perbankan tersebut diklaim dapat menggerakkan sistem keuangan.

Di sisi lain, bank sentral menilai perbankan tak kekurangan likuiditas, tercermin dari jumlah plafon kredit yang belum dicairkan nasabah atau undisbursement loan.

Banggar dan Pemerintah Sepakati Belanja Negara Naik Rp9 Triliun

Kamis, 24 September 2026 16:53 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122640/banggar-dan-pemerintah-sepakati-belanja-negara-naik-rp9-triliun/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Anggaran menyepakati kenaikan belanja negara dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi sebesar Rp4.106 triliun dari sebelumnya sebesar Rp4.097 triliun. Kenaikan ini terutama terjadi imbas membengkaknya belanja Kementerian/ Lembaga (K/L).

Dalam draf RAPBN 2027, belanja pemerintah pusat melonjak menjadi sebesar Rp3.371 triliun, naik 9,1 triliun dibandingkan dengan usulan pemerintah.

Pembengkakan ini terutama dikarenakan belanja Kementerian/Lembaga yang naik menjadi Rp 1.555 triliun dari sebelumnya sebesar Rp1.504 triliun atau naik sebesar 52 triliun

“Kebijakan khusus belanja K/L tahun anggaran 2027 diarahkan antara lain untuk melanjutkan bidang prioritas pembangunan yang didukung dengan penajaman arah kepengembangan melalui PKPN,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said pada rapat kerja dengan pemerintah, Kamis (24/9/2026).

Sementara itu belanja Non K/L justru menyusut menjadi sebesar Rp1.814 triliun atau turun dari usulan awal pemerintah yang sebesar Rp1.857 triliun.

Banggar juga menyebut bahwa Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp735 triliun atau sama dengan usulan pemerintah.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan anggaran belanja negara mencapai Rp4.097 triliun pada 2027, meningkat 6,6% dibanding proyeksi belanja negara pada 2026 yang sebesar Rp3.842 triliun.

Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan pemerintah akan menjalankan belanja berkualitas, yang efektif dan efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

"Dengan cara pro-growth dan pro-welfare mendukung PKPN (Program Kerja Prioritas Nasional), dan refocusing (fokus kembali) belanja," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (27/8/2026).

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi, dan perlindungan sosial, serta efektivitas sinergi serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Terkait belanja pemerintah pusat, Purbaya memaparkan anggaran belanja pemerintah pusat pada 2027 direncanakan mencapai Rp3.362 triliun atau tumbuh 3,6% dibanding proyeksi belanja pada 2026 yang sebesar Rp3.245 triliun. Angka ini terdiri dari belanja K/L Rp1.504,7 triliun dan belanja non-K/L Rp1.857 triliun.

BI Akui Transaksi Uang Tunai Berkurang Seiring Munculnya QRIS

Kamis, 24 September 2026 16:20 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122590/bi-akui-transaksi-uang-tunai-berkurang-seiring-munculnya-qris/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengakui pertumbuhan transaksi menggunakan uang kartal, berupa uang kertas dan uang logam mulai melambat seiring berkembangnya transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

"Kalau kita lihat memang masih tumbuh (transaksi uang kartal) tapi mulai terus melambat," ujar Gubernur Bank Indonesia Dstry Damayanti di sela-sela agenda Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (Fekdi) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Kendati demikian, Dstry menegaskan bank sentral tetap berupaya menyediakan uang tunai di seluruh wilayah Indonesia, terutama wilayah yang sulit masih membutuhkan uang tunai karena kesulitan memperoleh akses teknologi pembayaran digital.

"Indonesia kan sangat luas, wilayah pulau-pulau, ada daerah terdepan, terluar. Tentu mereka juga masih butuh uang tunai," kata Dstry.

Dia menilai sampai saat ini masih terhadap wilayah blankspot yang tidak memiliki akses teknologi informasi. Menurut dia, hal ini menjadi pekerjaan rumah para pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah.

"Sehingga kami tetap masih menyediakan untuk uang-uang apa namanya uang kertas," tutur Dstry.

Dia juga menegaskan kepada pelaku usaha atau merchant untuk tetap wajib menerima pembayaran tunai, meski sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS menjadi salah satu alat pembayaran yang paling banyak digunakan saat ini.

"Jadi buat para merchant juga walaupun ada yang memang mereka ingin bayar tunai ya mereka harus bisa menerima," kata Dstry.

Sebelumnya, Dstry melaporkan volume transaksi melalui internet dan mobile banking pada Agustus 2026 masing-masing tumbuh 15,12% dan 47,08%, termasuk transaksi QRIS yang tumbuh mencapai 67,22%, didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

Dstry menyebut pengguna QRIS tercatat sudah 67 juta pengguna. Artinya sekitar 25% penduduk Indonesia telah menggunakan QRIS. BI menargetkan pengguna terus meningkat mencapai 69,32 juta, atau tumbuh 20,26% sampai akhir tahun 2026 ini.

Dari sisi pelaku usaha, jumlah merchant yang telah menggunakan QRIS tercatat meningkat 13,83% dan kini menjadi 47,11 juta merchant.

Rupiah Melemah Bersama Mata Uang Asia

Kamis, 24 September 2026 15:30 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122622/rupiah-melemah-bersama-mata-uang-asia/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah melemah 0,57% ke Rp17.901/US\$ kala menutup perdagangan Kamis (24/9/2026), dipicu oleh tekanan eksternal yang semakin kuat.

Pada saat yang sama, pasar saham juga mengalami tekanan yang cukup kuat. Berdasarkan data Bloomberg, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah ke 6.299 (1,14%) pada 14:57 WIB. IHSG dibuka 6.364,98, lalu sempat menguat terbatas ke 6.368,57, tetapi kemudian berbalik turun dan menyentuh level terendah intraday di 6.287,46.

Sementara pasar obligasi relatif lebih tenang. Yield tenor 1 tahun tercatat turun 4,5 basis poin (bps) ke 6,7%, dan tenor acuan 10 tahun turun 1,6 bps ke 7,09%.

Namun, obligasi pemerintah tak sepenuhnya luput dari tekanan. Sebab tenor 5 tahun justru mencatat kenaikan yield 9 bps disusul tenor 4 tahun naik 9 bps ke 6,96% dan 6,97%.

Tekanan di pasar keuangan domestik disebabkan oleh ekspektasi langkah hawkish bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve. Usai menaikkan suku bunga acuan 25 bps menjadi 3,75-4%, The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan setidaknya satu kali lagi pada akhir tahun ini. Langkah pengetatan itu dipicu oleh harga minyak mentah masih melambung 0,63% ke US\$103,73/barel dan berpotensi mengerek inflasi.

Ekspektasi itu membuat indeks dolar Amerika Serikat (AS) terhadap enam mata uang utama masih bertahan tinggi 101,04, meski sedikit terpangkas. Posisi dolar AS membuat mata uang Asia hari ini bergerak di zona merah.

Rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan paling dalam. Disusul baht Thailand 0,43%, dolar Taiwan 0,29%, rupee India 0,18%, dan won Korea Selatan 0,15%. Sementara, yuan melemah lebih terbatas.

Tak banyak mata uang Asia yang menguat, hanya ringgit Malaysia, dolar Singapura dan yen Jepang.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea dalam keterangan tertulis mengatakan, BI berupaya intervensi melalui transaksi Non-Deliverable Forwards (NDF) di pasar offshore, spot dan DNDF di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Selain itu, pelemahan rupiah juga tersengat oleh sikap Bank Indonesia (BI) yang mengirim sinyal pro-pertumbuhan, alih-alih menegaskan bahwa stabilitas rupiah merupakan prioritas utama. BI mempertahankan BI Rate di 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin.

"Sikap BI yang pro-pertumbuhan semakin diwujudkan melalui kebijakan likuiditas, dengan frekuensi lelang SRBI yang lebih rendah telah menurunkan posisi outstanding menjadi Rp1.037 triliun," ujar Jessica Tasijawa, Fixed Income Analyst Mirae Asset, dalam catatannya.

Di saat yang sama, revisi Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) memberikan ruang yang lebih besar bagi perbankan untuk meningkatkan intermediasi sejalan dengan pertumbuhan kredit yang mencapai 13,65% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Agustus.

Terpisah, Citi memperkirakan BI akan menghentikan pemangkasan yield SRBI, usai mempertahankan BI Rate kemarin. BI dalam paparannya kemarin mengatakan bahwa kurva operasi pasar terbuka akan dikelola sejalan dengan BI Rate.

"Kami menafsirkan hal ini sebagai sinyal bahwa pemangkasan yield SRBI akan dihentikan," kata Helmi Arman, Kepala Ekonom Citibank, dalam catatannya.

Sebelumnya, Citi memperkirakan BI akan memangkas yield SRBI sebesar 25 bps hingga Oktober, yang akan membawa total pemangkasan menjadi 100 bps dari puncaknya sebesar 7,7% pada kuartal II-2026.

Sinyal tersebut semakin menegaskan BI kini mengandalkan instrumen likuiditas dan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas rupiah, sementara suku bunga kebijakan dipertahankan sebagai penyangga terakhir.

Jika pemangkasan yield SRBI benar-benar terwujud, maka arah kebijakan BI akan mengarah pada fokus menjaga daya tarik aset rupiah sambil tetap mempertahankan likuiditas agar intermediasi perbankan tidak terganggu.

Rupiah Hari Ini Sudah di Atas Rp17.900/US\$

Kamis, 24 September 2026 14:31 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122596/rupiah-hari-ini-sudah-di-atas-rp17-900-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Depresiasi rupiah terus berlanjut pada perdagangan spot Kamis (24/9/2026), menyusul tekanan eksternal dari gejolak di pasar surat utang global dan kenaikan yield US Treasury.

Berdasarkan data Bloomberg, depresiasi rupiah tercatat sebesar 0,58% ke Rp17.904/US\$ pada 13:54 WIB. Tak lama, rupiah melanjutkan pelemahan ke Rp17.910/US\$ pada 14:30 WIB.

Depresiasi rupiah dipicu oleh kenaikan yield obligasi Amerika Serikat (AS) tenor 10 tahun ke 5,11%, dan yield tenor 2 tahun berada di 4,71%. Begitu juga dengan yield obligasi pemerintah Jepang naik 11 bps ke 3,06%. Gejolak yang terjadi di pasar obligasi merembet dan menyebabkan depresiasi terhadap rupiah.

Tekanan dari jalur finansial itu juga diperparah dengan lonjakan pada harga minyak Brent 0,63% ke US\$103,73/barel.

Tak cuma di Indonesia, pasar mata uang Asia hari ini 'kebakaran'. Mayoritas mata uang melemah, tetapi tekanan terhadap rupiah menjadi yang paling dalam.

Rupiah melemah 0,58%, disusul baht Thailand, dolar Taiwan, peso Filipina, rupee India, won Korea Selatan, yuan offshore, yen Jepang, yuan China, dan ringgit Malaysia.

Pasar keuangan global terseret arus ekspektasi bahwa bank sentral AS akan kembali mengerek suku bunga acuan tahun ini lantaran tekanan inflasi. Dalam proyeksi terbaru, median proyeksi pejabat The Fed menunjukkan adanya kemungkinan satu kali kenaikan tambahan pada 2026, sementara tidak ada penurunan suku bunga tahun depan.

Selain itu, pelemahan rupiah juga tersengat oleh sikap Bank Indonesia (BI) yang mengirim sinyal pro-pertumbuhan, alih-alih menegaskan bahwa stabilitas rupiah merupakan prioritas utama. BI mempertahankan BI Rate di 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin.

Dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, BI menegaskan kebijakan insentif (non-suku bunga) ditempuh untuk mendukung sasaran inflasi $2,5\% \pm 1\%$, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea dalam keterangan tertulis mengatakan bahwa BI juga melakukan penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk mengelola struktur suku bunga pasar uang.

"Sikap BI yang pro-pertumbuhan semakin diwujudkan melalui kebijakan likuiditas, dengan frekuensi lelang SRBI yang lebih rendah telah menurunkan posisi outstanding menjadi Rp1.037 triliun," ujar Jessica Tasijawa, Fixed Income Analyst Mirae Asset, dalam catatannya.

Di saat yang sama, revisi Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) memberikan ruang yang lebih besar bagi perbankan untuk meningkatkan intermediasi sejalan dengan pertumbuhan kredit yang mencapai 13,65% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Agustus.

Mirae Asset memperkirakan skenario bahwa BI akan memperpanjang periode penahanan suku bunga di 5,75%. Namun, Jessica memperkirakan ruang kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) tetap terbuka, jika rupiah terus melemah hingga menembus Rp18.000/US\$, atau adanya arus keluar modal asing terus berlanjut, disertai meningkatnya kebutuhan intervensi BI, atau kenaikan harga pangan dan energi yang memberikan tekanan lebih besar terhadap inflasi.

Sebagai catatan, sepanjang kuartal II-2026, rupiah telah melemah 4,96%,. Sedangkan sepanjang September (month-to-date/mtd), mata uang Tanah Air menempati posisi mata uang Asia terlemah kedua (-1,06%), setelah ringgit Malaysia (1,3%).

Jika ditarik ke belakang sepanjang tahun ini, maka rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan paling tajam di Asia dengan depresiasi 6,81%.

BI Lapor Uang Beredar Tumbuh Belasan Persen di Agustus

Kamis, 24 September 2026 13:09 WIB

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/122581/bi-lapor-uang-beredar-tumbuh-belasan-persen-di-agustus/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengumumkan perkembangan uang beredar per akhir Agustus. Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh positif, demikian pula uang primer (M0).

Pada Kamis (24/9/2026), BI melaporkan posisi M2 per Agustus ada di Rp 10.448,1 triliun. Tumbuh 8,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy). Relatif stabil dari bulan sebelumnya yang naik 8,3% yoy.

“Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 9% yoy dan uang kuasi sebesar 6,5% yoy,” sebut laporan BI.

Perkembangan M2 pada Agustus, lanjut laporan BI, terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit. Penyaluran kredit tumbuh sebesar 13,3% yoy, lebih tinggi ketimbang pertumbuhan Juli yang sebesar 13% yoy.

Sementara itu, uang primer (M0) adjusted pada Agustus tercatat Rp 2.281,5 triliun. Tumbuh 16,3% yoy, melambat ketimbang Juli yang tumbuh 17,1% yoy.

“Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 19% yoy dan uang kartal yang diedarkan sebesar 12,9% yoy. Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah memperhitungkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted),” demikian laporan BI.

BI: Rupiah Tertekan Imbas Pengetatan Moneter AS dan Geopolitik

Kamis, 24 September 2026 12:10 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122568/bi-rupiah-tertekan-imbis-pengetatan-moneter-as-dan-geopolitik/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah kembali melemah pada pembukaan perdagangan Kamis (24/9/2026) dengan pelemahan 0,26% ke Rp17.846/US\$. Hal ini terjadi sehari setelah Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunganya. BI menyebut bahwa tekanan eksternal masih menjadi pemberat bagi mata uang Garuda.

“Pelemahan Rupiah dipengaruhi ekspektasi pengetatan kebijakan moneter AS di tengah kekhawatiran inflasi global dan outlook fiskal. Kondisi tersebut mendorong yield US Treasury 10 tahun naik hingga 5,11%, tertinggi sejak 2007,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).

Erwin juga menyebut bahwa tekanan juga datang dari ketidakpastian konflik Timur Tengah yang meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak dunia, sehingga harga minyak Brent kembali di atas US\$100 per barel.

Sementara itu, dari sisi domestik, tekanan nilai tukar dipengaruhi kebutuhan valas importir menjelang akhir triwulan III dan arus keluar portofolio dari aset emerging markets.

Oleh karenanya BI tengah mempersiapkan sejumlah upaya intervensi melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, spot dan DNDF di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

“Koordinasi dan komunikasi dengan korporasi dan pelaku pasar juga terus diperkuat,” kata Erwin.

Selain itu BI juga melakukan penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk mengelola struktur suku bunga pasar uang.

“Efektivitas stabilisasi dan kecukupan likuiditas diperkuat melalui peningkatan insentif Swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam rangka pendanaan luar negeri, serta perluasan transaksi underlying yang mencakup arus masuk modal portofolio, pinjaman luar negeri oleh bank, dan foreign direct investment,” kata Erwin.

Erwin juga menyebut bahwa secara umum, pergerakan Rupiah masih sejalan dengan mata uang kawasan, dengan penguatan secara quarter-to-date (qtd) sebesar 0,46%. Cadangan devisa meningkat menjadi US\$146,5 miliar pada akhir Agustus 2026.

Rupiah membuka perdagangan Kamis (24/9/2026) dengan pelemahan 0,26% ke Rp17.846/US\$, seiring tekanan eksternal kembali meningkat. Tak lama, rupiah kembali terpeleset 0,32% ke Rp17.857/US\$ pada 09:02 WIB.

Indeks dolar Amerika Serikat (AS) kembali naik 101,2, disusul yield US Treasury naik 15,5 basis poin (bps) jadi 5,11%. Belum lagi, pergerakan harga minyak yang menanjak ke US\$102,05/barel semakin menambah kekhawatiran pasar soal inflasi.

Kemarin, Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan BI Rate di 5,75%. Keputusan itu memberi ruang bagi BI untuk melihat perkembangan perekonomian usai kenaikan sebesar 100 bps. Namun,

kenaikan 100 bps itu juga membuat ruang BI untuk merespons melalui suku bunga juga tidak selebar sebelumnya.

Harga Pangan Mayoritas Naik, Beras tak Kunjung Turun

Kamis, 24 September 2026 11:10 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122557/harga-pangan-mayoritas-naik-beras-tak-kunjung-turun/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Mayoritas harga komoditas pangan nasional kembali masih mengalami peningkatan per hari ini, Kamis (24/9/2026). Salah satunya harga beras yang terus naik, bawang, hingga cabai-cabai.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 9.30 WIB, harga beras kualitas bawah I naik 5,03% atau Rp750/kg menjadi Rp15.650/kg. Begitu juga beras kualitas bawah II yang naik 3,74% atau Rp550/kg menjadi Rp15.250/kg.

Kemudian, harga beras kualitas medium I juga kembali naik 2,11% atau Rp350/kg menjadi Rp16.950/kg. serta beras kualitas medium II naik 4,88% atau Rp800/kg menjadi Rp17.200/kg.

Tetapi, harga beras kualitas super I tidak berubah dan bertahan di Rp17.900/kg. Sementara, beras kualitas super II naik 1,44% atau Rp250/kg menjadi Rp17.600/kg.

Lalu, harga bawang merah ukuran sedang melonjak 10,87% atau Rp4.050/kg menjadi Rp41.300/kg. Begitu juga bawang putih ukuran sedang yang naik 0,77% atau Rp300 menjadi Rp39.400/kg.

Pada kelompok cabai, cabai merah besar bergerak berlawanan dengan mayoritas komoditas pangan. Harganya turun 3,64% atau Rp2.100/kg menjadi Rp55.600/kg. Begitu juga harga rawit hijau turun 11,33% atau Rp7.650/kg menjadi Rp59.850/kg.

Tetapi, harga cabai rawit merah masih naik 10,31% atau Rp9.800/kg menjadi Rp104.850/kg, termasuk cabai merah keriting naik 8,88% atau Rp6.100/kg menjadi Rp74.800/kg.

Harga daging ayam ras segar turun 1,06% atau Rp450/kg menjadi Rp41.950/kg. Sementara, daging sapi kualitas I naik 0,66% atau Rp1.000/kg menjadi Rp153.300/kg dan juga daging sapi kualitas II naik 0,07% atau Rp100/kg menjadi Rp143.150/kg.

Harga telur ayam ras juga masih naik 0,17% menjadi Rp30.100/kg.

Gula pasir kualitas premium naik 0,25% atau Rp50/kg menjadi Rp20.400/kg. Begitu juga gula pasir lokal naik 3,14% atau Rp600/kg menjadi Rp19.700/kg.

Harga minyak goreng curah naik 3,68% atau Rp750/kg menjadi Rp21.150/kg. Minyak goreng kemasan bermerek I naik 5,75% atau Rp1.400/kg menjadi Rp25.750/kg. Minyak goreng kemasan bermerek II naik 4,04% atau Rp950/kg menjadi Rp24.450/kg.

Pisahkan Uang Usaha dan Pribadi, Pemkot Salatiga Bekali Pedagang Kelola Keuangan

Kamis, 24 September 2026

Penulis: Kontributor Kota Salatiga, Editor: WH/DiskomdigiJtg

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pisahkan-uang-usaha-dan-pribadi-pemkot-salatiga-bekali-pedagang-kelola-keuangan/>

SALATIGA — Memisahkan uang usaha dan uang pribadi menjadi salah satu cara penting bagi pedagang untuk menjaga keberlangsungan usaha. Pedagang juga perlu menghitung penggunaan modal, kebutuhan sehari-hari, hingga menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan.

Pentingnya pengelolaan keuangan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perdagangan. Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan bertema “Kelola Uang, Raih Peluang” di Ruang Mini Teater DPRD Kota Salatiga, Rabu (23/9/2026).

Wali Kota Salatiga Robby Hernawan mengatakan, pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu pedagang lebih bijak dalam mengatur pendapatan, modal, kebutuhan sehari-hari, hingga menyiapkan tabungan.

“Mengelola keuangan bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memisahkan uang usaha dan uang pribadi. Kemudian mengukur berapa persen penghasilan untuk modal usaha, kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk zakat. Yang tak kalah penting adalah menyusun rencana keuangan untuk menabung secara detail dan bijak,” ujarnya.

Robby berharap pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti sebagai teori, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari hingga menjadi kebiasaan. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih tertib, pedagang diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus semakin mandiri secara ekonomi.

Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Salatiga Zuli Rahayu Widatiningtyas menyampaikan, kegiatan berlangsung selama dua hari, 23–24 September 2026, dengan peserta para pedagang pasar di Salatiga.

“Harapannya para pedagang bisa memahami pentingnya mengelola keuangan usaha, merencanakan penggunaan modal dan keuntungan, serta mencatat keuangan secara sederhana,” jelasnya.

Dinas Perdagangan juga berkomitmen memberikan pembinaan, pendampingan, hingga evaluasi secara berkelanjutan kepada para pedagang pasar di Salatiga. Dengan demikian, pedagang diharapkan mampu bersaing secara konvensional maupun melalui digitalisasi seiring berkembangnya zaman.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, Pemkot Salatiga menghadirkan narasumber dari Bank Jateng Cabang Salatiga dan BPR BKK Perseroda Jawa Tengah Kancab Salatiga. Melalui kegiatan ini, pedagang diharapkan semakin terampil mengelola keuangan sehingga usaha lebih terarah dan peluang untuk berkembang semakin terbuka.

Jawa Tengah Sabet Penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026, Ini Strateginya

Kamis, 24 September 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/jawa-tengah-sabet-penghargaan-tpid-provinsi-berkinerja-terbaik-2026-ini-strateginya>

JAKARTA — Provinsi Jawa Tengah kembali menyabet penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi berkinerja terbaik 2026.

Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia — Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 sekaligus Rakornas Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).

Luthfi mengatakan, penghargaan tersebut sebagai bukti, kolaborasi yang dilakukan di Jawa Tengah mampu mengendalikan harga bahan pokok penting, sekaligus menjaga daya beli masyarakat, sehingga inflasi tetap stabil.

Inflasi Jawa Tengah pada Agustus 2026 tercatat 3,08% (YoY), sementara inflasi nasional sebesar 3,19%.

“Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota, di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, Bank Indonesia (BI) Jateng, dan stakeholder terkait lainnya. Sehingga, ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga,” katanya, sesuai acara.

Berdasarkan data 2025, luas panen padi mencapai 1,67 juta hektare, meningkat sekitar 120 ribu hektare atau 7,73% dibandingkan 2024, dengan produksi gabah kering giling sekitar 9,3 juta ton. Kalau dikonversikan menjadi beras, sekitar 5,35 juta ton. Produksi itu berkontribusi 15,6% terhadap kebutuhan pangan nasional. Produksi jagung juga meningkat 13,37%, dari sekitar 2,43 juta ton menjadi 2,75 juta ton, dan menjadi peningkatan produksi terbesar di antara provinsi di Pulau Jawa.

Untuk menjaga inflasi, penguatan produksi pangan tersebut juga dilakukan intervensi dari hulu sampai hilir. Apalagi Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Intervensi dari sisi hulu dilakukan melalui perbaikan 108 daerah irigasi, penyediaan 5.400 pompa, penanganan banjir di 60 titik, penguatan pola tanam, sarana produksi, corporate farming, ketersediaan benih, dan pengendalian hama.

Selain itu, Jawa Tengah juga memperkuat komoditas cabai, yang selama ini sensitif terhadap inflasi melalui program New Champion. Program tersebut dilakukan pada lahan seluas 50 hektare di tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.

Jateng juga mendorong dukungan greenhouse melalui CSR perusahaan, dan membangun komitmen champion petani untuk periode Oktober–Desember 2026, dengan target produksi sekitar 54.500 kilogram.

Sementara, di sisi hilir dilakukan dengan penguatan rantai pasok melalui supply chain champion, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali, penguatan 368 kios pangan, dan penguatan BUMD sebagai off taker (pembeli) komoditas strategis.

Kemudian ada kerja sama antardaerah seperti dengan Lampung, NTB, Jawa Timur, Maluku Utara, dan daerah lainnya. Termasuk menjaga keterjangkauan harga melalui subsidi pangan untuk produsen dan konsumen senilai Rp5,135 miliar, serta pemanfaatan e-Purchasing untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah.

Di samping itu, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) juga berperan dalam digitalisasi transaksi dan penguatan tata kelola ekonomi daerah. Melalui digitalisasi, semua dapat dikelola secara efisien dan dapat dipantau secara real-time.

Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, meningkat dari 96,25 pada 2024, dan Jateng meraih Peringkat II Championship P2DD 2025. Implementasinya sudah masuk ke berbagai layanan masyarakat, antara lain melalui pengembangan New Sakpole dengan berbagai kanal pembayaran, seperti virtual account bank/agregator, QRIS, transfer antarbank, dan Laku Pandai Bank Jateng. Transaksi Samsat Budiman juga terus meningkat pada periode 2022–2025.

Fondasi digital tersebut terus diperluas. Bank Jateng mendukung melalui Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, FGD bersama pemerintah daerah, serta perluasan kanal pembayaran.

Luthfi mengatakan, pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah, sebagai dua hal yang saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi daerah.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Baik dalam sistem pengendalian inflasi, maupun digitalisasi dan tata kelola ekonomi daerah.

Adapun acara di JICC tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisiner Friderica Widyasari Dewi, serta perwakilan dari kementerian/lembaga lainnya, dan gubernur atau wakil gubernur beserta bupati dan walikota. (Humas Jateng)*ul

Wabup Banyumas: Penguatan ekosistem halal tingkatkan daya saing produk UMKM

Kamis, 24 September 2026 17:00 WIB

Pewartu: Sumarwoto, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/646341/wabup-banyumas-penguatan-ekosistem-halal-tingkatkan-daya-saing-produk-umkm>

Purwokerto (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Banyumas Dwi Asih Lintarti mendorong penguatan ekosistem halal melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Dalam kegiatan Koordinasi Pembangunan Ekosistem Halal Wilayah Jawa Tengah di Purwokerto, Banyumas, Kamis, ia mengatakan percepatan pengembangan ekosistem halal merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempersiapkan pelaku UMKM menghadapi pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026.

"Persiapan matang sangat krusial agar para pelaku UMKM tidak merasa berjalan sendiri dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal produk mereka," katanya.

Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, sektor perbankan, lembaga keagamaan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan ekosistem halal.

Terkait dengan hal itu, ia mengatakan sertifikasi halal tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai pemenuhan regulasi atau kewajiban administratif, juga sebagai peluang strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

"Dengan mengantongi sertifikat halal, kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM Banyumas dipastikan meningkat, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Dia meminta seluruh pihak mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat sinergi melalui penyatuan langkah serta konsolidasi data pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan sertifikasi halal.

Selain itu, kata dia, pendampingan terpadu perlu diperkuat agar pelaku usaha dapat memenuhi standar dan kriteria halal secara efisien.

Wabup mengatakan penguatan ekonomi halal juga diperlukan untuk membangun fondasi ekonomi daerah yang tangguh dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Banyumas.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Zulpan Syarif mengatakan penguatan ekosistem halal di daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan derajat ekonomi UMKM.

"Sertifikasi halal memberikan perlindungan berupa kepastian, rasa aman, dan kenyamanan bagi konsumen sekaligus meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk UMKM di pasar lokal maupun internasional," katanya.

Menurut dia, pendaftaran sertifikasi halal gratis dilakukan secara digital melalui aplikasi Sihalal.

Akan tetapi, kata dia, keterbatasan kemampuan teknologi informasi sebagian pelaku UMK membuat keberadaan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) diperlukan untuk membantu pelaku usaha sejak proses awal hingga sertifikat diterbitkan.

Zulpan mengatakan penguatan ekosistem halal lokal penting agar UMKM Indonesia mampu meningkatkan daya saing dan mengambil peluang pasar global.

Defisit APBD Kabupaten Tegal membengkak, transfer desa anjlok 37 persen

Kamis, 24 September 2026 13:50 WIB

Pewarta: Oky/Kutnadi, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/646301/defisit-apbd-kabupaten-tegal-membengkak-transfer-desa-anjlok-37-persen>

Slawi (ANTARA) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 kembali mendapat sorotan tajam. Kali ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Tegal mengungkap sejumlah persoalan fiskal yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

Tiga hal menjadi catatan utama PKS. Yakni defisit anggaran yang membengkak, belanja transfer yang merosot tajam, serta target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru mengalami penurunan. Sorotan tersebut disampaikan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal, Rabu (2/9).

Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 itu dibacakan anggota Fraksi PKS Nurul Fajrin, yang mewakili Ketua Fraksi PKS Arif Budiono.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tegal Wasbun Jauhara Khalim, didampingi tiga wakil ketua DPRD. Hadir pula Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, unsur Forkopimda, Sekda, para kepala OPD, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Tegal.

Di hadapan forum paripurna, PKS menyoroti perubahan kondisi fiskal daerah yang dinilai cukup signifikan. Salah satunya menyangkut defisit anggaran. Dalam rancangan perubahan APBD 2026, defisit meningkat dari sebelumnya Rp134,03 miliar menjadi Rp166,08 miliar.

Defisit tersebut rencananya ditutup melalui pembiayaan neto dengan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai salah satu sumber utama.

PKS tidak serta-merta mempersoalkan penggunaan SiLPA. Namun, fraksi tersebut meminta pemerintah daerah membuka secara terang dari mana SiLPA itu berasal dan mengapa jumlahnya bisa terbentuk.

Menurut PKS, transparansi menjadi penting agar SiLPA tidak sekadar dipandang sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit. Lebih jauh, besarnya SiLPA harus dilihat apakah berkaitan dengan rendahnya penyerapan anggaran maupun belum optimalnya pelaksanaan program pemerintah.

"Kami minta transparansi mengenai sumber SiLPA dan penyebab terbentuknya, agar peningkatan SiLPA ini tidak mencerminkan rendahnya penyerapan program serta tidak menjadi beban fiskal pada tahun-tahun berikutnya," tegas Nurul Fajrin.

Tak kalah mencolok, PKS juga menyoroti penurunan Belanja Transfer. Dalam rancangan perubahan APBD 2026, anggaran tersebut turun Rp166,99 miliar atau sekitar 37,15 persen. Semula Belanja Transfer tercatat Rp449,46 miliar. Angka tersebut kemudian turun menjadi Rp282,47 miliar.

Bagi PKS, penurunan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai konsekuensi penyesuaian fiskal daerah. Sebab, belanja transfer berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan pelayanan publik maupun pembangunan.

PKS memahami kondisi fiskal daerah dapat memaksa pemerintah melakukan penyesuaian anggaran. Namun, penyesuaian tersebut jangan sampai berujung pada berkurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terlebih desa menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, kebijakan transfer daerah diminta tetap memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan dan keberpihakan terhadap masyarakat.

"Penyesuaian fiskal jangan sampai mengorbankan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa," demikian garis besar catatan Fraksi PKS.

Persoalan lain yang disorot adalah penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD Kabupaten Tegal dalam perubahan APBD 2026 turun Rp69,73 miliar atau 9,23 persen.

Penurunan paling mencolok terjadi pada sektor retribusi daerah. Target pendapatan dari sektor ini mengalami koreksi hingga Rp73,63 miliar atau turun 20,29 persen.

Angka tersebut menjadi alarm tersendiri. Sebab, di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan meningkatnya defisit, kemampuan daerah menggali pendapatan justru mengalami penurunan.

Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemkab Tegal tidak sekadar melakukan penyesuaian target, tetapi juga mengevaluasi secara menyeluruh potensi pendapatan yang sebenarnya masih dapat digali.

Optimalisasi PAD, menurut PKS, harus dilakukan melalui pembenahan tata kelola, pemutakhiran data, digitalisasi sistem pendapatan, optimalisasi aset daerah hingga penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun, upaya meningkatkan PAD tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai optimalisasi pendapatan justru diterjemahkan menjadi penambahan beban bagi masyarakat.

"Langkah-langkah optimalisasi ini harus dilakukan secara efektif tanpa menambah beban masyarakat," pungkas Nurul Fajrin.

Menanggapi sejumlah sorotan tersebut, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman memastikan pemerintah daerah akan menindaklanjutinya.

Terkait peningkatan defisit dan penggunaan SiLPA, bupati menegaskan Pemkab Tegal akan memastikan penggunaannya dilakukan secara tepat, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemkab juga akan terus mengevaluasi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar SiLPA dapat dikelola secara optimal dan tidak menimbulkan persoalan fiskal pada tahun-tahun berikutnya.

"Terkait peningkatan defisit dan penggunaan SiLPA, Pemerintah Kabupaten Tegal akan memastikan penggunaan SiLPA dilaksanakan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ischak.

Mengenai penurunan Belanja Transfer, bupati menyebut persoalan tersebut sebelumnya telah dijawab pemerintah daerah dalam tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Golkar.

Meski demikian, pemerintah memastikan penyesuaian anggaran tidak akan diarahkan untuk menurunkan kualitas pelayanan dan pembangunan masyarakat.

"Kami akan berupaya agar penyesuaian tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan," tegasnya.

Sementara terkait penurunan PAD, khususnya sektor retribusi daerah, pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi terhadap potensi maupun realisasi pendapatan.

Optimalisasi PAD akan ditempuh melalui perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, pemutakhiran data, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah dan BUMD.

Bupati menegaskan, berbagai langkah tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

"Optimalisasi PAD akan terus kami lakukan dengan tetap memperhatikan prinsip tidak menambah beban masyarakat," katanya.